



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu melakukan Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Farook Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kalimantan Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk 5 (lima) tahun periode masa bhakti Kepala Daerah 2013-2018 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
12. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah.
15. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.

16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Tujuan penetapan Perubahan RPJMD adalah untuk :

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah.
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Kabupaten/Kota, serta dengan Provinsi yang berbatasan.
- c. sebagai pedoman dalam :
 - 1) Penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - 2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - 3) Penyusunan Renja PD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) Indikator makro pembangunan daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang harus dicapai pada Tahun 2018.
- (2) Indikator makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 75,70;
 - b. Indeks gini pada skala 0,32;
 - c. Tingkat inflasi sebesar 4 ± 1 persen;
 - d. Tingkat pengangguran sebesar 7,00 persen;
 - e. Tingkat kemiskinan sebesar 6 persen;
 - f. Pertumbuhan ekonomi sebesar $0,5 \pm 1$ persen; dan
 - g. Indeks kualitas lingkungan pada skala 82,00
- (3) Indikator makro pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen rencana pembangunan.

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perubahan RPJMD.
- (2) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2016

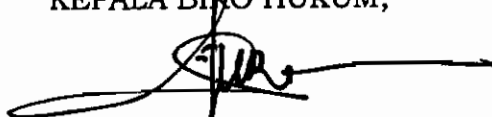
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
50 TAHUN 2016 TENTANG PENYESUAIAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 telah dilaksanakan dalam periode tahunan yaitu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun 2014, 2015, 2016 serta tahun 2017 (ditetapkan dalam RKPD tahun 2017) untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur menyusut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Gejolak ekonomi internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir berimbas pada kondisi makro ekonomi nasional dan ekonomi regional berjalan begitu cepat. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Provinsi Kalimantan Timur kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten, khususnya pada sisa periode kebijakan pembangunan tahun 2018.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang. Pemahaman yang demikian dijamin melalui pendekatan sektoral dan kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk pelibatan pemerintah pusat.

Dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pembangunan tersebut



dokumen ini. Merujuk pernyataan sebelumnya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus menyusun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sejak ditetapkan pada Tanggal 17 Juni 2014, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 telah dilaksanakan melalui RKPD Tahun 2014 dan RKPD Tahun 2015 yang secara periodik dievaluasi pelaksanaannya oleh Gubernur melalui Bappeda. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2015 maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 tanpa mengubah visi utama pembangunan daerah.

Alasan utama yang melandasi dilakukannya perubahan adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019), terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, kinerja ekonomi global yang cenderung menurun dan berdampak kepada kapasitas fiskal dan pembiayaan target pembangunan. Selain itu, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa target kinerja banyak tidak tercapai yang antara lain disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah sesuai dengan yang direncanakan. Alasan lain yang tak kalah penting dan melandasi dilakukannya perubahan adalah karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perubahan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di beberapa bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana antara lain dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sesuai pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
- b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- c) Terjadi perubahan yang mendasar (terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional); dan atau
- d) Merugikan kepentingan nasional (pelaksanaan pembangunan selama ini bertentangan dengan kebijakan nasional sehingga merugikan kepentingan nasional).



Secara ringkas, Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 dilakukan dengan perbaikan perumusan dan penyajian dokumen sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Rincian Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

BAB PERDA No. 07 Tahun 2014	REVISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018
BAB I	• Penajaman latar belakang dan penyebutan alasan revisi
	• Melengkapi dasar hukum dengan peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk
BAB II	• Memperbaharui data kinerja sampai dengan tahun 2015
BAB III	• Memperbaharui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun 2017 dan 2018
BAB IV	• Memperbaharui permasalahan pembangunan daerah
	• Menganalisis/memasukkan RPJMN 2015-2019
	• Menyelaraskan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
	• Memperbaharui isu strategis
BAB V	• Memperbaharui sasaran, indikator sasaran dan target pada tiap sasaran RPJMD
BAB VI	• Penajaman arah kebijakan tahun 2017 dan 2018
BAB VII	• Penajaman program pembangunan daerah tahun 2017 dan 2018
BAB VIII	• Memperbaharui program, indikator, target dan pagu tahun 2017 dan 2018
	• Menyesuaikan numenklatur Perangkat Daerah penanggungjawab bidang urusan/program perangkat daerah
BAB IX	• Memperbaharui indikator kinerja daerah
BAB X	• Memperbaharui kaidah pelaksanaan

Penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana visi dasar Provinsi Kalimantan Timur kini dan masa yang akan



datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara baik, fokus, dan konsisten pada sisa periode kebijakan pembangunan tahun 2017 dan 2018. Perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memerhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2016 dimana masih tersisa dua periode RKPD didalamnya, salah satu fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2017 dan 2018 sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa depan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 65, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
12. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
16. Undang-Undang nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM);
19. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;



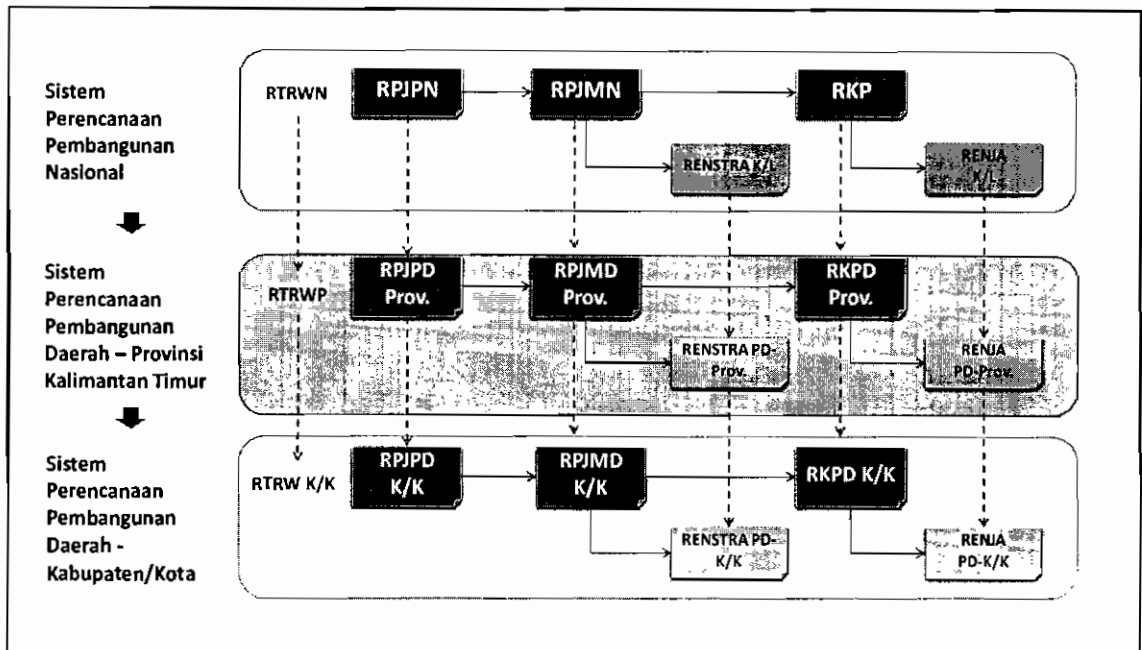
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025; serta
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD merupakan rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang tidak saja merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPD), tetapi juga akan menjadi rujukan perencanaan sektoral dan kewilayahan bagi seluruh lini pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, RPJMD bukan hanya berdasarkan kepentingan saja, namun harus diselaraskan dengan kemampuan sumberdaya daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk didalamnya adalah sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota. Diagramatika keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.2
Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain berlandaskan dokumen RPJMN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 juga harus mengacu pada dokumen RTRW Nasional dan RTRW Provinsi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap ketiga. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2009-2013 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh Gubernur. Secara substantif, isi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai evaluasi RPJMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Hubungan Antara RPJMD dan Renstra PD Provinsi Kalimantan Timur

Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama lima



tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Gubernur bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD Provinsi untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRWP Kalimantan Timur, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan Timur dalam RPJMD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat



penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 tidak jauh berbeda dengan rumusan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 pada Perda Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014. Namun konten-konten dari sistematika penulisan perubahan RPJMD disempurnakan dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan perubahan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan menekankan pada penjelasan alasan formil dan materiil mengapa perubahan RPJMD ini dilakukan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan perubahan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Perubahan menekankan pada analisis kinerja pembangunan sampai dengan tahun 2013, 2014 dan 2015 sesuai ketersediaan data.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Perubahan akan menekankan pada analisis realisasi kinerja keuangan daerah sampai dengan tahun 2014, 2015 dan prediksinya sampai dengan tahun 2018. Alokasi pendanaan pembangunan dalam tiga tahun terakhir dan kapasitas riil di sisa waktu dua tahun sampai akhir periode RPJMD menjadi sandaran penting untuk menentukan (kembali) fokus atau prioritas pembangunan tahun 2018.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling pokok dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional). Perubahan menekankan pada analisis permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur dewasa ini dengan memerhatikan isu dan kebijakan pembangunan nasional maupun pembangunan global internasional.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi gubernur ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. Perubahan menekankan pada penajaman dan penentuan target sasaran pembangunan yang lebih realistis dapat dicapai sesuai kondisi riil capaian pembangunan dan kemampuan pendanaan keuangan daerah.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan pencapaian sasaran ke berbagai strategi yang akan diselenggarakan selama periode pelaksanaan pembangunan. Masing-masing strategi dijabarkan ke dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan. Perubahan RPJMD lebih menekankan pada arah kebijakan untuk sisa periode kebijakan sebagai dasar penentuan kebijakan pada RKPD Tahun 2017 dan 2018.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan berbagai Arah kebijakan dan kebijakan umum ke dalam program pembangunan untuk mengoperasionalkan strategi dalam mencapai sasaran. Perubahan menekankan pada penajaman arah kebijakan dan program pembangunan untuk tahun 2017 dan 2018 yang nantinya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun berkenaan.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur serta pagu anggaran setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2017 dan 2018, penanggungjawab bidang urusan/program Perangkat Daerah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terbaru.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH



Berisikan indikator kinerja *impact* dan *outcome* terpenting sebagai hasil kinerja dari kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah pada realisasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Perubahan dilakukan dengan memperbaiki indikator dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dan atau 2015 dan prediksinya sampai dengan tahun 2018.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Perubahan RPJMD, menekankan pada kaidah pelaksanaan agar kebijakan pembangunan untuk periode tahun 2018 dapat benar-benar dipedomani sampai dengan penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun berkenaan sehingga sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD dapat benar-benar tercapai.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan maksud untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dengan peraturan perundangan yang berlaku, fenomena pembangunan dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling *update*. Dokumen hasil perubahan RPJMD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur secara berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah:

1. Perbaiki sistematika dan substansi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2013-2018.
6. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sisa periode pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur; serta
7. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas



dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD ini.



BAB II

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama Kawasan Timur karena letaknya yang cukup strategis di perbatasan Kawasan Tengah dan Kawasan Timur Indonesia. Provinsi yang beribukota di Kota Samarinda ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dan beranekaragam sebagai salah satu modal utama pembangunan. Keanekaragaman sumber daya alam yang terkenal hingga saat ini adalah sumber daya mineral berupa tambang batubara dan minyak bumi, serta hasil hutan yang masih memiliki peran dalam sektor perakyuan nusantara.

Ratusan sungai yang tersebar se-antero Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi daya tarik tersendiri karena sungai-sungai inilah salah satu penghubung utama antarwilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Transportasi sungai ini merupakan salah satu pintu aksesibilitas ke berbagai wilayah terpencil dari dulu; di samping penerbangan-penerbangan perintis di sebagian wilayah Kalimantan Timur yang sekarang sudah makin banyak dibuka. Hal inilah yang memberikan sumbangsih cukup signifikan dalam pembangunan di daerah terpencil dan terpelosok sebagai bagian dari pemerataan kesejahteraan sosial.

Provinsi Kalimantan Timur juga dikenal dengan sejarah dan kebudayaannya hingga ke mancanegara. Sejarah Provinsi Kalimantan Timur dimulai pada abad ke-4 Masehi di Pulau Kalimantan telah berdiri Kerajaan Kutai (Kutai Martadipura) yang terletak di Muara Kaman. Wilayah kerajaan Kutai Martadipura mencakup wilayah yang cukup luas, yaitu hampir menguasai seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur bahkan hingga sebagian wilayah Kalimantan pada masa kejayaannya. Kerajaan yang bercorak Hindu ini memiliki raja pertama bernama Raja Kudungga dan keturunannya.

Raja terbesar dari Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman yang merupakan anak dari Raja Aswawarman dan cucu Raja Kudungga. Kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Raja Mulawarman mengalami puncak masa kejayaannya yang terlihat pada kehidupan masyarakatnya sejahtera dan diadakannya upacara kurban dengan emas yang sangat banyak. Namun pada masa pemerintahan Maharaja Dhama Setia (raja ke-21), Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan.

Memasuki abad 18, sesuai traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan (termasuk Banjarmasin) kepada Hindia-Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di Samarinda untuk wilayah Borneo



Timur (sekarang provinsi Kalimantan Timur dan bagian timur Kalimantan Selatan) bernama H. Von Dewall. Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang pertama adalah APT Pranoto.

Sebelumnya, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Sejarah berlanjut hingga pada tanggal 25 Oktober 2012, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2012, Provinsi Kalimantan Timur mekar menjadi dua provinsi yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, uraian tentang gambaran umum kondisi daerah dalam bab ini secara umum telah terpisahkan data antara kabupaten/kota yang di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Analisis tentang gambaran umum kondisi Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, yang tersaji sebagai berikut:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk memahami kondisi atau gambaran umum daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Adapun, aspek demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara *series* maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Provinsi Kalimantan Timur. Karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.



a. Luas dan batas wilayah administrasi

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah dan daratan sekitar 12.726.752 ha yang terdiri dari daratan seluas 12.533.681 ha dan perairan darat seluas 193.071 ha. Sebagai provinsi terluas ketiga, Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah mencapai 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia. Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang dan Samarinda).

Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	135
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.032

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Timur dengan luas sebesar 3.105.171 Ha atau 24,38 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Kabupaten dengan luas terkecil adalah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hanya memiliki luas sebesar 292.373 Ha atau 2,3 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk luas wilayah perkotaan, total luas wilayah 3 kota di Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki proporsi wilayah sebesar 1,09 persen saja.



Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

b. Letak dan kondisi geografis

Secara geografis, posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 4° 24' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Geo-strategis Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu dari 13 provinsi di Indonesia yang mempunyai wilayah perbatasan antar negara, yaitu dengan negara Malaysia. Selain itu, posisi Provinsi Kalimantan Timur berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat Lombok yang memiliki potensi perekonomian sangat strategis.

ALKI berperan dalam memperlancar transportasi kapal-kapal dagang yang melintasi wilayah kepulauan Indonesia. Manfaat dari tersedianya jalur laut tersebut bagi Indonesia sangat besar, yaitu dapat meningkatkan hubungan dagang baik dengan negara-negara Afrika, Asia, dan Pasifik. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, posisi ALKI II sangat bernilai strategis baik ditinjau aspek ekonomi maupun politis karena akan membuka peluang berkembangnya pelabuhan besar dan berstandar internasional yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah dan nasional.

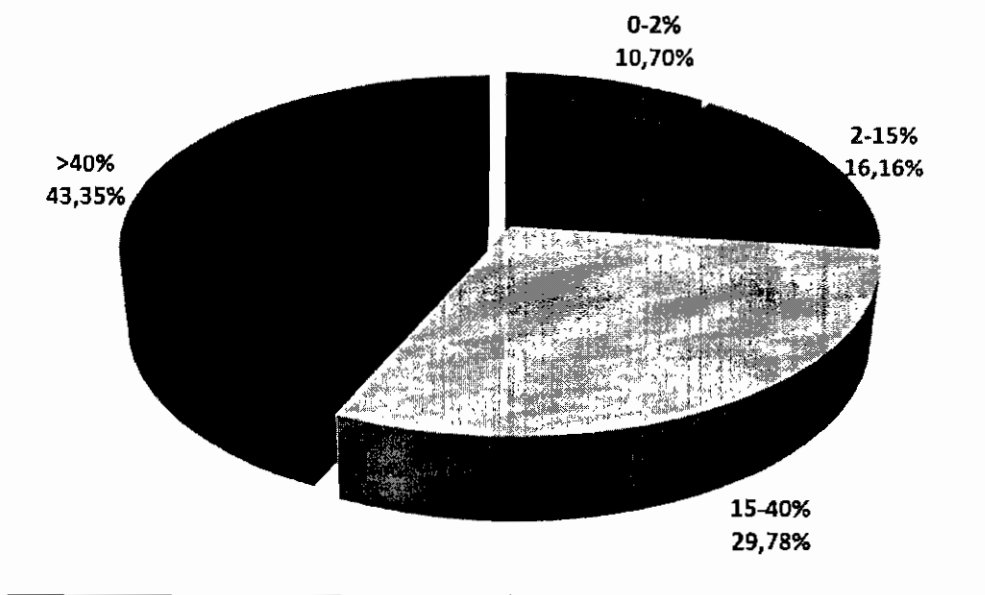
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada di pulau besar Kalimantan yang sangat luas dengan berbagai keanekaragaman karakteristik wilayah seperti kawasan perkotaan, perbatasan, pedalaman, terpencil, pegunungan, pesisir, dan kepulauan. Batas antar negara dengan Malaysia pun dapat ditempuh via lintas darat meskipun akses yang harus dilalui memiliki medan yang cukup sulit.

c. Topografi

Berdasarkan kelerengan atau kemiringan lahan dan ketinggian tempat, karakteristik topografi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 40 persen dan ketinggian kurang dari 500 meter dpl. Kondisi demikian akan mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.



Gambar 2.1
Karakteristik Topografi Wilayah Berdasarkan Tingkat Kelerengan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur



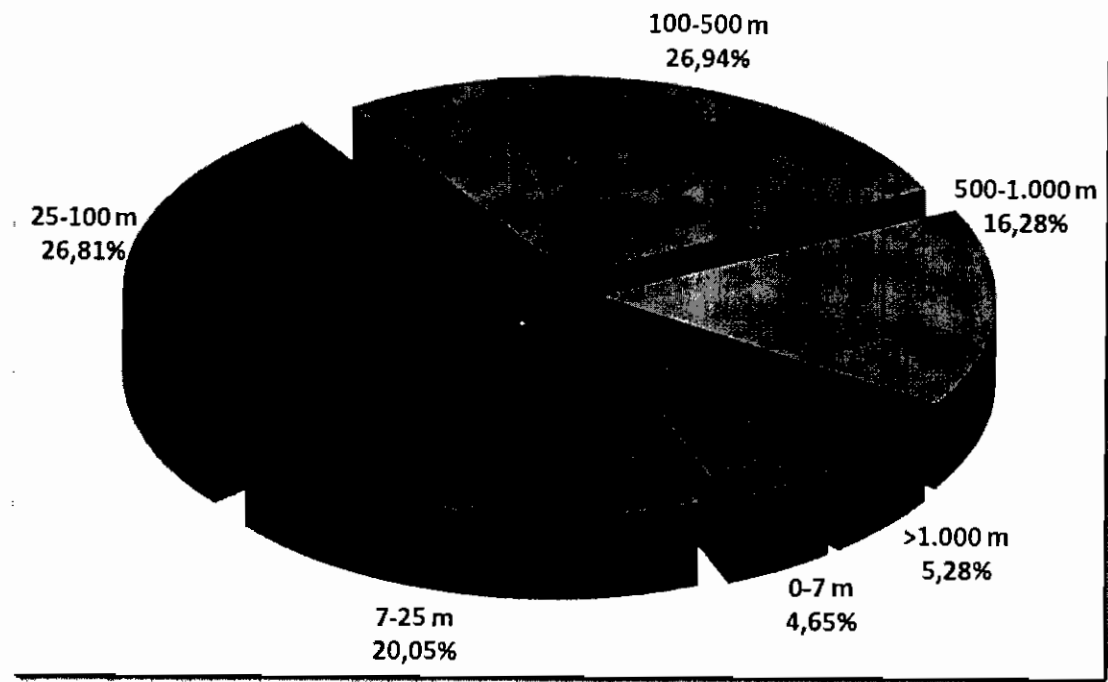
Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2015

Lahan datar (0-2%) di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%) luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan > 15% dengan luasnya mencapai sekitar 73,14 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan di daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan 0-15 persen. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan yang lebih tinggi (>15 persen) hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi.



Gambar 2.2
Karakteristik Topografi Wilayah Berdasarkan Ketinggian Tempat (mdpl)
Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2015

Berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut, 51,51 persen lahan di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai ketinggian di bawah 100 mdpl. Sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara 100 dan 500mdpl mencapai 26,94 persen. Selebihnya terletak pada ketinggian di atas 500 mdpl sekitar 21,55 persen. Berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, diketahui bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 21,55 persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 500 mdpl. Wilayah yang suhunya relatif lebih rendah ini cocok untuk tempat pengembangan tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan.

d. Geologi

Kalimantan merupakan daerah yang memiliki tektonik yang kompleks. Adanya interaksi konvergen atau kolisi antara 3 lempeng utama, yakni lempeng Indo – Australia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia yang membentuk daerah Timur Kalimantan. Evolusi tektonik dari Asia Tenggara dan sebagian Kalimantan yang aktif menjadi bahan perbincangan antara ahli – ahli ilmu kebumian. Pada zaman Kapur Bawah, bagian dari *continental passive margin* di daerah Barat daya Kalimantan, yang terbentuk sebagai bagian dari lempeng Asia Tenggara yang dikenal sebagai Paparan Sunda. Pada zaman Tersier, terjadi peristiwa interaksi konvergen yang menghasilkan beberapa formasi akresi, pada daerah Kalimantan.



Selama zaman Eosen, daerah Sulawesi berada di bagian Timur kontinen dataran Sunda. Pada pertengahan Eosen, terjadi interaksi konvergen ataupun kolisi antara lempeng utama, yaitu lempeng India dan lempeng Asia yang mempengaruhi makin terbukanya busur belakang samudra, Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Cekungan Kutai merupakan salah satu cekungan yang dihasilkan oleh perkembangan regangan cekungan yang besar pada daerah Kalimantan. Pada Pra-Tersier, Pulau Kalimantan ini merupakan salah satu pusat pengendapan, yang kemudian pada awal tersier terpisah menjadi 6 cekungan sebagai berikut: Cekungan Barito yang terletak di Kalimantan Selatan, Cekungan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur, Cekungan Tarakan yang terletak di Timur laut Kalimantan, Cekungan Sabah yang terletak di Utara Kalimantan, Cekungan Sarawak yang terletak di Barat laut Kalimantan, Cekungan Melawai dan Ketungau yang terletak di Kalimantan Tengah.

Di Kalimantan timur, terdapat 3 (tiga) pola sesar utama. Di antaranya Sesar Mangkalihat, Sesar Sangkulirang, dan Megashear Adang. Serta terdapat pula Antiklinorium Samarinda. Potensi mineral yang terdapat di Kalimantan Timur ialah Batubara, Minyak dan Gas Bumi, emas, galena, dan lain – lain.

e. Hidrologi

Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 157 sungai besar dan kecil di antaranya adalah Sungai Mahakam yang memiliki panjang 920 km dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 77.913 km². Terdapat juga Sungai Kelay dengan panjang 254 km. Sedang jumlah danau yang ada sebanyak 18 (delapan belas) buah, dengan 3 (tiga) danau terbesar adalah Danau Melintang seluas 11.000 Ha, Danau Semayang seluas 13.000 Ha dan Danau Jempang seluas 15.000 Ha. Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang.

Sesuai dengan Permen PU No. 11 A/PRT/M/2006 tentang Pembagian Wilayah Sungai, sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Timur (termasuk Kaltara) dikelompokkan dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu **SWS Mahakam** (Strategis Nasional) yang terdiri dari Sungai-sungai Besar antara lain Sungai Mahakam, Samboja, Senipah, dan Semoi; **SWS Berau-Kelay** (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Kuning, Bakau, Berau, Pangkung, dan Sungai Pantai; **SWS Karangan** (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Karangan, Sangata, Bengalon, dan Santan.

f. Klimatologi

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan/pancaroba pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Provinsi



Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat (November-April) dan angin Muson Timur (Mei-Oktober). Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Provinsi Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang.

Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum, Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropik dengan rata-rata suhu udara pada tahun 2015 sebesar 22,20°C (minimum) yang tercatat di stasiun meteorologi Samarinda dan memiliki rata-rata suhu udara maksimum sebesar 35,20°C yang juga tercatat di stasiun meteorologi Samarinda.

Parameter kondisi iklim lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kelembaban udara yang rata-rata mencapai 82,0 persen di Samarinda dan Tanjung Redeb, serta 84,0 persen di Balikpapan. Selain itu, rata-rata tekanan udara tertinggi berada di Samarinda yang mencapai 1.012,9 Mbs dengan kecepatan angin sebesar 4 Knot pada setiap stasiun pengamatan. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah berada di Tanjung Redeb sebesar 1.363,40 mm dan tertinggi di Kota Balikpapan sebesar 2.149,80 mm.

Tabel 2.2

Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Melalui Stasiun Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Uraian	Stasiun Pengamatan		
	Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Suhu Udara (°C)			
- Minimum	22,20	22,30	22,30
- Maksimum	35,20	33,80	34,40
2. Kelembaban Udara (%)	80	82	85
3. Tekanan Udara (Mbs)	1.012,9	1.011,7	1.010,9
4. Kecepatan Angin (Knot)	4,0	4,0	4,0
5. Curah Hujan (mm)	2.097,80	2.149,80	1.363,40
6. Penyinaran Matahari (%)	46,8	52,5	50,8

Sumber: BMKG Samarinda, 2015

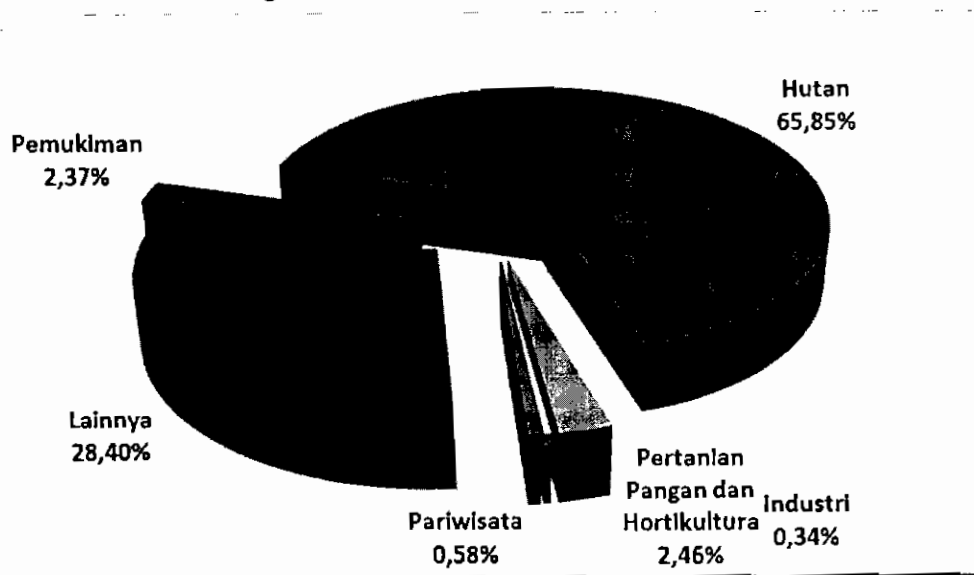


g. Penggunaan lahan

Potensi Sumber daya lahan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yakni seluas 12.638.931 Ha (75,68%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 16.732.065 ha. Secara garis besar sumber daya lahan Kalimantan Timur terbagi menjadi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Jika dilihat dari peruntukan kawasan, sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur masih berupa kawasan hutan yang mencapai 65,85 persen sedangkan sisanya berupa wilayah permukiman yang hanya mencapai 2,37% (396.266 Ha), industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan hortikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.3

**Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016 - 2035**



Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Provinsi Kalimantan Timur diidentifikasi memiliki wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Sebagai dasar dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah, penataan ruang nasional telah mengatur pembentukan kawasan untuk meningkatkan ekonomi pada pusat pertumbuhan yaitu dengan Kawasan Andalan. Kawasan andalan merupakan bagian dari



kawasan budidaya yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya. Kawasan Andalan Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan sekitarnya.
2. Kawasan Andalan Sangkulirang – Sengatta - Muara Wahau (SASAMAWA).
3. Kawasan Andalan Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam dan sekitarnya (BONSAMTEBAJAM) dan sekitarnya.
4. Kawasan Andalan Laut Bontang – Tarakan dan sekitarnya.

Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonominamun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan. Secara berkelanjutan, pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditetapkan kawasan strategis provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yaitu:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:
 - a. Kawasan industri dan Pelabuhan Maloy di kabupaten Kutai Timur;
 - b. Kawasan agropolitan regional di kabupaten Kutai Timur; dan
 - c. Kawasan pusat pertambangan regional (klaster pertambangan) di kabupaten Kutai Timur.
- 2) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi terdapat di Kabupaten Kutai Barat.
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi meliputi:
 - a. Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu;
 - b. Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - c. Desa budaya Pampang di Kota Samarinda.
- 4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi:
 - a. Kawasan Delta Mahakam;
 - b. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran, dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan); dan
 - d. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.



2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik, gempa vulkanik dan sebagainya.

Tabel 2.3
Jumlah Kejadian Bencana Per Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana					
	Kebakaran	Tanah Longsor	Banjir	Angin Topan	Konflik	Tenggelam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
1.Paser	21	1	6	0	1	2
2.Kutai Barat	11	0	6	0	0	1
3.Kutai Kartanegara	57	6	12	4	0	7
4.Kutai Timur	26	0	7	0	0	2
5.Berau	8	1	2	1	0	1
6.Penajam Paser Utara	21	0	4	0	0	2
7.Balikpapan	74	44	15	2	0	2
8.Samarinda	87	5	5	1	0	4
9.Bontang	19	0	1	1	0	2
10.Mahakam Ulu	1	0	0	0	0	2
Kalimantan Timur	325	57		9	1	25

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah kebakaran dan disusul dengan banjir. Secara lebih terperinci, daerah yang berpotensi rawan bencana meliputi:

1. Gempa Bumi

Daerah rawan gempa bumi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kabupaten Paser.

2. Banjir

Daerah rawan banjir terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, terutama di daerah perkotaan dan pemukiman. Sementara daerah banjir



dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi adalah Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda.

3. Tanah Longsor

Daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor terdapat di daerah perkotaan seperti Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

Secara umum kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur tergolong tinggi. Pada tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 1.248 kali. Dimana jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan terbanyak ialah di Kabupaten Penajam Paser Utara yakni sebanyak 250 kali.

5. Tsunami

Meski tidak pernah mengalami tsunami, namun Provinsi Kalimantan Timur terdapat daerah yang rawan bencana tsunami. Daerah rawan tsunami adalah sepanjang pantai Provinsi Kalimantan Timur. Sementara daerah dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi terdapat di Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur.

2.1.4. Demografi

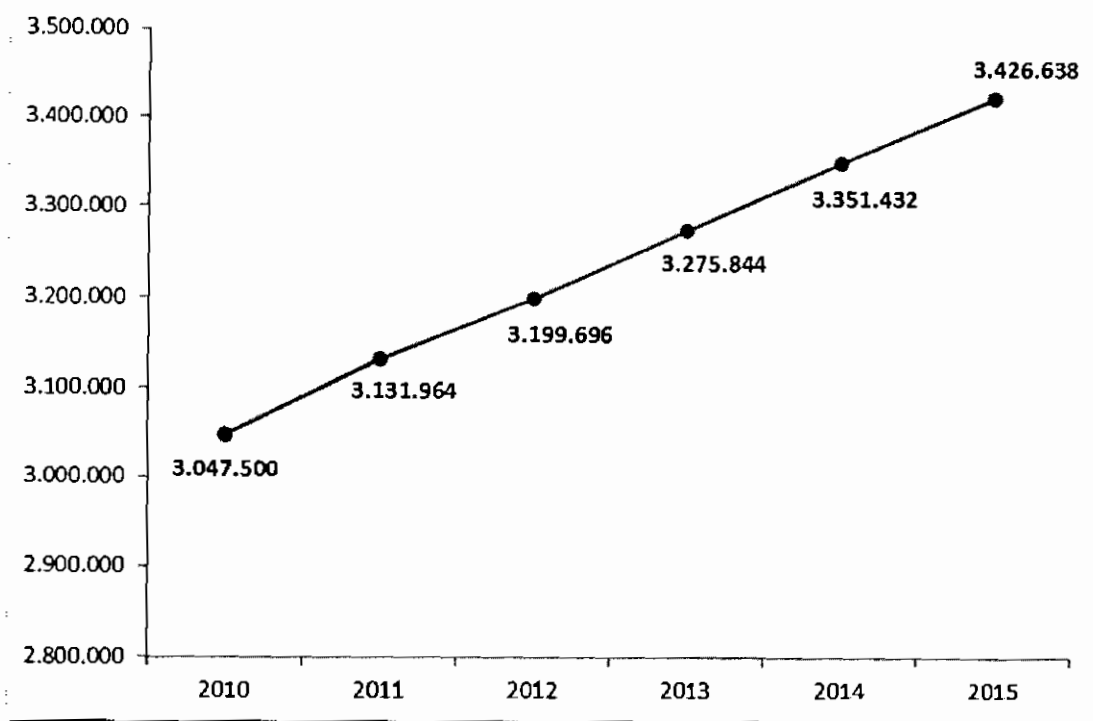
Demografi merupakan ilmu yang dapat menggambarkan dan mempelajari segala persoalan-persoalan kependudukan suatu wilayah dari segi kuantitas, distribusi hingga komponen-komponen perubahannya. Kondisi demografi di Provinsi Kalimantan Timur sangat kompleks mengingat wilayah geografis yang begitu luas namun jumlah penduduk yang bisa dibilang belum tinggi. Selain itu distribusi penduduk yang menyebar tidak merata menimbulkan tantangan tersendiri dalam membuat kebijakan kependudukan agar pembangunan dirasakan setiap lapisan masyarakat.

1) Jumlah Penduduk

Penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Hal ini terlihat pada saat Sensus Penduduk tahun 2000 dimana jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 2.127.050 jiwa dan jumlah tersebut meningkat pesat 10 tahun kemudian menjadi 3.047.500 jiwa pada tahun 2010. Terakhir, berdasarkan penghitungan proyeksi penduduk didapatkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 meningkat kembali menjadi 3.426.638 jiwa.



Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Angka Proyeksi, 2016

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Paser	244.111	249.991	256.175	262.301
2. Kutai Barat	143.101	144.018	144.892	145.838
3. Mahakam Ulu*	25.522	25.678	25.894	25.970
4. Kutai Kartanegara	665.489	683.131	700.439	717.789
5. Kutai Timur	281.594	294.216	306.974	320.115
6. Berau	191.576	197.388	203.223	208.893
7. PPU	148.034	150.205	152.119	154.235
8. Balikpapan	583.272	594.322	605.096	615.574
9. Samarinda	764.908	781.015	797.006	812.597
10. Bontang	152.089	155.880	159.614	163.326
Kalimantan Timur	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.426.638

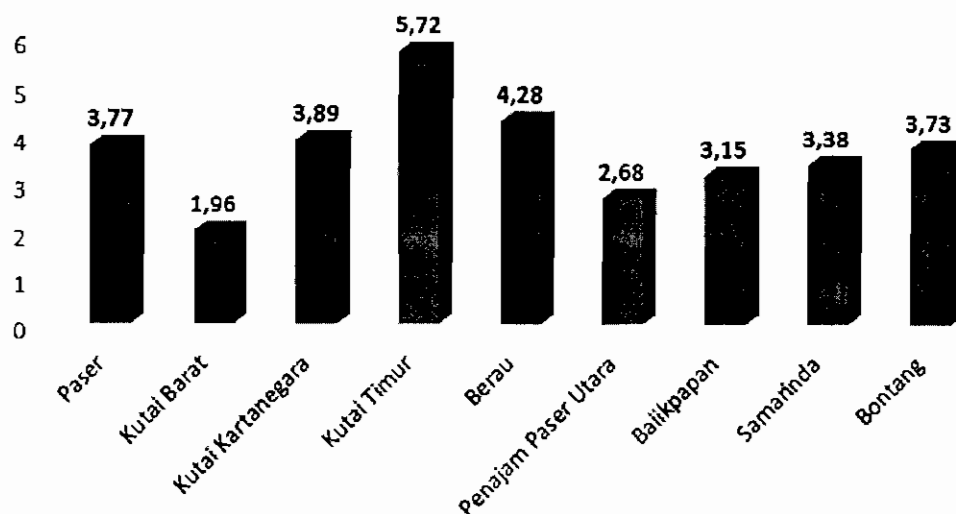
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Angka Proyeks, 2016



2) Pertumbuhan Penduduk

Pada periode tahun 2000 hingga 2010, rata-rata pertumbuhan penduduk (rata-rata per tahun) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,60 persen sedangkan pada tahun 2014-2015 pertumbuhan penduduk hanya sebesar 2,24 persen. Selama kurun waktu 10 tahun (2000 s.d. 2010), kabupaten/kota yang paling cepat mengalami pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 10 tahun tersebut adalah Kabupaten Kutai Timur dengan pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 4,28 persen, sedangkan kabupaten/kota yang pertumbuhannya paling lambat adalah Mahakam Ulu yakni sebesar 0,29 persen.

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000-2010



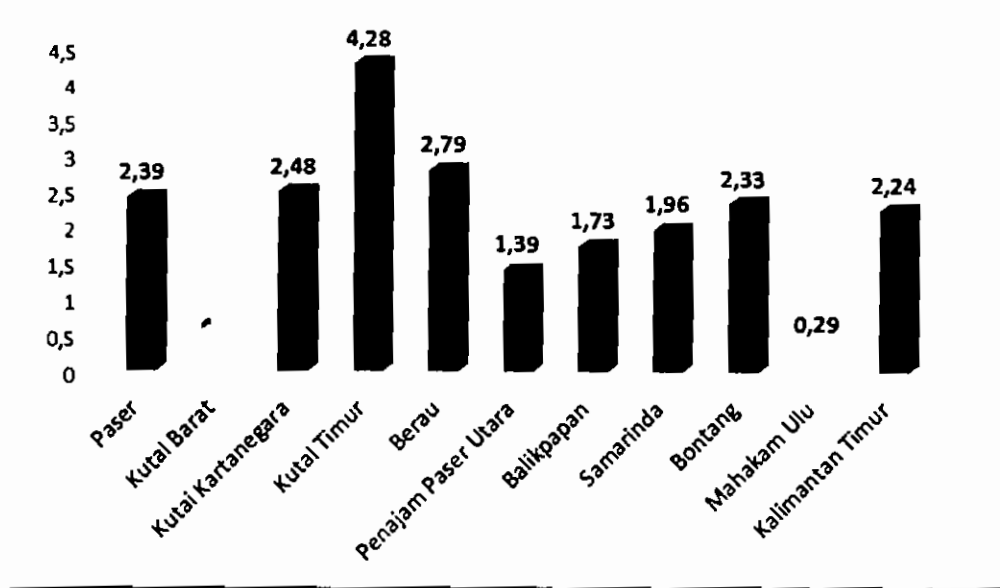
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

*Kutai Barat + Mahakam Ulu

Sama halnya dengan pola pertumbuhan penduduk antar Sensus Penduduk (10 tahunan), pertumbuhan penduduk tahunan pada tahun terakhir yakni tahun 2015 juga memiliki pola yang serupa dimana Kabupaten Kutai Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi (4,28%) dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terendah (0,29%).



Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

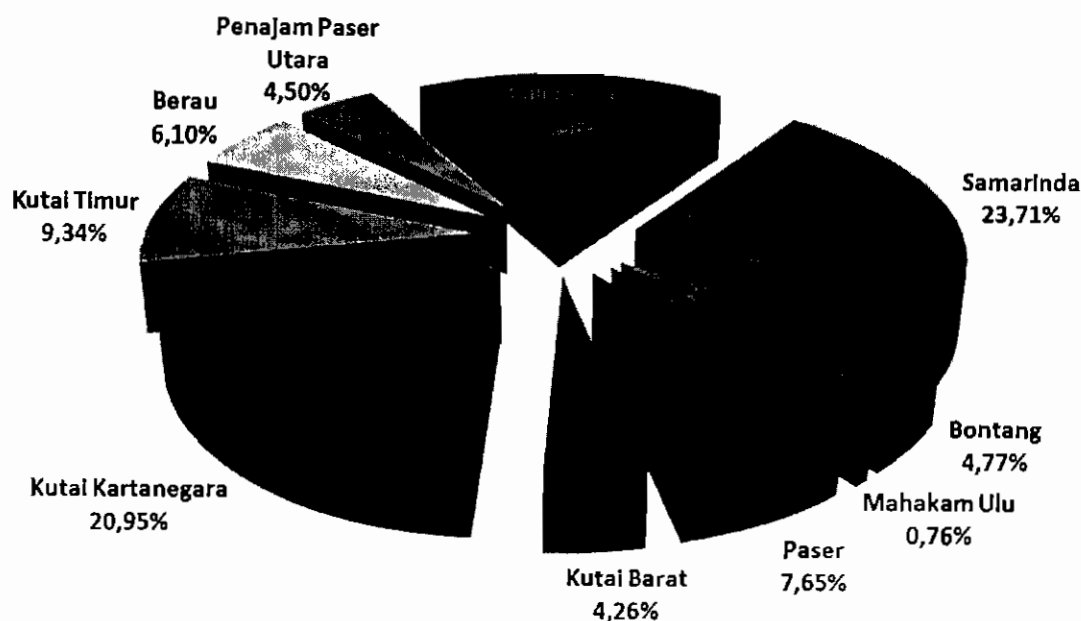
3) Distribusi Penduduk

Ketimpangan distribusi jumlah penduduk dengan luas wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terjadi di antara wilayah kota dan kabupaten. Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 3 kota dan luas wilayahnya pun hanya sebesar 1,09 persen dari total wilayah daratan, namun distribusi penduduk sebanyak 46,44 persen berada di kota dan sisanya 53,56 persen tinggal di kabupaten. Distribusi penduduk yang tidak merata inilah salah satu faktor penghambat terbesar dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh di setiap lapisan masyarakat.

Penduduk Provinsi Kalimantan paling banyak berdomisili di Kota Samarinda yaitu sebesar 23,71 persen. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahan sekaligus jasa perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang kurang dari 5 persen terdapat di Kota Bontang (4,77%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,50%), Kabupaten Kutai Barat (4,26%) dan paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Hulu yang bahkan tidak mencapai 1 persen (0,76%).



Gambar 2.7
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

4) Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio

Salah satu aspek demografi yang perlu diketahui sebagai dasar pelaksanaan pembangunan adalah *sex ratio* dimana dengan indikator ini akan diketahui perbandingan antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita ketahui, meskipun emansipasi wanita telah digalakkan namun tidak dapat dipungkiri bahwa produktivitas penduduk laki-laki lebih tinggi jika dibanding dengan produktivitas penduduk perempuan, oleh karena itu, perbandingan jumlah penduduk yang wajar akan memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap pergerakan pembangunan daerah.

Di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penduduk laki-laki jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dimana angka *sex ratio* mencapai 110,31 yang berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat 110-111 penduduk laki-laki.



Tabel 2.5
Luas Wilayah, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No	Kab/Kota	Luas Wilayah Daratan (Km2)	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Paser	11.096,96	139.219	123.082	262.301	113,11	23,64
2	Kutai Barat	13.709,92	77.010	68.828	145.838	111,89	10,64
3	Kutai Kartanegara	25.988,08	377.070	340.719	717.789	110,67	27,62
4	Kutai Timur	31.051,71	173.586	146.529	320.115	118,47	10,31
5	Berau	21.735,19	112.297	96.596	208.893	116,25	9,61
6	Penajam Paser Utara	2923,73	80.609	73.626	154.235	109,48	52,75
7	Balikpapan	512,25	317.988	297.586	615.574	106,86	1201,08
8	Samarinda	716,53	420.141	392.456	812.597	107,05	1173,19
9	Bontang	163,14	85.522	77.804	163.326	109,92	1001,14
10	Mahakam Ulu	19.449,41	13.855	12.115	25.970	114,36	1,34
Kalimantan Timur		127.346,92	1.797.297	1.629.341	3.426.638	110,31	26,91

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

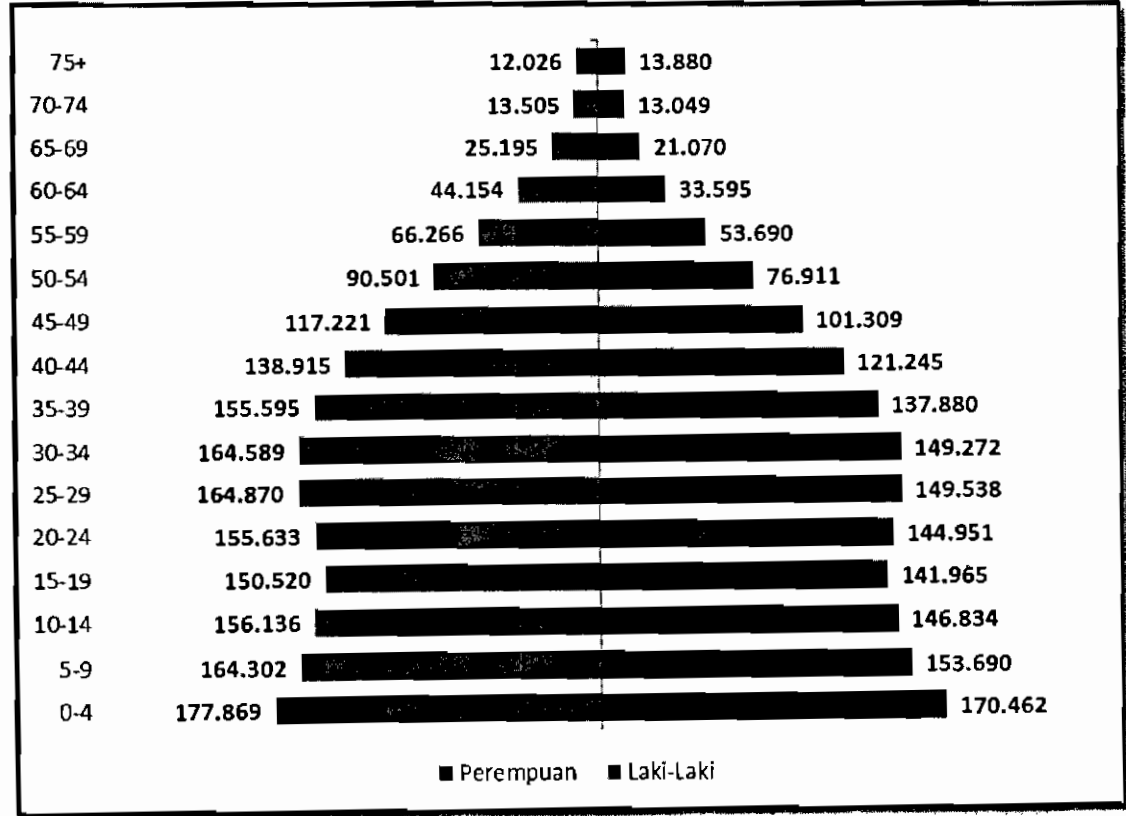
Secara umum, kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebesar 26,91 jiwa/km². Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tinggal di dalamnya. Selain itu, persebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang tidak merata menyebabkan terjadinya perbedaan kepadatan penduduk antar daerah yang mencolok, terutama antar daerah kabupaten dengan kota. Wilayah 7 kabupaten dengan luas 98,91 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 53,56 persen dari total penduduk Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan selebihnya, yaitu sekitar 46,44 persen menetap di 3 daerah kota dengan luas hanya 1,09 persen dari luas wilayah total Provinsi Kalimantan Timur. Akibatnya, kepadatan penduduk di daerah kabupaten hanya berkisar 1,34-52,75 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk di Kota Samarinda sebanyak 1.134,07 jiwa/km², Kota Balikpapan 1.201,71 jiwa/km², dan Kota Bontang 1.001,14 jiwa/km².



5) Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana). Di Provinsi Kalimantan Timur, terlihat bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia produktif dimana pada usia muda paling sedikit jumlahnya kemudian semakin bertambah usia semakin sedikit penduduknya hingga berumur 75 ke atas. Piramida penduduk ini selain mengindikasikan rendahnya tingkat ketergantungan penduduk non produktif, semakin tingginya jumlah penduduk pada kelompok umur tua juga mengasumsikan cukup tingginya derajat kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.8
Piramida Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur , 2016

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Provinsi Kalimantan Timur yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Provinsi Kalimantan Timur serta analisis dan kajian singkat terkait



kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Provinsi Kalimantan Timur. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

a. Nilai Produk Domestik Regional Bruto

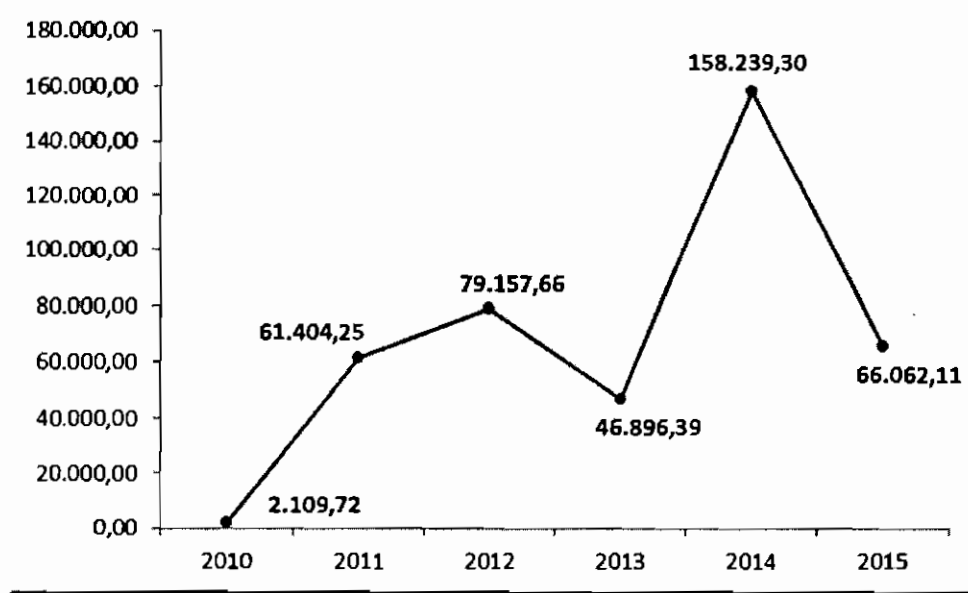
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja perekonomian daerah baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan baik terkait tahun dasar maupun metodologi penghitungan. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami peningkatan di setiap periodenya meskipun semakin lama terlihat peningkatannya semakin



Gambar 2.55
Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (Ha)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



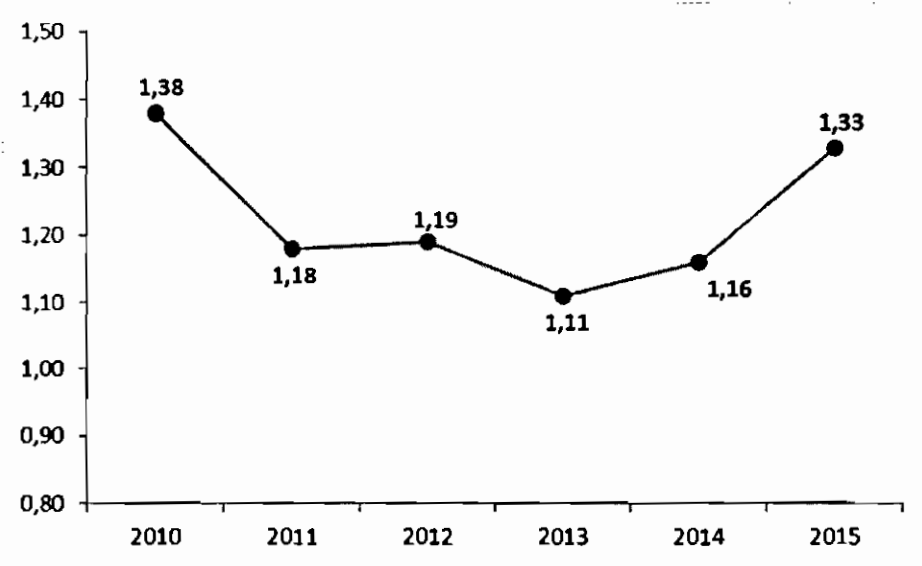
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Tahun 2015

Untuk tetap menjaga stabilitas kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah daerah melaksanakan program reboisasi dan rehabilitasi lahan kehutanan dimana pada tahun 2015 telah dilakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan seluas 66.062,11 ha. Luas hutan yang direhabilitasi ini menurun jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun lalu seluas 158.239,30 ha yang direhabilitasi.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB diperhitungkan dari jumlah distribusi persentase total PDRB dari subsektor kehutanan. Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi penurunan.



Gambar 2.56
Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Dalam enam tahun terakhir, kontribusi terbesar subsektor kehutanan terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 1,38 persen sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan kontribusi terendah yakni sebesar 1,11 persen. Pada tahun 2014, kembali terjadi kenaikan kontribusi subsektor kehutanan menjadi 1,16 persen yang ditindaklanjuti dengan kenaikan kembali pada tahun 2015 menjadi sebesar 1,33 persen.

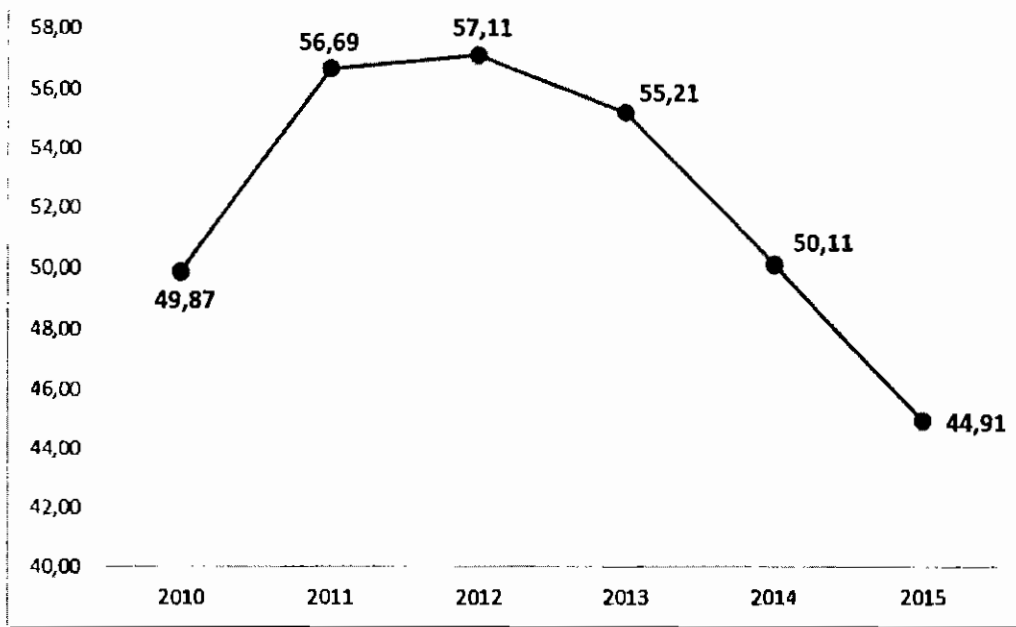
c. Energi dan sumber daya mineral

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan di setiap tahunnya hingga tahun 2015 kontribusi menurun hingga mencapai 44,91 persen.

Nilai PDRB pada pertambangan batubara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun produksi batubara meningkat sedangkan produksi migas memang cenderung menurun. Kelesuan ini kemungkinan dikarenakan gejolak perekonomian yang mengguncang global internasional sehingga berdampak pada nilai ekspor produk pertambangan dan penggalian. Sedangkan nilai PDRB pada minyak dan gas menurun karena produksi pertambangan migas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

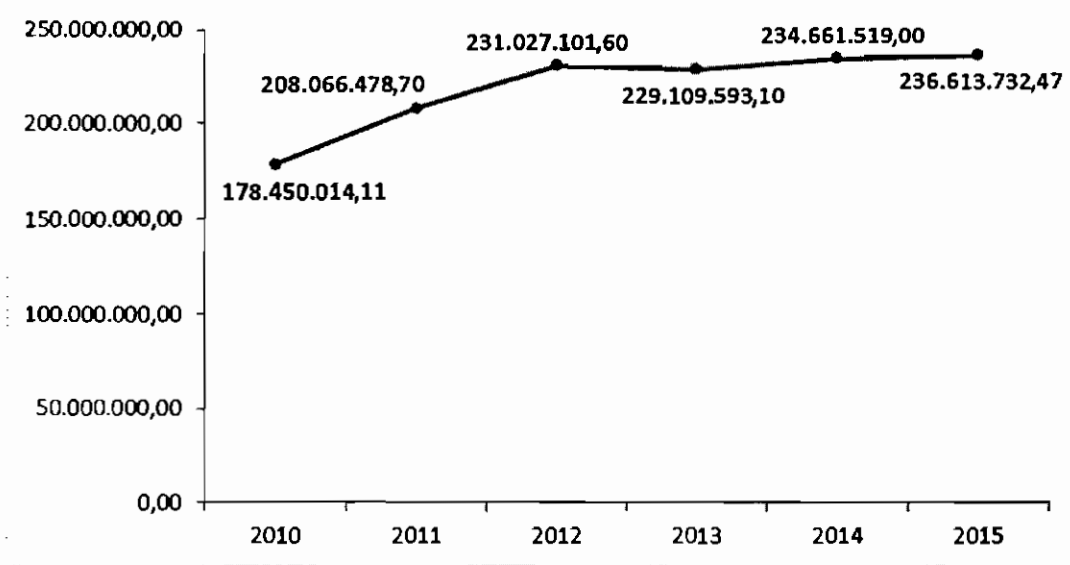


Gambar 2.57
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Gambar 2.58
Produksi Pertambangan Batubara (Ton)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016



Tabel 2.41
Produksi Pertambangan Unggulan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

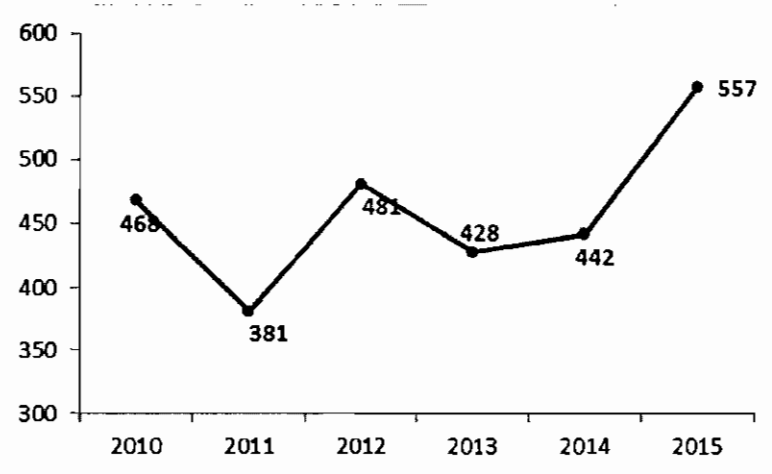
Tahun	Batubara (Ton)	Amoniak (Ton)	Urea (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	178.450.014,11	1.825.106,00	2.887.285,00	56.791,01	1.045.503,66
2011	208.066.478,72	1.745.336,00	2.793.766,00	53.023,68	911.529,96
2012	231.027.101,60	1.905.389,00	3.008.267,00	47.436,40	822.229,47
2013	229.109.593,05	1.939.081,00	3.007.632,00	42.983,64	713.549,85
2014	234.661.519,00	2.433.945,00	1.125.544,00	35.207,46	605.579,00
2015	236.613.732,47	1.087.077,00	3.019.349,00	36.605,80	609.744,52

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2016

d. Pariwisata

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat perkembangan obyek wisata di tiap tahunnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 2.59
Jumlah Obyek Wisata
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016



Pada tahun 2015, obyek wisata di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 557 obyek wisata padahal enam tahun sebelumnya yakni tahun 2010 hanya memiliki 468 obyek wisata saja. Tentu saja hal ini berdampak pada kenaikan wisatawan (nusantara dan mancanegara) yang meningkat dalam enam tahun terakhir hingga pada tahun 2015 mencapai 4.320.025 wisatawan dengan rincian 49.285 wisatawan mancanegara dan 4.270.740 wisatawan dalam negeri.

Tabel 2.42
Jumlah Wisatawan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

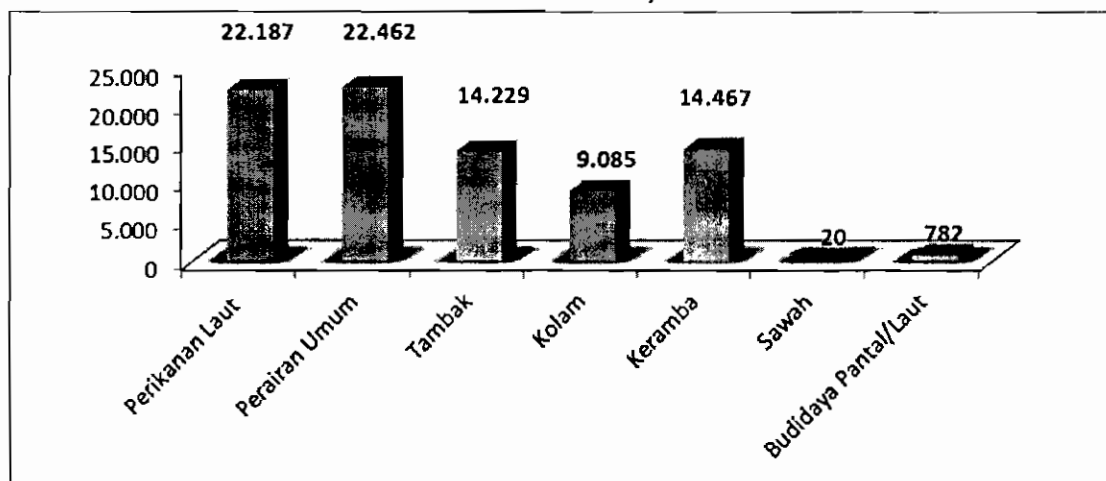
Tahun	Mancanegara	Nusantara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	24.410	1.174.626	1.199.036
2011	29.768	1.564.013	1.593.781
2012	28.273	1.667.467	1.695.740
2013	32.973	1.925.769	1.959.742
2014	53.257	3.914.769	3.968.026
2015	49.285	4.270.740	4.320.025

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

e. Kelautan dan perikanan

Jumlah rumahtangga dan produksi pada subsektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh perikanan laut dan perairan umum. Namun pada jumlah nilai produksinya, subsektor perikanan yang tinggi nilai produksinya adalah perikanan laut (2,85 triliun rupiah) dan tambak (1,92 trilyun rupiah).

Gambar 2.60
Jumlah Rumahtangga Perikanan Menurut Subsektor
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015





Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

Tabel 2.43
Jumlah Rumah tangga, Produksi, dan Nilai Produksi Subsektor Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No.	Subsektor	Rumah Tangga	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perikanan Laut	22.187	104.622,3	2.846,85
2.	Perairan Umum	22.462	40.557,9	667,44
3.	Tambak	14.229	38.166,5	1.919,42
4.	Kolam	9.085	2.694,2	76,88
5.	Karamba	14.467	32.784,1	802,23
6.	Sawah	20	429,4	6,44
7.	Budidaya Pantai/Laut	782	212,7	22,00
Total		83.232	219.467,1	6.341,33

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

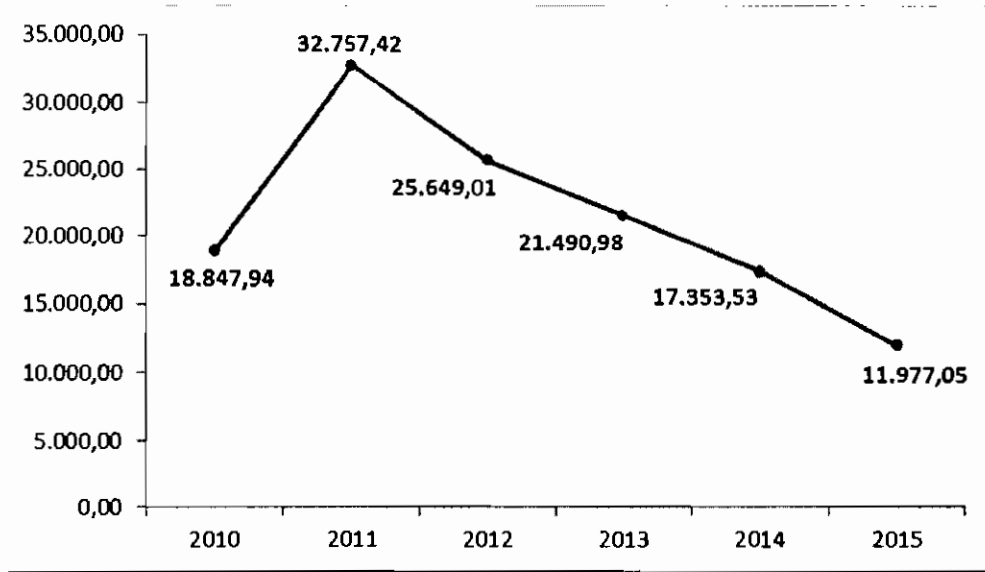
f. Perdagangan

Provinsi Kalimantan Timur mengalami surplus ekspor-impor di setiap tahunnya meskipun pada kurun waktu empat tahun terakhir mengalami penurunan hingga mencapai 11,9 milyar US\$. Penurunan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menanggulangi gejala perekonomian daerah yang akan datang. Sehingga perlu adanya antisipasi untuk meningkatkan ketahanan perekonomian utamanya dalam meningkatkan daya saing ekonomi di luar daerah.

Nilai ekspor yang menurun dari tahun ke tahun merupakan permasalahan yang cukup penting untuk dikaji faktor penyebabnya. Kemungkinan terbesar penurunan ekspor adalah terkait ekspor bahan pertambangan dan penggalian yang menurun daya belinya maupun berkurangnya produktivitasnya. Transformasi ekonomi perlu menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan dalam merevitalisasi struktur perekonomian daerah agar menyelamatkan gejala ekonomi negatif pada masa sekarang dan mendatang.



Gambar 2.61
Surplus Ekspor-Impor (Juta US\$)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Tabel 2.44
Nilai Ekspor, Nilai Impor, dan Surplus (Juta US\$)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

Tahun	Nilai Ekspor	Nilai Impor	Surplus
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	25.116,95	6.269,01	18.847,94
2011	39.974,15	7.216,74	32.757,42
2012	33.792,55	8.143,54	25.649,01
2013	31.003,08	9.512,10	21.490,98
2014	25.825,02	8.471,50	17.353,53
2015	17.483,27	5.506,23	11.977,05

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

g. Perindustrian

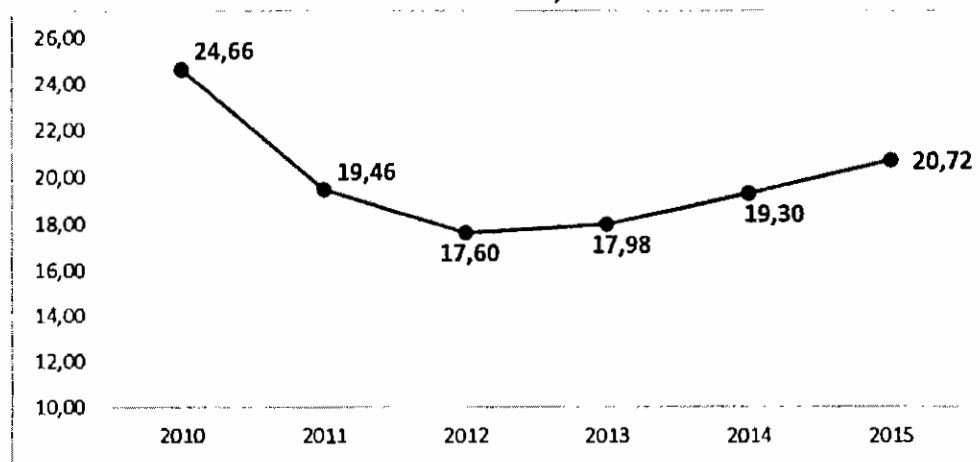
Kontribusi sektor industri pengolahan menjadi sorotan bagi pelaku ekonomi mengingat pada sektor ini telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan terjadi pertumbuhan ekonomi negative pada kurun waktu 2011-2013. Hal ini menjadikan kewaspadaan bagi pelaku ekonomi maupun pemerintah daerah agar memberikan insentif



terhadap berbagai industri baik kecil, menengah, maupun besar untuk terus mempercepat laju perekonomian daerah.

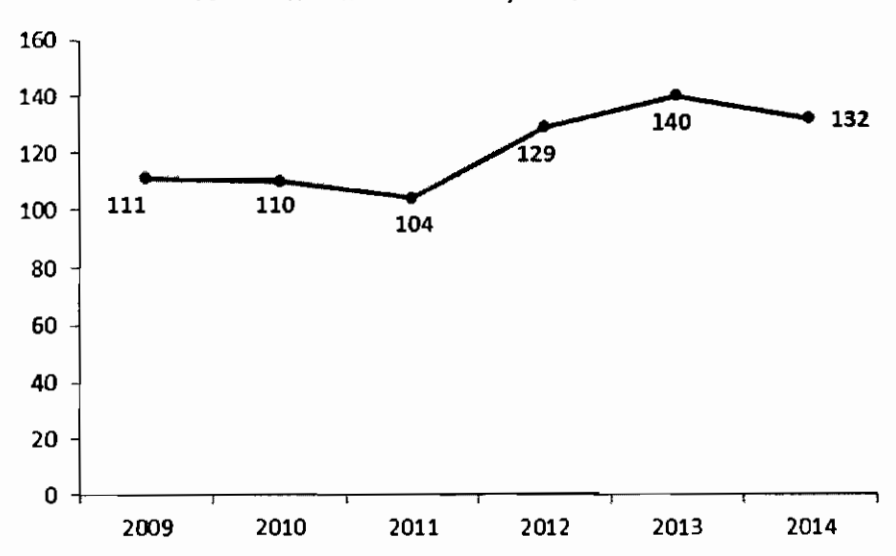
Meskipun begitu, industri pengolahan yang paling berpengaruh adalah industri pengolahan batubara dan pengilangan migas. Tingginya kontribusi sektor tersebut menjadikan penurunan produktivitas sektor pertambangan dan penggalian berdampak tinggi pada pertumbuhan perekonomian maupun kontribusi perekonomian dari sektor industri pengolahan. Oleh karena itu, dukungan terhadap transformasi perekonomian terus digalakkan untuk mengantisipasi terjadinya fluktuatif perekonomian yang merugikan seluruh pihak.

Gambar 2.62
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2015

Gambar 2.63
Jumlah Perusahaan Besar dan Sedang
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2009-2014





Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

Perusahaan besar dan sedang di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan ketertarikan investor dalam menanamkan modalnya masih cukup tinggi. Pada tahun 2014, sebanyak 132 perusahaan besar dan sedang menjalankan perusahaannya di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah pekerja sebanyak 40.222 orang dan nilai tambah (biaya faktor produksi) sebesar 19,12 trilyun rupiah.

Tabel 2.45
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Perusahaan Industri Besar dan Sedarang Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Tambah (dlm Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	111	31.031	9.451.289
2010	110	31.459	14.894.451
2011	104	30.966	16.427.670
2012	129	39.682	14.932.730
2013	140	40.689	19.089.481
2014	132	40.222	19.115.486

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2015

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

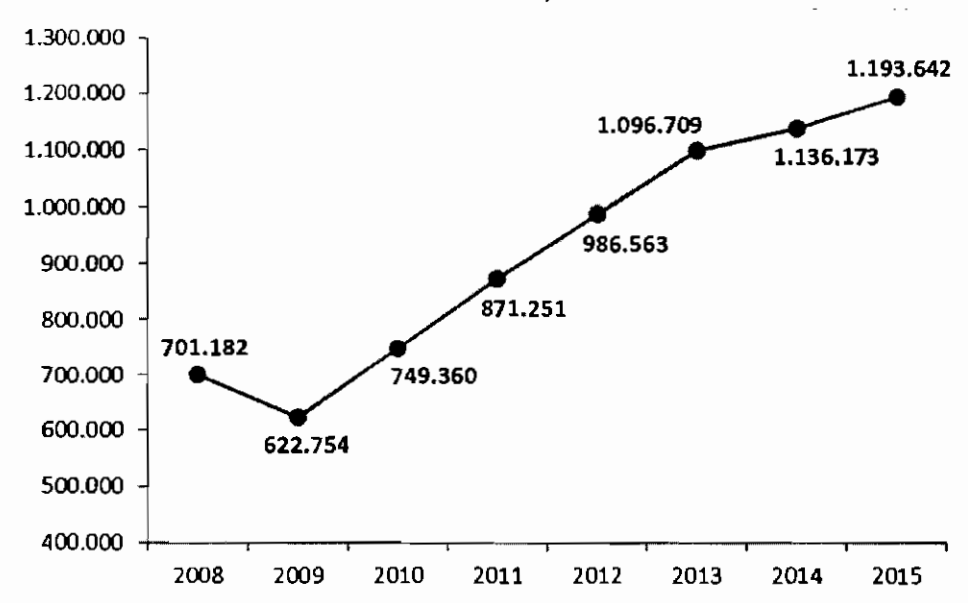
2.4.1. Fokus kemampuan ekonomi daerah

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita per bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2015 mencapai Rp.1.193.642,- per bulan.

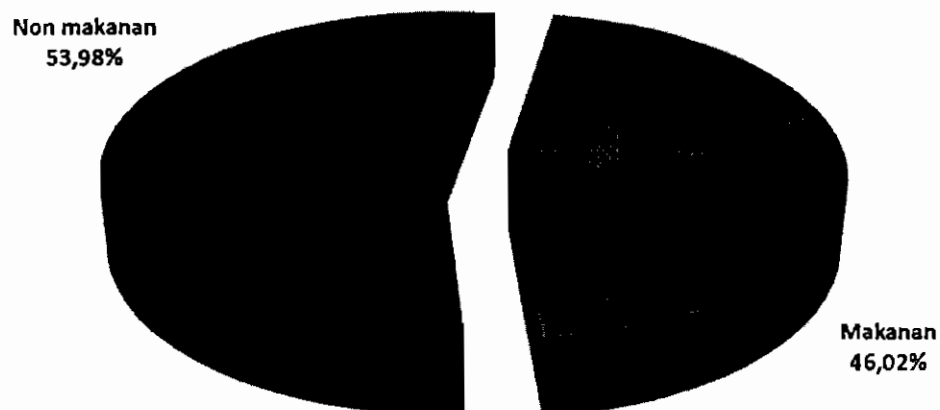


Gambar 2.64
Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan (Rp)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2008-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Gambar 2.65
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016



Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (53,98%) lebih tinggi jika dibandingkan konsumsi makanan (46,02%). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih baik karena fokus konsumsi penduduk lebih tinggi ke konsumsi non makanan dibandingkan dengan konsumsi makanan.

Tabel 2.46
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	385.993	467.532	535.643	588.003	627.372	644.291
2.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	749.360	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642
3.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	51,51	53,66	54,29	53,62	55,22	53,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov.Kaltim

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2012-2015, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Tabel 2.47
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012-2015 (2012=100)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	129,43	130,69	111,58	117,00
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	132,02	137,14	111,66	118,66
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,04	95,30	99,93	98,61

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015



Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektornya, maka NTP tertinggi adalah NTP pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang mencapai 102,99 pada tahun 2015 naik jika dibandingkan tahun kemarin (102,24). Sedangkan NTP terendah berada pada subsektor hortikultura yang hanya mencapai 93,28 dimana angka ini menurun dari tahun sebelumnya (96,65).

Tabel 2.48
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor, Tahun 2014-2015 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NTP Gabungan		99,93	98,61	-1,32
1.	Tanaman Pangan	96,41	95,29	-1,12
2.	Hortikultura	96,65	93,28	-3,37
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	102,24	102,99	0,75
4.	Peternakan	104,02	102,79	-1,23
5.	Perikanan	101,46	98,38	-3,07

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

2.4.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, hingga fasilitas perumahan.

a. Perhubungan

Lalu lintas angkutan udara baik kedatangan maupun keberangkatan di Provinsi Kalimantan Timur berkembang cukup pesat. Pada tahun 2010, jumlah penumpang kedatangan ke Kalimantan Timur sebanyak 2.966.090 orang dan keberangkatan sebanyak 2.966.283 orang, sedangkan pada tahun 2014 penumpang kedatangan mencapai 3.791.629 orang dan keberangkatan mencapai 3.955.136 orang.



Tabel 2.49
Lalu Lintas Angkutan Udara
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2014

Tahun	Penerbangan		Penumpang		
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Transit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	44.728	44.715	2.966.090	2.966.283	289.859
2011	42.217	42.345	2.733.253	2.637.144	399.500
2012	50.446	50.500	3.791.788	3.689.629	531.105
2013	46.361	46.507	3.642.539	3.593.262	535.451
2014	43.909	44.068	3.791.629	3.955.136	598.075

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

Sebaliknya, lalu lintas angkutan laut mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana penumpang yang tiba pada tahun 2009 mencapai 1.354.478 orang dan penumpang berangkat mencapai 1.364.964 orang. Sedangkan pada tahun 2013, penumpang angkutan laut yang tiba hanya sejumlah 369.779 orang dan penumpang berangkat menurun hingga 290.611 orang.

Tabel 2.50
Banyaknya Kapal dan Penumpang Angkutan Laut
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2009-2013

Tahun	Kapal		Penumpang	
	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	75.664	75.283	1.354.478	1.364.964
2010	41.893	41.224	676.501	675.754
2011	41.895	42.362	693.487	571.285
2012	28.044	28.130	531.289	494.985
2013	31.726	31.726	369.779	290.611

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

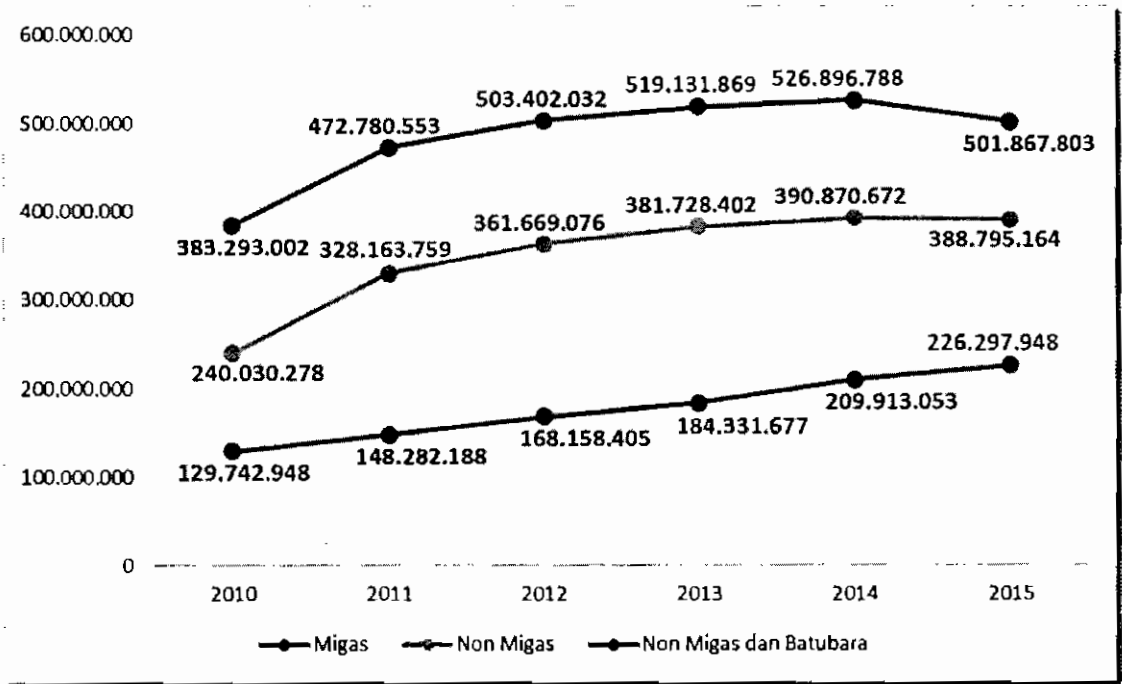
Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat terlihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu,

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.



melambat hingga akhirnya secara umum menurun pada tahun terakhir. Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan besaran 501,87 trilyun rupiah, padahal pada tahun 2010 hingga 2014 terus mengalami kenaikan hingga puncaknya hampir mencapai 526,90 trilyun rupiah. Dominasi PDRB Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor yang terkait dengan batubara dan migas sehingga jika dominasi sektor yang merupakan sumber daya tak terbarukan tersebut dihilangkan maka PDRB Provinsi Kalimantan Timur hanya mencapai 226,30 trilyun rupiah. Namun, meskipun pada tahun 2015 perekonomian Kaltim tumbuh negatif, dimana PDRB Kalimantan Timur dengan migas menurun drastis, akan tetapi nilai PDRB non migas dan batubara tetap meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016



Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013-2015

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.348.936,23	37.452.356,22	38.230.278,69
B	Pertambangan dan Penggalian	286.637.783,21	264.043.485,91	225.379.207,60
C	Industri Pengolahan	93.315.498,55	101.684.330,05	103.984.603,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	107.495,64	120.054,14	191.351,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	184.953	197.645	208.719
F	Konstruksi	34.863.896	39.404.039	41.445.891
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.291.903,29	23.990.760,83	25.395.701,29
H	Transportasi dan Pergudangan	13.392.023,78	15.754.631,35	17.432.908,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.423.162,88	3.809.603,74	4.227.063,53
J	Informasi dan Komunikasi	5.185.903	5.724.716	6.160.397
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.409.905,06	7.906.883,90	8.385.355,78
L	Real Estat	3.868.134	4.421.927	4.803.758
M,N	Jasa Perusahaan	959.043	1.088.747	1.085.805
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.859.471	10.246.463	11.767.430
P	Jasa Pendidikan	5.293.714	6.416.400	7.596.404
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.028.161	2.361.055	2.867.928
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.961.886	2.273.692	2.705.001
Nilai PDRB		519.131.868,86	526.896.788,45	501.867.803,12

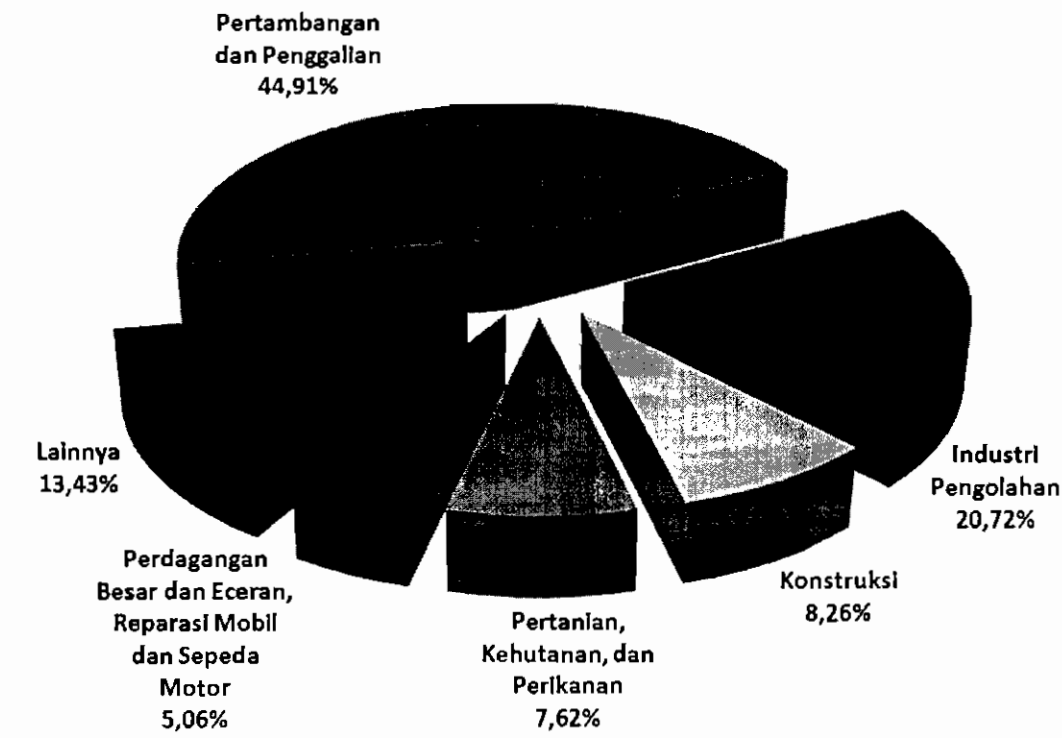
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

b. Struktur ekonomi wilayah

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada beberapa periode terakhir sangat dipengaruhi oleh kontribusi pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan yang terkait batubara dan migas. Tingginya dominasi sumber daya alam tak terbarui terhadap pembentukan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ini akan menimbulkan gejolak perekonomian pada kemudian hari jika tidak ada pengelolaan perekonomian pembangunan secara berkelanjutan.



Gambar 2.10
Struktur Perekonomian
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Dominasi kategori pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan perekonomian daerah mencapai 44,91 persen. Meskipun begitu, dominasi struktur ekonomi kategori pertambangan dan penggalian ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dimana selain terlihat dari kontribusi sektor juga terlihat dari laju pertumbuhan sektoralnya yang mengalami perlambatan bahkan pertumbuhan negatif pada tahun 2015.

Kategori berikutnya yang dominan terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur adalah kategori industri pengolahan yang mencapai 20,72 persen. Dominasi sektor ini juga ada keterkaitannya dengan industri pengolahan batubara dan migas yang cukup tinggi. Selain itu, konstruksi dan pertanian juga memiliki andil dalam pembentukan perekonomian yang tinggi. Cukup tingginya andil kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki harapan yang positif pada perkembangan pembangunan perekonomian berkelanjutan karena selain merupakan sumber daya alam tak terbarui, juga pada sektor ini akan memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat dari perekonomian hulu hingga hilir.

Terlihat pada tabel di bawah ini, bahwa sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian yakni pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan produksi pertambangan dan penggalian



di wilayah Kalimantan Timur mengalami penurunan dan memberikan efek yang cukup tinggi terhadap nilai PDRB daerah. Di sisi lain, beberapa sektor utamanya pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan kontribusi sehingga memberikan beberapa harapan untuk pembangunan perekonomian wilayah agar tidak tergantung kepada sumber daya alam tak terbarui.

Tabel 2.7
Struktur Perekonomian (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013-2015

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,65	7,11	7,62
B	Pertambangan dan Penggalan	55,21	50,11	44,91
C	Industri Pengolahan	17,98	19,30	20,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,72	7,48	8,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,29	4,55	5,06
H	Transportasi dan Pergudangan	2,58	2,99	3,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,66	0,72	0,84
J	Informasi dan Komunikasi	1,00	1,09	1,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,43	1,50	1,67
L	Real Estat	0,75	0,84	0,96
M,N	Jasa Perusahaan	0,18	0,21	0,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,71	1,94	2,34
P	Jasa Pendidikan	1,02	1,22	1,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	0,45	0,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,38	0,43	0,54
Total		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

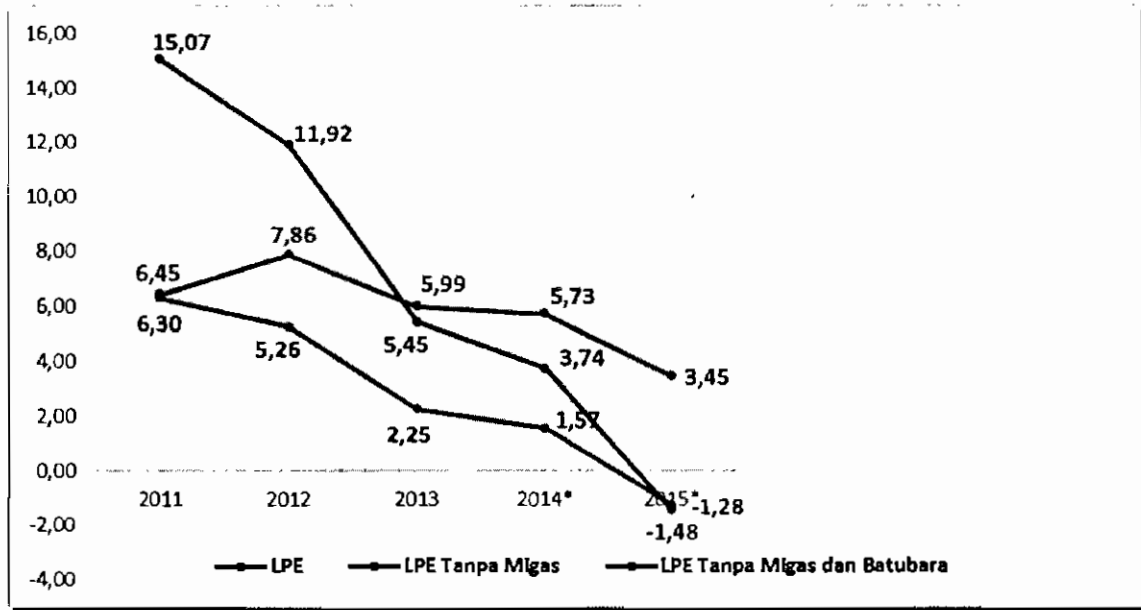
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu titik tolak pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan



masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha yang potensial.

Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2015 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Hal menarik terkait perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur yakni bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur jauh dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, namun kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendapatan nasional sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi sektor migas dan batubara dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada kontribusi PDRB nasional. Namun yang perlu digarisbawahi adalah produksi minyak, gas, dan batubara terus menurun dari tahun ke tahun yang menyebabkan penurunan nilai tambahnya sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun meskipun PDRB masih tergolong tinggi.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami perlambatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 1,57 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,25 persen. Perlambatan ini sebagian besar dikarenakan terjadinya pertumbuhan negatif kategori pertambangan dan



penggalian (-0,56%) karena pada sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam struktur perekonomian daerah. Hal ini terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi jika dikeluarkan sektor yang terkait batubara dan migasnya mencapai 5,73 persen. Sementara pada tahun 2015, ekonomi Kaltim tumbuh negatif sebesar -1,28 persen. Hal ini akibat sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki peran sebesar 44,91 persen laju pertumbuhannya jauh di bawah pertumbuhan tahun 2014 yakni menjadi negatif 54,83persen. Dan jika dilihat berdasarkan kategorinya, maka pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada kategori pengadaan listrik dan gas (25,41%) dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial (12,04%).

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013-2015

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,44	6,72	4,59
B	Pertambangan dan Penggalian	1,85	(0,56)	(4,83)
C	Industri Pengolahan	(1,81)	0,22	2,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,56	18,74	25,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,26	4,55	2,56
F	Konstruksi	4,91	5,98	(1,16)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,26	4,43	0,32
H	Transportasi dan Pergudangan	6,51	7,23	2,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,34	5,18	4,89
J	Informasi dan Komunikasi	9,11	9,65	7,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,37	2,41	2,05
L	Real Estat	8,23	8,29	3,59
M,N	Jasa Perusahaan	8,22	8,29	(3,75)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,74	9,47	4,85
P	Jasa Pendidikan	18,74	15,28	11,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,12	10,90	12,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,24	7,38	8,81
Laju Pertumbuhan Ekonomi		2,25	1,57	(1,28)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

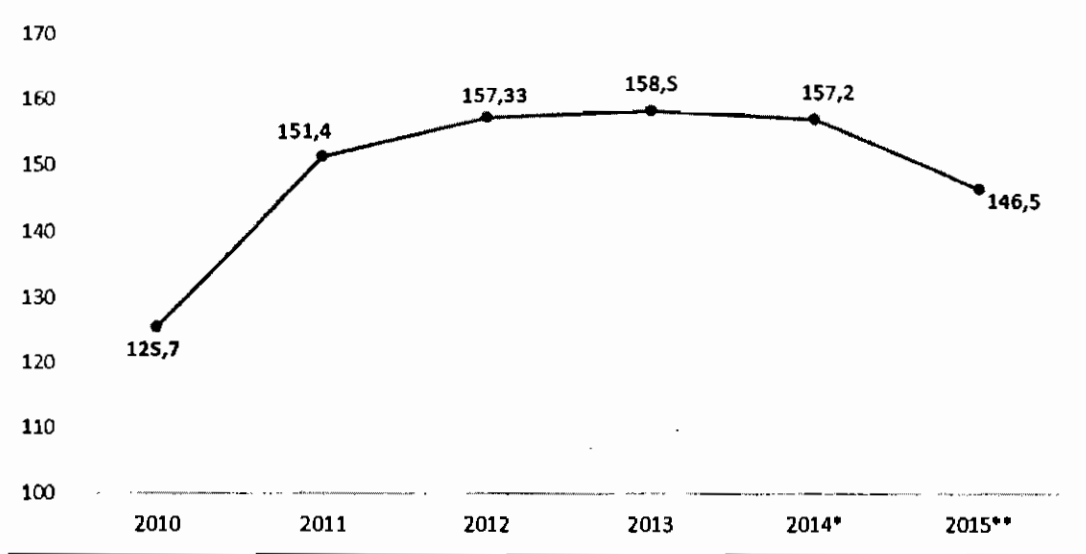


d. PDRB per kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Peningkatan nilai PDRB secara umum akan meningkatkan nilai PDRB per kapita jika jumlah penduduk tidak meningkat secara massive. Begitu juga yang terjadi di Kalimantan Timur, PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 mencapai 157,2 juta rupiah. Dalam lima tahun terakhir, perkembangan PDRB per kapita cukup signifikan dimana pada tahun 2010 sebesar 125,7 juta rupiah. Namun akibat menurunnya PDRB Kalimantan Timur di tahun 2015 maka PDRB per kapita Kalimantan Timur juga turun, menjadi sebesar 146,5 juta rupiah.

Gambar 2.12
PDRB Per Kapita
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah) Tahun Dasar 2010



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

e. Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur

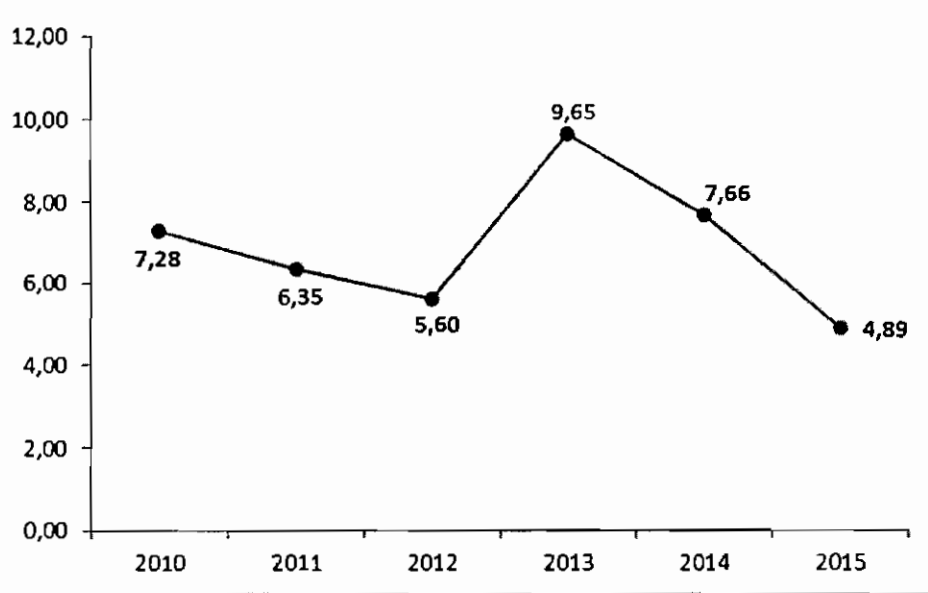
Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi). Dalam



aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.13
Laju Inflasi
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana paling tinggi berada pada tahun 2013 (9,65%) dan paling rendah berada pada tahun 2015 yakni sebesar 4,89 persen. Laju inflasi ini mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir dimana hingga tahun 2016 per kondisi kalender Januari-September, inflasi hanya mencapai 2,71 persen. Selain itu jika dilihat secara agregat, laju inflasi kalender di Provinsi Kalimantan Timur sama dengan inflasi nasional yaitu 2,11 persen.

Rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah yakni terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa, kelangkaan beberapa komoditas baik karena aksi spekulasi/penimbunan barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut, hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional.

Pembentukan laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dibentuk oleh dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Angka yang dihasilkan



masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Berikut inflasi di setiap kota IHK di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Tabel 2.9
Laju Inflasi Menurut Kota IHK (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Tarakan	Kalimantan Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	7,00	7,38	7,92	7,28	6,96
2011	6,23	6,45	6,43	6,35	3,79
2012	4,81	6,41	5,99	5,60	4,30
2013	10,37	8,56	10,35	9,65	8,38
2014	6,74	7,43	11,91	7,66	8,36
2015	4,24	6,26	3,42	4,89	3,35

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

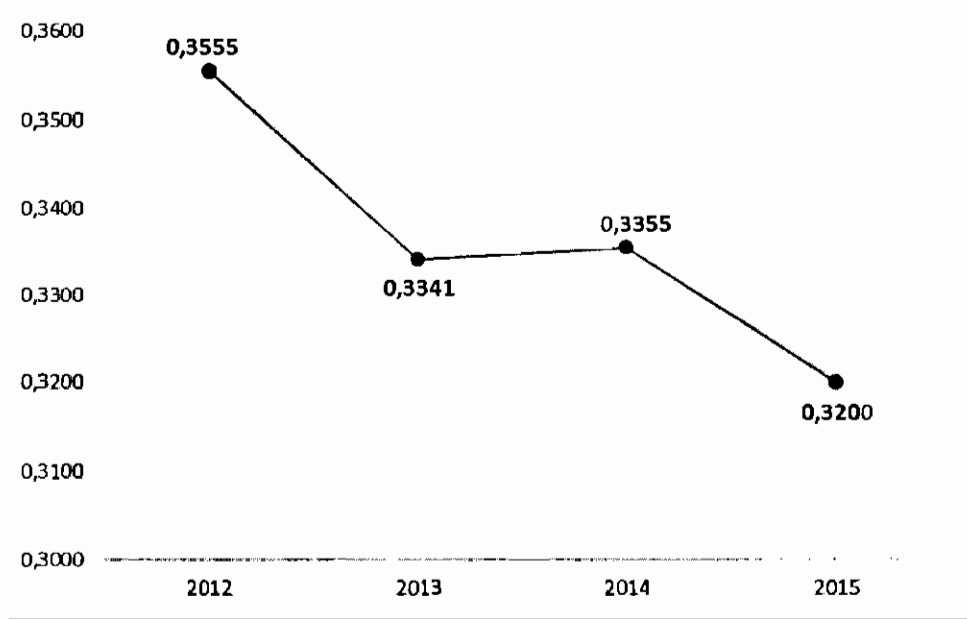
f. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Indeks gini di Provinsi Kalimantan Timur masih berkisar pada angka 0,32 pada tahun 2015 dimana angka ini meningkat dari indeks gini pada tahun sebelumnya yang mencapai 0,34. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pemerataan pendapatan (kesejahteraan masyarakat) mengalami penurunan, namun meski demikian perihal ini masih perlu adanya perhatian khusus *stakeholders* pemerintah provinsi dalam menangani masalah ini. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota tahun 2014, maka pemerataan kesejahteraan paling baik adalah di Kabupaten Kutai Barat (termasuk Mahakam Ulu) dengan indeks gini sebesar 0,2855 sedangkan ketimpangan kesejahteraan paling tinggi berada di Kota Bontang yang mencapai indeks gini sebesar 0,3533.

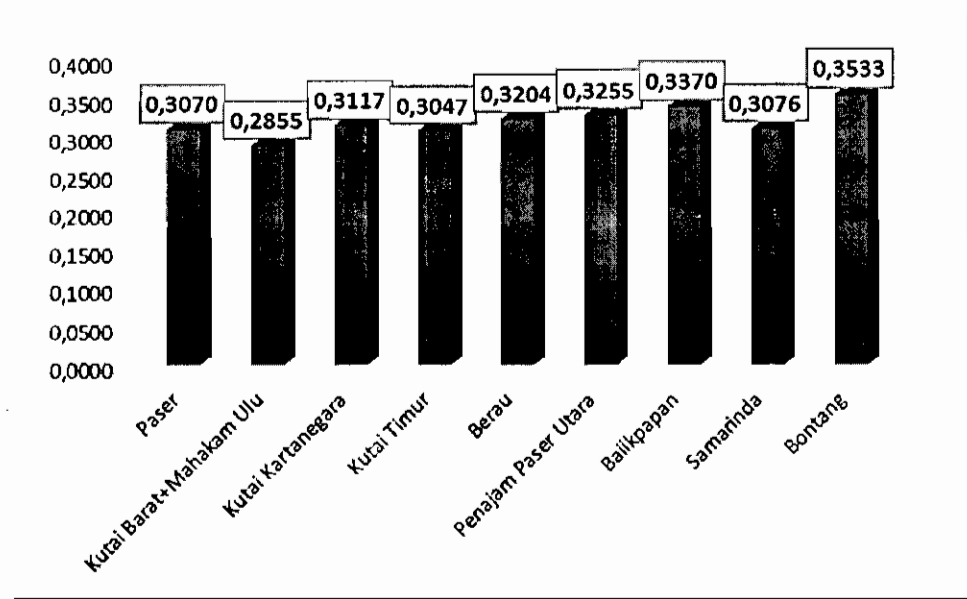


Gambar 2.14
Indeks Gini
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Gambar 2.15
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015 (Data tahun 2015 belum ada dari BPS)



g. Pemerataan pendapatan

Lebih dalam lagi terkait pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan juga dapat dilihat melalui distribusi pembagian pendapatan seperti tabel di bawah ini. Pada tahun 2014, distribusi pendapatan dengan cakupan pendapatan 20 persen tertinggi telah dinikmati oleh 43,06 persen penduduk. Sedangkan pendapatan sedang (40% pendapatan sedang) dinikmati oleh penduduk sebanyak 36,96 persen dan pendapatan 40 persen rendah dinikmati hampir 19,98 persen penduduk Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan persentase penduduk yang memiliki pendapatan 40 persen rendah ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk lebih meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritasnya.

Tabel 2.10
Distribusi Pembagian Pendapatan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2014

No.	Distribusi Pembagian Pendapatan	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	40% Rendah	18,95	19,77	19,98
2.	40% Sedang	36,37	37,67	36,96
3.	20% Tinggi	44,68	42,55	43,06
Total		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

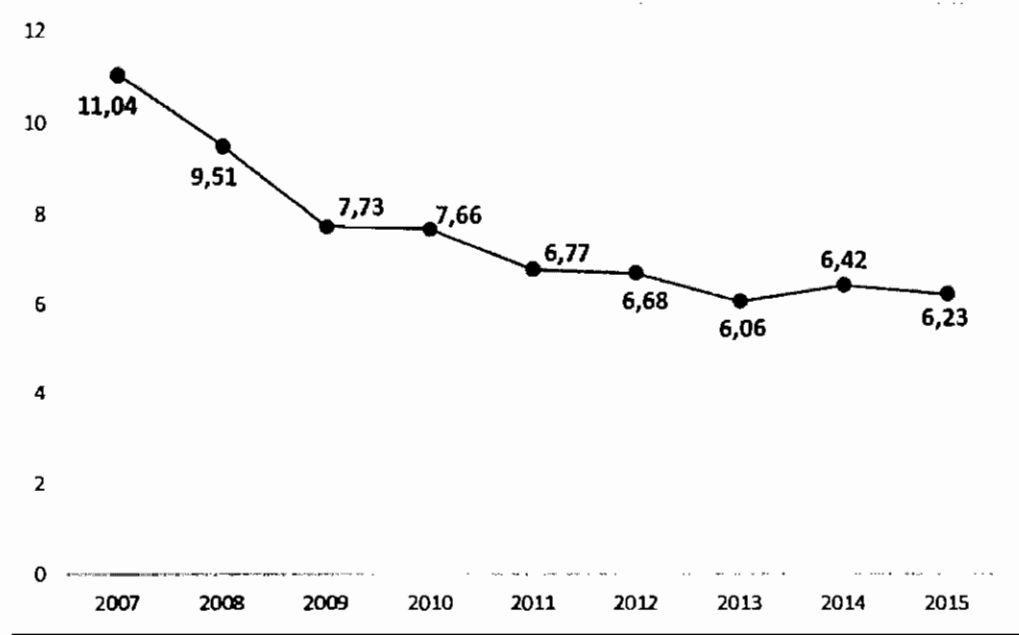
h. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kecenderungan menurun pada setiap periode pembangunan hingga mencapai angka 6,23 persen tingkat kemiskinan pada tahun 2015. Meskipun memiliki kecenderungan menurun, tingkat kemiskinan mulai mengalami kerentanan dalam penurunannya bahkan mengalami kenaikan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013.

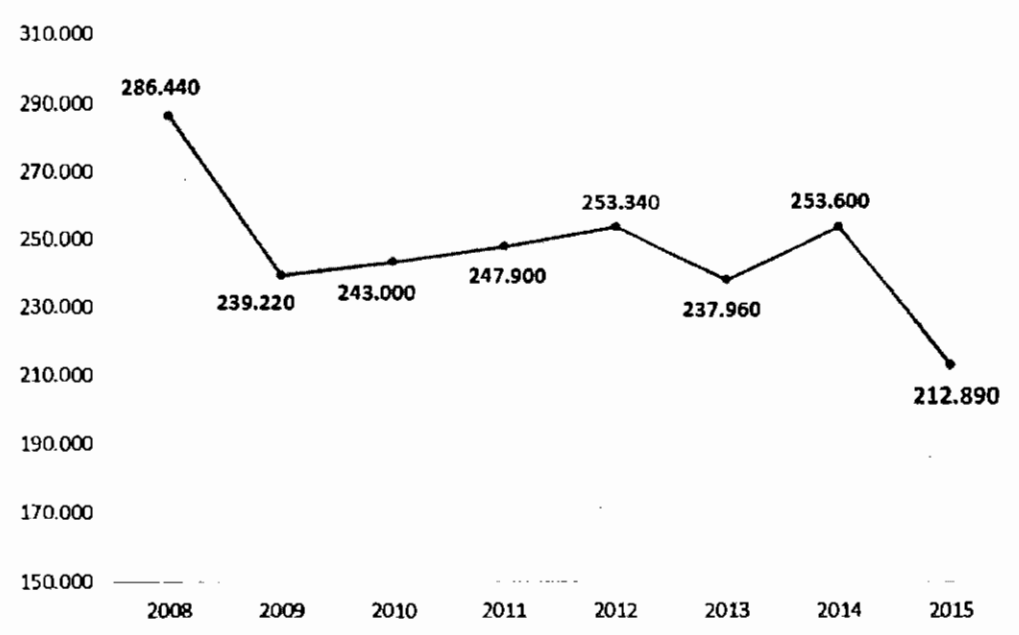


Gambar 2.16
Tingkat Kemiskinan (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2008-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Gambar 2.17
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2008-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016



Lain halnya jika dilihat secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur memiliki trend yang fluktuatif dalam perkembangannya. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 212.890 jiwa, artinya secara absolut jumlah penduduk miskin juga turun jika dibanding pada tahun sebelumnya (253.600 jiwa penduduk miskin). Penurunan tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin ini merupakan capaian positif pemerintah daerah, meskipun begitu perlu menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi sebagai pengayom masyarakat agar selalu memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan setiap realisasinya berjalan seiring dengan program dari pemerintah pusat.

i. Angka kriminalitas yang tertangani

Kriminalitas merupakan salah satu penghambat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menciptakan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Masih cukup tingginya kejadian kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur haruslah memberi suatu pemicu bagi aparat penegak hukum maupun pemerintah provinsi untuk terus melakukan berbagai upaya pencegahan danantisipasi berbagai kasus kriminalitas yang sering terjadi.

Selain itu, perlu juga dilakukan upaya khusus dalam penanganan kasus kriminalitas dimana pada tahun 2015 masih cukup banyak kasus kejahatan yang belum ditangani secara optimal. Kasus kriminalitas yang paling minim penanganan kasusnya adalah pencurian dimana pencurian ranmor hanya 34 persen kejadian yang tertangani, kemudian kasus pencurian dengan pemberatan hanya sebesar 37 persen kejadian yang tertangani, dan pencurian dengan kekerasan hanya sebesar 39 persen kasus yang tertangani. Masih minimnya persentase kejadian yang tertangani ini menjadi sebuah tantangan khusus bagi aparat penegak hukum untuk lebih fokus dalam menuntaskan berbagai kasus kriminalitas untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram.

Tabel 2.11
Dominasi Kasus Kriminalitas
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No	Kasus	Kejadian	Tertangani	% Kejadian tertangani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembunuhan	39	29	74,36
2	Penganiayaan Berat	460	333	72,39
3	Pencurian dengan Kekerasan	181	70	38,67
4	Pencurian dengan Pemberatan	1.161	424	36,52
5	Pencurian Ranmor	1.365	467	34,21
6	Pemeriksaan	18	16	88,89
7	Pembakaran	41	19	46,30
8	Pemeriksaan	168	127	75,50



No	Kasus	Kejadian	Tertangani	% Kejadian tertangani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	142	113	79,58

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

2.2.2. Fokus kesejahteraan masyarakat

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berkecakupan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

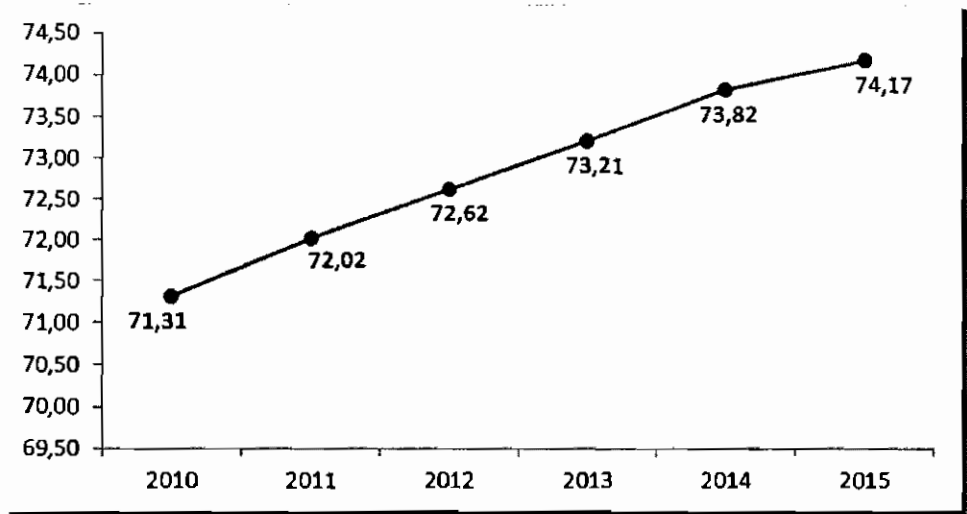
Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programmes (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, IPM dihitung dengan menggunakan metodologi baru utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), dan Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur memiliki peringkat yang cukup tinggi dalam cakupan Nasional dimana menduduki ranking ketiga nasional dalam capaiannya. Pada tahun 2015, angka IPM mencapai 74,17 dimana pada tahun sebelumnya



mencapai 73,82. Peningkatan IPM di setiap tahunnya mengindikasikan optimalnya pembangunan sumber daya manusia di wilayah Kalimantan Timur melalui pemerataan berbagai fasilitas dan pelayanan yang menunjang peningkatan daya saing manusia.

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, IPM tertinggi adalah di Kota Bontang yang mencapai 78,78 dan diikuti oleh Kota Samarinda dengan IPM mencapai 78,69. Selanjutnya IPM tertinggi ketiga berada di Kota Balikpapan, sehingga wilayah dengan IPM tinggi diduduki oleh wilayah perkotaan. Sedangkan wilayah kabupaten, memiliki kesenjangan IPM yang cukup jauh dengan wilayah kota dimana IPM tertinggi di kabupaten adalah Kabupaten Berau dengan IPM sebesar 72,72 dan terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan IPM sebesar 64,89.

Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No	Kab/Kota	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Paser	71,98	12,65	8,12	9.900	70,30
2	Kutai Barat	72,19	12,30	8,02	9.380	69,34
3	Kutai Kartanegara	71,60	13,25	8,68	10.250	71,78
4	Kutai Timur	72,39	12,43	8,69	9.704	70,76
5	Berau	71,31	13,17	8,62	11.572	72,72
6	Penajam Paser Utara	70,53	12,02	7,59	10.913	69,26
7	Mahakam Ulu	71,13	12,03	7,36	7.162	64,89



No	Kab/Kota	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Balikpapan	73,95	13,46	10,44	13.705	78,18
9	Samarinda	73,65	14,17	10,31	13.825	78,69
10	Bontang	73,69	12,77	10,38	15.980	78,78

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

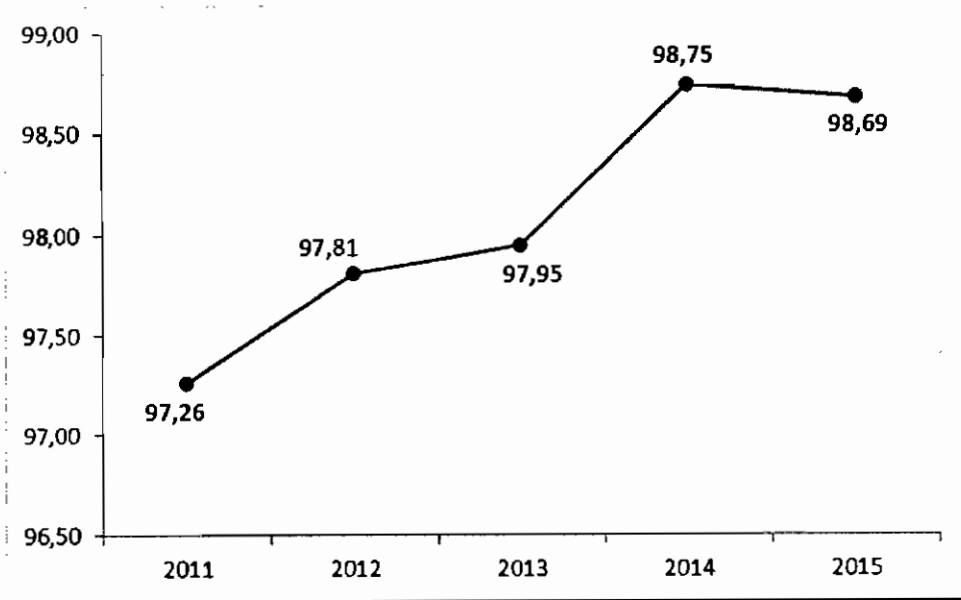
b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

- Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 mencapai 98,69 persen. Hal ini mengindikasikan semakin optimal dan efisiensinya program pemerintah dalam pemberantasan buta huruf di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai pondasi utama dalam pendidikan, melek huruf harus selalu digencarkan program dan kegiatannya untuk mengimplementasikan potensi minimal sumber daya manusia dalam mengenyam dunia pendidikan.

Gambar 2.19
Angka Melek Huruf (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



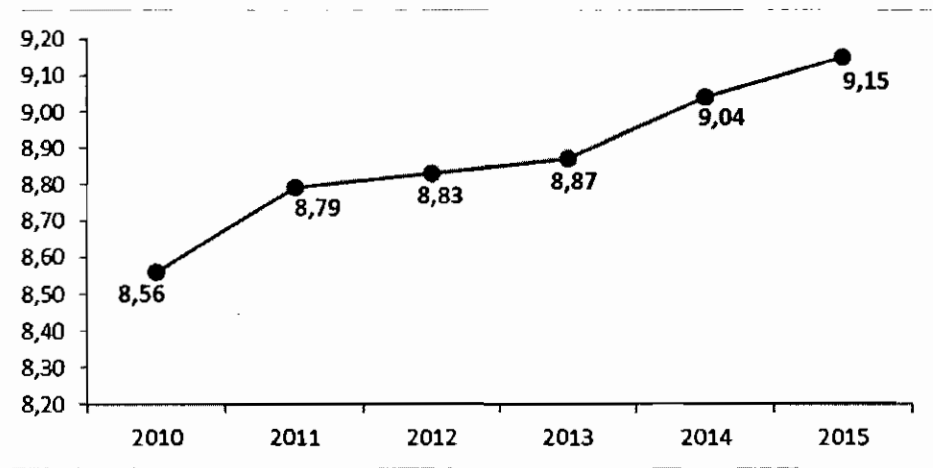
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016



▪ Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir (2015) mencapai 9,15 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk di Provinsi Kalimantan Timur rata-rata telah bersekolah hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) awal kelas 1 semester 1.

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



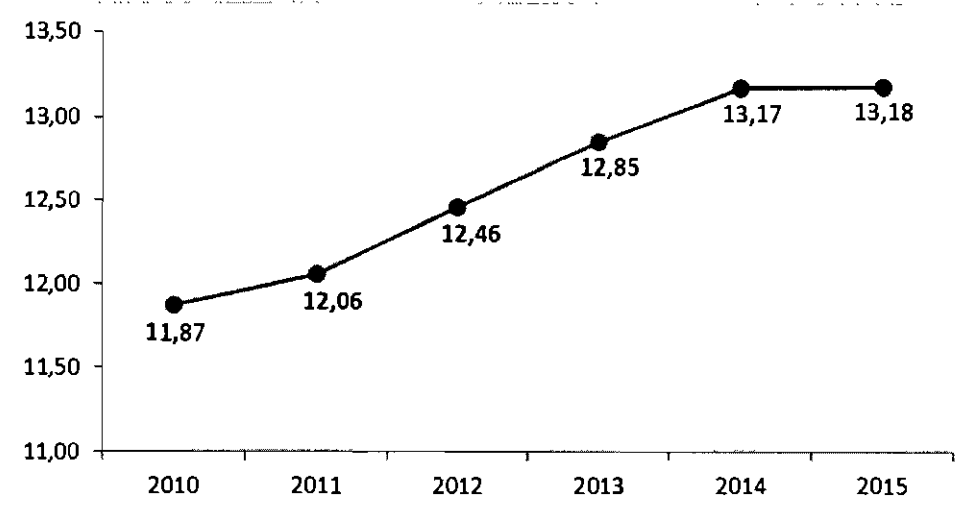
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

▪ Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang mengimplementasikan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.



Gambar 2.20
Harapan Usia Lama Sekolah (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Di Provinsi Kalimantan Timur, Harapan Lama Sekolah cukup tinggi mencapai 13,18 tahun pada tahun 2015. Hal ini sangat baik karena akan menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

▪ Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan jumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umurnya. Di Provinsi Kalimantan Timur, APK untuk jenjang Sekolah Dasar lebih dari 100 persen yang mengindikasikan cukup tingginya penduduk yang mengenyam pendidikan SD bahkan pada usia diluar 7-12 tahun. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah semakin tinggi jenjang pendidikan, maka APK akan semakin menurun yang mengindikasikan menurunnya atensi penduduk dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2015

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	104,83	107,76	107,57	111,04	112,61
SLTP	97,62	93,24	91,06	91,49	97,90
SLTA	73,00	80,08	82,21	85,54	90,31



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang mengindikasikan jumlah penduduk suatu wilayah yang mengenyam jenjang tertentu sesuai dengan batasan usia sekolahnya. Di setiap jenjang pendidikan, terjadi kenaikan APM yang mengindikasikan meningkatnya penduduk pada usia sekolah untuk mengenyam jenjang pendidikan sesuai tingkatan usia sekolahnya. Namun, seperti pada APK, semakin meningkat jenjang pendidikan maka semakin menurun APM. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dalam merumuskan program prioritas pembangunan bidang pendidikan agar lebih berdaya saing dan optimal.

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2015

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	92,23	94,37	95,91	96,70	97,00
SLTP	72,40	74,37	76,10	78,73	79,06
SLTA	54,58	59,75	62,22	67,03	67,78

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

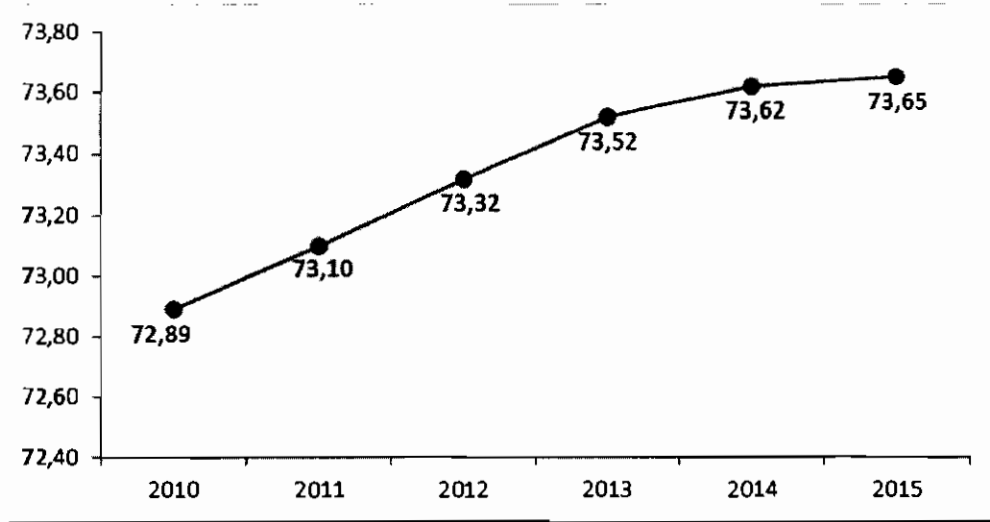
c. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 mencapai 73,62 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 73,65 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2015 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun.



Gambar 2.21
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2014

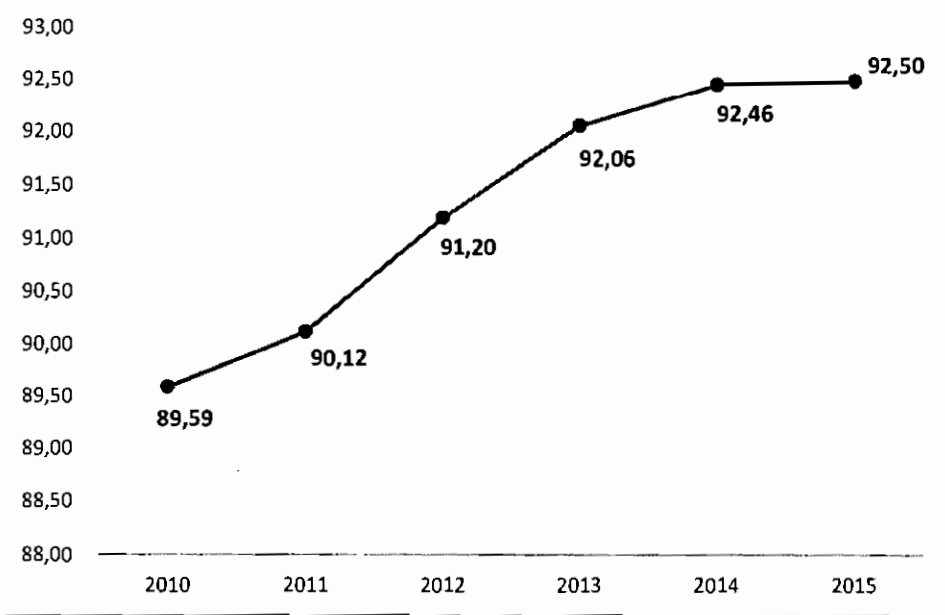


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

d. Ketenagakerjaan

Pada fokus kesejahteraan masyarakat di bidang ketenagakerjaan akan menyoroti perihal penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu.

Gambar 2.22
Rasio Penduduk yang Bekerja (Tingkat Kesempatan Kerja) (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015 (Data diolah)

Secara konseptual, seharusnya penduduk yang bekerja di suatu wilayah akan tercakup cukup banyak. Begitu pula dengan penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Timur, terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja (Tingkat Kesempatan Kerja) di setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 persentase penduduk yang bekerja mencapai 92,50 persen dari jumlah angkatan kerja.

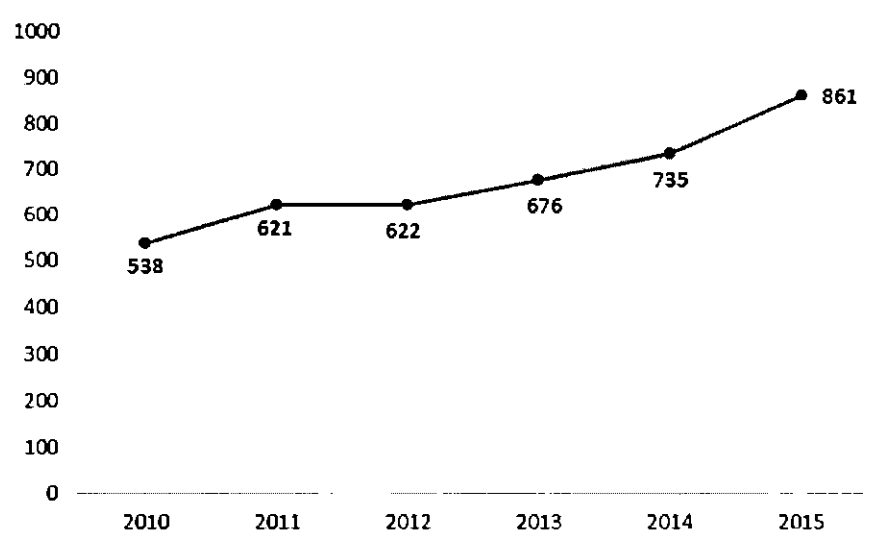
2.2.3. Fokus seni budaya dan olahraga

a. Kebudayaan

Sanggar seni dan budaya di Kalimantan Timur mencakup grup sanggar kesenian, sanggar seni ukir, sanggar seni lukis/gambar dan sanggar seni teater. Capaian beberapa tahun lalu kaitannya pengembangan kebudayaan cukup rendah yang disebabkan sanggar-sanggar kesenian di Kabupaten/Kota masih tidak aktif, selain itu sanggar-sanggar kesenian yang tidak terdaftar walaupun keberadaannya tetap eksis sampai sekarang, serta adanya pembaharuan data organisasi seni di daerah yang belum optimal. Namun semakin hari, program seni budaya mulai diperhatikan dan mendapat porsi lebih dalam pelaksanaan pembangunan yang terlihat dari peningkatan jumlah grup kesenian daerah meskipun gedung kesenian daerah mengalami penurunan.

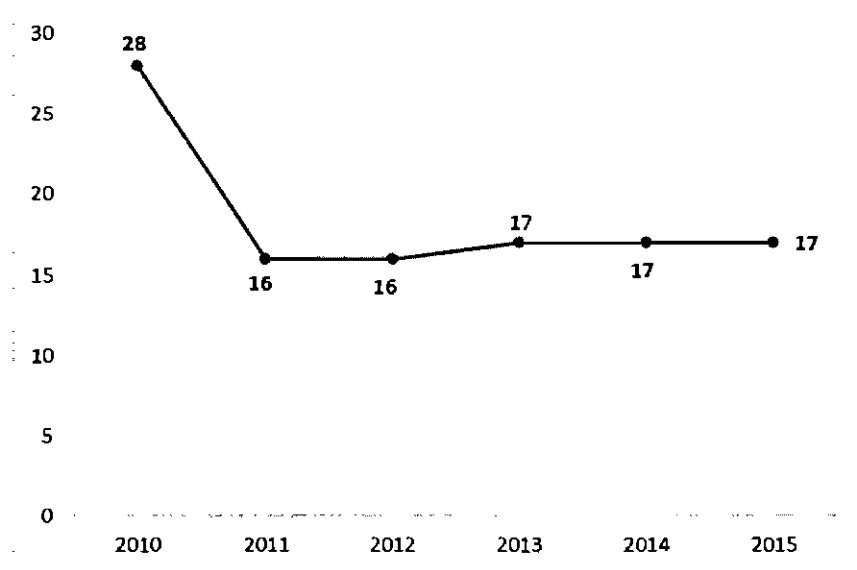


Gambar 2.23
Jumlah Grup Kesenian
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.24
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Berikut perkembangan beberapa data kesenian dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur:



Tabel 2.15
Data Seni Budaya Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015

Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Jumlah sanggar seni dan seni budaya yang terbina	593	621	623	676	735	861
Jumlah benda cagar budaya digali dan dilestarikan	36	64	170	190	242	248
Jumlah masyarakat yang mengenal seni budaya daerah	-	4.050	5.050	7.000	9.000	11.000
Jumlah terbinanya seni budaya daerah	-	105	200	200	340	340
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-	16	16	17	17	17
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	47	49	56	55	60
Pelatihan sarjana penggerak pembangunan perdesaan	41	50	55	20	25	40
Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	44	200	1.361	200	-	54

Sumber: Renstra Disparbud dan Dispora Provinsi Kalimantan Timur, 2015

b. Pemuda dan Olahraga

Di bidang pemuda dan olahraga, tingkat capaian olahraga daerah cukup menggembirakan dimana pada tahun 2015 telah memiliki berbagai jenis olahraga unggulan yang mencapai 23 cabang olahraga dengan total atlet sebanyak 816 atlet. Dalam meningkatkan prestasi olahraga tersebut, dibentuklah lembaga olahraga sebanyak 55 unit dan pembangunan sarana/prasarana olahraga sebanyak 423 unit.

Tabel 2.16
Statistik Cabang Olahraga Unggulan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

Cabang Olahraga	Jumlah Lembaga	Jenis Olahraga Unggulan	Jumlah Atlet	Sarana/Prasarana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beladiri	11	9	260	15
Terukur	19	13	397	24
Permainan	14	3	156	5
Beregu	11	6	250	6
Total	55	31	1063	50

Sumber: SIDATA 2015



2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

2.3.1. Fokus layanan urusan wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Provinsi Kalimantan Timur memang sudah mulai ada perbaikan, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, hingga aksesibilitas wilayah. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah provinsi hingga saat ini.

a. Pendidikan

▪ Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS yang terus mengalami trend kenaikan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang memang seharusnya bersekolah semakin meningkat.

Keberhasilan peningkatan angka partisipasi pendidikan tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan pemerintah secara langsung dapat dilihat dari pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah, pemberian beasiswa kepada pelajar, hingga peningkatan insentif tenaga pengajar. Sedangkan dukungan secara tidak langsung dapat dilihat pada peningkatan sarana prasarana pendukung pendidikan seperti perbaikan jalan menuju akses pendidikan, peningkatan jangkauan listrik ke desa-desa terpencil, dan sebagainya.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2014

Usia Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7-12	98,68	99,17	99,46	99,33	99,63
13-15	92,78	96,53	96,62	97,99	97,92
16-18	67,60	71,16	73,10	80,50	80,68

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2015



▪ Rasio Guru-Murid dan Murid-Sekolah

Rasio ini menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan dan sarana pendidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Khusus di Provinsi Kalimantan Timur, pemenuhan jumlah guru maupun jumlah sekolah terhadap murid sudah memenuhi syarat dan terbilang lebih dari cukup. Namun permasalahan mendasar pada pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran pelayanan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan pendidikan dan program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat.

Tabel 2.18
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.649	363.481	22.079	16,46	220,43
Swasta	193	49.423	3.053	16,19	256,08
MI	114	20.889	1.906	10,96	183,24
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	416	123.976	7.643	16,22	298,02
Swasta	182	28.293	2.119	13,35	155,46
MTs	104	16.222	1.593	10,18	155,98
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	135	53.351	3.560	14,99	395,19
Swasta	76	9.186	857	10,72	120,87
MA	60	7.435	1.023	7,27	123,92
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	82	40.887	2.943	13.89	498,62
Swasta	130	28.064	1.918	14.63	215,88

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

▪ Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 9 perguruan tinggi dan 45 akademi baik negeri maupun swasta sebagai bagian dari



sarana pendidikan masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih baik. Pada tahun 2014, jumlah mahasiswa yang terdaftar di berbagai akademi dan perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 95.642 mahasiswa.

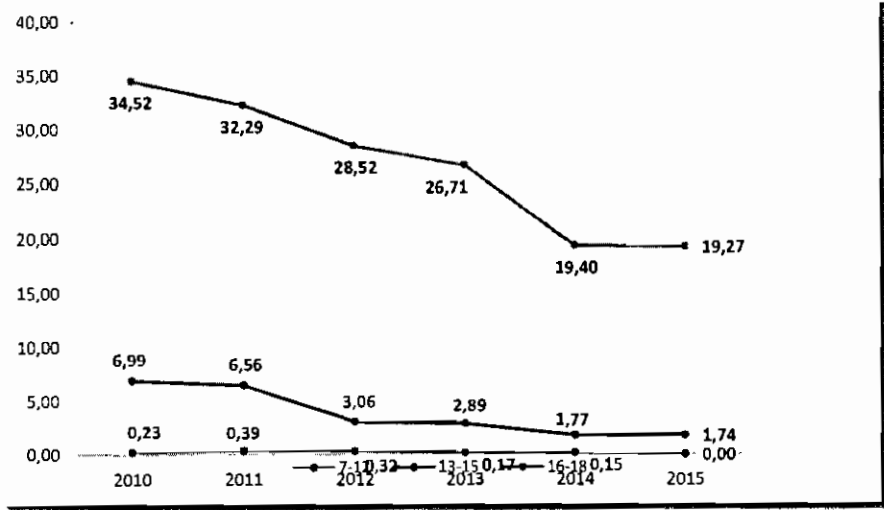
Tabel 2.19
Indikator Perguruan Tinggi
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Kategori	Jumlah PT/Akademi	Jumlah Fakultas/Jurusan	Jumlah Mahasiswa
(1)	(2)	(3)	(4)
Perguruan Tinggi			
Negeri	2	22	41.690
Swasta	7	11	24.882
Akademi			
Negeri	5	24	6.117
Swasta	40	0	22.953
Jumlah	54	57	95.642

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

Angka Putus Sekolah

Gambar 2.25
Angka Putus Sekolah (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2016



Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur semakin lama semakin menurun meskipun pada jenjang pendidikan menengah ke atas (SMA) masih cukup tinggi. Pada tahun 2015, angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar berhasil mencapai nol persen, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) mencapai 1,74 persen, sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas (SMA) mencapai 19,27 persen.

▪ Angka kelulusan

Pada tahun 2015, angka kelulusan di setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, hingga SMA sederajat mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan program peningkatan kelulusan siswa telah berhasil dan harus dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten agar ke depannya prestasi ini dapat dipertahankan.

Tabel 2.20
Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2015

Tahun Ajaran	Jenjang Pendidikan						
	SD	SLTP/MTs/SMP T	SMU/MA (IPA)	SMU/MA (IPS)	SMU/M A (Bahasa)	SMU/M A (Agama)	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2012/2013	100,00	99,74	99,94	99,40	99,23	100,00	99,64
2013/2014	100,00	99,98	99,55	99,20	100,00	96,82	99,90
2014/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2015/2016	100,00	99,99	99,96	99,80	100,00	100,00	99,97

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur, tahun 2016

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan ke depannya baik secara langsung maupun tidak langsung

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Peningkatan berbagai pelayanan kesehatan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Meskipun begitu, perlu adanya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan



fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2.21
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2015

No.	Fasilitas Kesehatan	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rumah Sakit	42	43	42	46
2	Tempat Tidur RS	4538	4538	4745	4.873
3	Rumah Sakit Swasta	25	29	17	26
4	Dokter Umum	794	1007	908	1.113
5	Dokter Gigi	262	290	269	320
6	Dokter Spesialis	276	569	354	347
7	Tenaga Medis RS	471	1341	1195	1.189
8	Perawat RS	1627	3791	3027	4.573
9	RS Bersalin	13	14	18	10
10	Puskesmas	172	186	180	180
11	Pustu	568	576	661	689
12	Dokter Puskesmas	513	396	607	607
13	Pedagang Besar Farmasi	41	44	46	44
14	Apotek	371	398	435	1561
15	Persentase Persalinan dengan tenaga medis	79,48	90,86	88,76	91,26

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

c. Pekerjaan umum

Dalam bidang pekerjaan umum, aksesibilitas wilayah terkait perhubungan darat masih menjadi “pekerjaan rumah” yang cukup penting untuk diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jalan sebagai penghubung utama antar wilayah khususnya daerah terpencil masih belum optimal pengadaannya bahkan kondisi jalan masih banyak yang belum layak. Meskipun sepanjang 5.431,97 km panjang jalan berupa aspal, akan tetapi masih terdapat jalan tanah yang cukup panjang yakni mencapai 2.882,83 km. Oleh karena itu, perlu adanya porsi lebih terkait pengadaan jalan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitasnya agar infrastruktur perhubungan dapat terealisasi dengan baik.



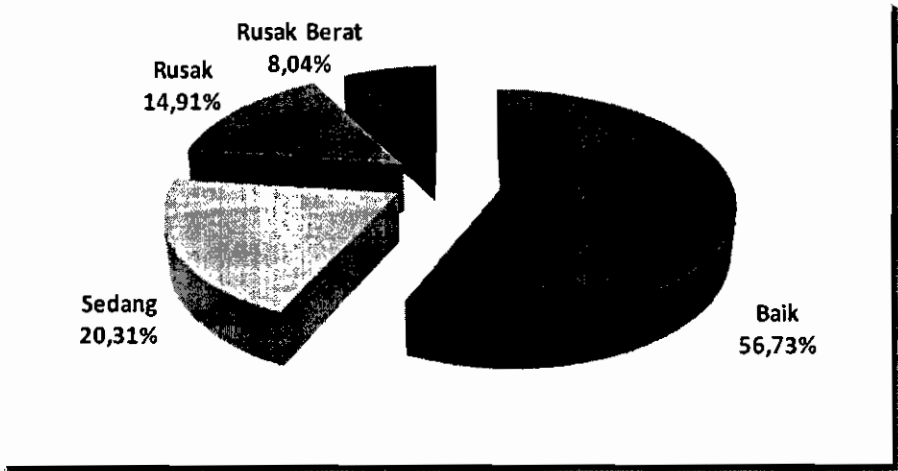
Tabel 2.22
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No.	Status Jalan	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan Negara	1.357,25	0,00	73,16	63,27	1.493,68
2	Jalan Provinsi	1.022,45	281,58	182,80	101,85	1.588,68
3	Jalan Kabupaten	3.052,27	3.416,89	2.626,87	2.040,15	11.136,18
4	Total	5.431,97	3.698,47	2.882,83	2.205,27	14.218,54

Sumber: Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat kondisi jalan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, masih terdapat cukup panjang jalan yang kondisinya rusak (14,91%) bahkan rusak berat (8,04%). Sedangkan jalan pada kondisi baik mencapai 56,73 persen panjang jalan secara keseluruhan.

Gambar 2.26
Persentase Panjang Jalan Berdasarkan Kondisinya
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016

Tabel 2.23
Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan Jalan (Km)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No.	Status Jalan	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan Negara	912,89	525,53	41,23	14,01	1.493,66
2	Jalan Provinsi	586,78	526,98	259,89	215,03	1.588,68
3	Jalan Kabupaten	6.385,82	1.770,57	1.771,53	888,69	10.816,61



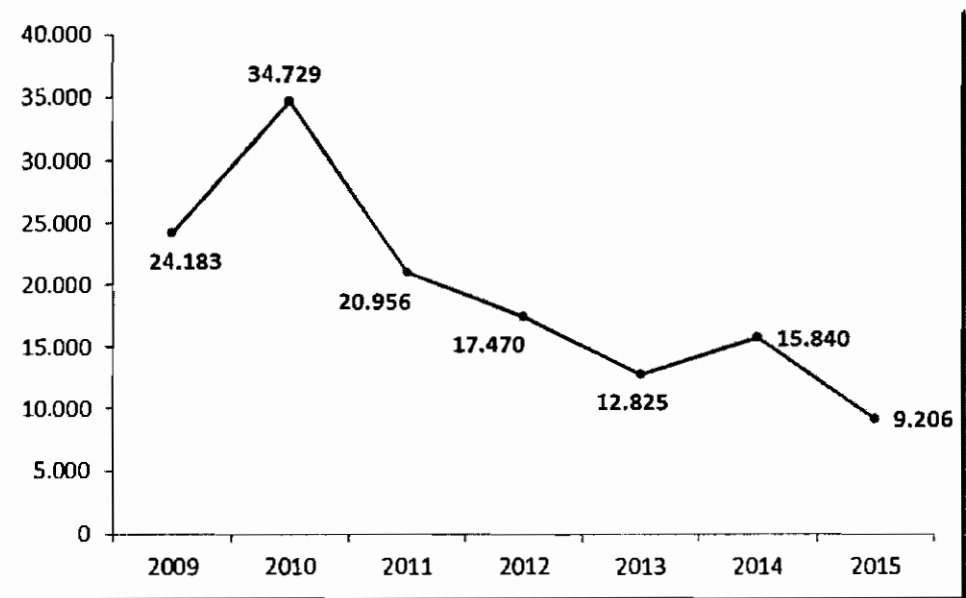
4	Total	7.885,49	2.823,08	2.072,65	1.117,73	13.898,95
---	-------	----------	----------	----------	----------	-----------

Sumber: Dinas PU Provinsi Kaltim, Tahun 2016

■ Irigasi

Salah satu program pemerintah provinsi adalah ingin mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pertanian seperti kondisi irigasi. Kondisi irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kecenderungan menurun sehingga perlu adanya restrukturisasi irigasi kembali oleh pemerintah daerah.

Gambar 2.27
Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2009-2015

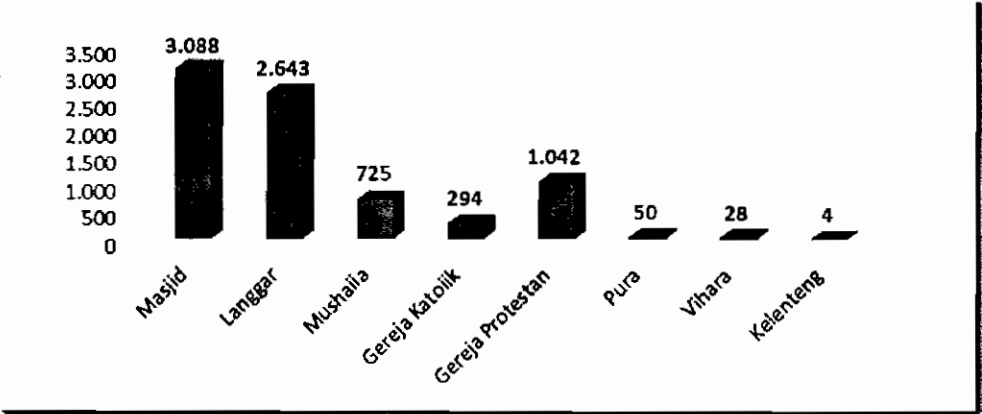


Sumber: Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, 2016

■ Tempat ibadah

Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur memiliki keanekaragaman agama yang dianut. Oleh karena itu, tempat peribadatan masyarakat juga cukup beragam. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur mayoritas memeluk agama muslim sehingga sebagian besar tempat ibadah adalah masjid/langgar/musholla yang secara total mencapai 6.456 unit. Selain itu, terdapat pula gereja katolik (294 unit), gereja protestan (1.042 unit), pura (50 unit), vihara (28 unit), dan kelenteng (4 unit).

Gambar 2.28
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Jenisnya (Unit)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: Sidata Kaltim, 2016

d. Perumahan

Salah satu infrastruktur yang menunjukkan kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan masyarakat adalah perumahan yang layak untuk dihuni. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu secara konsisten melakukan pengawasan dan monitoring dalam hal pengadaan perumahan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan pendidikan maupun pengetahuan terhadap masyarakat terkait perumahan yang layak huni baik dari segi kesehatan, sanitasi, dan sebagainya

Di Provinsi Kalimantan Timur, perumahan layak huni sudah meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 mencapai 606.322 unit.

Tabel 2.24
Perumahan Layak Huni
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah rumah layak huni	679.369	533.400	605.607	605.957	606.322
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	89,30	87,00	85,22		
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	1,51	1,49	1,47		
4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (%)	17,44	17,44	17,44		

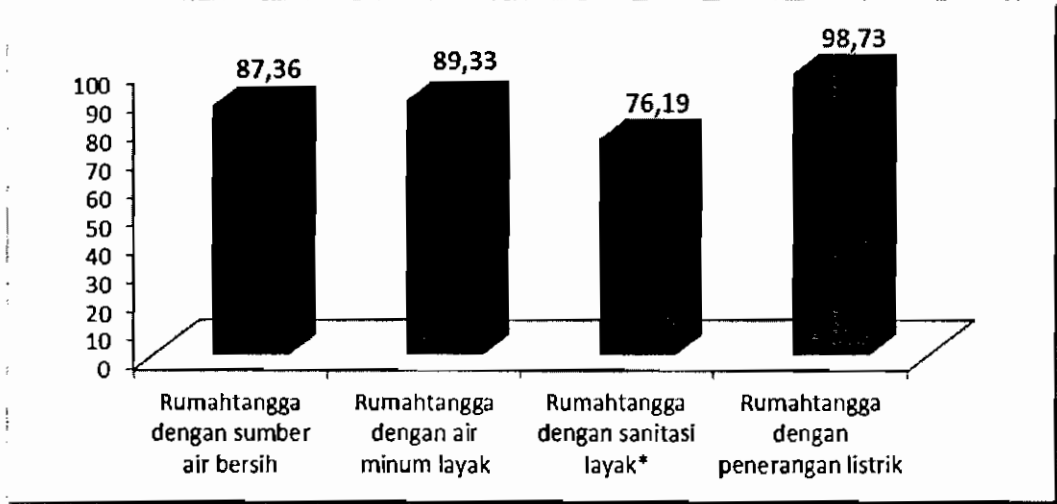
Sumber: Dinas PU, 2015

Perumahan layak huni dapat diindikasikan melalui berbagai indikator perumahan seperti gambar di atas seperti, persentase rumahtangga dengan sumber air bersih di Provinsi



Kalimantan Timur mencapai 87,36 persen dengan air minum yang layak mencapai 89,33 persen. Terkait fasilitas listrik, rumahtangga dengan penerangan listrik di Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai 98,73 persen.

Gambar 2.29
Indikator Perumahan (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016

* Data tahun 2014

e. Perencanaan pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan perda merupakan salah satu alat untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Dokumen	Nomor Perda	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	RPJPD Tahun 2005-2025	Perda No.15 Tahun 2008	Ada
2.	RPJMD Tahun 2009-2013	Perda No. 04 Tahun 2009	Ada
3.	RKPD Tahun 2016	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 30 Tahun 2015	Ada

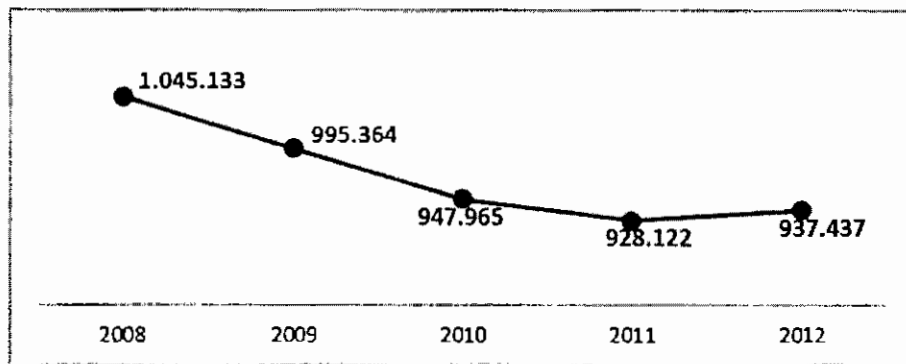
Sumber: Bappeda, 2016



f. Perhubungan

Jumlah orang yang menggunakan fasilitas angkutan umum di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan tiap tahunnya meski angkutan umum jumlahnya tetap. Penurunan disebabkan beralihnya pengguna kendaraan umum ke kendaraan pribadi.

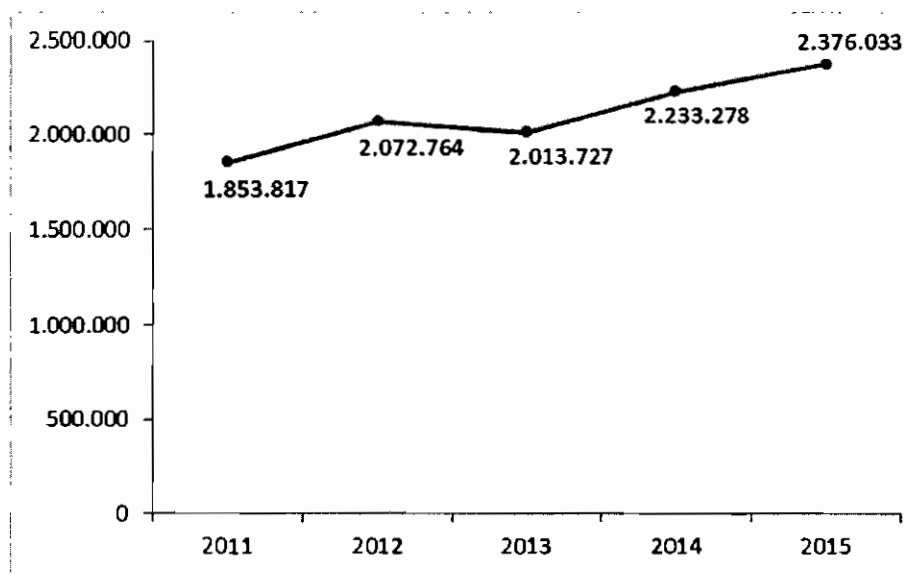
Gambar 2.30
Jumlah Pengguna Angkutan Umum
di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2007-2012



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2012

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur cukup pesat dimana terjadi kenaikan di setiap tahunnya dan mencapai 2.640.301 unit kendaraan bermotor pada tahun 2015. Meskipun jumlah kendaraan bermotor naik, namun jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan semakin berkualitasnya pengemudi kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.31
Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur, 2016



Sektor perhubungan udara merupakan transportasi unggulan dibandingkan transportasi lainnya. Adanya kemudahan akses transportasi udara mempengaruhi investasi ekonomi melalui peningkatan mobilisasi orang, barang dan jasa serta dukungan pengembangan pariwisata.

Saat ini, transportasi melalui udara sangat memegang peranan penting dalam sektor perhubungan. Banyaknya investasi berbagai sektor menjadi daya tarik ke Provinsi Kalimantan Timur misalnya sektor perminyakan, batubara dan lainnya, memerlukan dukungan layanan transportasi udara yang tinggi antar daerah asal dan tujuan terutama untuk tujuan Jakarta sebagai pusat sebagian besar perusahaan investor. Dengan demikian, fungsi transportasi udara untuk kegiatan penunjang pembangunan sangat vital.

Dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui angkutan udara, maka di Provinsi Kalimantan Timur telah dilengkapi infrastruktur maupun sarana prasarana pelabuhan udara sebanyak 12 unit. Berikut pelabuhan udara yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Timur:

- ✓ Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Sepinggan)
- ✓ Temindung
- ✓ Kalimarau
- ✓ Long Bawan
- ✓ Data Dawai
- ✓ Long apung
- ✓ Melak
- ✓ Bontang
- ✓ Badak
- ✓ Tanjung Bara
- ✓ Tanjung Santan
- ✓ Senipah

g. Lingkungan hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

Tanpa disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan.



Tabel 2.26
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Penduduk berakses air minum	65,71	75,20	-	-	78,48	-
2.	Penegakan hukum lingkungan	10	17	27	23	19	27
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (EQI)	62,22	70,75	74,07	74,07	78,29	81,97
4.	Emisi Gas Buang (CO2 eq)	5,04 Juta	5,68 Juta	6,41 Juta	6,41 Juta	64,6 Juta	-
5.	Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)	6,71	7,02	7,15	7,6	3,04	2,63
6.	Indeks kualitas udara	92,30	93,12	92,49	-	96,20	79,68
7.	Indeks tutupan hutan	87,63	89,29	83,69	80,93	83,11	79,68
8.	% Penanganan sampah	-	75,24 %	77,5 %	78,5 %	72,29 %	67,62 %
9.	% Sampah terangkut per hari	-	-	65,95 %	64,61 %	71,19 %	65,62 %
10.	% Pembentukan BPBD	33,33 %	46,6 %	-	-	-	-
11.	Luas lahan hutan kota	141,0 Ha	196,9 Ha	211,9 Ha	211,9 Ha	-	1.107,8 Ha

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

h. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan dan catatan sipil Provinsi Kalimantan Timur memiliki peranan penting dalam menjalankan administrasi kependudukan daerah. Berikut indikator kependudukan dan catatan sipil yang perlu diperhatikan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.



Tabel 2.27
Indikator Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2.	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Kepemilikan KTP			1.150.831	1.857.699	1.092.362	1.149.116
4.	Kepemilikan Akte Kelahiran		1.502.799	1.429.810	1.351.261	695.301	1.071.135
5.	Banyaknya pernikahan	29.832	32.430	25.165	32.169	25.894	17.819

Sumber: Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur

i. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam melaksanakan pembangunan periode saat ini, perlu adanya fokus pemerintah pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dikarenakan isu kesetaraan gender menjadi perhatian dunia internasional dimana penggalakan emansipasi wanita akan memberikan suatu akselerasi positif bagi pembangunan daerah. Sedangkan perlindungan terhadap anak menjadi penting mengingat masih cukup tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan minimnya hak yang diberikan kepada anak-anak sesuai dengan batasan usianya.

- Perempuan di lembaga pemerintahan/dewan

Persentase jumlah anggota legislatif perempuan di Provinsi Kalimantan Timur baik DPRD kabupaten/kota maupun DPRD tingkat I Provinsi Kalimantan Timur masih cukup rendah dimana total hanya sebesar 14,93 persen.



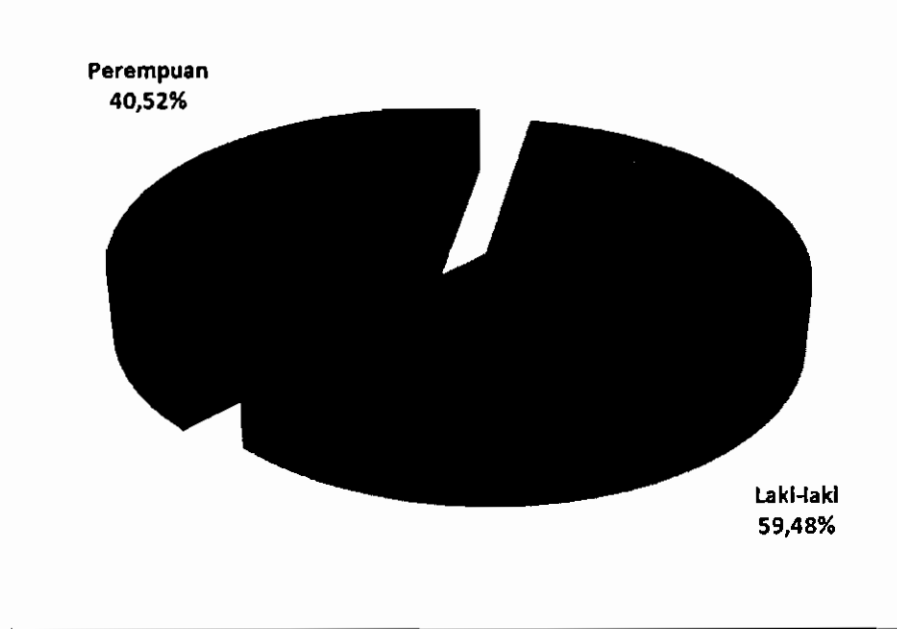
Tabel 2.28
Jumlah Anggota Legislatif Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% Perempuan dalam dewan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Paser	24	6	55	20
2	Kutai Barat	24	1	25	4
3	Kutai Kartanegara	42	3	45	7
4	Kutai Timur	34	6	40	15
5	Berau	27	3	30	10
6	Penajam Paser Utara	24	1	25	4
7	Balikpapan	37	8	45	18
8	Samarinda	36	9	45	20
9	Bontang	23	2	25	8
10	Mahakam Ulu	15	5	20	25
11	DPRD Tk I Kalimantan Timur	49	6	55	11
Total Kalimantan Timur		335	50	385	14.93

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015



Gambar 2.32
Persentase PNS di Lingkungan Pemprov Kalimantan Timur
Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2015



Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

Selain dari segi keterlibatan perempuan dalam legislatif, keaktifan perempuan dalam pemerintahan juga menjadi poin positif bagi pemberdayaan perempuan. Sebanyak 47,47 persen pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan pegawai negeri sipil perempuan dengan berbagai jabatan dan golongannya.

- Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jika dilihat pada partisipasi angkatan kerjanya, angkatan kerja perempuan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki sehingga secara otomatis jumlah pekerja perempuan juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan pekerja laki-laki.

Tabel 2.29
Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2015

Kegiatan	Laki-laki				Perempuan			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Angkatan Kerja	1.252.403	1.056.170	1.068.661	1.091.062	533.828	441.402	469.277	448.429
- Bekerja	1.142.660	977.743	993.555	1.016.212	479.800	400.867	428.397	407.745
- Pengangguran	109.743	78.427	75.106	74.850	54.028	40.535	40.880	40.684

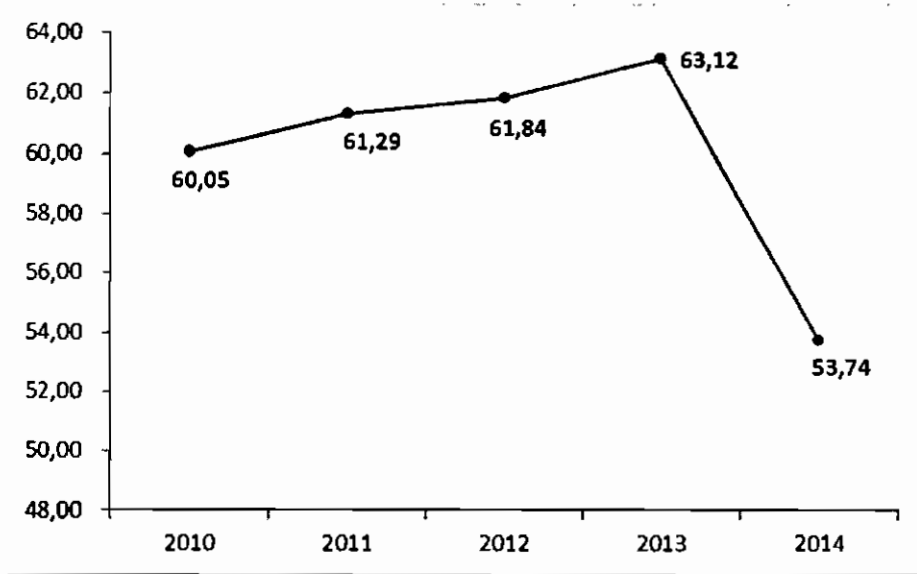
Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2015



▪ Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender

Secara umum, pemberdayaan gender dapat dilihat melalui dua indeks yang terkait masalah gender yakni Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dimana pada tahun terakhir terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 63,12 pada tahun 2013 menjadi 53,74 pada tahun berikutnya. Sedangkan pada Indeks Pembangunan Gender, terjadi kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun hingga pada 2014 indeks meningkat menjadi 84,75.

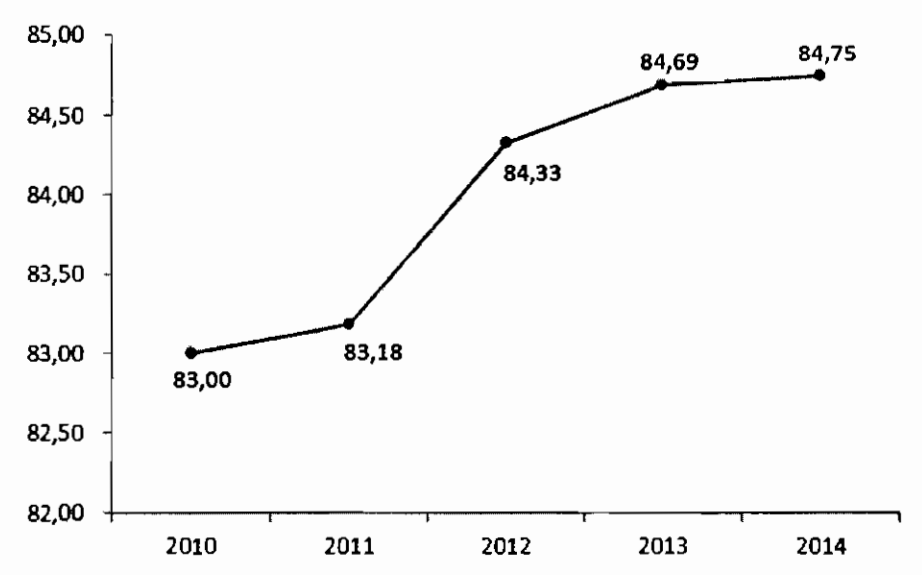
Gambar 2.33
Indeks Pemberdayaan Gender
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015



Gambar 2.34
Indeks Pembangunan Gender
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2014



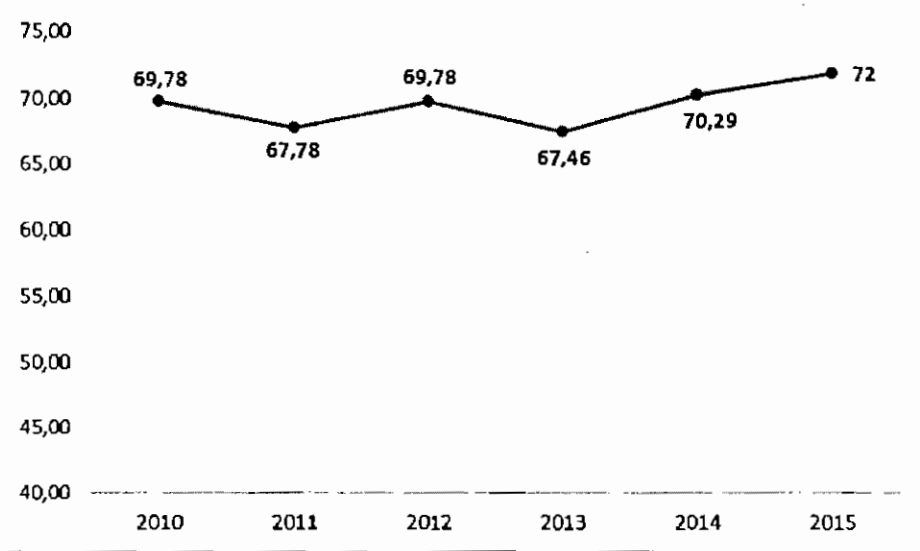
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

▪ Akseptor Keluarga Berencana

Akseptor Keluarga Berencana yang aktif cukup fluktuatif di setiap tahunnya dimana persentase terhadap pasangan usia subur juga fluktuatif. Pada tahun 2015, persentase akseptor KB aktif terhadap pasangan usia subur mencapai 65,51 persen padahal pada tahun sebelumnya hanya mencapai 55,58 persen. Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Program nasional ini sudah dilaksanakan sejak Orde Baru namun hingga sekarang masih ditemui keluarga yang belum sadar akan arti pentingnya keluarga berencana.



Gambar 2.35
Persentase Akseptor KB Aktif Terhadap PUS
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

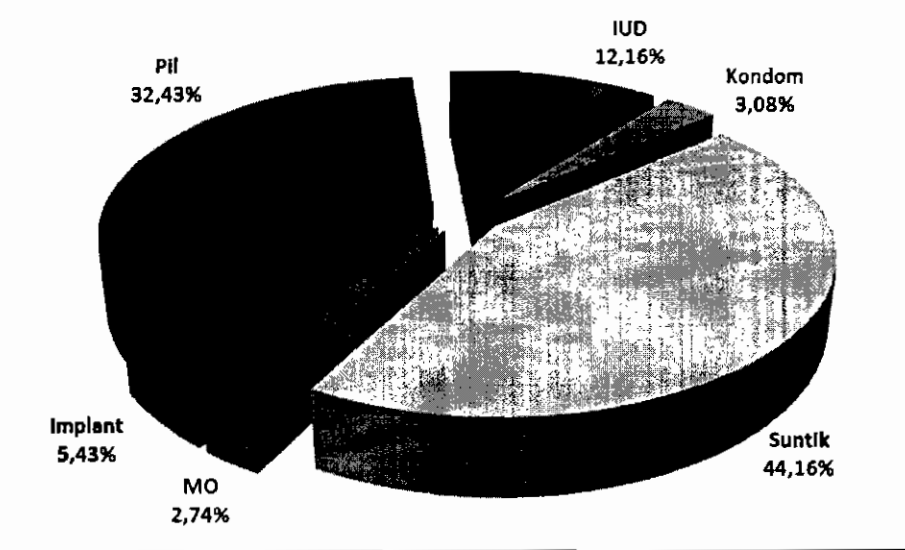


Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

Akseptor Keluarga Berencana yang aktif menggunakan alat kontrasepsi yang beragam dari Pil KB, KB suntik, hingga metode operasi terhadap pria maupun wanita. Sebagian besar akseptor Keluarga Berencana menggunakan alat kontrasepsi suntik KB yang mencapai 44,18 persen penggunaanya dan diikuti oleh pil KB sebanyak 32,45 persen. Sedangkan paling sedikit akseptor Keluarga Berencana yang aktif menggunakan kondom (3,08%) dan metode operasi pria/wanita (2,74%).



Gambar 2.36
Persentase Akseptor KB Aktif Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

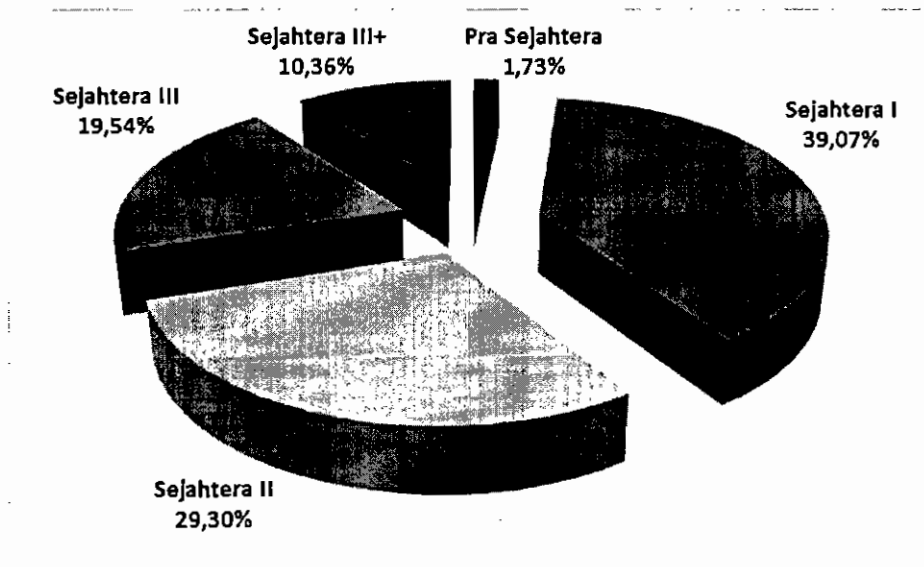


Sumber: BKKBN

- Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

Keluarga sejahtera merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah kepada masyarakatnya. Namun, di Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat keluarga yang pra sejahtera (1,73%) dan sejahtera I (39,07%).

Gambar 2.37
Persentase Jumlah Keluarga Menurut Golongan Kesejahteraannya
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: BKKBN



j. Sosial

Aspek sosial dalam pembangunan menjadi penting karena terkait dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan kehidupan baik secara fisik maupun psikologis. Berikut beberapa indikator terkait aspek sosial sebagai hasil dari pembangunan daerah pada periode sebelumnya.

Tabel 2.30
Indikator Sosial
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015

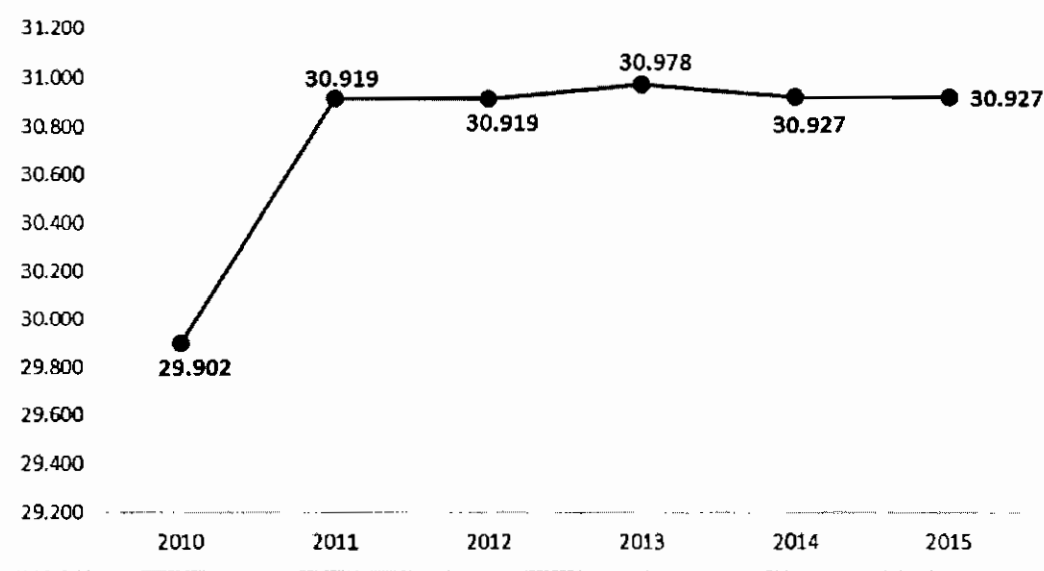
No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan mental, pelatihan keterampilan, UEP melalui KUBE	1.550	1.750	2.110	1.400	1.765	2.500
2.	Jumlah keluarga berumah tidak layak huni yang mendapat bantuan sosial	50	0	13	154	*)	*)
3.	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial	1.550	1.750	2.110	1.400	1.765	2.500
4.	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	3.292	1.868	3.007	3.534	2.607	1.288
5.	Jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	*)	218	303	363	508	435
6.	Jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	100	78	213	210	48	65
7.	Jumlah wanita korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial	44	175	103	130	72	71
8.	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial	730	660	1.105	1.125	1.608	1.190
9.	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial	404	533	782	740	865	664
10.	Penanganan korban bencana alam	226	250	105	16.334	15	14
11.	Jumlah warga KAT yang diberdayakan melalui pemukiman	90	219	162	114	87	100
12.	Banyaknya panti asuhan	144	134	134	134	111	118
13.	Banyaknya anak asuhan	8.248	7.299	7.938	7.368	7.296	7.296
14.	Banyaknya panti werdha	4	4	4	4	4	4
15.	Jumlah penghuni panti werdha	120	180	205	200	267	277

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur



Keterangan: *) Program & Kegiatan anak balita terlantar ada sejak tahun 2011

Gambar 2.38
Jumlah Anak Terlantar
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



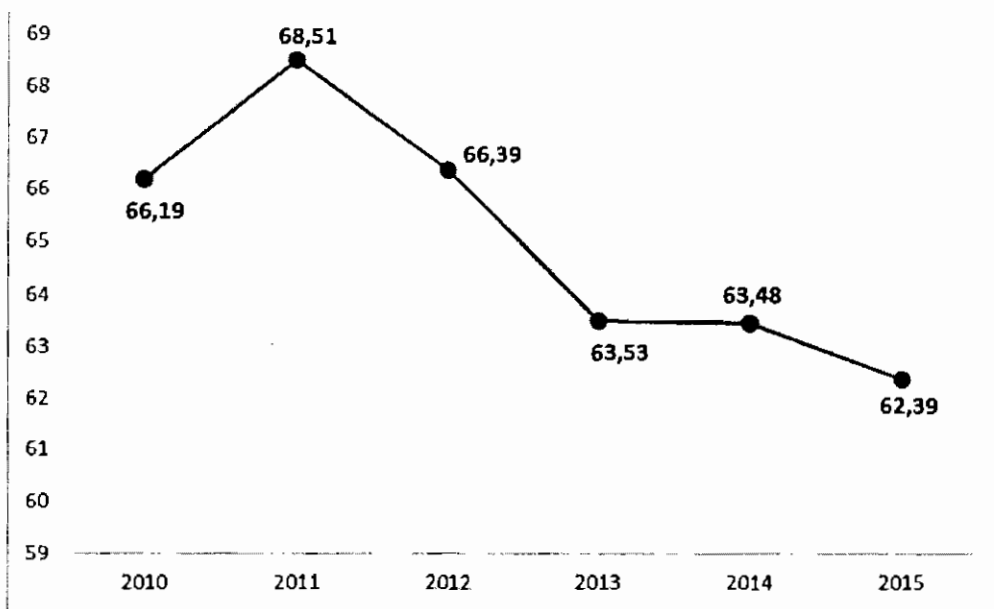
Sumber: Dinas Sosial 2015

k. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah angkatan kerja meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.537.938 orang menjadi 1.539.491 orang. Meskipun begitu, secara persentase yakni tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan menjadi 62,39 persen dari sebelumnya sebesar 63,48 persen. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya dan bisa disebabkan penimbangnya yakni jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

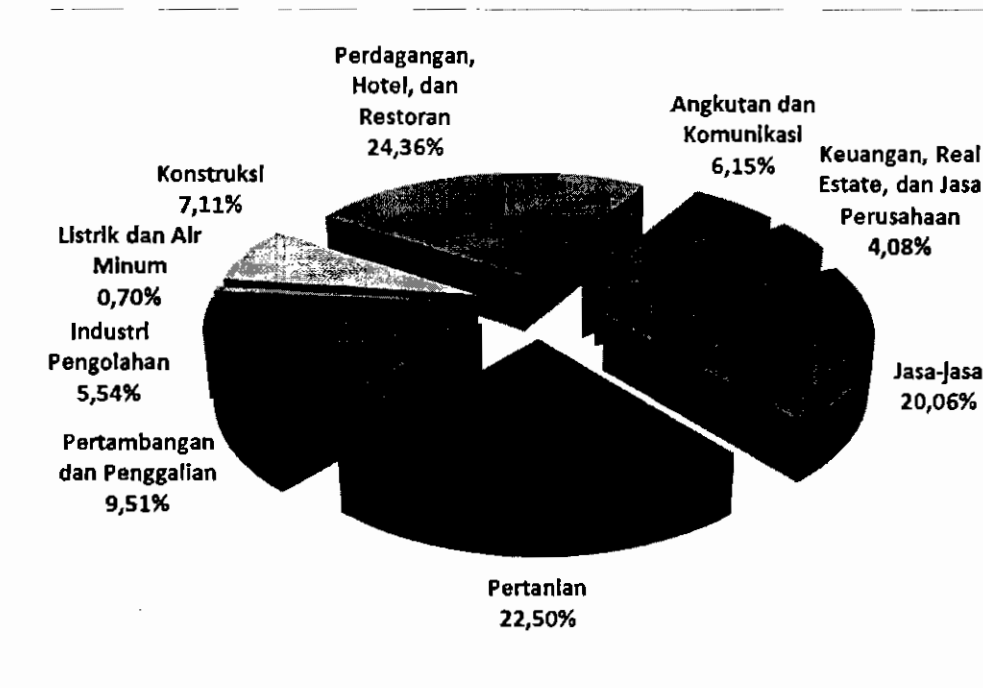


Gambar 2.39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.40
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



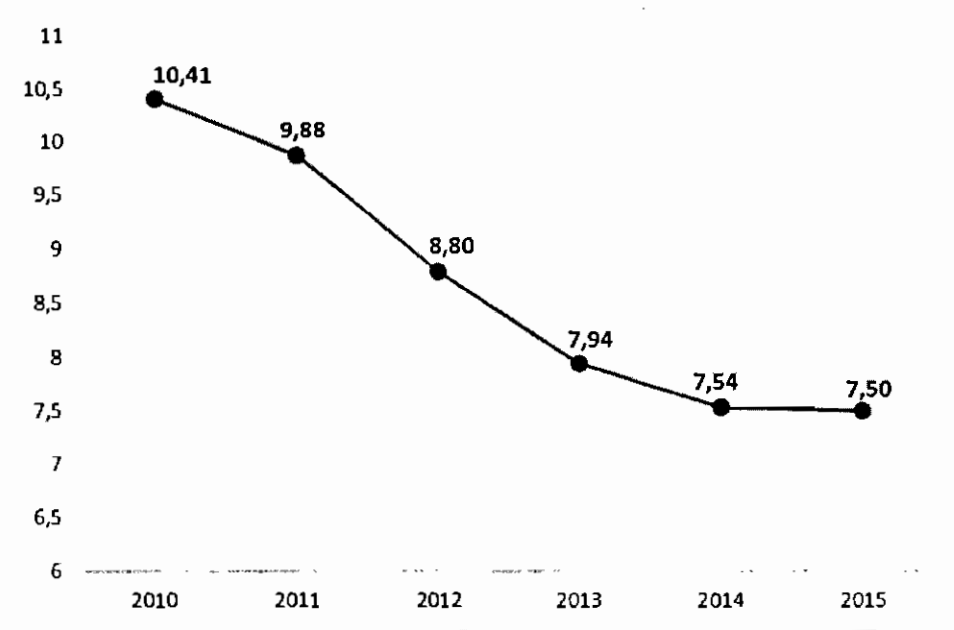
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur



Pada tahun 2015, sebanyak 92,50 persen penduduk memiliki pekerjaan yang terbagi pada sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (24,36%) dan diikuti oleh penduduk yang bekerja pada sector pertanian yang mencapai 22,50 persen. Sedangkan penduduk paling sedikit bekerja di sektor Listrik dan Air Minum (0,70%).

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,50 persen dimana angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 7,54 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur sehingga keberlanjutan program prioritas yang memberdayakan masyarakat harus terus dioptimalkan.

Gambar 2.41
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

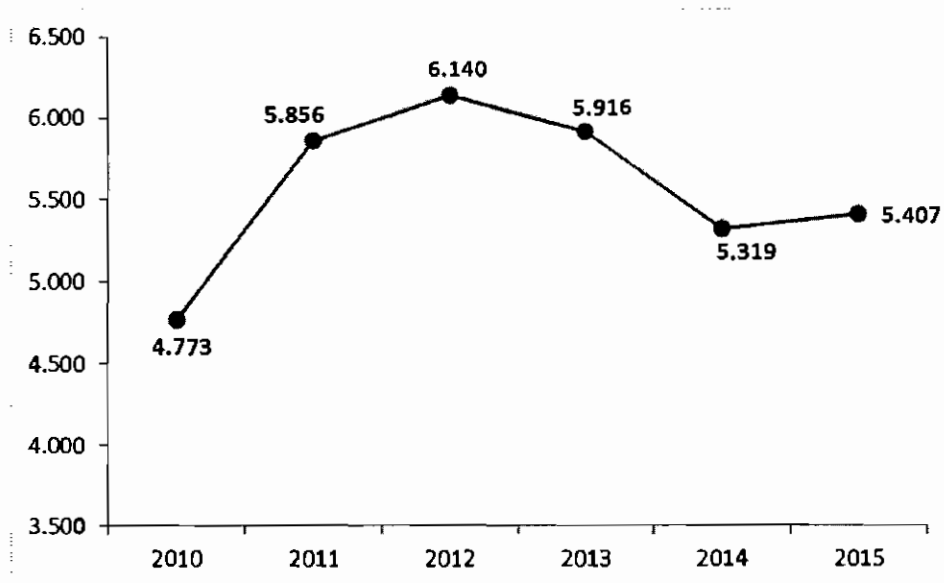
I. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Perkembangan koperasi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan trend yang positif dimana kecenderungan jumlah koperasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun



2015, jumlah koperasi menurun dari 5.407 unit dimana tahun sebelumnya berjumlah 5.319 unit.

Gambar 2.42
Jumlah Koperasi
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



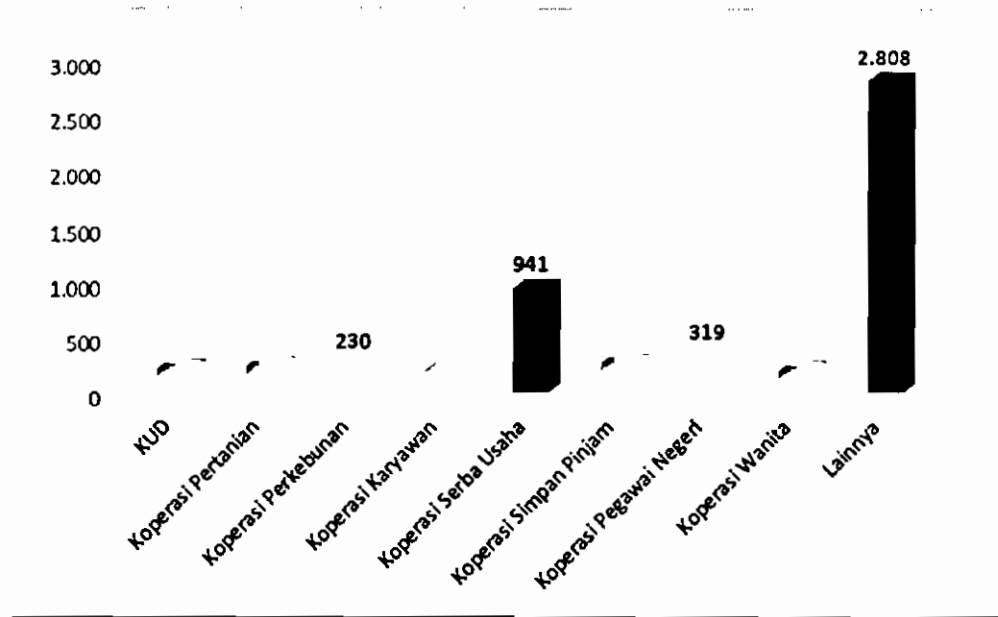
Sumber: Disperindagkop Prov Kaltim

Jika dilihat berdasarkan jenis koperasinya, maka sebagian besar koperasi di Provinsi Kalimantan Timur adalah Koperasi Serba Usaha yang mencapai 941 unit koperasi yang tersebar di seluruh wilayah. Koperasi yang cukup banyak dan aktif selanjutnya adalah Koperasi Pegawai Negeri yang berjumlah 319 unit dan Koperasi Simpan Pinjam yang berjumlah 267 unit.

Koperasi yang memberdayakan masyarakat desa yakni Koperasi Unit Desa hanya berjumlah 214 unit. Meskipun begitu, terdapat Koperasi Pertanian (237 unit) dan Koperasi Perkebunan (230 unit) yang memberdayakan masyarakat pedesaan terutama yang bergerak pada sektor pertanian maupun perkebunan.



Gambar 2.43
Jumlah Koperasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: Disperondagkop Provinsi Kaltim, Tahun 2016

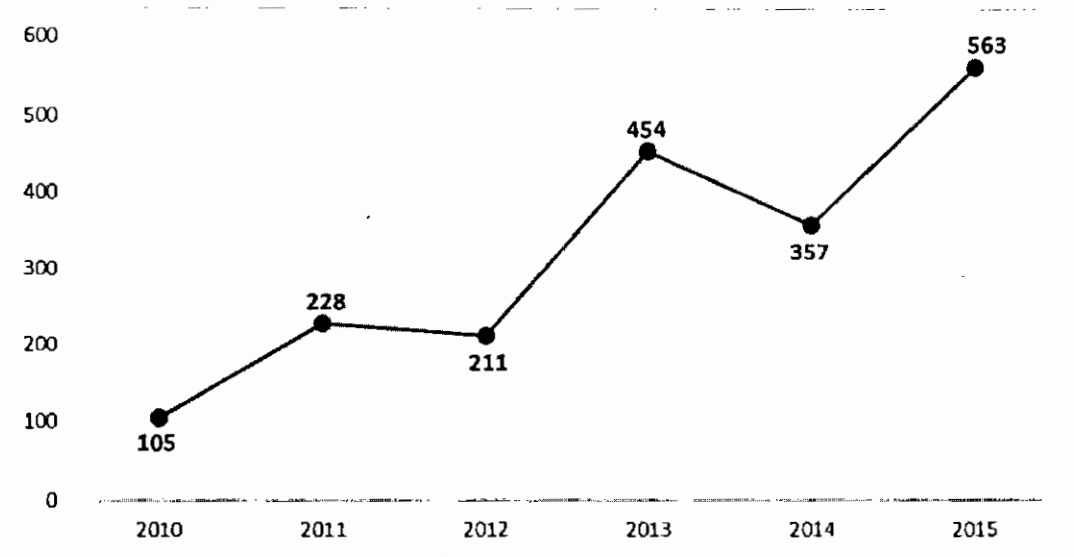
m. Penanaman modal

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang diminati oleh kalangan investor baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari cukup tingginya penanaman modal yang ditanamkan di wilayah Kalimantan Timur di berbagai sektor. Daya Tarik yang cukup membuat investor tertarik utamanya pada eksploitasi sumber daya alam dimana Provinsi Kalimantan Timur memiliki keanekaragaman potensi sumber daya yang beragam.

Pada tahun 2015, sebanyak 563 investor baik dalam negeri maupun asing telah menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, dalam perijinan penanaman modal harus diperhatikan kaitannya dengan produktivitas serta timbal balik dari pergerakan usaha tersebut agar memiliki keberlanjutan di kemudian hari. Hal ini terkait dengan dampak lingkungan hidup bagi generasi mendatang agar tetap memiliki kehidupan yang sejahtera, nyaman, dan asri.



Gambar 2.44
Jumlah Investor Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

n. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

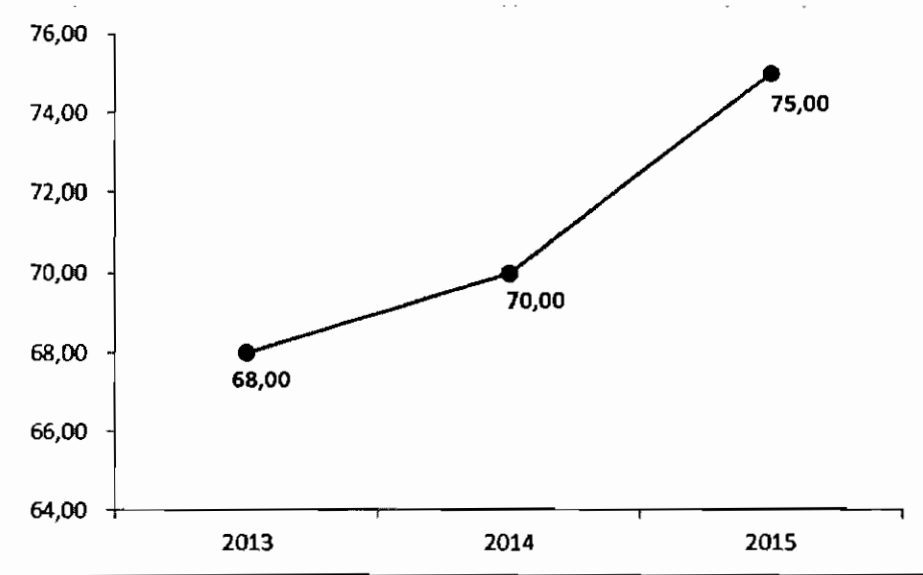
▪ Pelayanan Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, masyarakat tidak akan pernah terlepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan. Berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan telah dilaksanakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dimana angka indeks yang meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015, Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 76,65 yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini bukan tanpa alasan mengingat berbagai program dan kegiatan terkait peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas. Untuk selanjutnya, perlu dirumuskan kembali terkait pemerataan pelayanan masyarakat agar setiap wilayah di Kalimantan Timur dapat merasakan hasil dari capaian pembangunan di berbagai bidang.



Gambar 2.45
Indeks Kepuasan Masyarakat
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013-2015



Sumber: SIDATA KALIMANTAN TIMUR

- Pengelolaan Keuangan Daerah dan Integritas Kinerja Daerah

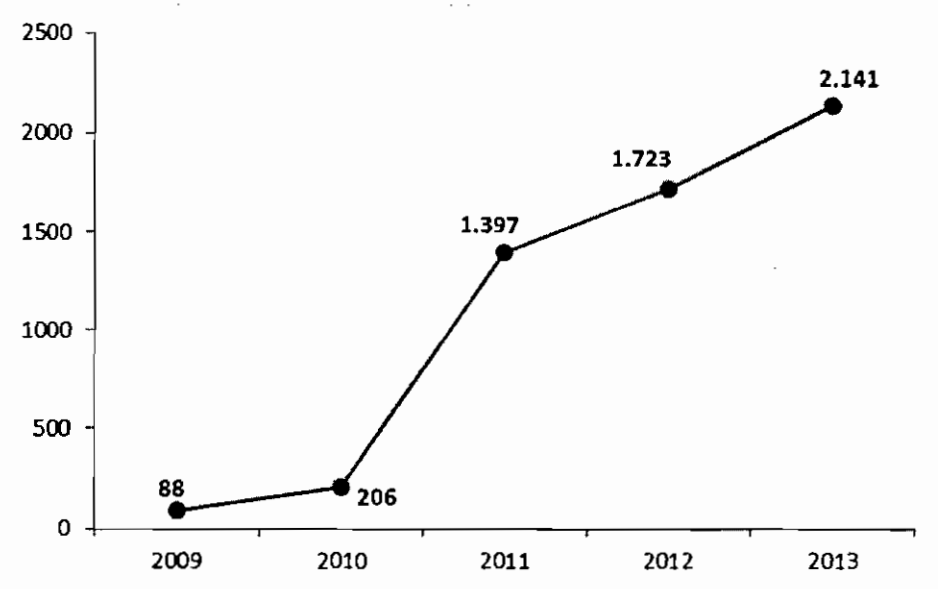
Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015. Sempat terjadinya penurunan status opini BPS ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Sedangkan dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur juga memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

- K3 (Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan)

Dalam menciptakan suasana asri dan harmonis di kehidupan masyarakat, implementasi K3 (Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan) di lingkungan masyarakat perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam beberapa kurun waktu terakhir ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan aparatur pamong praja sebagai satuan pengamanan dan penegakan K3 di lingkungan masyarakat. Pada tahun 2014, jumlah pamong praja di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 2.141 orang, padahal pada lima tahun yang lalu jumlah satuan polisi pamong praja sangat terbatas.

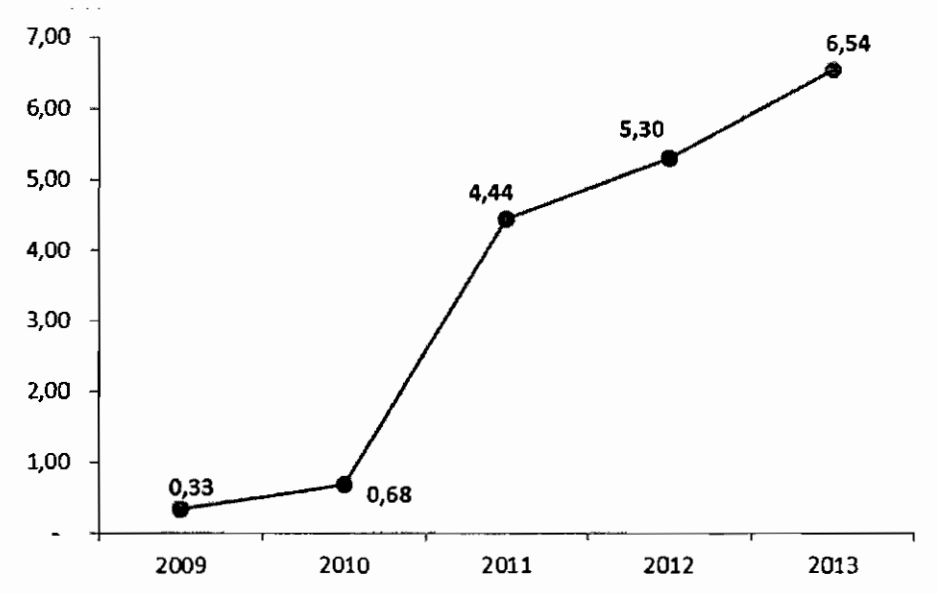


Gambar 2.46
Jumlah Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2009-2013



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Gambar 2.47
Rasio Pamong Praja per 10.000 penduduk
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2009-2013



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2014



o. Ketahanan pangan

Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, telah dilaksanakan pengembangan Desa Mandiri Pangan pada tahun 2009 yang meliputi 21 Desa, dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 79 desa. Pembangunan Lumbung Pangan Desa dan Pengisian Lumbung juga telah dilaksanakan sejak tahun 2009 yang mencapai 15 unit dan menjadi 19 Unit pada tahun 2015 dengan alokasi anggaran dari APBN (DAK, TP dan Dekon dan APBD Provinsi, APBD Kab/Kota).

Untuk pemberdayaan dan intervensi daerah rawan, serta untuk menjaga kestabilan tingkat harga pada saat panen raya, maka dilaksanakan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada 29 kelompok usaha Gapoktan di 12 Kabupaten/Kota pada tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 52 kelompok serta dalam tahun 2010 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 54 kelompok. Keberadaan lembaga ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas harga pada saat panen, meningkatkan cadangan pangan masyarakat serta memperkuat modal untuk memperoleh posisi tawar yang tinggi dan nilai tambah. Namun jumlah lembaga ini masih sangat perlu ditingkatkan sehingga bisa mencakup semua kawasan sentra produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur.

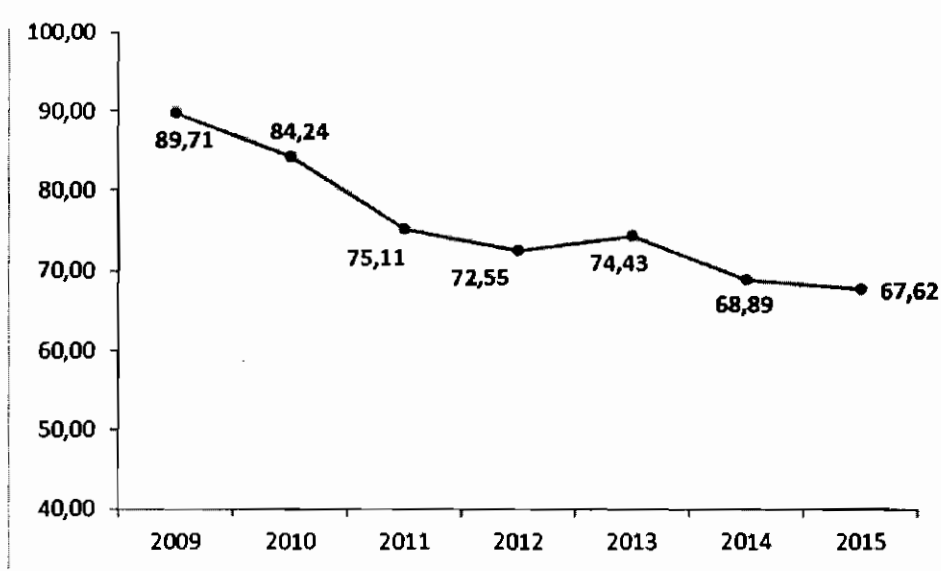
Capaian urusan ketahanan pangan diukur dengan indikator ketersediaan regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, dan skor Pola Pangan Harapan. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan terjangkau daya beli masyarakat. Kekurangan pangan tidak hanya dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan dapat mengancam keamanan sosial.

▪ **Ketersediaan Pangan Utama**

Ketersediaan pangan merupakan rasio rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (beras) per tahun (kg) dibagi dengan tingkat konsumsi. Ketersediaan pangan utama pada tahun 2014 sebesar 68,89 kg dan pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 67,62 kg saja.



Gambar 2.48
Ketersediaan Pangan Utama
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015 (Kg)



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016

p. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa sebagai wilayah administrasi terkecil memiliki peran yang sangat vital dalam pemberdayaan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya berbagai pembinaan dalam meningkatkan kualitas setiap elemen desa untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi pelaksanaan pembangunan suatu wilayah. Berikut capaian pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.31
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2015

No	Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok mikro kecil yang memanfaatkan teknologi tepat guna	30 lembaga	18 lembaga
2.	Jumlah lembaga perekonomian perdesaaan yang aktif	51 lembaga	65 lembaga
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang telah dibina dan dilatih	1.559 lembaga	1.559 lembaga
4.	Jumlah desa/kelurahan yang berhasil meraih peringkat perlombaan	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan
5.	Persentase bantuan PNPM-MP yang tepat sasaran	95,24 %	95,24 %

Sumber: Renstra BPMPD, 2016



q. Statistik

Publikasi statistik resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik merupakan sumber data dan informasi yang valid dan relevan sebagai bahan rumusan perencanaan pembangunan daerah. Selama ini, setiap tahun BPS Provinsi Kalimantan Timur terus merilis berbagai publikasi terkait data pembangunan daerah terutama publikasi utama yakni Kalimantan Timur Dalam Angka dan PDRB menurut lapangan usaha maupun PDRB menurut penggunaan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.32
Publikasi Statistik Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015

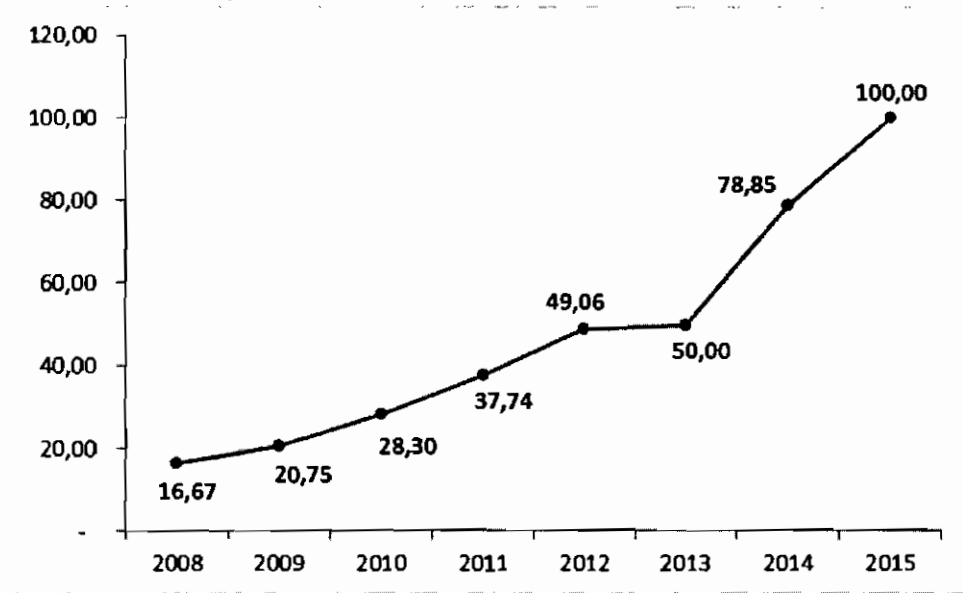
No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Buku Kaltim Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	PDRB Provinsi Kalimantan Timur	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

r. Kearsipan

Pengelolaan arsip baku di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 100 persen pada tahun 2015.

Gambar 2.49
Pengelolaan Arsip Secara Baku Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2008-2015



Sumber: Badan Arsip Daerah Provinsi Kaltim, 2016



s. **Komunikasi dan Informatika**

Pada era teknologi informasi ini, komunikasi dan informatika menjadi hal yang umum dalam keseharian masyarakat utamanya wilayah perkotaan. Namun dari segi pemerataannya, masih terdapat beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang belum memiliki akses telekomunikasi maupun informatika. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur melek komunikasi dan informatika agar memiliki pengetahuan dan mendapatkan informasi yang berguna bagi kehidupannya. Berikut indikator komunikasi dan informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.33
Indikator Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2009-2015 (Sebagian besar data tidak diisi Diskominfo)

No	Indikator	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah sarana telekomunikasi	416.263	-	397.544	394.700	-	-	241
2.	Banyaknya telepon umum	731	980	1.432	676	-		
	Pelanggan Broadband	-	-	52.989	70.888	70.888		
3.	Jumlah pelanggan telepon rumah	195.907	-	354.592	202.107	202.107		
	Jumlah pelanggan telepon CDMA Flexi	-	-	209.464	245.047	245.047	-	-
4.	Website Pemprov Kaltim	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2016

t. **Perpustakaan**

Sebagai salah satu sarana prasarana penunjang pendidikan, pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas pendukung untuk menyukseskan program prioritas di bidang pendidikan salah satunya dengan memberikan fasilitas perpustakaan yang berkualitas. Perpustakaan merupakan tempat untuk mengakses informasi yang berisi kumpulan buku dan koleksinya baik yang tercetak maupun tersimpan secara digital. Perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-Rom dan internet. Perpustakaan juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan dan rekreasi yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Dilihat dari indikatornya, perkembangan tugas pokok dan fungsi perpustakaan dalam memberikan pelayanan mengalami peningkatan meskipun terdapat beberapa kelemahan yang harus diantisipasi. Berikut indikator perpustakaan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.



Tabel 2.34
Indikator Perpustakaan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	285.299	225.676	199.571	172.040	153.199	141.557
2.	Jumlah anggota perpustakaan	37.182	55.803	66.240	75.393	83.379	92.345
3.	Jumlah peminjam buku	175.800	204.725	89.797	72.592	90.239	117.278
4.	Jumlah buku yang dipinjam	99.540	216.543	199.820	179.229	135.163	121.372
5.	Jumlah buku yang tersedia	234.458	227.995	242.949	169.037	173.207	180.324
6.	Jumlah perpustakaan di Kaltim	1.501	1.837	1.946	1.743	1.819	1.830

Sumber: Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur 2016

2.3.2. Fokus layanan urusan pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut 75adin layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Pertanian

▪ Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi hingga saat ini belum dapat dicapai. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan baik pada lahan kering (ladang) maupun lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi hingga saat ini, agro-ekosistem sawah mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang. Sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi, dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Produksi padi pada tahun 2015 mengalami kenaikan luas panen maupun total produksi padi. Pada tahun 2015, total produksi padi mencapai 408.782 ton dengan luas panen 99.209 ha akan tetapi produktivitasnya mengalami penurunan menjadi 4,12 ton/ha.



Tabel 2.35
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

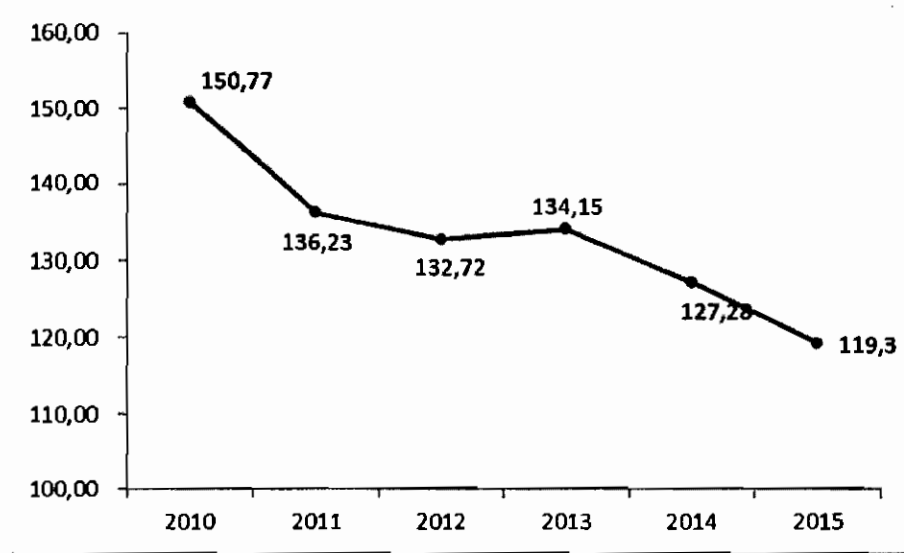
Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	110.288	459.477	4,17
2011	100.826	425.505	4,22
2012	101.960	424.670	4,17
2013	102.912	439.439	4,27
2014	100.262	426.567	4,26
2015	99.209	408.782	4,12

Sumber: Dinas Pertanian Prov Kaltim, 2016

Berdasarkan data produksi lima tahun terakhir diketahui bahwa, tingkat produksi padi di daerah ini masih cukup berfluktuasi. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa pengelolaan produksi padi di daerah ini belum dikendalikan sepenuhnya oleh suatu sistem produksi yang terukur. Secara umum terdeteksi bahwa, faktor pembatas yang dominan adalah kondisi cuaca dan motivasi petani serta kualitas lahan dan sumber daya manusia berkualitas (teknologi modern). Pengaruh faktor cuaca, karena petani hanya mungkin menanam padi dengan baik bilamana curah hujan tersedia cukup. Motivasi petani naik dan turun dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama harga beras dan ketersediaan lapangan kerja alternatif. Sedangkan peran pemerintah dalam pengelolaan produksi adalah sebagai fasilitator dan dinamisator dari stakeholder yang ada.



Gambar 2.50
Rasio Produksi Padi per Satuan Penduduk (Kg)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016 (dialah)

Jika berdasarkan data produksi padi, jumlah penduduk, dan asumsi kebutuhan atau konsumsi beras per kapita sebesar 113 kg/tahun, status swasembada pangan (beras) di Provinsi Kalimantan Timur untuk lima tahun terakhir sudah tercapai. Meski begitu, trend memperlihatkan bahwa produksi beras di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan meskipun datanya fluktuatif.

Tabel 2.36
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Palawija
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No.	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jagung	2.307	8.379	3,63
2.	Ubi Kayu	2.384	53.966	22,64
3.	Ubi Jalar	978	10.933	11,18
4.	Kacang Tanah	882	1.127	1,28
5.	Kedelai	947	1.519	1,60
6.	Kacang Hijau	162	176	1,09

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2015

Prospek peningkatan produksi padi di daerah ini sesungguhnya sangat baik dan sejak tahun 2012 didukung oleh Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Bilamana program ini dilaksanakan secara konsisten dengan dukungan sumber daya secara maksimal, maka upaya

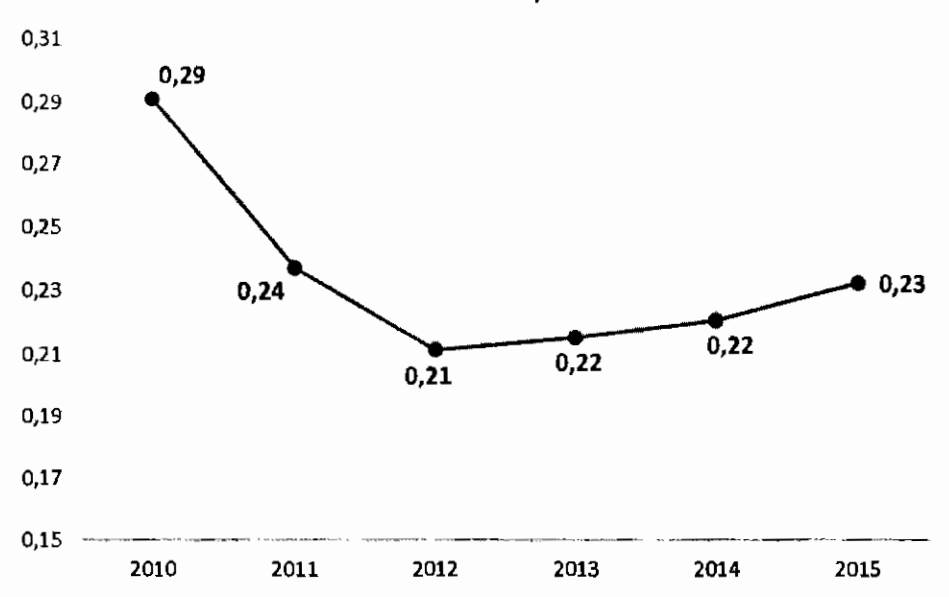


untuk mewujudkan swasembada beras di daerah ini akan dapat terwujud. Palawija sebagai sumber bahan pangan alternatif belum berkembang secara memadai, luas tanamnya cukup fluktuatif dan belum ada komoditas palawija yang luas panennya mencapai 10% dari luas panen tanaman padi.

Produksi palawija masih terbatas dan ubi kayu yang produksinya paling banyak belum mencapai 20% dari produksi padi. Meskipun, berdasarkan kriteria kebutuhan konsumsi per kapita untuk jagung, kedele dan ubi kayu telah mencapai swasembada. Tetapi berdasarkan kriteria penyediaannya, komoditi palawija masih mengalami kekurangan kecuali untuk ubi kayu.

Sektor pertanian dalam struktur perekonomian masih belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hal itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena sektor ini mampu menampung banyak tenaga kerja dan lebih ramah lingkungan dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.51
Kontribusi Subsektor Pertanian Tanaman Pangan Terhadap PDRB (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Pada subsektor pertanian tanaman pangan yang merupakan fokus dari swasembada pertanian dimana pada tahun 2015 hanya memiliki kontribusi PDRB sebesar 0,23 persen. Sedangkan pada kategori pertanian secara luas, kontribusi terbesar berada pada subsektor perkebunan yang mencapai 3,88 persen dan diikuti oleh subsektor perikanan 1,52 persen dan kehutanan 1,33 persen.



Perlunya ada peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam lima tahun kedepan yang dibangun dari subsektor-subsektor penyusun sektor pertanian seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

▪ Hortikultura

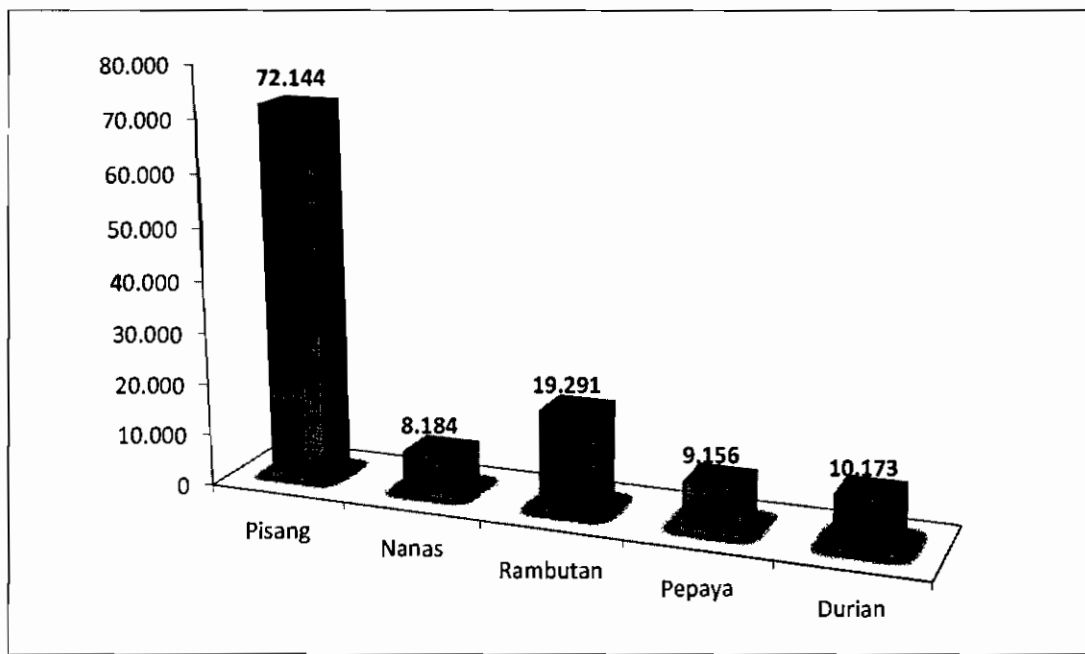
Beberapa komoditas hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur menjadi unggulan meskipun belum terlalu tinggi intensitasnya dalam ekspor ke luar daerah. Berikut produktivitas komoditas sayur-sayuran unggulan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.37
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sayur-sayuran Unggulan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tomat	789	8.048	10,20
2.	Ketimun	1.013	8.481	8,37
3.	Terong	1.052	9.901	9,41
4.	Kacang Panjang	1.357	6.754	4,98
5.	Kangkung	1.381	3.887	2,81

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

Gambar 2.52
Produksi Buah-buahan Unggulan (Ton)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016



Lain halnya dengan sayur-sayuran, produksi buah-buahan di Kalimantan Timur lebih tinggi utamanya pisang yang mencapai 72.144 ton pada tahun 2015. Berikut produksi komoditas buah-buahan unggulan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015.

▪ Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,09 juta ha dan memiliki produksi mencapai 10,81 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 65 ribu hektar pada tahun 2015. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.38
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Karet	113.739	65.738	1,3
2.	Kelapa	22.887	12.457	0,07
3.	Kopi	3.567	399	0,21
4.	Lada	9.606	6.923	1,06
5.	Kakao	8.296	3.948	0,70
6.	Kelapa Sawit	1.090.106	10.812.893	173

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

▪ Peternakan

Provinsi Kalimantan Timur sedang menggalakkan peningkatan produksi daging sebagai salah satu usaha untuk swasembada daging. Pada tahun 2015, produksi daging terbanyak adalah daging sapi yang mencapai 9.129,48 ton dan diikuti oleh produksi daging babi yang mencapai 1.009,38 ton. Sedangkan pada daging unggas, produksi daging unggas paling banyak adalah ayam ras pedaging yang produksinya mencapai 53.859,80 ton. Selain itu, untuk produksi telur sebagian besar merupakan produksi telur ayam ras yang mencapai 5.555,76 ton.



Tabel 2.39
Populasi dan Produksi Daging Ternak
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No.	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)	Produksi Daging (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sapi	110.097	9.129,48
2.	Sapi Perah	79	-
3.	Kerbau	6.680	36,44
4.	Kambing	59.258	441,36
5.	Domba	265	1,42
6.	Babi	68.238	1.009,34
7.	Kuda	107	1,40

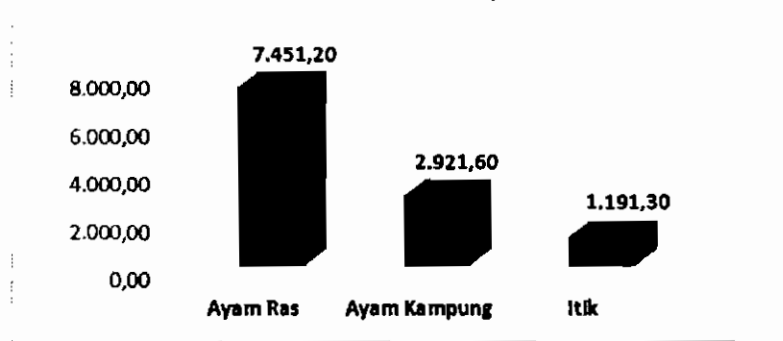
Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kaltim, 2015

Tabel 2.40
Populasi dan Produksi Daging Unggas
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

No.	Jenis Unggas	Populasi unggas (ekor)	Produksi Daging (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ayam Kampung	4.561.377	5.042,60
2.	Ayam Ras Pedaging	55.783.230	53.859,80
3.	Ayam Ras Petelur	966.432	435,86
4.	Itik	216.997	95,5

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kaltim, 2015

Gambar 2.53
Produksi Telur (Ton)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: Dinas Peternakan Prov Kaltim, 2016

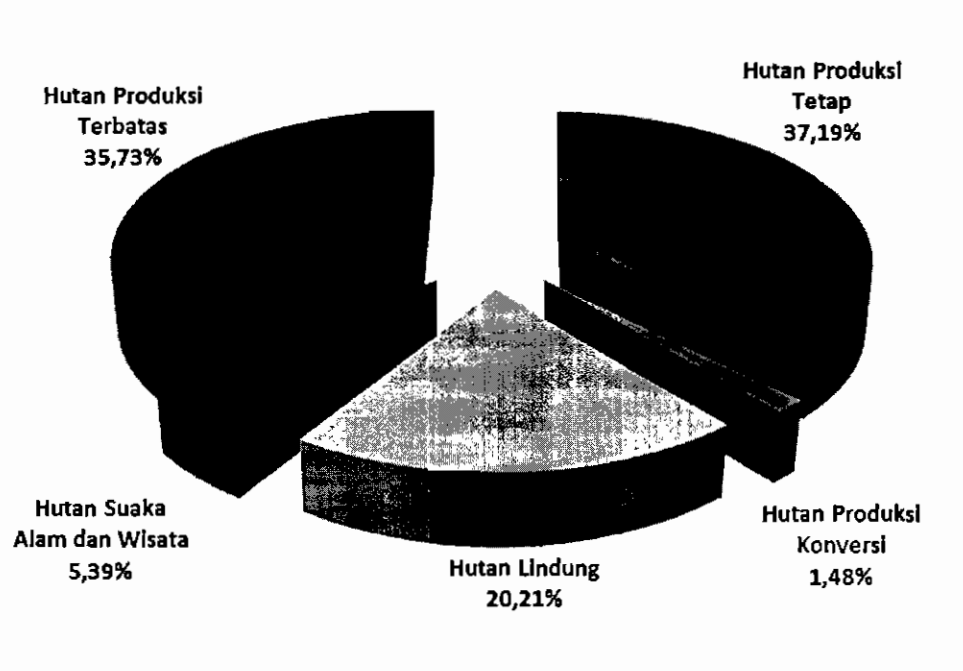


b. Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur dahulu terkenal dengan hasil hutannya yang melimpah hingga ekspor ke dunia internasional. Namun semakin lama, produksi kehutanan semakin menurun dan bahkan dampak degradasi lingkungan hidup sudah mulai terasa di wilayah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menata ulang peruntukan wilayah hutan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus tetap menjaga kelestariannya demi keberlanjutan kualitas lingkungan hidup.

Sebagian besar wilayah hutan di Provinsi Kalimantan telah ditetapkan sebagai hutan produksi dengan rincian hutan produksi tetap (37,19% atau 5.935.355 ha) dan hutan produksi terbatas (35,73% atau 2.908.256 ha). Sedangkan wilayah hutan lindung hanya ditetapkan sebanyak 20,21 persen atau 1.844.969 ha.

Gambar 2.54
Luas Hutan Menurut Tata Guna Hutan (Ha)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016



2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan kawasan Samarinda - Sangatta - Muara Wahau - Berau - Kalimantan Utara.

Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 94,87 km per 1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 94,87 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) di bawah rasio nasional yaitu 115 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki beberapa kendala seperti berikut ini.

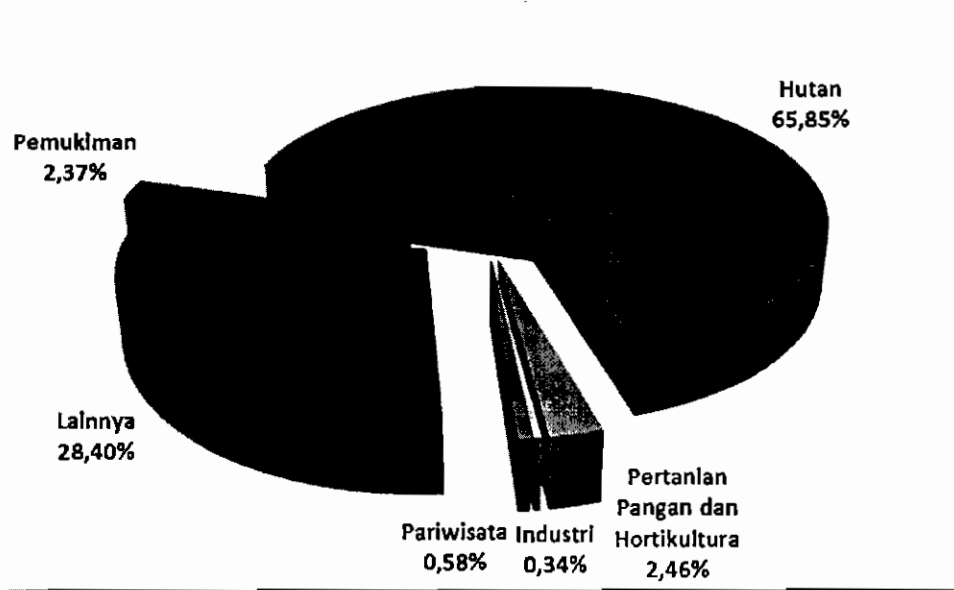
- 1) Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil, serta kondisi topografi yang berat;
- 2) Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
- 3) Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap baik nasional maupun provinsi dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
- 4) Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
- 5) Masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum ada kesepakatan pembiayaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- 6) Dukungan swasta belum optimal.

b. Penataan ruang

Penataan ruang di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar masih berupa kawasan hutan hingga mencapai 65,85 persen dari total luas wilayah. Sedangkan wilayah pertanian yang notabene masih merupakan kawasan hijau menempati luas areal hingga mencapai 2,46 persen. Mengingat luas wilayah Kalimantan Timur yang sangat luas, maka pemukiman penduduk hanya menempati seluas 2,37 persen saja.



Gambar 2.66
Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur

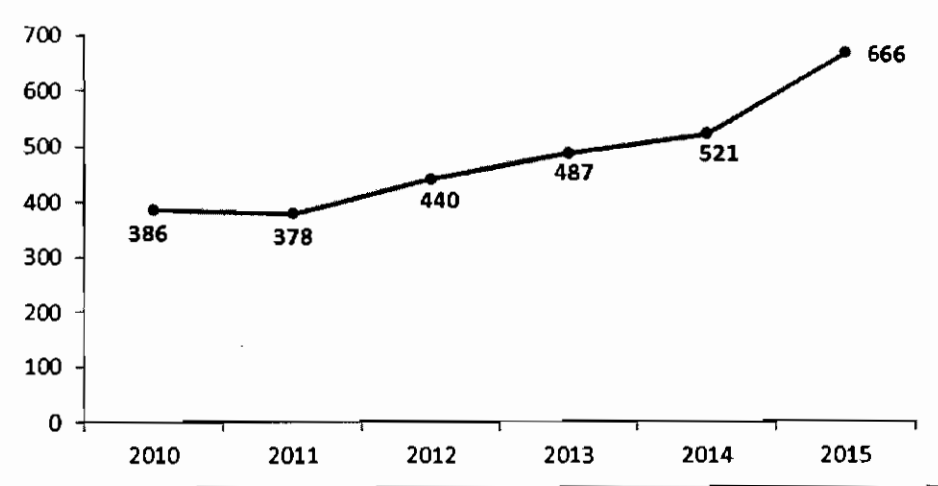


Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

c. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya

Salah satu indikator tingginya pergerakan perekonomian suatu daerah adalah jumlah unit bank yang dibangun di wilayah tersebut sebagai motor perekonomian daerah. Di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah bank meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 666 unit pada tahun 2015.

Gambar 2.67
Jumlah Bank (Unit)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015

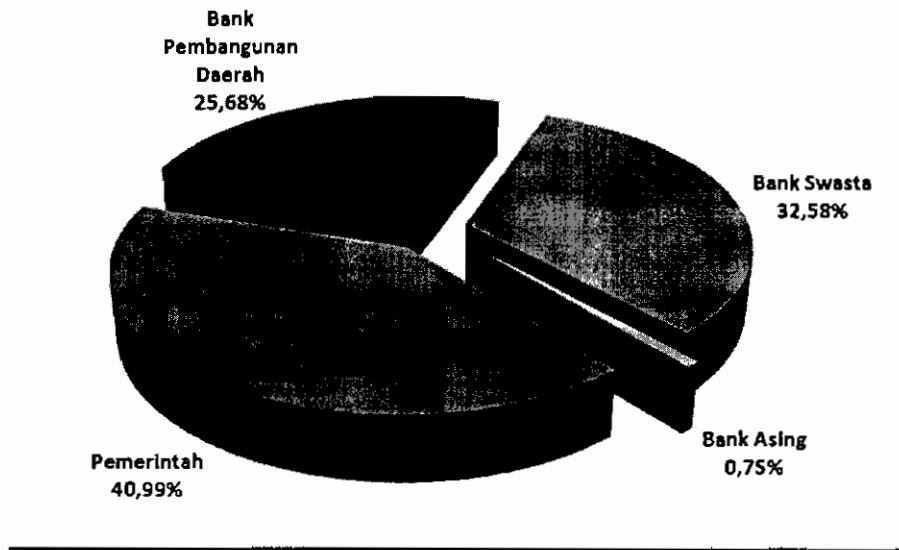


Sumber: Bank Indonesia Wilayah Kaltim



Sebagian besar unit bank yang ada di Kalimantan Timur adalah bank pemerintah yang mencapai 41,24 persen (252 unit) dan bank swasta yang juga cukup tinggi yakni mencapai 34,86 persen (213 unit). Sedangkan bank pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur mencapai 23,08 persen (141 unit).

Gambar 2.68
Persentase Unit Bank Menurut Status Kantor Bank
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: Bank Indonesia Wilayah Kaltim, 2016

d. Perhotelan

Salah satu penunjang pergerakan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur pada berbagai bidang adalah adanya pelayanan akomodasi berupa hotel. Peningkatan jumlah hotel di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tingginya pergerakan perekonomian karena kedatangan penduduk dari wilayah lain. Pada tahun 2015, sebanyak 49 hotel bintang dan 618 hotel non bintang beroperasi di Kalimantan Timur dengan jumlah kamar yang cukup banyak hingga mencapai 9.760 kamar pada hotel berbintang dan 6.691 kamar untuk hotel non bintang.



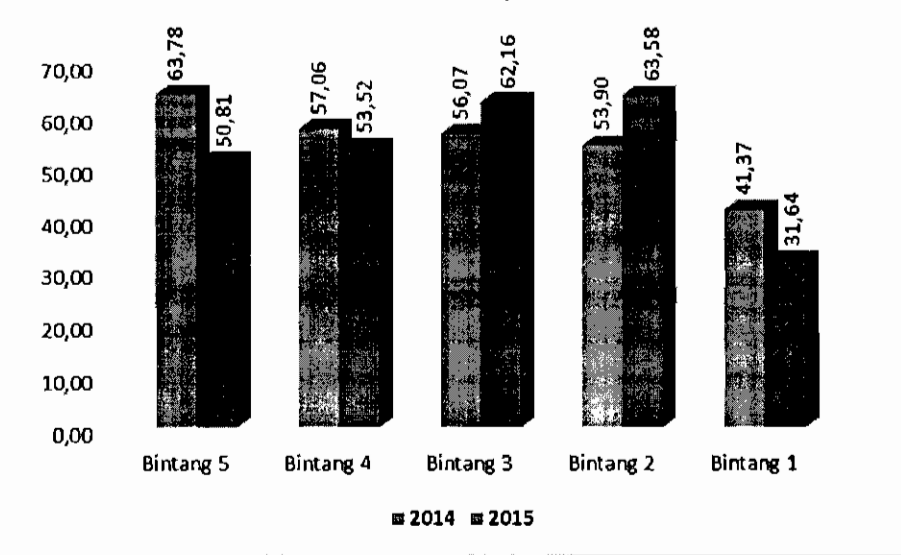
Tabel 2.51
Banyaknya Hotel dan Kamar Hotel (Bintang dan Non Bintang)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2015

Tahun	Hotel		Kamar	
	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	48	467	901	8.948
2013	50	468	801	9.002
2014	48	609	701	9.321
2015	49	618	6380	9.760

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Poriwisata Prov Kaltim, 2016

Jika dilihat dari tingkat hunian hotel berbintang, maka pada tahun 2015 sebesar 57,14 persen, capaian ini turun jika dibandingkan tingkat hunian hotel pada tahun 2014 sebesar 56,73 persen. Tingkat hunian hotel tertinggi berada pada hotel bintang dua dengan tingkat hunian sebesar 63,58 persen dan tingkat hunian terendah berada pada hotel bintang 1 dengan tingkat hunian sebesar 31,64 persen.

Gambar 2.69
Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014 - 2015

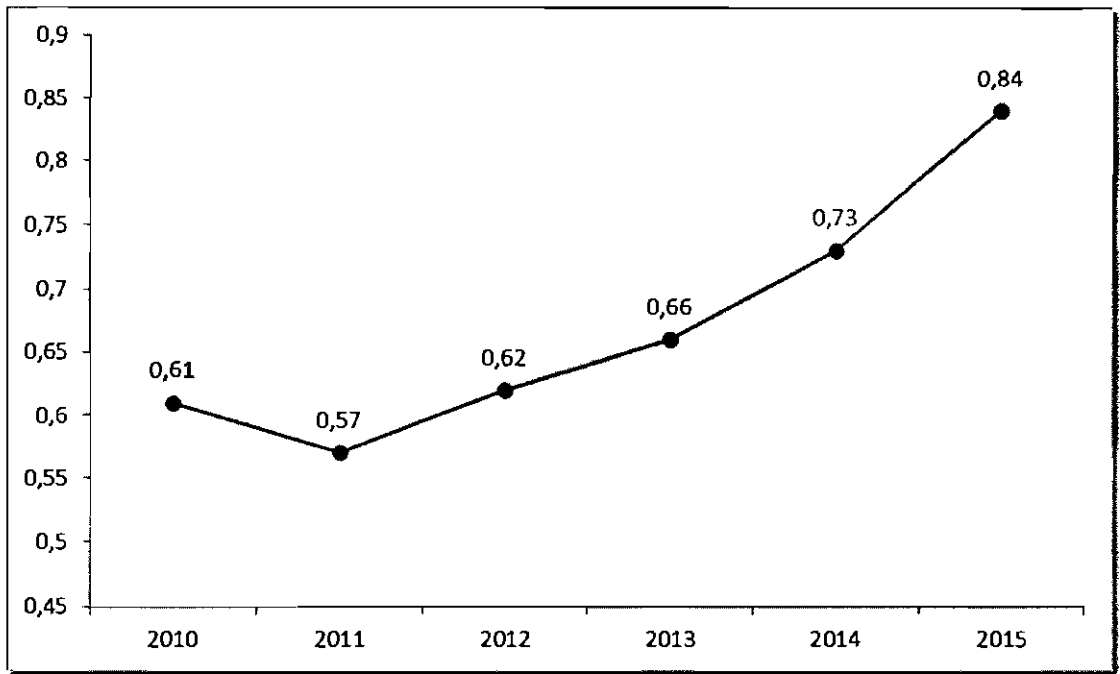


Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

Kontribusi salah satu sektor penunjang pergerakan perekonomian daerah yakni penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, kontribusi sektor ini mencapai 0,84 persen dari total PDRB.



Gambar 2.70
Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

e. Lingkungan hidup

Aspek daya saing daerah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur bidang lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air bersih. Pada tahun 2010, persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar 73,20 persen dan peningkatan persentase terjadi di setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 mencapai 89,41 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki akses ke sumber air bersih.



BAB III

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan pagu indikatif program perangkat daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target dampak dan hasil dari sasaran dan program pembangunan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun di masa lalu yaitu tahun 2014 dan 2015 dan penetapan APBD 2016 yang sekarang sedang berjalan dan proyeksi APBD 2017 dalam RKPD 2017. Realisasi beberapa tahun sebelumnya dimungkinkan untuk dicantumkan untuk memperkaya analisis. Data dan informasi dimaksud digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah khususnya pada tahun 2018.

Dalam kaitan hal itu, pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya. Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu:

1. Besarnya kemampuan keuangan daerah; yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan
2. Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat; dimana Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dengan melihat perkembangan dinamika perekonomian Internasional, nasional dan daerah Provinsi Kalimantan Timur menuntut pemerintah pusat dan daerah harus bertindak cepat dalam menyikapi dan menindaklanjuti perekonomian yang cenderung menurun. Salah satu yang mempengaruhi pembangunan daerah yaitu adalah kondisi keuangan daerah. Dengan itu maka perlu adanya perubahan dan atau perubahan pengelolaan keuangan daerah baik anggaran maupun kebijakan keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Melihat kondisi keuangan daerah sekarang ini perlu adanya strategi dan kebijakan perbaikan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Untuk memperoleh pendapatan yang melebihi target dan meminimalisasi belanja untuk mempertahankan kapasitas riil. Sehingga dengan



demikian diharapkan pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Timur mampu merangkul segala kebutuhan pendanaan dalam pembangunan daerah dalam menyikapi gejolak ekonomi yang terjadi.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal yang diukur dengan membandingkan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah APBD. Tujuan dari Derajat Desentralisasi Fiskal adalah untuk melihat persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. Perkembangan Derajat Fiskal Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2011	4.503.239	9.819.129	45,86
2012	5.409.449	11.904.245	45,44
2013	5.885.262	11.631.697	50,60
2014	6.664.586	11.287.301	59,04
2015	4.484.734	8.999.520	49,83
RATA-RATA	5.389.540.00	10.728.378.40	50,16

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur (diolah)

Dari tabel di atas, rata-rata Derajat Desentralisasi fiskal daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2011-2016 sebesar 50,16 persen yang menunjukkan peran/kontribusi pendapatan asli daerah dalam pendanaan keuangan daerah dikategorikan “sedang”. Namun demikian, Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberi harapan bagi Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.



3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sebagaimana diketahui, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian otonomi khusus.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 di bawah.



Tabel 3.2
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi				Rata-Rata Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	2015
I	Pendapatan Daerah	9.819.129	11.904.245	11.631.697	11.287.301	9.464.926
1.	Pendapatan Asli Daerah	4.503.239	5.409.449	5.885.262	6.664.586	4.950.160
1.1	Pajak Daerah	3.679.367	4.486.404	4.929.791	5.429.126	3.753.719
1.2	Retribusi Daerah	13.699	22.496	33.677	15.494	14.723
1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	215.652	207.793	291.684	310.199	230.116
1.4	Lain-lain PAD yang sah	594.520	692.755	630.110	909.766	951.602
2	Dana Perimbangan	5.298.979	6.089.861	5.335.759	4.253.321	4.503.361
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	5.206.241	5.984.332	5.272.171	4.194.970	3.805.374
2.2	DAU	51.447	52.637	55.539	57.312	0
2.3	DAK	38.188	34.616	8.048	1.038	218.651
2.4	Dana Penyesuaian	3.103	389.642	394.630	352.611	479.336
2.5	Dana Insentif Daerah	0	18.274	0	0	0
3	Lain-Lain PAD yang sah	16.910	404.935	410.676	369.394	490.741
3.1	Pendapatan Hibah	16.910	15.292	16.045	16.782	11.405

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur (diolah)



Analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 0,04 persen. Hampir semua unsur-unsur pendapatan daerah mengalami penurunan, yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 369.394 juta rupiah menjadi 490.741 juta rupiah pada tahun 2015.
2. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 4.11 persen. Semua unsur PAD menunjukkan *trend* menurun (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah) kecuali lain-lain PAD yang sah. Menurunnya pajak dan retribusi daerah disebabkan oleh transisi ekonomi Kalimantan Timur yang beralih ke pengembangan pertanian dan turunannya. Unsur PAD yang mengalami trend positif yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing 4,31 persen dan 14,12 persen.
3. Realisasi penerimaan dana perimbangan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 2,97 persen. Kenaikan dana bagi hasil pajak dan atau bukan pajak menggambarkan meningkatnya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan meningkatnya pendapatan dari eksplorasi/eksploitasi SDA yang dibagihasilkan kepada daerah.
4. Secara total realisasi, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 579,7 persen. Unsur hibah dari kelompok masyarakat cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -8,02 persen.

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:



Tabel 3.3
Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Realisasi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2011	2012	2013	2014		2015
BELANJA							
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.679.991	6.126.151	7.103.435	6.414.605	5.734.344	6,64
2.1.1	Belanja Pegawai	697.747	765.957	779.583	930.549	942.463	8,05
2.1.2	Belanja Hibah	683.778	856.807	1.567.764	909.318	966.801	18,15
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	130.813	7.073	3.940	4.249	4.419	-31,76
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.863.896	2.132.835	2.692.808	2.563.201	2.440.676	7,77
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.303.593	2.354.897	2.059.339	2.005.786	1.376.558	8,53
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	165	8.580	0	1.500	3.434	1.691,47
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.462.844	5.213.614	6.676.810	4.860.027	4.470.989	10,85
2.2.1	Belanja Pegawai	279.926	493.003	568.036	494.596	525.218	21,15
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.406.715	2.221.478	2.457.693	2.154.151	1.938.639	11,55
2.2.3	Belanja Modal	1.776.203	2.499.133	3.651.082	2.211.280	2.007.130	9,53
Jumlah Belanja		8.142.835	11.339.765	13.780.245	11.274.632	10.205.342	8,28
Proporsi Belanja Tidak Langsung (%)		57,47	54,02	51,55	56,89	56,19	-0,36
Proporsi Belanja Langsung (%)		42,53	45,98	48,45	43,11	43,81	1,02

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur (diolah)



Sedangkan analisis terhadap realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan belanja. Sebagian besar realisasi belanja digunakan untuk belanja tidak langsung rata-rata pertumbuhan mencapai 6,64 persen pada tahun 2015 yang artinya semakin besarnya porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat daerah.
- 2) Melihat tabel 3.3 diatas realisasi belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung mengalami kenaikan dan penurunan hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pemerintah daerah dalam pembangunan cenderung fluktuaktif dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi anggaran agar tingginya penyerapan anggaran berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2009-2015 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset tetap yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total aset. Pertumbuhan aset tetap Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebesar 8,14 persen. Di sisi lain kewajiban dan dimana pertumbuhan rata-rata kewajiban sebesar 24,95 persen dan ekuitas dana sebesar minus 6,00 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 3.4
Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015 (Juta Rupiah)

No.	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET								
1.1	ASET LANCAR	2.574.032	3.056.753	3.936.790	4.571.861	3.189.372	3.515.289	2.794.480	3,86%
1.1.1	Kas	803.529	1.652.456	2.839.332	3.200.549	1.053.101	1.040.451	246.354	7,60%
1.1.1.1	Piutang	1.755.023	1.336.446	684.488	324.020	343.778	951.916	978.483	10,08%
1.1.1.3	Persediaan	15.480	62.092	409.958	975.830	1.782.357	1.997.096	2.057.431	182,85%
	Belanja dibayar dimuka	-	5.759	3.012	71.463	10.136	1.783	1.452	339,69%
	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.147.051	1.534.257	2.161.020	2.404.564	2.307.568	2.179.088	2.118.541	12,25%
	Investasi Jangka Panjang	1.147.051	1.534.257	2.161.020	2.404.564	2.307.568	2.179.088	2.118.541	12,25%
1.2	ASET TETAP	12.288.534	13.889.730	15.622.005	18.258.419	21.996.097	24.220.982	18.382.849	8,14%
1.2.1	Tanah	2.367.246	2.422.730	2.493.086	2.504.598	2.524.355	2.675.688	2.499.018	0,98%
1.2.2	Peralatan dan Mesin	937.179	1.153.840	1.263.524	1.430.437	1.777.864	1.936.974	2.168.557	15,17%
1.2.3	Gedung dan Bangunan	4.069.828	4.544.584	5.018.494	5.381.582	5.698.536	6.000.013	6.804.319	8,99%
1.2.4	Jalan, irigasi dan jaringan	4.433.338	4.756.736	4.968.576	5.559.028	6.902.749	8.560.377	9.795.739	14,37%
1.2.5	Aset tetap lainnya	49.531	57.816	419.217	451.384	478.645	480.680	481.310	109,35%
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	431.412	954.024	1.459.108	2.931.391	4.613.948	4.567.247	4.202.131	53,90%
1.3	ASET LAINNYA	346.067	52.381	179.192	103.519	151.881	174.339	132.704	25,44%
1.3.1	Tagihan penjualan	4.450	5.603	5.888	4.157	3.441	2.752	2.540	-7,23%



No.	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	angsuran								
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	162	135	41	40	40	40	27	-20,21%
1.3.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970	0,00%
1.3.4	Aset tak berwujud	-	492	18.569	38.860	34.925	64.035	36.652	635,65%
1.3.5	Aset lain-lain	330.486	35.181	143.724	49.493	102.504	85.571	82.378	40,08%
	JUMLAH ASET	16.355.685	18.533.121	21.899.007	25.338.363	27.644.918	30.089.700	23.428.575	7,16%
2	KEWAJIBAN								
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	191.479	269.133	296.763	570.419	632.278	913.791	468.763	24,95%
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Utang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	-	581	315	518	2.411	2.758	3.253	69,41%
2.1.4	Utang jangka pendek lainnya	191.479	268.552	296.448	569.902	629.866	108.860	42.378	1,60%
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Utang Jangka Panjang								
	JUMLAH KEWAJIBAN	191.479	269.133	296.763	570.419	632.278	913.791	468.763	24,95%
3	EKUITAS DANA								



No.	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	2.382.554	2.787.621	3.640.027	4.020.982	2.570.017	2.601.498	-	-12,80%
3.1.1	SILPA	803.529	1.652.438	2.837.724	3.198.904	1.050.356	1.036.628	-	3,61%
3.1.2	Cadangan Piutang	1.755.023	1.342.205	687.500	395.483	353.914	477.741	-	-31,72%
3.1.3	Cadangan Persediaan	15.480	62.092	409.958	975.830	1.782.357	1.997.096	-	165,68%
3.1.4	Pendapatan yang ditangguhkan	-	19	1.608	60	-	-	-	1361,15%
3.1.5	Dana yang disediakan untuk hutang jangka pendek	-191.479	-269.133	-296.763	-549.294	-	-909.968	-	-10,68%
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	13.781.652	15.476.368	17.962.217	20.746.962	24.442.622	26.574.410	-	-4,93%
3.1.1	Diinvestasikan dalam aset tetap	12.288.534	13.889.730	15.622.005	18.258.419	21.966.096	24.220.982	-	-4,51%
3.1.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	346.067	52.381	179.192	83.979	138.957	174.339	-	15,84%
3.1.3	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	1.147.051	1.534.257	2.161.020	2.404.564	2.307.568	2.179.088	-	-3,95%
JUMLAH EKUITAS DANA		16.164.206	18.263.988	21.602.244	24.767.944	24.442.622	29.175.908	-	-6,00%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		16.355.685	18.533.121	21.899.007	25.338.363	27.644.918	30.089.700	23.428.575	7,16%

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)



Untuk menganalisis neraca Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2010-2015 akan digunakan analisis rasio sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 - 2015

NO.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	11,36	13,27	8,01	5,04	3,84	5,96
2	Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	11,13	11,88	6,30	2,23	1,66	1,57
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,015	0,014	0,023	0,023	0,030	0,020
4	Rasio hutang terhadap modal	0,015	0,014	0,023	0,023	0,030	0,020
5	Rata-Rata umur piutang	80,13	37,56	15,46	10,48	-	-
6	Rata-Rata umur persediaan	30,4167	30,4167	30,4167	30,4167	-	-
7	Perputaran total aktiva (<i>total assets turn over</i>)	0,20	0,29	0,30	0,27	-	-

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perputaran total aktiva (*total assets turn over*) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 0,20 persen di tahun 2010 menjadi 0,27 persen di tahun 2013.

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya.

a. Rasio Lancar

Secara umum, keuangan Provinsi Kalimantan Timur sangat likuid dengan kemampuan pengembalian terhadap utang lancar yang sangat tinggi. Namun jika dicermati, terlihat aktiva lancar selama empat tahun berturut-turut mengalami kenaikan dan penurunan sedangkan rasio lancar menunjukkan tren juga mengalami hal yang sama.



Tabel 3.6
Rasio Lancar Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)

NO.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Aktiva lancar	3.056.753	3.936.790	4.571.861	3.189.372	3.515.289	2.794.480
2	Kewajiban Jangka Pendek	269.133	296.763	570.419	632.278	913.791	468.763
3	Rasio lancar (Aktiva lancar: Kewajiban jangka pendek)	11,36	13,27	8,01	5,04	3,84	5,96

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

b. Quick Ratio

Quick ratio merupakan rasio lancar dengan mengurangi tingkat persediaan dari *current asset*-nya yang terlihat dari rasionya pada tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.7
Quick Ratio Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Aktiva lancar	3.056.753	3.936.790	4.571.861	3.189.372	3.515.289	2.794.480
2	Persediaan	62.092	409.958	975.830	1.782.357	1.997.096	2.057.431
3	Kewajiban Jangka Pendek	269.133	296.763	570.419	632.278	913.791	468.763
4	Quick Ratio ((Aktiva lancar - persediaan): kewajiban jangka pendek))	11.13	11.88	6.30	2.23	1,66	1,57

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang yang menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun rasio yang tergabung dalam *Ratio Leverage* adalah:

a. Rasio total hutang terhadap total aset

Rasio ini pada tahun 2012 mulai mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2011. Rasio total hutang di tahun 2013 naik menjadi 2,29 persen dari tahun sebelumnya 2,25 persen. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih cukup jauh di bawah nilai total aset yang terlihat pada tabel 3.8 dibawah ini.



Tabel 3.8
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010- 2015(Juta Rupiah)

NO.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Total Hutang	269.133	296.763	570.419	632.278	-	-
2	Total Aset	18.533.121	21.899.007	25.338.363	27.644.918	-	-
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (Total Hutang: Total Aset)	0,0145	0,0136	0,0225	0,0229	-	-

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

b. Rasio hutang terhadap modal

Rasio total hutang terhadap modal yang tertera di atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nilai total ekuitas yang merupakan nilai ekuitas dana lancar ditambah dengan nilai ekuitas dana investasi ternyata jauh lebih besar dari total hutang.

Tabel 3.9
Rasio Total Hutang Terhadap Modal Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 - 2015 (Juta Rupiah)

NO.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Total Hutang	269.133	296.763	570.419	632.278	-	-
2	Ekuitas Dana Lancar	2.787.621	3.640.027	4.020.982	2.570.017	-	-
3	Ekuitas Dana Investasi	15.476.368	17.962.217	20.746.962	24.442.622	-	-
4	Total Ekuitas (Ekuitas Dana Lancar + Ekuitas Dana Investasi)	18.263.988	21.602.244	24.767.944	27.012.639	-	-
5	Rasio Total Hutang Terhadap Modal (Total Hutang: Total Ekuitas)	0,015	0,014	0,023	0,023	-	-

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan antara lain:

- Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah piutang menjadi kas). Terlihat dari hasil perhitungan pada tahun 2010 hingga tahun 2015 bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutang adalah 18.61 hari dimana angka ini jauh lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut perhitungan lengkapnya:



Tabel 3.10
Rata-Rata Umur Piutang
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)

No.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Saldo Awal Piutang	1.755.023	1.336.446	684.488	324.020	343.778	475.958
2	Saldo Akhir Piutang	1.336.446	684.488	324.020	343.778	475.958	489.241
3	Rata-rata piutang pendapatan daerah ((saldo awal piutang + saldo akhir piutang): 2)	1.545.734	1.010.467	504.254	333.899	409.868	482.599
4	Pendapatan Daerah	7.041.041	9.819.129	11.904.245	11.631.697	11.285.828	9.464.926
5	Perputaran piutang (pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah)	4.56	9.72	23.61	34.84	27.54	19.61
6	Rata-rata umur piutang (365: perputaran piutang)	80.13	37.56	15.46	10.48	13.26	18.61

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

- b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata umur persediaan tahun 2013 sebesar 30 hari dimana angka ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.11
Rata-Rata Umur Persediaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)

NO.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Saldo Awal Persediaan	15.480.37	62.091.93	409.958.00	975.829.90	1.782.357	1.997.096
2	Saldo Akhir Persediaan	62.091.93	409.958.00	975.829.90	1.782.357	1.997.096	2.057.431
3	Rata-rata Nilai Persediaan ((saldo awal Persediaan + saldo akhir Persediaan): 2)	38.786.15	236.024.96	692.893.95	1.379.093.45	1.889.726	2.027.264
4	Nilai Persediaan yang digunakan dalam satu tahun (Rata-rata nilai persediaan x 12 bulan)	465.433.82	2.832.299.57	8.314.727.38	16.549.121.40	22.676.721	24.327.170
5	Perputaran persediaan (Nilai Persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan)	12	12	12	12	12	12



NO.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Rata-rata persediaan (365: perputaran Persediaan)	30.4167	30.4167	30.4167	30.4167	30.4167	30.4167

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

- c. Perputaran total aktiva (*total assets turn over*), rasio ini mengalami kenaikan pada tahun 2012 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 0,27. Dari angka yang cenderung kecil menggambarkan bahwa peningkatan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mendorong meningkatnya PAD. Perhitungan lengkap perputaran total aktiva dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12

Perputaran Total Aktiva

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan Asli Daerah	2.711.300	4.503.239	5.409.949	5.885.262	6.663.113	4.950.160
2	Aset Tetap	13.889.730	15.622.005	18.258.419	21.996.097	24.220.982	18.382.849
3	Perputaran Total Aktiva (PAD: Aset Tetap)	0,20	0,29	0,30	0,27	0,28	0,28

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

3.1.3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.13

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No	Tahun	Opini
1	2010	Wajar Dengan Pengecualian
2	2011	Wajar Dengan Pengecualian
3	2012	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2013	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2014	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2015	Wajar Tanpa Pengecualian

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja dalam rangka



penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- (1) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- (2) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; serta
- (3) Analisis proyeksi belanja daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikaji dari informasi pada tabel berikut.



Tabel 3.14
Proporsi Penggunaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	Realisasi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2011	2012	2013	2014		2015
BELANJA							
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.679.991	6.126.151	7.103.435	6.414.605	5.734.344	6,64
2.1.1	Belanja Pegawai	697.747	765.957	779.583	930.549	942.463	8.05
2.1.2	Belanja Hibah	683.778	856.807	1.567.764	909.318	966.801	18.15
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	130.813	7.073	3.940	4.249	4.419	-31,76
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.863.896	2.132.835	2.692.808	2.563.201	2.440.676	7,77
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.303.593	2.354.897	2.059.339	2.005.786	1.376.558	8,53
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	165	8.580	0	1.500	3.434	1.691,47
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.462.844	5.213.614	6.676.810	4.860.027	4.470.989	10,85
2.2.1	Belanja Pegawai	279.926	493.003	568.036	494.596	525.218	21,15
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.406.715	2.221.478	2.457.693	2.154.151	1.938.639	11,55
2.2.3	Belanja Modal	1.776.203	2.499.133	3.651.082	2.211.280	2.007.130	9,53
	Jumlah Belanja	8.142.835	11.339.765	13.780.245	11.274.632	10.205.342	8,28
	Proporsi Belanja Tidak Langsung (%)	57.47	54.02	51.55	56.89	56.19	-0,36
	Proporsi Belanja Langsung (%)	42.53	45.98	48.45	43.11	43.81	1,02

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur (diolah)



Tabel 3.15
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

No	TAHUN	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2011	1.270.750	8.142.835	15,61
2	2012	1.514.854	11.339.765	13,36
3	2013	1.696.672	12.900.000	13,15
4	2014	1.587.234	12.217.683	12,99
5	2015	1.223.918	9.699.058	12,19

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur (dialah)

Dari tabel 3.15 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif dan penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 cukup signifikan yaitu sebesar 13,15 persen hingga 12,19 persen. Selain disebabkan total pengeluaran pemerintah yang meningkat tajam, penurunan ini disebabkan pula karena upaya pemerintah untuk lebih memprioritaskan belanja publik untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar kebutuhan masyarakat.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan seperti honorarium tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.



Tabel 3.16
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat
Serta Prioritas Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	2.472.776	2.782.161	3.063.571	3.617.431	3.289.765	7,91
1	Gaji dan Tunjangan	321.603	345.849	465.048	467.878	414.013	770,00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	274.906	290.737	323.347	354.834	421.576	1138,00%
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.370	12.740	13.621	15.268	13.482	258,00%
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	1.863.897	2.132.835	2.261.555	2.779.451	2.440.676	7,79
B.	Belanja Langsung	37.833	50.749	48.227	48.227	194.396	83,06
5	Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis	0	0	0	0	0	0
6	Belanja Beasiswa tugas belajar PNS	26.492	35.818	28.695	37.765	18.040	-133,00%
7	Belanja Jasa Kantor	11.341	14.931	19.532	23.914	57.891	56,75
	- Belanja Air	4.412	5.283	4.645	4.914	4.230	-0,12
	- Belanja Listrik	3.540	4.445	5.302	6.281	32.730	121,1
	- Belanja Surat Prov.ar / Majalah	2.591	3.145	3.485	4.336	2.891	5,82
	- Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	798	2.059	6.100	14.105	6.626	108,12
	- Belanja Sewa Gedung	0	0	0	0	11.414	-
8	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	0	0	0	0	10.574	-
C.	Pembiayaan pengeluaran	0	0	0	0	50.000	-
9	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
10	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
	Total	2.521.950	2.847.842	3.131.330	3.665.658	3.690.318	10,15

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur (dialah)



Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2011-2015 dapat dijelaskan antara lain:

- 1) Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 10,15 persen. Kenaikan ini dikarenakan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.
- 2) Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung adalah sebesar 7,91 persen. Dalam pengecekannya, perhitungan kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena semua unsur belanja tidak langsung cenderung meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2014 dan mengalami penurunan ditahun 2015. Terlebih lagi unsur belanja bagi hasil yang dominan juga meningkat baik dari sisi jumlah dana maupun persentase.
- 3) Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung pada pengeluaran periodik dan pengeluaran yang wajib dan mengikat pada tahun 2011-2015 sebesar 83,06 persen.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1.	Pendapatan	9.819.129	11.904.245	11.631.697	11.287.301	9.464.926	-0,04
	Dikurangi Realisasi:						
2.	Belanja Daerah	8.142.835	11.339.765	13.780.245	11.274.632	10.205.342	8,28
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	491006	202.800	0	25.000	50000	426,66
	DEFISIT RIIL (REALISASI)	1.185.288	361.680	2.148.548	12.331	-790.416	1.361,77

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur (diolah)



Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa komposisi penutup defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya ditutup dari sumber pembiayaan sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 3.18
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertum- buhan
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.652.437	2.837.723	3.198.903	1.050.356	1.036.628	4,32%
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-
4.	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur (diolah)

SilPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SilPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Jumlah SilPA tahun anggaran sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 4,23 persen yang berarti telah terjadi penurunan efektivitas penggunaan anggaran terutama pada dua tahun terakhir yang sisa lebih penghitungan anggarannya menurun cukup drastis.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan. Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat.



3.3.1 Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan merupakan target pendapatan yang diharapkan akan tercapai oleh suatu daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Penentuan proyeksi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan positif maupun pertumbuhan negatif pendapatan daerah yang secara umum dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan di bidang keuangan negara.

Dengan melihat realisasi pada tahun sebelumnya (2013-2015) maka Proyeksi pendapatan daerah tahun 2016-2018 Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel 3.19 berikut.



Tabel 3.19
Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2015 dan Target Pendapatan Tahun 2016-2018 Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)

URAIAN		Realisasi			Target		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
PENDAPATAN		11.631.697	11.287.301	9.464.926	10.296.924	6.080.056	6.718.101
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.885.262	6.664.586	4.950.160	5.089.508	3.987.450	4.187.639
	1 Pajak Daerah	4.929.791	5.429.126	3.753.718	4.012.255	3.034.590	3.091.089
	2 Retribusi Daerah	33.677	15.494	14.722	12.996	23.133	12.308
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	291.684	310.199	230.816	289.251	161.561	226.276
B	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	630.110	909.766	951.602	775.005	768.165	857.270
	DANA PERIMBANGAN	5.335.759	4.253.321	4.503.361	5.186.846	2.080.704	2.518.079
	1 Bagi Hasil Pajak	-	-	639.155	833.000	1.992.750	2.437.677
	2 Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	3.166.218	3.212.361		
C	3 Dana Perimbangan Lainnya	5.335.759	4.253.320	4.024.025	1.091.484	87.954	80.402
	a. Dana Alokasi Umum	55.539	57.312	0	80.402	87.954	80.402
	b. Dana Alokasi Khusus	8.048	1.038	218.651	1.011.082		-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	410.676	369.394	490.741	20.570	11.902	12.382
	1 Pendapatan Hibah	-	-	11.404	15.570	11.902	12.382
	2 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	-	-	479.336	5.000	-	-



Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah tidak lepas dari pemahaman realisasi pendapatan daerah pada periode sebelumnya dan juga harus diselaraskan dengan isu strategis terkait pada periode lima tahun ke depan.

Proyeksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendapatan daerah dalam kurun waktu dua tahun ke depan cukup berhati-hati dan jauh dari kesan “muluk-muluk”, mengingat pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur cukup signifikan penurunannya jika dibandingkan dengan tiga tahun terakhir. Secara umum, kekhawatiran tersebut ditujukan pada pendapatan dari dana perimbangan terutama terkait dengan bagi hasil bukan pajak pada sektor migas dan batubara, sebagaimana dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai pajak daerah cenderung fluktuatif jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi pajak pada tahun 2011 sampai tahun 2015 yaitu sebesar 2,77 persen. Selain itu, pajak daerah merupakan kontributor tertinggi dalam pembentukan pendapatan asli. Proyeksi pajak daerah dalam tiga tahun ke depan tidak menunjukkan perubahan yang berarti meskipun mengalami penurunan (tapi tidak signifikan) pada periode 2016-2018. Hal ini dikarenakan terjadinya *cancel out* pajak daerah dari hasil kebijakan pemerintah sehingga menimbulkan faktor pendorong dan penarik proyeksi pajak daerah.

Faktor pendorong (penambah) proyeksi pajak daerah:

- a. Adanya kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang berefek pada kenaikan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan secara tidak langsung kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- b. Melakukan penertiban dan penataan pungutan terhadap wajib pajak seperti menggunakan sistem “jemput bola” (penempatan mobil Samsat di kampus, penyediaan speed boat untuk wajib pajak daerah terpencil, hingga sarasa Samsat Jelajah);
- c. Secara periodik melakukan sosialisasi, razia lapangan, penagihan, pendataan, hingga rekonsiliasi terhadap seluruh wajib pajak terkait berbagai hak dan kewajibannya; dan
- d. Mulai tahun 2014, pajak rokok akan menjadi sumber pendapatan daerah.

Faktor penarik (pengurang) proyeksi pajak daerah:

- a. Berkurangnya potensi pajak daerah yang berasal dari Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b. Pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor serta pembebasan sanksi administrasi dan pokok bea balik nama kendaraan kedua dan seterusnya (Pergub no. 5 tahun 2013).

2. Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Proyeksi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, mengalami penurunan signifikan pada



periode 2013-2014 yang dipengaruhi oleh adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara sehingga potensi retribusi daerah berkurang namun proyeksi pada 2014-2018 mengalami kenaikan secara konsisten yang disebabkan oleh:

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya sarana-prasarana yang dimiliki instansi terkait kesehatan;
- b. Penerapan retribusi penggantian biaya cetak peta oleh Distamben Provinsi Kalimantan Timur yang dimulai pada tahun 2014;
- c. Peningkatan sarana tersier kebutuhan masyarakat seperti tempat rekreasi, olahraga, maupun penginapan/hotel;
- d. Peningkatan kuantitas produksi usaha daerah dari berbagai sektor;
- e. Peningkatan pengguna kendaraan bermotor yang akan mendongkrak retribusi parkir;
- f. Peningkatan hasil penyertaan modal pada perusahaan daerah dan pihak ketiga;
- g. Kenaikan suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan pendapatan daerah; dan
- h. Peningkatan sumbangan pihak ketiga.

3. Urgensi Sektor Migas dan Batubara terhadap Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang merupakan kontributor terbesar pendapatan daerah pada tahun 2012 mengalami penurunan pada tahun 2013 dan berimbas pada proyeksi dana perimbangan periode 2016-2018. Penurunan dana perimbangan pada tahun 2013-2015 cenderung fluktuatif, dana perimbangan tahun 2013 yang mencapai 5,34 triliun dan proyeksi secara umum terus menurun hingga tahun 2018 dana perimbangan diproyeksikan hanya sebesar 2,52 triliun. Terdapat beberapa indikator pemicu penurunan proyeksi dana perimbangan yakni sebagai berikut.

- a. Pada dana perimbangan dari hasil bagi pajak, pemicu penurunan dana perimbangan diakibatkan pada penurunan penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penurunan bagi hasil PBB terjadi karena penerimaan sektor PBB P2 (pedesaan dan perkotaan) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Sehingga penerimaan sektor PBB pemerintah provinsi hanya berasal dari PBB P3 (Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan). Selain itu, dengan diterbitkannya surat edaran Gubernur 180/1375-HK/2013 tertanggal 25 Januari 2013 (terkait moratorium perijinan pembukaan lahan pertambangan dan kehutanan) akan menyebabkan PBB P3 mengalami penurunan.
- b. Pada dana perimbangan dari hasil bukan pajak, pemicu terbesar penurunan dana perimbangan berasal dari bagi hasil sektor migas dan batubara. Penurunan bagi hasil pertambangan terjadi karena:
 - Adanya pembatasan jumlah produksi batubara oleh pemerintah pusat
 - Harga batubara dari tahun ke tahun cenderung menurun karena adanya ekonomi global yang dibarengi penurunan permintaan batubara



- Penurunan produksi batubara karena merupakan sumber daya alam tak terbarukan

Sedangkan penurunan bagi hasil sektor migas terjadi karena:

- Belum diketemukannya cadangan baru untuk eksplorasi migas (wilayah 0-12 mil)
- Terjadinya penurunan produksi migas secara alamiah sekitar 6-10 persen per tahun

3.3.2 Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.20 maka dapat di proyeksikan besaran SiLPA tahun 2014-2016 setiap tahunnya selalu mengalami selisih positif. Jika dilihat pada tabel di bawah ini maka Provinsi Kalimantan Timur mempunyai SiLPA sebesar 750.000 juta rupiah tahun 2014 dan pada tahun 2016 ditargetkan provinsi Kalimantan Timur mempunyai SiLPA sebesar 800.000. Dengan terjadinya gejolak perekonomian nasional pada tahun 2016 yang secara tidak langsung berdampak pada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur maka ditargetkan tidak ada SiLPA pada tahun 2017 dan 2018.



Tabel 3.20
Realisasi dan Target Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2014	2014	2015	2015	2016	2016
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.800.000	1.038.025	800.000	287.098	800.000	-
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Kembali Pemberian - Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

Dengan menggunakan asumsi bahwa SiLPA semakin menurun di tiap tahunnya dan pada tahun 2017 dan 2018 ditargetkan tidak ada SiLPA, maka hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan mengefisienkan anggaran. Oleh karena itu perlu kebijakan untuk menggenjot kinerja Perangkat Daerah agar proyeksi bisa terwujud sehingga efektifitas anggaran tetap terjaga.

3.3.3 Proyeksi belanja wajib dan mengikat

Dengan membandingkan antara target pada RKPD dan realisasi anggaran pada tahun 2014 hingga 2015, maka akan terlihat pergerakan anggaran keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pergerakan anggaran tersebut dapat digunakan untuk asumsi pendanaan pada periode selanjutnya, khususnya pada tahun 2018. Target dan realisasi anggaran belanja wajib mengikat pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.21

Realisasi dan Target Belanja Wajib dan Mengikat Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A.	Belanja Tidak Langsung	6.351.511	3.617.431	3.153.819	3.289.765	5.809.876	5.199.684	3.537.016			
	1 Gaji dan Tunjangan	933.503	467.878	451.316	414.013	1.052.777	1.550.000	1.830.000			
	2 Tambahan Penghasilan PNS	-	354.834	445.300	421.576	-					
	3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	15.268	13.749	13.482	-					
	4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Prov.upaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.342.065	2.779.451	2.243.454	2.440.676	2.098.380	1.583.213	1.583.213			
	5 Belanja Hibah dan Bansos wajib	1.138.015	-	-	-	1.171.123	37.250	37.250			
	6 Belanja Bantuan Sosial	5.500	-	-	-						
	7 Belanja Bantuan keuangan Kab/Kota (Bankeu Spesifik)	1.901.327	-	-	-	1.461.640					
	8 Belanja bantuan parpol	1.100	-	-	-	-	1.553	1.553			



No	Uraian	Target 2014		Realisasi 2014		Target 2015		Realisasi 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	9 Belanja Tidak Terduga	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	5.000	-
	10 Bonus PON											42.000			
	11 Hutang Bagi Hasil 2015											241.073			
	Hutang Bagi Hasil 2015 Kaltara											12.414			
	12 Hutang Bantuan Keuangan 2015											104.452			
	13 Pokok Pikiran											304.875			
	14 DAK (Dana Alokasi Khusus)											1.133.767			
	15 DID (Dana Insentif Daerah)											7.500			
	16 Dana Reboisasi											157.087			
	15 Pilkada											4.500		80.000	
B.	Belanja Langsung	7.328.488	48.227	222.167	194.396	1.234.300	2.027.420	2.640.076							
1	Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis	666.152	37.765	72.626	0	-									
2	Belanja Beasiswa tugas belajar PNS			28.824	18.040	-									
3	Belanja Jasa Kantor	2.868.999	23.914	96.411	57.891	-									
	- Belanja Air	-	4.914	6.631	4.230	-									
	- Belanja Listrik	-	6.281	41.527	32.730	-									



No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	- Belanja Surat Prov.ar / Majalah	-	4.336	4.135	2.891	-	-				
	- Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	-	14.105	8.220	6.626	-	-				
	- Belanja Sewa Gedung	-	0	35.898	11.414	-	-				
4	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	0	24.306	10.574	-	-				
5	Belanja Modal	3.793.335	-	-	-	-	-				
6	Belanja MYC	-	0	-	348.000	735.000	1.149.390	1.739.296			
	a) Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	-	0	-	0	332.000					
	b) Pembangunan Bandara Samarinda Baru	-	0	-	0	272.000					
	c) Pembangunan Jembatan Mahakam 4	-	0	-	0	41.000					
	d) Pembangunan Jalan mendekat Perekat Jembatan	-	0	-	0	90.000					
	e) Pembangunan SPAM Maloy	-	0	-	0	37.-					



No	Uraian	Target 2014		Realisasi 2014		Target 2015		Realisasi 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018	
7	f) Pembangunan Pipa transmisi Sekerat Malay	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Belanja BLUD	-	-	289.209	289.209	-	-	647.039	647.039	499.300	499.300	697.700	697.700	713.780	713.780
	a) RSUD AWS Samarinda	-	-	0	0	-	-	0	0	276.000	276.000	-	-	-	-
	b) RSUD Kanujoso Djatiwibowo	-	-	0	0	-	-	0	0	204.000	204.000	-	-	-	-
	c) UPTD Lab.Kes Dinkes	-	-	0	0	-	-	0	0	2.800	2.800	-	-	-	-
C.	d) RSUD Atma Husada	-	-	0	0	-	-	0	0	16.500	16.500	-	-	-	-
	Pembiayaan pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.330	180.330	187.000	187.000
	1 Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Pembayaran Pokok Utang	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Kewajiban Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.330	180.330	187.000	187.000
Total		13.679.999	13.679.999	3.665.658	3.665.658	3.375.986	3.375.986	3.690.318	3.690.318	7.018.222	7.018.222	7.227.106	7.227.106	6.177.092	6.177.092



3.3.4 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan untuk prioritas I, II, dan III tersaji pada tabel 3.22 :

Tabel 3.22
Realisasi dan Target Kapasitas Riil Keuangan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

No	URAIAN	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pendapatan	12.000.000	8.527.563	10.296.924	7.710.900	6.718.101
2.	Pencairan Dana Cadangan					
3.	SILPA	1.800.000	800.000	800.000	-	-
Total		13.800.000	9.327.563	11.096.924	7.710.900	6.718.101
Kurangi						
4.	Belanja wajib mengikat	6.351.511	3.375.986	7.018.222	7.227.106	6.177.092
Kapasitas Riil		7.448.489	5.951.577	4.078.702	483.793	541.008

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur (diolah)

Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan ke berbagai program kegiatan sesuai urutan prioritas berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan calon kepala daerah. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III dimana setiap tingkatan prioritas mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas di atasnya terpenuhi.

➤ Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) calon kepala daerah sebagaimana dijanjikan pada kampanye pemilukada. Selain itu, alokasi anggaran juga harus disesuaikan dengan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti di bidang pendidikan mendapat alokasi dana 20 persen dari belanja daerah.

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, serta memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi sehingga memberikan dampak luas pada masyarakat sesuai dengan capaian visi dan misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk menyederhanakan perhitungan, pendanaan prioritas I akan dihitung sesuai pagu total program pembangunan daerah atau program prioritas untuk mencapai sasaran RPJMD sebagaimana diuraikan di bab VII.



➤ Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis pada tiap bidang urusan. Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat. Program/kegiatan unggulan ini harus disesuaikan dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

➤ Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Tabel 3.23
Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah)

No.	Uraian	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	7.448.489	5.951.577	7.566.354		
Rencana alokasi prioritas I dan II						
II	Belanja Langsung seluruh bidang urusan	6.705.599	5.349.235	5.354.981		
II.a	Jumlah prioritas I	5.668.892	2.829.823	2.863.410		
II.b	Sisa belanja langsung untuk prioritas II (II-II.a)	1.036.707	2.519.412	2.491.571		
III	Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0	0	0		
IV	Jumlah prioritas III (I-II-III)	742.890	602.342	895.290		
Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III-IV)		0	0	0		



Tabel 3.24
Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah)

No	Uraian	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	Total Penerimaan	13.800.000	9.327.563	11.046.924		
II	Belanja Langsung (IIa + IIb)	6.705.599	5.571.402	5.605.680		
IIa	Belanja langsung seluruh bidang urusan (prioritas I & II)	6.705.599	5.349.235	5.354.981		
IIb	Belanja langsung wajib dan mengikat	0	222.167	250.699		
III	Belanja tidak langsung (IIIa + IIIb)	7.094.401	3.756.161	4.125.161		
IIIa	Belanja tidak langsung (Prioritas III)	742.890	602.342	895.290		
IIIb	Belanja tidak langsung wajib dan mengikat	6.351.511	3.153.819	3.229.871		
IV	Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0	0	0		
V	Surplus/defisit (I-II-III-IV)	0	0	0		



BAB IV

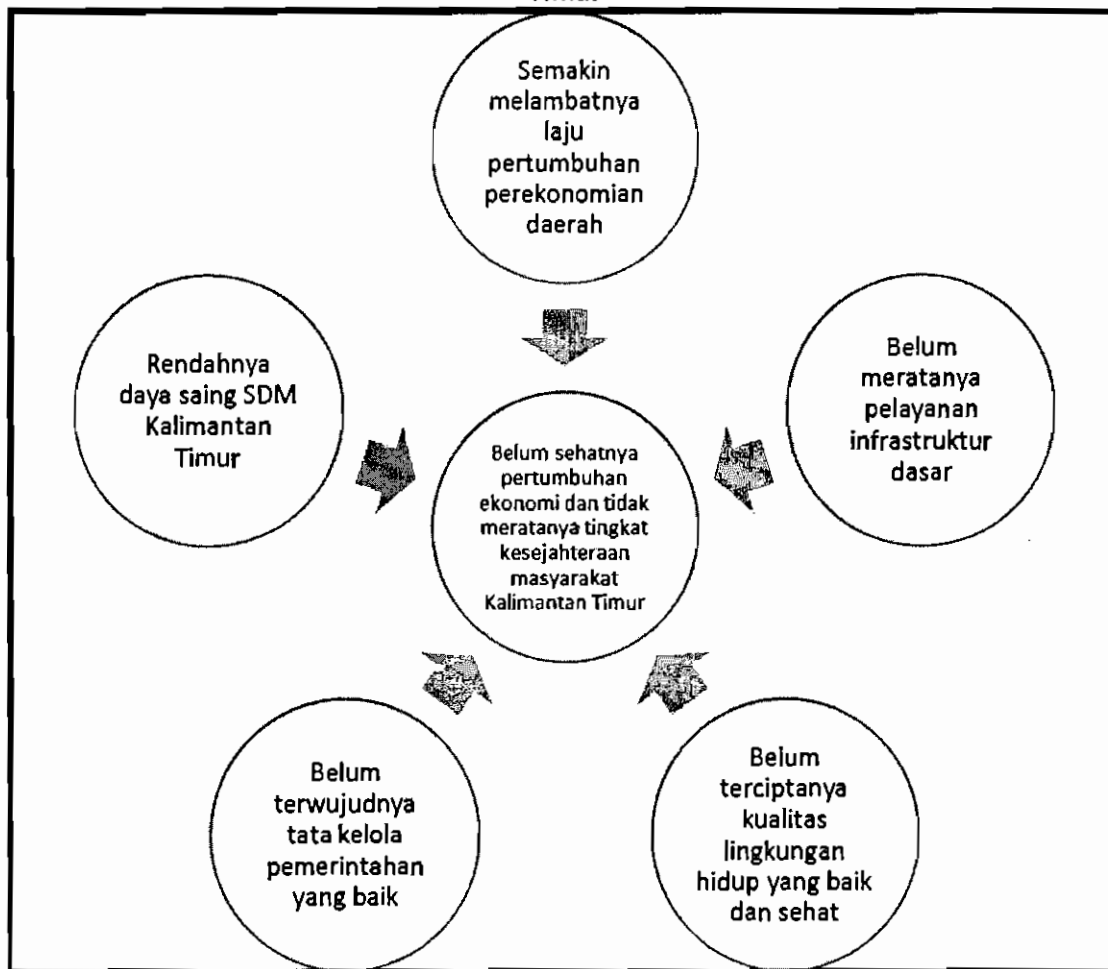
Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan dimaknai sebagai prioritas pembangunan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan harus dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam RKPD selama lima tahun. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka diidentifikasi lima permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu: **rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur, semakin melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.** Kelima permasalahan utama tersebut menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4.1
Permasalahan Utama Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur



1. Rendahnya Daya Saing SDM Provinsi Kalimantan Timur

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Provinsi Kalimantan Timur berperan di berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah. Rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur berkorelasi dengan kualitas SDM. Indikasi atas kualitas SDM antara lain diukur dengan sejauh mana SDM Provinsi Kalimantan Timur dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurang-kurangnya di “negeri” sendiri. Selain itu, masih dominannya produk primer yang menjadi andalan ekspor menunjukkan bahwa kemandirian lokal SDM masih menjadi kendala utama pembangunan karena belum mampu memberi nilai tambah terhadap potensi sumber daya alam yang dihasilkan.

Rendahnya kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan serta akses dan mutu pelayanan kesehatan masih perlu di tingkatkan. Permasalahan rendahnya akses dan



mutu pendidikan dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Timur yang hanya mencapai 9,04 tahun pada tahun 2014 dari target 10,00 dan meningkat menjadi 9,15 tahun pada tahun 2015 dari target 10,50. Selain itu, terlihat pada Angka Partisipasi Sekolah yang belum 100 persen untuk usia pendidikan dasar terlebih lagi pada usia pendidikan menengah atas yang hanya mencapai 80,68 persen.

Permasalahan berikutnya yang memengaruhi rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat penting mengingat kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Angka harapan hidup di Provinsi Kalimantan Timur cenderung naik perlahan dimana pada tahun 2013 sebesar 73,52 tahun dan meningkat sebesar 0,10 tahun menjadi 73,62 tahun pada tahun 2014 serta pada tahun 2015 capaian angka harapan hidup mengalami sedikit kenaikan kembali menjadi selama 73,65 tahun.

Selain itu, masih belum optimalnya pemerataan pelayanan kesehatan menjadi kendala tersendiri bagi pembangunan di bidang kesehatan. Hal ini terlihat pada kelahiran bayi yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih hanya kisaran 91,26 persen pada tahun 2015. Kemudian angka kematian ibu melahirkan yang meningkat menjadi 177 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi yang mencapai 21 per 1.000 kelahiran hidup perlu menjadi "Pekerjaan Rumah" bagi *stakeholder* terkait untuk menuntaskan permasalahan yang sangat vital dalam pembangunan ini.

Tabel 4.1
Perbandingan Komponen IPM
Regional Kalimantan, Tahun 2015

Provinsi	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	IPM
1. Kalimantan Barat	69,87	12,25	6,93	65,59
2. Kalimantan Tengah	69,54	12,22	8,03	68,53
3. Kalimantan Selatan	67,80	12,21	7,76	68,38
4. Kalimantan Timur	73,65	13,18	9,15	74,17
5. Kalimantan Utara	72,16	12,54	8,36	68,76
Indonesia	70,78	12,55	7,84	69,55

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Jika dilihat perbandingan se-regional Pulau Kalimantan, capaian daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat pertama baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Terlebih lagi dari segi pendidikan yakni rata-rata lama sekolah, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang sudah mewujudkan rata-rata lama sekolah hingga menyelesaikan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Jika diperbandingkan dengan level



nasional, terlihat selisih yang signifikan baik pada komponen angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, maupun harapan lama sekolah, dimana capaian Provinsi Kalimantan Timur jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Meskipun begitu, hal ini tetap diangkat menjadi suatu permasalahan mengingat sumber daya manusia merupakan subyek pembangunan utama sehingga kualitasnya harus diperhatikan dengan mendayagunakan setiap potensi yang ada.

Agar rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya maka perlu dipahami sumber/akar masalah pada masing-masing masalah pokok. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Rumusan Permasalahan: Rendahnya Daya Saing SDM Provinsi Kalimantan Timur

Masalah	Akar Masalah
1) Indeks Pembangunan Manusia yang masih perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah perbatasan dan terpencil. 2. Rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. 3. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tinggi. 4. Masih rendahnya sarana dan prasarana layanan publik terhadap anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas, dan anak yang bermasalah hukum.
2) Rendahnya akses dan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan (kurangnya pembiayaan sekolah). 2. Sebagian guru belum berkualitas dengan distribusi yang tidak proporsional di setiap wilayah 3. Masyarakat masih menganggap pendidikan mahal. 4. Masih terdapat sekolah yang mengadakan pungutan 5. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal yang menjangkau setiap strata masyarakat. 6. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan 7. Adanya anak-anak usia sekolah yang membantu orang tua untuk mencari

--

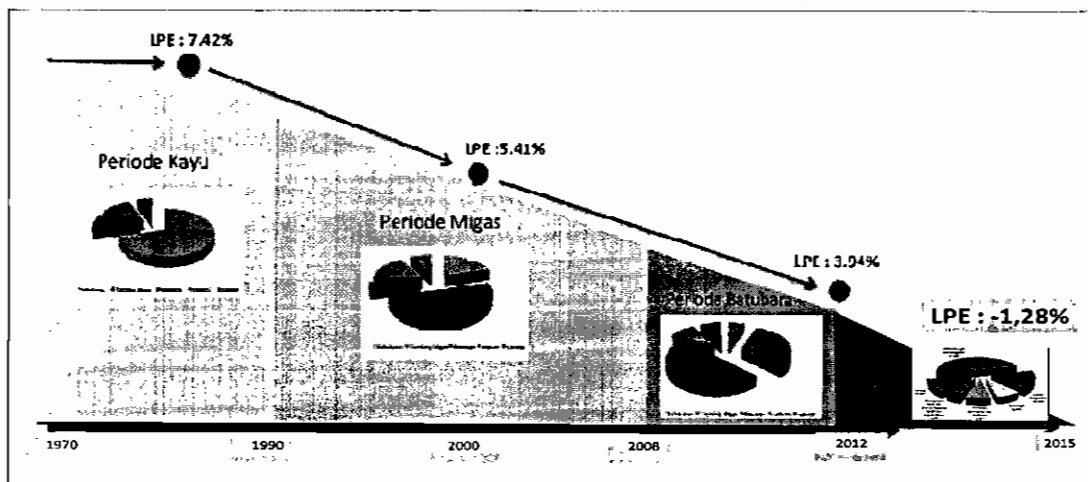


Masalah	Akar Masalah
	nafkah
3) Akses dan mutu pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum meratanya program jamkesmas ke seluruh masyarakat terutama penduduk ekonomi lemah2. Belum maksimalnya kerjasama dengan pihak lain (swasta) yang mampu mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat3. Kualitas pelayanan kesehatan yang belum efektif & efisien thdp pasien4. Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan, dan terpencil5. Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan, dan terpencil6. Rendahnya akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan daerah terpencil

2. Semakin melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan berbagai dampak dari kebijakan dan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak lanjutan terutama pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa dekade mengalami penurunan sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Dalam Tiga Dekade Terakhir



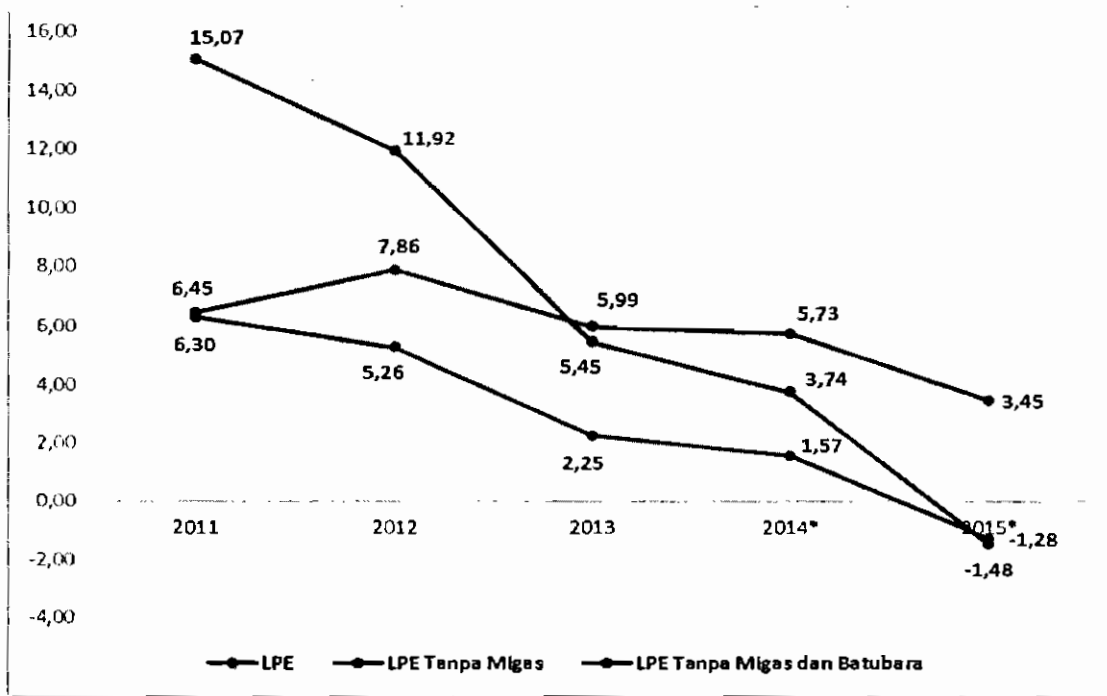
Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2016



Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak 40 tahun yang lalu dimana Provinsi Kalimantan Timur telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang sehat dan berkualitas sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di atas. Penurunan tingkat pertumbuhan dari 7,42 persen pada periode “booming” kayu yang merupakan industri yang padat karya (*labour intensive*) menjadi 5,41 persen pada era migas yang padat modal (*capital intensive*) mengakibatkan pengangguran meningkat hingga diatas 10 persen. Selanjutnya, penurunan laju pertumbuhan ekonomi akibat pergeseran basis ekonomi dari migas ke batu bara berimbas pada meningkatnya pengangguran hingga pada tahun 2007 angka pengangguran berada pada titik tertinggi dalam sejarah ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 12,83 persen. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,50 persen dimana angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 7,54 persen.

Selama periode lima tahun terakhir, kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami banyak tekanan. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun terakhir hingga mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,28 persen pada tahun 2015. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan antara regional Kalimantan maupun level nasional. Pertumbuhan negatif ini disinyalir karena menurunnya kontribusi sektor-sektor yang memiliki dominasi perekonomian maupun sisi strategis dalam pembentukan perekonomian makro daerah utamanya sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.

Gambar 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 (%)



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2016



Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami perlambatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 1,57 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,52 persen. Sementara pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kaltim tumbuh negatif 1,28 persen. Hal ini akibat sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki peran sebesar 44,91 persen terhadap PDRB menurun laju pertumbuhannya di bawah pertumbuhan tahun 2014 yakni menjadi negatif 4,83 persen. Jika dilihat berdasarkan kategorinya, maka pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada kategori pengadaan listrik dan gas (25,41%) dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial (12,04%).

Laju pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Pulau Kalimantan mengalami penurunan kecuali Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, diantara lima provinsi di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi negatif sehingga secara otomatis juga menduduki peringkat terakhir dalam laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Regional Kalimantan dan Nasional, Tahun 2012-2015

Provinsi	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
1. Kalimantan Barat	5,91	6,05	5,03	4,81
2. Kalimantan Tengah	6,87	7,37	6,21	7,01
3. Kalimantan Selatan	5,97	5,33	4,85	3,84
4. Kalimantan Timur	5,26	2,25	1,57	-1,28
5. Kalimantan Utara	7,77	8,15	8,18	3,13
Indonesia	6,16	5,71	5,20	4,98

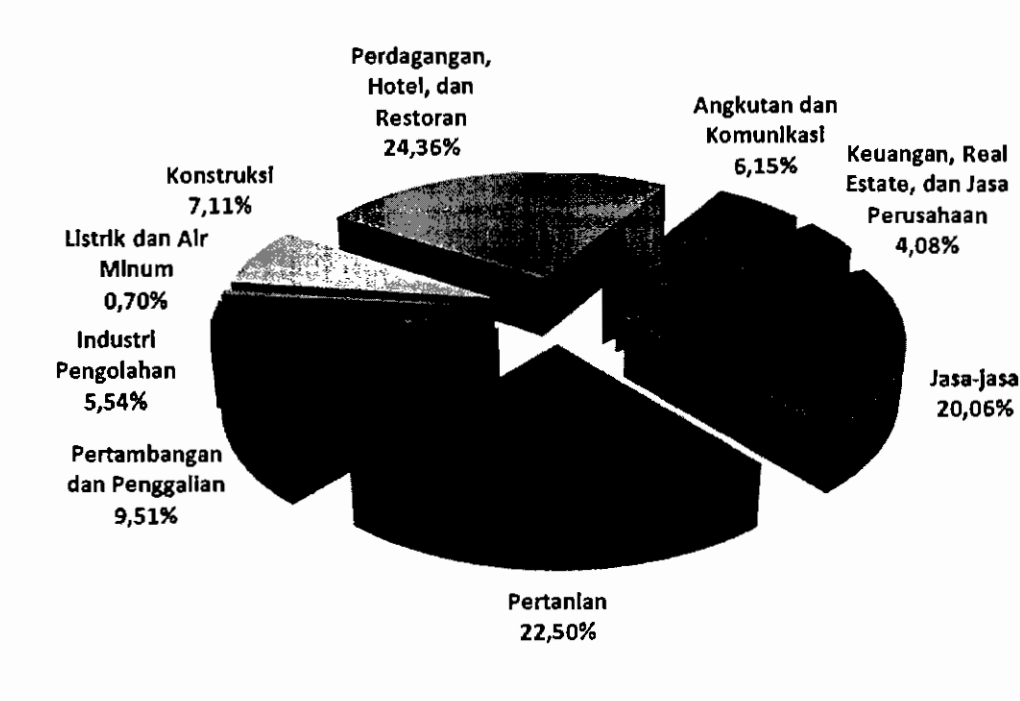
Terkait hal tersebut, perlambatan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah terutama sektor-sektor yang memiliki andil besar (pertambangan dan penggalian) dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur sehingga gejala perekonomian wilayah dapat diantisipasi.

Hal menarik terkait perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur yakni bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur jauh dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, namun kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendapatan nasional sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi sektor migas dan batubara dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada kontribusi PDRB nasional. Namun yang perlu digarisbawahi adalah produksi minyak, gas, dan batubara terus



menurun dari tahun ke tahun yang menyebabkan penurunan nilai tambahnya sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun meskipun nilai PDRB masih tergolong tinggi.

Gambar 4.4
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



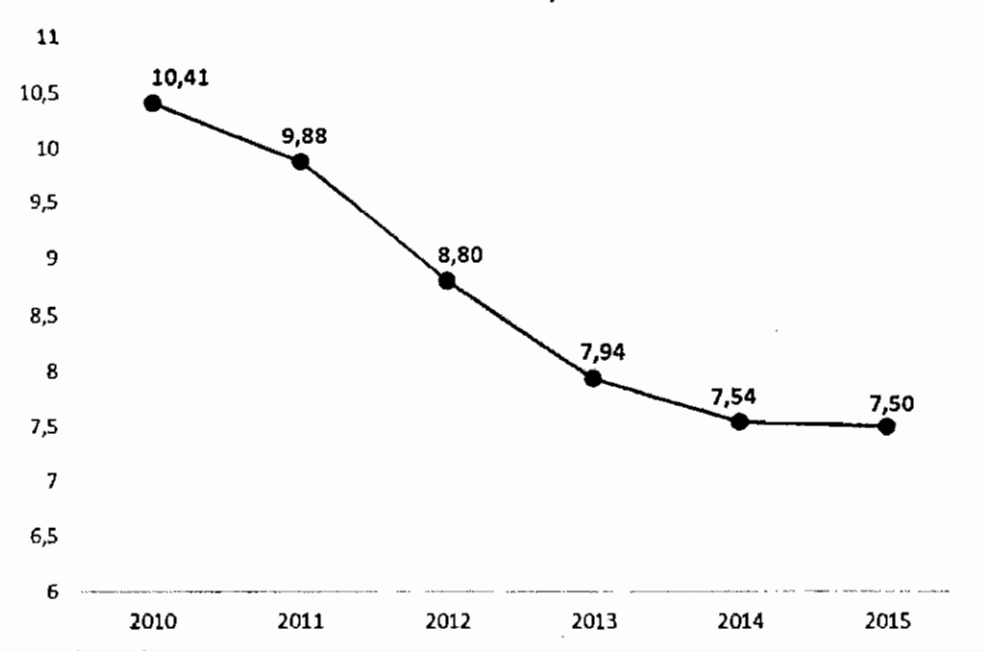
Sumber: Data Pembangunan Kaltim, Tahun 2016

Pada tahun 2015, sebanyak 92,50 persen penduduk memiliki pekerjaan yang terbagi pada sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restaurant (24,36%) dan diikuti oleh penduduk yang bekerja pada sektor pertanian yang mencapai 22,50 persen. Sedangkan penduduk paling sedikit bekerja di sektor Listrik dan Air Minum (0,70%).

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,50 persen dimana angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 7,54 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur sehingga keberlanjutan program prioritas yang memberdayakan masyarakat harus terus dioptimalkan.

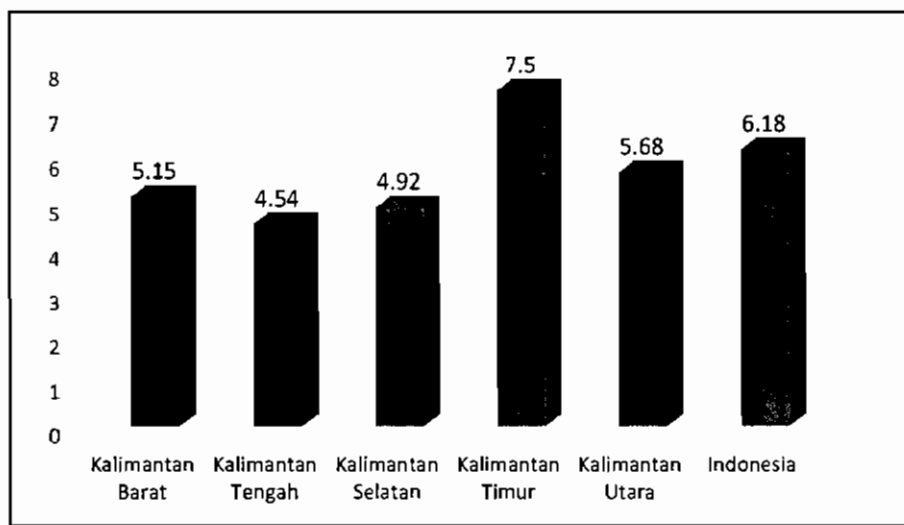


Gambar 4.5
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Gambar 4.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Regional Pulau Kalimantan dan Nasional, Tahun 2015 (kondisi Agustus)



Sumber: BPS RI, 2015

Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur merupakan tingkat pengangguran tertinggi di regional Pulau Kalimantan dimana pada kondisi Agustus 2015, tingkat pengangguran mencapai 7,50 persen. Sedangkan keempat provinsi lain memiliki



tingkat pengangguran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pengangguran Provinsi Kalimantan Timur maupun level nasional yang mencapai 6,18 persen.

Kualitas sumber daya manusia (utamanya angkatan kerja) menentukan kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan spesifikasi tenaga kerja dari sektor ekonomi. Dengan basis ekonomi wilayah yang padat modal dan membutuhkan kemampuan yang cukup tinggi, kondisi pasar tenaga kerja lokal terbilang rentan dalam memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor-sektor utama perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Kualitas tenaga kerja yang tinggi merupakan kebutuhan dasar pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang mempunyai *skill*, handal, dan dapat dipercaya dalam mengelola sumber daya dengan maksimal akan menjadikan daya saing tenaga kerja lebih *powerfull*. Efek dari kondisi tersebut meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal dan secara otomatis akan meningkatkan daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur.

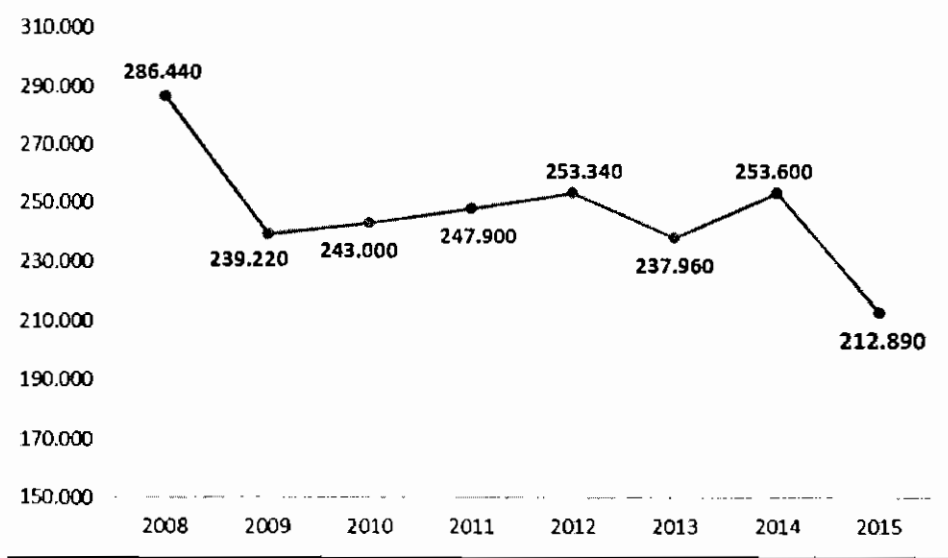
Salah satu permasalahan pokok di Provinsi Kalimantan Timur yaitu penurunan tingkat kemiskinan yang bergerak fluktuatif namun cenderung menurun. Hal ini sejalan dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sehingga tingkat kemiskinan daerah mengalami pergerakan yang kurang baik. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kecenderungan menurun pada setiap periode pembangunan hingga mencapai angka 6,23 persen tingkat kemiskinan pada tahun 2015. Meskipun memiliki kecenderungan menurun, tingkat kemiskinan mulai mengalami kerentanan dalam penurunannya bahkan mengalami kenaikan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013.

Secara umum, selama periode 2008-2015, persentase penduduk miskin menurun namun jika dilihat angka absolutnya maka dari 2009 hingga 2012 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin meski tidak signifikan hingga akhirnya menurun kembali menjadi 237.960 jiwa pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur meningkat tajam hingga mencapai 253.600 jiwa dan pada tahun 2015 penduduk miskin menurun kembali menjadi sebanyak 212.890 jiwa.

Peningkatan pada tahun-tahun tertentu baik tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi sebagai payayom masyarakat agar memprioritaskan kembali pengentasan kemiskinan dan berjalan seiring dengan program dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini harus dapat menghadapi dan menyiasati tingginya tingkat kemiskinan terutama di perdesaan. Hal ini dikarenakan meski terjadi penurunan tingkat kemiskinan namun berjalan relatif lambat, sehingga menegaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di daerah perdesaan terutama wilayah pedalaman.

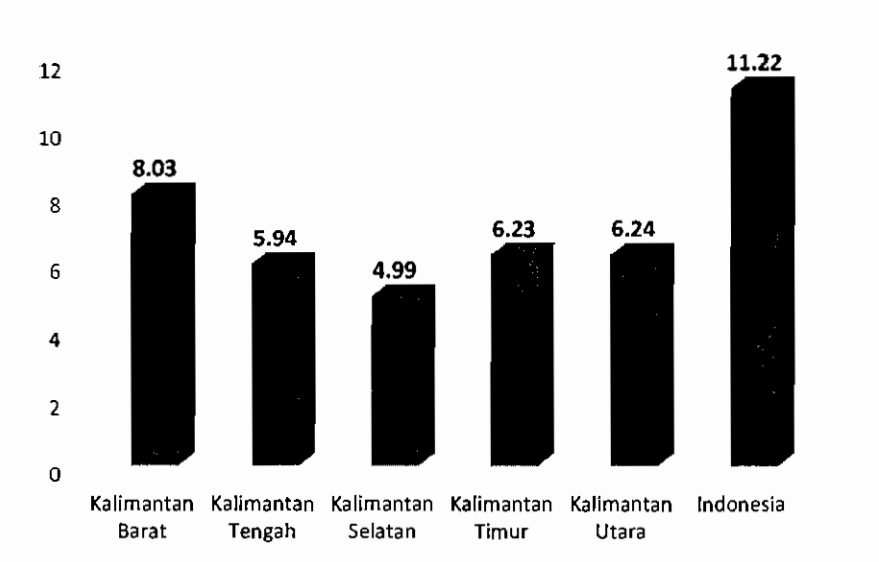


Gambar 4.7
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2008-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Gambar 4.8
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2015 (Kondisi Maret)



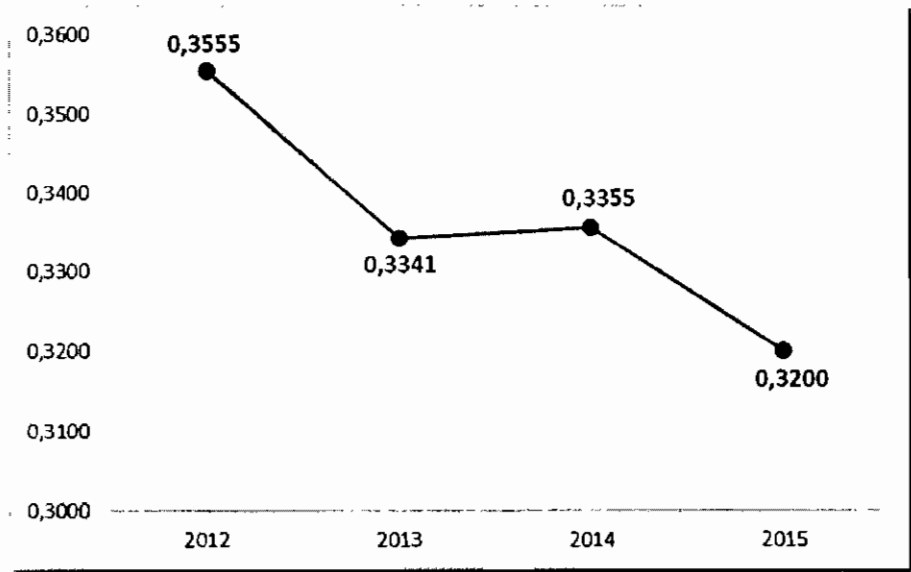
Sumber: BPS RI, 2015

Tingginya kesenjangan pendapatan sangat memengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan masih berada dalam batas “wajar” yaitu sebesar 0,3355 di tahun 2014 dan terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,3200. Penurunan angka ini mengindikasikan semakin meratanya kesenjangan pemerataan pendapatan masyarakat



meskipun masih fluktuatif. Oleh karena itu, ketidakstabilan pemerataan pendapatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun perlu diperhatikan dan diawasi lebih lanjut mengingat tingginya sektor-sektor padat modal yang berperan dalam pembentukan PDRB.

Gambar 4.9
Indeks Gini
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

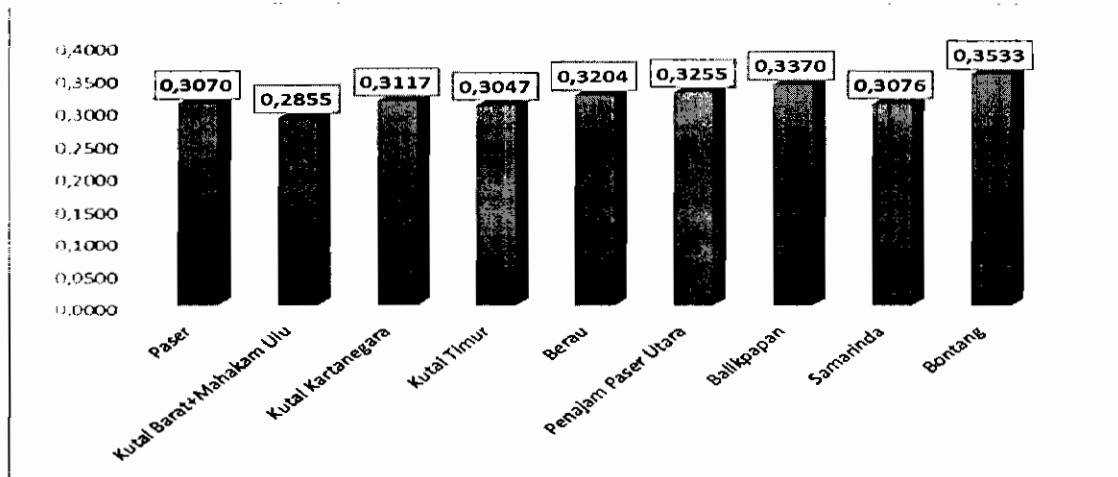
Jika dilihat dari perbandingan regional Kalimantan, pemerataan kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Timur lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain kecuali Kalimantan Utara. Selain itu, angka indeks gini di seluruh regional Kalimantan berada di bawah angka nasional yang mencapai 0,41.

Tabel 4.4
Perbandingan Indeks Gini
Regional Kalimantan dan Nasional, Tahun 2011-2015

Provinsi	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	0,40	0,38	0,40	0,39	0,33
Kalimantan Tengah	0,34	0,33	0,35	0,35	0,33
Kalimantan Selatan	0,37	0,38	0,36	0,36	0,35
Kalimantan Timur	0,38	0,36	0,33	0,36	0,32
Kalimantan Utara	-	-	-	-	0,29
Indonesia	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41



Gambar 4.10
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Permasalahan turunan yang juga mengindikasikan semakin melambatnya laju pertumbuhan perekonomian daerah adalah standar hidup layak yang masih perlu ditingkatkan, dengan indikator paritas daya beli masyarakat Kalimantan Timur. Paritas daya beli masyarakat pada tahun 2013 sebesar 10.981 ribu perkapita/tahun meningkat pada tahun 2014 sebesar 11.019 ribu perkapita/tahun dan tahun 2015 sebesar 11.229 ribu perkapita/tahun. Hal ini juga dipicu dengan masih minimnya upah minimum untuk tenaga kerja pada level provinsi yang kemudian akan diturunkan menjadi upah minimum regional kabupaten/kota. Jika dilihat perbandingan regional Kalimantan, Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun menduduki peringkat kedua dimana pada tahun 2016 mencapai Rp. 2.161.253,-. Tingginya upah minimum ini salah satunya disebabkan karena cukup tingginya kebutuhan hidup masyarakat untuk memenuhi persyaratan hidup layak.

Tabel 4.5
Upah Minimum Provinsi
Regional Kalimantan, Tahun 2014-2016

Provinsi	Tahun		
	2014	2015	2016
Kalimantan Barat	Rp 1.400.000,-	Rp 1.615.000,-	Rp. 1.739.400,-
Kalimantan Tengah	Rp 1.723.970,-	Rp 1.896.367,-	Rp. 2.057.558,-
Kalimantan Selatan	Rp 1.620.000,-	Rp 1.870.000,-	Rp. 2.085.050,-
Kalimantan Timur	Rp 1.886.315,-	Rp 2.026.126,-	Rp. 2.161.253,-
Kalimantan Utara			Rp. 2.175.340,-

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2015



Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan semakin melambatnya laju pertumbuhan perekonomian daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Rumusan Permasalahan: Semakin melambatnya
laju pertumbuhan perekonomian daerah

Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)
(1) Penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berkembangnya ekonomi perdesaan. 2. Infrastruktur pendukung perekonomian, pendidikan, kesehatan masih rendah 3. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terintegrasi dan tidak tepat sasaran 4. Sulit mengendalikan migrasi penduduk 5. Adanya kultur yang menyebabkan masyarakat terperangkap dalam kemiskinan 6. Belum optimalnya pemberdayaan dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas
(2) Menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya PHK akibat krisis ekonomi global 2. Masih rendahnya semangat enterpreneur 3. Belum sesuai latar belakang pendidikan dengan kesempatan kerja. 4. Banyaknya imigran yang tidak punya keterampilan 5. Rendahnya keterampilan lulusan pendidikan pencari kerja daerah
(3) Standar hidup layak yang masih perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu/kualitas sumber daya manusia yang masih rendah 2. Rendahnya peran perempuan dalam pembangunan
(4) Rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya angka inflasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem distribusi logistik belum efisien. 2. Ketergantungan suplai bahan makanan pokok dari luar 3. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok masyarakat (pangan, sandang, dan papan)
(5) Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun dan kurang berkualitas (tidak berkelanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan & industri pengolahan migas. 2. Hilirisasi/peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah berjalan lambat 3. Daya saing investasi/competitive advance daerah masih rendah (Kepastian lahan, Regulasi, pelayanan perijinan investasi dan infrastruktur terutama energi dan jalan) 4. Belanja pemerintah belum mengarah



Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)
	sepenuhnya pada upaya percepatan transformasi ekonomi 5. Kondisi ekonomi negara-negara utama tujuan ekspor kaltim melemah 6. Belum terpenuhinya infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis provinsi (KSP) 7. Masih rendahnya tingkat efisiensi dan distribusi barang dan jasa pusat kegiatan nasional (PKN)
(6) Kurang maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	1. Belum maksimalnya penggalan potensi sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur (rendahnya produk sektor pertanian). 2. Kebijakan pemerintah terkait sektor penggalan dan pertambangan menyebabkan rusaknya lahan potensi pertanian. 3. Kurangnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat terutama petani dalam pengembangan potensi pertanian. 4. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM sektor pertanian 5. Infrastruktur pertanian belum memadai
(7) Belum terpenuhinya kebutuhan pangan	1. Pengembangan dan pemberdayaan sektor pertanian yang dilaksanakan belum optimal. 2. Kebijakan terkait kesejahteraan petani belum efektif dan efisien (terkait harga, pupuk, dll). 3. Ketersediaan infrastruktur pertanian yang rendah. 4. Luas tanam dan luas panen yang belum optimal. 5. Masih kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, dan penunjang pertanian).
(8) Belum optimalnya pengembangan energi baru terbarukan dalam pemenuhan energi terutama energi yang ramah lingkungan	1. Daya mampu pembangkit listrik PT PLN dan IPP masih kurang dimana sebagian besar umur teknis (<i>life time</i>) PLTD sudah tua; 2. Masih rendahnya komitmen swasta dalam mengembangkan EBT (nvestasi); 3. Mekanisme harga listrik (tariff) 4. Belum adanya Insentif yang memadai bagi investor dalam mengembangkan EBT; 5. Biaya Investasi sektor EBT masih sangat tinggi; 6. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sarana EBT.



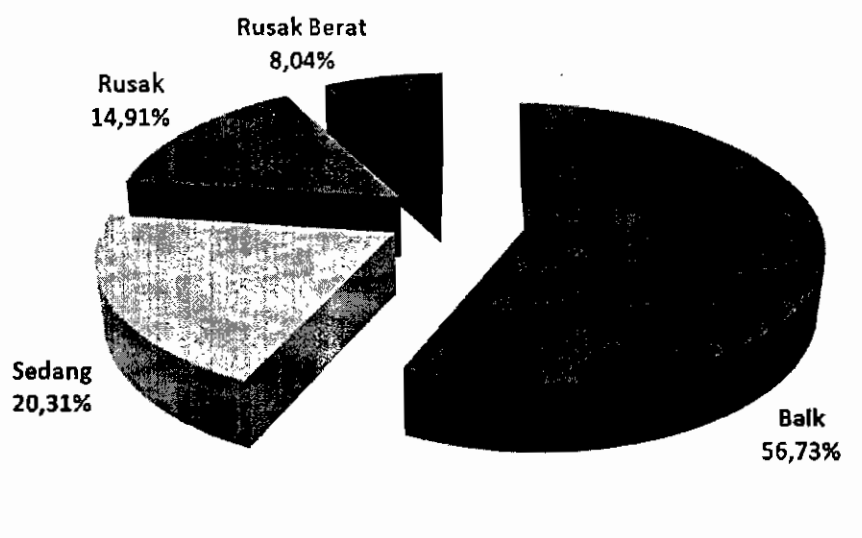
3. Belum meratanya pelayanan infrastruktur Dasar

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan) secara merata.

Dari sisi transportasi, kita lihat bersama bahwa pada tahun 2015 panjang jalan secara umum mencapai 14.218,56 km sehingga rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Provinsi Kalimantan Timur adalah 111,72 Km/1000 Km². Nilai ini masih berada di bawah rasio nasional, yakni berkisar di angka 115 Km/1000 Km². Jika dilihat lagi dari kondisi jalan, hanya sebesar 56,73 persen panjang jalan dalam kondisi baik, bahkan terdapat 8,04 persen panjang jalan masih dalam kondisi rusak berat.

Gambar 4.11
Proporsi Jalan Menurut Kondisinya
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

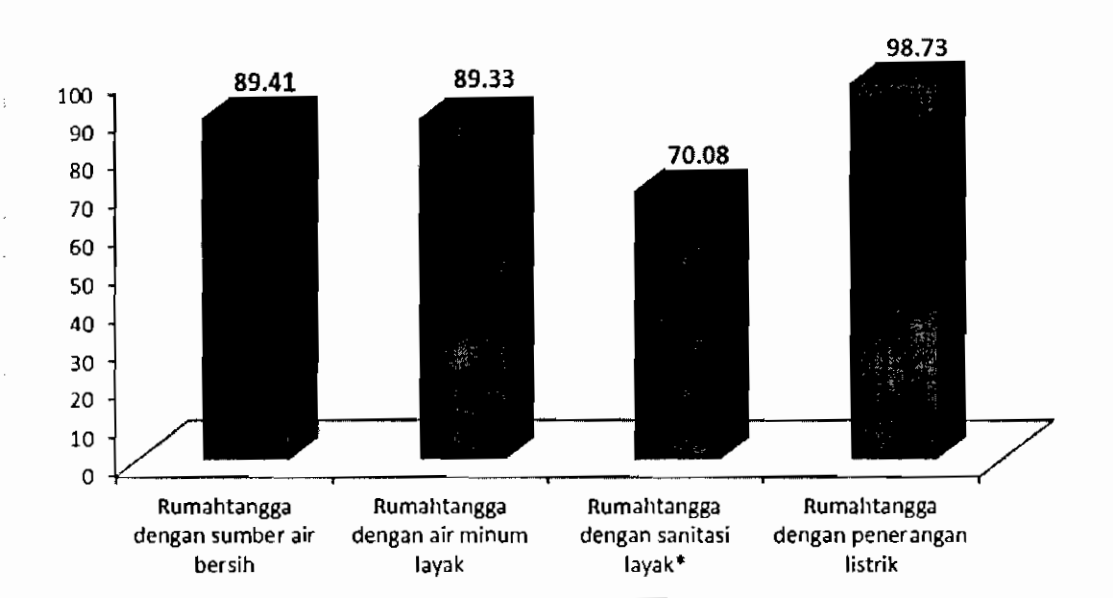


Sumber: Data Pembangunan Kaltim, Tahun 2016



Pada tahun 2009 masih terdapat 23 Kecamatan yang belum terhubung dengan prasarana jalan (9 diantaranya saat ini masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara) dan pada tahun 2013 jumlah kecamatan yang belum terhubung dengan akses jalan sebanyak 15 Kecamatan (Khusus Provinsi Kalimantan Timur). Selain itu, akses jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman belum berkondisi mantap, bahkan banyak jalan yang terputus oleh alur sungai maupun karena rusak parah sehingga sulit untuk dilalui.

Gambar 4.12
Indikator Perumahan (%)
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016 *

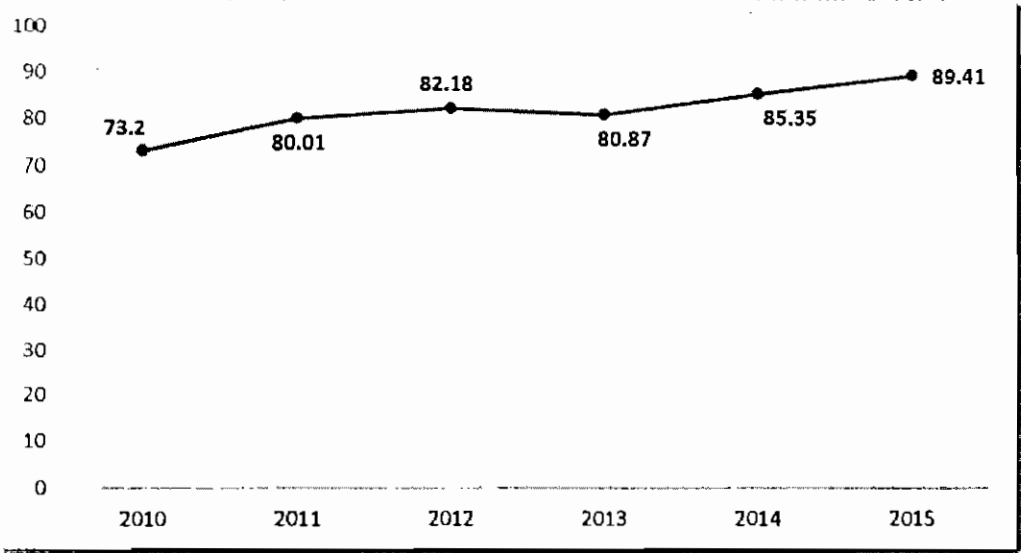
Perumahan layak huni dapat diindikasikan melalui berbagai indikator perumahan seperti gambar di atas seperti, persentase rumah tangga dengan sumber air bersih di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 89,41 persen dengan air minum yang layak mencapai 89,33 persen. Terkait fasilitas listrik, rumah tangga dengan penerangan listrik di Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai 98,73 persen.

Salah satu daya dukung pembangunan utamanya dalam mewujudkan daya saing kesehatan masyarakat adalah pemenuhan air bersih untuk masyarakat sebagai bagian dari pencegahan dan antisipasi penyebaran penyakit. Hal ini harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah selain masalah kelistrikan mengingat cukup strategisnya peran “air bersih” dalam kehidupan masyarakat bahkan sudah menjadi barang kebutuhan primer dan wajib didapatkan oleh setiap penduduk suatu wilayah. Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, pemenuhan kebutuhan air minum bersih untuk masyarakat mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2015 telah mencapai 89,41 persen rumah tangga yang dapat menikmati air minum bersih dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun begitu, perwujudan seluruh masyarakat akan akses air minum bersih terus



diupayakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penggunaan sumber daya bumi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Gambar 4.13
Persentase Rumahtangga dengan Sumber Air Minum Bersih
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: Data Pembangunan Kaltim, Tahun 2016

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Rumusan Permasalahan: Belum Meratanya Pelayanan Infrastruktur Dasar

Masalah	Akar Masalah
(1) Rendahnya pelayanan infrastruktur dasar (jalan dan jembatan , air bersih, sumber daya air (irigasi), transportasi, rumah layak huni dan telekomunikasi)	<div>1. Belum terpenuhinya kualitas prasarana jalan penghubung antar pusat pelayanan perkotaan.</div> <div>2. Masih terdapat ibukota kecamatan yang belum terhubung dengan prasarana transportasi</div> <div>3. Masih kurangnya kapasitas air baku dan air minum yang mengakibatkan cakupan air minum masih rendah</div> <div>4. Semakin meningkatnya daerah rawan banjir dan daya rusak air</div>

4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata



kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Masing-masing permasalahan ditunjukkan oleh rendahnya indeks kepuasan masyarakat, rendahnya indeks persepsi korupsi, dan predikat akuntabilitas kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2015, hasil survei menyebutkan bahwa indeks kepuasan masyarakat meningkat hingga mencapai 76,65. Angka ini masih perlu ditingkatkan sebagai indikasi perbaikan kinerja dan pelayanan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh pemerintah provinsi, terlihat bahwa Indeks persepsi korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 masih diangka 2,80 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 5,58. Peningkatan ini cukup mengindikasikan bahwa pemerintah serius dalam memberantas praktik KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menindaklanjuti perihal tersebut, pemerintah provinsi telah mencanangkan zona integritas kawasan bebas korupsi (ZI WBK) sebagaimana arahan dari Presiden RI. Namun jika dilihat dari data *Indonesian Corruption Watch*, terdapat 4 penindakan kasus korupsi di Provinsi Kalimantan Timur seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Penindakan Kasus Korupsi
Regional Kalimantan, Tahun 2013-2014

Provinsi	Tahun	
	2013	2014
1. Kalimantan Barat	5	8
2. Kalimantan Tengah	9	12
3. Kalimantan Selatan	3	3
4. Kalimantan Timur	3	4

Sumber: ICW

Adapun untuk predikat akuntabilitas kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi B+ dengan nilai 75,14 dimana kinerja pemerintahan termasuk dalam status tinggi. Selain itu terkait pengawasan keuangan daerah, opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan “Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik” dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.9

Rumusan Permasalahan: Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Masalah	Akar Masalah
(1) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur. 2. Rendahnya respons pemerintah terhadap pengaduan masyarakat 3. Keuangan daerah belum sepenuhnya dikelola berbasis kinerja 4. Manajemen pengelolaan aset daerah belum terkelola dengan efektif, efisien, dan maksimal. 5. Manajemen pendapatan daerah belum dikelola secara efektif dan efisien 6. Manajemen belanja daerah belum efektif dan efisien
(2) Rendahnya kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. 2. Belum terintegrasinya system berbasis IT
(3) Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil, dan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat. 2. Pencapaian sasaran pembangunan tingkat daerah maupun PD belum dikendalikan dengan baik. 3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik.

5. Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pembangunan bertujuan untuk menemukan suatu keadaan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Penyelesaian isu lingkungan berkaitan dengan masalah pengkategorian limbah dan emisi serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan harus menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan.

Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2012, luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 6.075.271 hektar dengan laju kerusakan lahan 500.000 Ha/tahun. Pertumbuhan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh penebangan hutan dan penambangan batubara yang menjalankan kegiatan tanpa memerhatikan kaidah kelestarian lingkungan.



Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan indeks kualitas lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang masih rendah yakni sebesar 74,07 pada tahun 2013 dan bergerak fluktuatif pada tahun 2014 menjadi 78,29 persen dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 81,97 persen. Namun dari sisi lain, terjadi peningkatan intensitas emisi pada tahun 2015 hingga sebesar 1.738 ton/1 juta USD.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Rumusan Permasalahan: Belum Terciptanya Kualitas Hidup yang Baik dan Sehat

Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)
(1) Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Tata kelola perizinan pada sektor usaha berbasis lahan belum optimal.2. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya lingkungan hidup.3. Ketaatan perusahaan dalam memenuhi baku mutu lingkungan masih rendah.4. Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman
(2) Intensitas emisi gas rumah kaca masih tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya merujuk pada peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.2. Iklim investasi belum terkondisi dan bersinergi dengan pembangunan sektor ekonomi yang rendah emisi.3. Isu perubahan iklim belum diarusutamakan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.4. Isu perubahan iklim belum diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan di kabupaten/kota.5. Minimnya kebijakan pemerintah tentang pembangunan daerah dengan memerhatikan lingkungan hidup khususnya emisi gas rumah kaca.6. Mekanisme MRV yang belum berjalan dengan baik.

4.2 ISU STRATEGIS

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih



besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.2.1 ISU INTERNASIONAL

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Provinsi Kalimantan Timur antara lain: pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. Sustainable Development Goals (SDG's)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu



dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta



17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Timur, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan pertengahan tahun 2016, tak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “Brexit” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Provinsi Kalimantan Timur yang berpengaruh pada perlambatan pemulihan ekonomi.

c. Antisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.



d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu bersaing internasional.

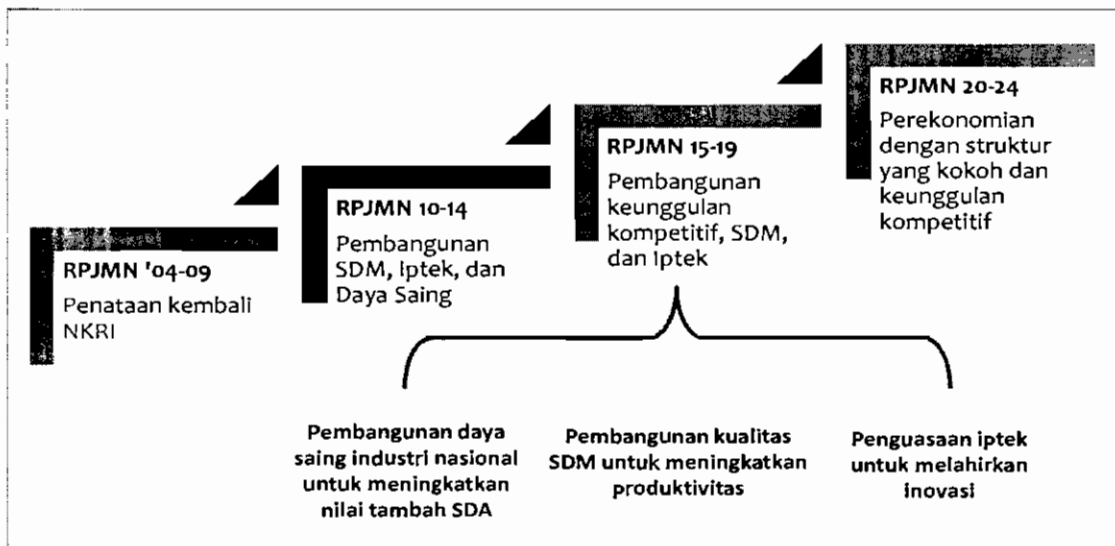
4.2.2 ISU ATAU KEBIJAKAN NASIONAL

1) Telaahan RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat perodesasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur melebihi batas RPJMN II yang saat ini masih berlaku, maka arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019).



Gambar 4.15
Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025



Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan iptek untuk melahirkan inovasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN, arah kebijakan untuk periode RPJMN III (2015-2019) yang relevan untuk pengembangan daerah dijelaskan sebagai berikut:

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental,



dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikembangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Provinsi Kalimantan Timur harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

- a. Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
- b. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- c. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta



Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 5.305 Ha. Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 dan dokumen Masterplan Perluasan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), KIP Maloy diarahkan untuk menjadi pusat pengolahan kelapa sawit, *oleo chemical*, dan industri turunannya. Berdasarkan Masterplan 2012, tahap awal pembangunan KIP Maloy seluas areal 1.000 Ha dengan nilai investasi sebesar 3,7 triliun rupiah.

KIP Maloy akan terintegrasi dengan Tanki Timbun dan Pelabuhan Internasional CPO (*Crude Palm Oil*) yang dioperasikan dengan sistem pemipaan. Selain itu, sebagai strategi untuk menambah nilai investasi, KIP Maloy telah diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada tahun 2030, KIP Maloy diproyeksikan menjadi pusat/sentra pengolahan *olea chemical* berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

5. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kawasan Industri Tanaman Pangan terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara-Paser) sebagai *hinterland* Kota Balikpapan, memiliki letak geo-strategis perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) PPU-Paser memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha.

Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2036, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

6. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat

Sebelum terjadi pemekaran, Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Negara dimana kedua wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi dan menjanjikan untuk diolah. Oleh karena itu, industrialisasi hasil produksi pertanian menjadi salah satu opsi penting dalam perumusan kebijakan peningkatan perekonomian wilayah selain sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber daya tak terbarui.

Potensi pertanian di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat juga didukung oleh tingginya tenaga kerja sektor pertanian di kedua wilayah tersebut serta “kue” struktur ekonomi daerah yang besar. Meskipun begitu, perlu adanya perencanaan yang terintegrasi bahkan koordinasi dengan kabupaten lain untuk mengoptimalkan berbagai potensi baik infrastruktur, tenaga ahli, hingga master plan. Diharapkan industrialisasi pertanian akan



memberikan dampak positif bagi peningkatan pembangunan Kalimantan Timur khususnya kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten tersebut.

7. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu

Klaster industri kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan harus diiringi dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2030, kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

8. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur

Pengembangan klaster industri di Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur (utamanya) sangat layak didukung karena merupakan program-program visibel yang akan menimbulkan multiplier efek luas bagi masyarakat. Pemerintah pusat sebagai pemrakarsa dan pelaksana tentu memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Selain itu, dukungan investor untuk menanamkan investasinya dalam proyek besar pengembangan klaster industri pertanian menjadi harapan bagi pemerintah.

Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan komitmen yang jelas dalam bentuk pembangunan yang mempertimbangkan sisi lingkungan, sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam komitmen Kalimantan Timur Green. Hal ini juga harus dilakukan pada pembangunan sektor perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Provinsi Kalimantan Timur harus siap untuk melaksanakan model pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan sisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat sehingga dalam pengalihan lahan tidak ada rekomendasi untuk lahan gambut dan tidak ada negosiasi untuk hutan primer.

B. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya di Dalam Wilayah Provinsi

1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara

Museum Mulawarman terletak di Kota Tenggarong, Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Museum Mulawarman adalah istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara dibangun pada tahun 1963 sebagai pengganti Istana sebelumnya yang terbakar dan diresmikan pada tanggal 25 November 1971 kemudian diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 Februari 1976.

Museum yang sebelumnya adalah bangunan Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ini didirikan pada tahun 1932 oleh Pemerintah Belanda yang menyerahkan Keraton kepada



Sultan Adji Muhammad Parikesit pada tahun 1935. Bahan bangunannya didominasi oleh beton mulai dari ruang bawah tanah, lantai, dinding, penyekat, hingga atap. Di halaman depan Museum terdapat duplikat Patung Lembuswana yang merupakan lambang Kerajaan Kutai Kartanegara. Arsitektur dari museum ini mengadopsi dari arsitektur tradisional Suku Dayak yang ada di Kutai.

2. Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser

Kabupaten Paser memiliki keunikan budaya dan keindahan alam termasuk wisata sejarah dimana salah satu daya tarik wisata adalah Museum Sadurengas. Museum Sadurengas merupakan bekas Istana Kesultanan Paser yang terletak di Pusat Kecamatan Paser Belengkong. Museum tersebut menjadi ikon daerah Kalimantan Timur wilayah selatan mengingat Kesultanan Sadurengas memiliki sejarah panjang di wilayah Kalimantan Timur.

Museum Sadurengas memiliki berbagai koleksi benda-benda kuno yang bisa dilihat hingga kini seperti Al-Qur'an Tua yang ditulis tangan, tempayan guci kuno peninggalan Dinasti Yuan, alat-alat rumah tangga Kesultanan Paser, alat-alat kesenian, pakaian Kesultanan Paser, serta meriam peninggalan Portugis.

3. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau

Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung pada dasarnya merupakan satu kerajaan (Kerajaan Berau) yang terpisah pada keturunan ke-13 (tahun 1810) pada silsilah kerajaan tersebut. Kedua kerajaan ini memiliki lokasi yang tidak berjauhan dimana hanya dipisahkan oleh pertemuan dua sungai yakni Sungai Segah dan Sungai Kelay. Kedua kerajaan tersebut mewariskan peninggalan sejarah berupa museum yang keduanya merupakan bekas istana kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung.

Pada kedua museum tersebut, dapat ditemukan berbagai peninggalan bersejarah kedua kerajaan tersebut yakni berupa benda sejarah, keramik, benda arkeologis, etnografis, dan naskah-naskah sejarah. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Berau masih konsisten menjaga warisan kebudayaan ini sehingga kondisi museum (kesultanan) tetap terawat. Selain itu, meskipun beberapa kali dilakukan pemugaran di beberapa titik, namun pemerintah daerah tetap menjaga keaslian bangunan historis tersebut

4. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda

Desa Budaya Pampang adalah sebuah desa budaya yang berlokasi di Sungai Siring, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekitar tahun 1960-an, Suku Dayak Apokayan dan Kenyah yang saat itu berdomisili di wilayah Kutai Barat dan Malinau hijrah karena tidak mau bergabung atau tidak ingin ikut ke wilayah Malaysia meskipun taraf pendapatan atau ekonomi yang menjanjikan di negeri tetangga tersebut. Rasa nasionalisme mereka inilah yang membuat mereka memilih tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pindah ke desa yang saat ini dinamai Desa Pampang.

Pada bulan Juni 1991, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H.M. Ardans mencanangkan dan meresmikan Desa Pampang sebagai Desa Budaya. Melalui desa ini,



pemerintah berharap Provinsi Kalimantan Timur tetap memelihara dan melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat Dayak. Pemerintah juga merasa antusias bahwa desa budaya ini memiliki kegiatan positif yang bisa menjadi aset wisata unggulan baik di tingkat lokal maupun mancanegara. Desa Budaya Pampang diharapkan dapat dijadikan sebagai cagar budaya guna mengoptimalkan nilai sosial dan budaya tempat tersebut.

5. Koridor Sungai Mahakam

Kawasan Koridor **Sungai Mahakam hingga ke hulu: Tanjung Isuy, Desa Mancong, dan Kersik Luway, Lamin Eheng** di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kawasan strategis yang diprioritaskan penataan ruangnya dalam upaya meningkatkan apresiasi seni/budaya bernilai tinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pengelolaan terhadap kawasan strategis ini juga perlu dipertimbangkan dari aspek apresiasi nilai seni/budaya bernilai tinggi yang menghasilkan peluang ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan kawasan strategis harus melibatkan berbagai pihak dengan pembagian peran dan kepentingan sesuai dengan tupoksinya, yakni pihak yang berkepentingan terhadap nilai seni/budayanya (benda/objeknya), terhadap wilayahnya (ruang spasial), dan terhadap investasi ekonomi (bisnis pariwisata).

C. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Dalam Wilayah Provinsi

1. Kawasan 3 (tiga) Danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, dan Sekitarnya)

Permasalahan utama danau-danau di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingginya tingkat sedimentasi bahkan tiga danau besar di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Danau Malintang (11.000 ha), Danau Semayang (13.000 ha), dan Danau Jempang (15.000 ha), memiliki tingkat sedimentasi tinggi yang mencapai sekitar 70 persen total kawasan. Tingginya tingkat sedimentasi menyebabkan kedalaman air yang tersisa hanya sekitar setengah hingga dua meter yang menyebabkan berkurangnya fungsi danau sebagai kawasan resapan air. Dengan demikian, resiko banjir akan meningkat pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau padang delta yang mencuat ke permukaan kian meluas. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas industri perhutanan di daerah aliran sungai di sebelah hulu kawasan danau memicu sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan.

Danau-danau di Provinsi Kalimantan Timur, selain menjadi kawasan tangkapan air hujan di pedalaman Mahakam juga berfungsi sebagai habitat berbagai satwa termasuk Belibis Kembang serta Kerbau Kalang. Burung Belibis Kembang (*Dendrocygna arcuata*) berfungsi sebagai motor produktifitas danau Mahakam dengan menyebarkan biji-biji rumput serta berkontribusi memberikan nutrisi (kotoran) terhadap ikan sedangkan Kerbau Kalang memiliki ciri khas, yakni bisa bertahan hidup dalam rawa-rawa pada danau tanpa penanganan yang rumit. Kerbau Kalang sebenarnya merupakan jenis "kerbau rawa" (*swamp buffalo*) yang dipelihara dengan sistem kalang, yaitu pada waktu musim banjir ternak



ditampung dalam kandang yang disebut "kalang", sedangkan pada musim kemarau kerbau dilepas sepanjang hari ke dalam hutan atau rawa-rawa. Disekitar danau juga terdapat puluhan ribu petani/nelayan yang mengantungkan hidupnya sebagai petani yang mengelola potensi pertanian pada lahan rawa-rawa serta perikanan darat.

2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan)

Kawasan Teluk Balikpapan merupakan kawasan di sekitar Sepaku-Penajam-Balikpapan yang berada di barat Selat Makassar atau tepi barat daya dari Samudera Pasifik. Kawasan ini memiliki berbagai pelabuhan umum maupun pelabuhan swasta sebagai penunjang aktivitas perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa pelabuhan umum yang berada di Kawasan Teluk Balikpapan seperti:

- a. Pelabuhan Semayan, penumpang dan kargo terbesar bagi Kota Balikpapan;
- b. Pelabuhan Kampung Baru, sebuah pelabuhan yang melayani penumpang kapal feri ke Sulawesi;
- c. Pelabuhan Kariangau, sebuah pelabuhan feri ke Kota Penajam; dan
- d. Pelabuhan Penajam, sebuah pelabuhan feri ke Kota Balikpapan.

Beberapa pelabuhan swasta yang berada di Kawasan Teluk Balikpapan seperti:

- a. Pelabuhan Pertamina, di bagian timur
- b. Pelabuhan Chevron, di bagian barat
- c. POSB, Petrosea Offshore Supply Base di kawasan Kariangau
- d. Beberapa perusahaan pertambangan batubara memiliki pelabuhan pribadi pada bagian barat dan utara.

3. Kawasan Delta Mahakam

Kawasan Delta Mahakam meliputi enam kecamatan yaitu: Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Angana, Muara Badak, dan Marang Kayu. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan meliputi perikanan (pertambakan), pertambangan energi, sentra industri, dengan bidang penunjang utama pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Pusat pengembangan kawasan Delta Mahakam ini adalah Muara Badak.

Delta Mahakam terbentuk dari hasil sedimentasi selama ribuan tahun oleh Sungai Mahakam dimana secara administrative berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Anggana, Muara Jawa, dan Sanga-sanga). Kawasan Delta Mahakam memiliki luas sekitar 1.500 km² (termasuk wilayah perairan) dengan luas wilayah daratan mencapai kurang lebih 1.000 km². Kawasan Delta Mahakam merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam (migas). Cadangan sumber daya alam terbesar terdapat di lapangan Peciko dan Tunu yang kini dieksploitasi perusahaan migas internasional asal Prancis, Total E&P Indonesia.

Wilayah daratan Delta Mahakam terbagi menjadi 4 zona vegetasi yaitu hutan tanaman keras tropis dataran rendah, hutan campuran tanaman keras dan palma dataran



rendah, hutan rawa nipah, serta hutan bakau. Sebagian besar Delta ditutupi oleh hutan rawa nipah dan hutan bakau yang penyebarannya tergantung pada keberadaan air laut (sering disebut hutan mangrove).

4. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan Sekitarnya

Kawasan Pariwisata Pesisir dan laut kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau memiliki luas areal 13.500 Ha dengan potensi wisata alam bawah laut yang menakjubkan. Gugus Kepulauan Derawan terdiri dari 4 (empat) pulau sebagai tujuan utama wisata, yaitu Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan semakin meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 mencapai 1.278.500 wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Pada tahun 2030, basis sektor industri pariwisata di Kepulauan Derawan diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disamping sektor jasa keuangan, industri pengolahan, dan pertanian. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati No. 31/2005 tentang Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau seluas 1,2 juta hektar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan untuk menjamin perikanan serta pariwisata yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Berau telah mengeluarkan Keputusan Bupati No. 351 Tahun 2006 tentang kerangka penyusunan rencana pengelolaan KKL Berau. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, penyusunan rencana pengelolaan mesti mempertimbangkan aspek sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek pengelolaan dan kebijaksanaan, pembiayaan, dan kelembagaan.

5. Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat

Karst Sangkulirang-Mangkalihat merupakan bentang alam kompak dan tak terpisahkan yang meliputi 2 kabupaten (Kutai Timur dan Berau), 13 kecamatan dan 111 desa. Kawasan tersebut merupakan hulu dari lima sungai utama di Berau dan Kutai Timur yaitu Sungai Talabar, Sungai Lesan, Sungai Pesab, Sungai Bengalon dan Sungai Karang, dan merupakan salah satu sumber air utama bagi masyarakat khususnya bagi pesisir Mangkalihat.

Kawasan tersebut merupakan ekosistem yang memiliki 120 jenis burung, 200 jenis serangga dan antropoda dengan 1 jenis kecoa raksasa, 400 jenis flora dan 50 jenis ikan, termasuk ikan *Nemacheilus Marang* dan *Kalacemeti Sarax Sangkulirangensis* sp. Nov, serta *Sarax mardua* sp. Nov yang merupakan spesies baru. Saat ini, pengelolaan ekosistem yang bersifat ekstraktif dan konversi bentang alam untuk perkebunan sawit, pertambangan batubara dan semen, pemukiman dan infrastrukturnya menurunkan kualitas karst. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan untuk menurunkan resiko degradasi ekosistem melalui pengelolaan dan perlindungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



6. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan

Kepulauan Balabalagan merupakan suatu kawasan wisata yang memiliki daya tarik wisata bahari yang terletak pada perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Potensi wisata bahari yang ditawarkan hampir menyerupai kepulauan Derawan, Kabupaten Berau dimana terdapat beberapa pulau yang layak untuk dikunjungi, keindahan pantai, batu karang, pasir putih, hingga spesies ikan dan penyu yang masih terjaga ekosistemnya.

D. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal di Dalam Wilayah Provinsi

1. Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.

Kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 1.531.500 Ha merupakan kabupaten hasil pemekaran Kutai Barat (berdasarkan UU. Nomor 2 Tahun 2013) memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu: Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, dan Laham. Perdesaan dalam kawasan tertinggal pada kelima kecamatan tersebut yang merupakan fokus utama untuk dipacu pertumbuhannya melalui paradigma perencanaan yang lebih kompeten diantaranya Datah Naha, Dilang Kerohong, Lirung Ubing, Liu Mulang, Long Isun, Long Lunuk, Long Pahangai II, Long Pahangai I, Long Pakak, Long Penaneh II, Long Penaneh I, Long Penaneh III, Long Tuyuq, Naha Aru, Naha Tifab, Tiong Buu, Tiong Ohang, Repama, Pa' Upan, Long Ruangan, Buduk Kubul, Long Puak, Wa' Laya, KP. Baru, Pa' Kebuan, Wa' Jagung, Samalat, Malutok, Sipatal, Sibal, Panas, Tatalunjuk, Sedalan, Buatan, Simantobol, Liang, Debulan, Simalumung, Likas, Sesibu, Liang.

Adanya pengembangan kawasan tersebut harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah hasil produksi dari pusat pertumbuhan kawasan tersebut akan dipakai oleh kegiatan ekonomi yang berada daerah sekitar (*hinterland*), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah *hinterland* tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan.

6.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam lima tahun (2013-2018) mendatang diarahkan untuk mendukung:

- (1) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dan peningkatan aksesibilitas;
- (2) Pengembangan prasarana wilayah untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
- (3) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (4) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadap kerusakan lingkungan hidup;



- (5) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- (6) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta
- (7) Pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu, sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan pola ruang wilayah diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW), pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagai berikut.

Tabel 6.4
Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Fungsi
Penataan Sistem Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.4a Rincian Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

No	Nama PKN	Lokasi	Fungsi
1	Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang	Balikpapan	Pusat Pemerintahan Kota
			Pusat Perdagangan Regional
			Pusat Industri
			Pusat Transportasi Udara Internasional
			Pusat Transportasi Laut Internasional
			Pusat Pengolahan Migas
			Pusat jasa Pariwisata
			Pusat Pendidikan Tinggi
		Tenggarong	Pusat Pengolahan Migas
			Pusat Pengolahan Batubara
			Pusat Pemerintahan Kabupaten
			Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional
			Pusat Pengembangan Perkebunan Sawit dan Pengolahan Hasil Sawit
			Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata
			Pengembangan Industri Kreatif
			Pusat Olahraga Skala Nasional
			Perikanan Budidaya
			Pusat Pendidikan Tinggi
			Pusat Pengendalian Laut
			Pengolahan Hasil Hutan
			Pusat Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Samarinda	Pusat Pemerintahan Provinsi
			Pusat Pemerintahan Kota



No	Nama PKN	Lokasi	Fungsi
			Pusat Perdagangan dan Jasa Regional
			Pusat Koleksi dan Distribusi Barang dan Jasa Regional
			Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata
			Pusat Transportasi Darat dan Laut Regional
			Pusat Pendidikan Tinggi
			Pusat Pelayanan Kesehatan
			Pusat Siaran dan Telekomunikasi
			Pusat Olahraga Skala Nasional dan Internasional
			Pusat Transportasi Laut Regional dan Internasional
			Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional
		Bontang	Pusat Industri Strategis Nasional
			Pusat Pengolahan Migas
			Pusat Pemerintahan Kota
			Pusat Perdagangan Regional
			Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional
			Pusat Pengolahan Perikanan

Tabel 6.4b Rincian Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

No	Nama PKW	Fungsi
1	Tana Paser (Kab. Paser)	Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan
		Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit
		Pusat pemerintahan kabupaten
2	Sendawar (Kab. Kutai Barat)	Pusat pemerintahan kabupaten
		Pusat pengolahan hasil tambang batubara
		Pengolahan hasil hutan
3	Kota Sangatta (Kab. Kutai Timur)	Pengembangan perikanan tangkap
		Pusat pelayanan pariwisata
		Pusat pengolahan hasil tambang batubara
4	Tanjung Redeb (Kab. Berau)	Pusat industri
		Pengolahan hasil hutan
		Pusat pengolahan hasil tambang batubara
		Pengembangan perikanan tangkap
		Pusat pelayanan pariwisata



No	Nama PKW	Fungsi
		Pusat pemerintahan kabupaten

Tabel 6.4c Rincian Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)

No	Nama PKWp	Fungsi
1	Penajam (Kab. Penajam Paser Utara)	Pusat pemerintahan kabupaten
		Pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan
2	Ujoh Bilang (Kab. Mahakam Ulu)	Pengolahan hasil hutan
		Pusat pengembangan perkebunan
		Pusat pemerintahan kabupaten
		Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan
		Pusat pariwisata

Tabel 6.4d Rincian Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

No	Nama PKL	Fungsi
1	Long Ikis (Kab. Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
2	Kuaro (Kab. Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
3	Muara Komam (Kab. Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
		Gerbang masuk provinsi dari Provinsi Kalimantan Selatan
4	Batu Kajang (Kab. Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
5	Long Kali (Kab. Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
6	Long Hubung (Kab. Mahakam Ulu)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
7	Tiong Ohang (Kabupaten Mahakam Ulu)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
		Pusat yang mendukung kegiatan di PKSN Long Pahangai dan PKSN Long Apari
8	Long Iram Kota (Kab. Kutai Barat)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
9	Muara Lawa (Kab. Kutai Barat)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
10	Mook Manaar Bulatn (Kab. Kutai Barat)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
		Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Kota Sendawar
11	Muara Badak (Kabupaten Kutai)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN



No	Nama PKL	Fungsi
	Kartanegara)	Samarinda
		Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
12	Muara Jawa (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Samarinda dan PKN Balikpapan
		Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
13	Kota Bangun (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
		Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
14	Kembang Janggut (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
15	Loa Janan (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
16	Tenggarong Seberang (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
17	Sebulu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
18	Loa Kulu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
19	Samboja (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
20	Sanga-Sanga (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
21	Anggana (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
22	Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
23	Muara Bengkal (Kabupaten Kutai Timur)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
24	Muara Wahau (Kabupaten Kutai Timur)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
25	Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Kota Sangatta
		Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
26	Merancang (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
		Pusat industri kabupaten
27	Tepian Buah (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
28	Tanjung Batu (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
29	Talisayan (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
30	Mangkajang (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan



No	Nama PKL	Fungsi
		desa-desa sekitarnya
		Pusat industri kabupaten
31	Labanan (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
32	Sido Bangen (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
33	Petung (Kab. PenajamPaser Utara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Penajam Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
34	Sepaku (Kab. Penajam Paser Utara)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya

Tabel 6.4e Rincian Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

No	Nama PKSN	Fungsi
1	Long Pahangai (Kab. Mahakam Ulu)	Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan (tercantum di dalam RTRWN) Didukung oleh pengembangan Bandar Udara Datah Dawai
2	Long Apari (Kab. Mahakam Ulu)	Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan Wilayah terdekat dengan perbatasan Pengembangan Pos Lintas Batas dan Pos Perbatasan Didukung oleh pengembangan Bandar udara Long Apari



BAB V

Provinsi Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut merupakan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Namun, pengolahan potensi sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan agar pemenuhan kesejahteraan masyarakat pada saat ini tidak mengorbankan pembangunan generasi di masa mendatang (*Brundtland Commission, 1987*). Untuk menindaklanjuti hal tersebut, visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur harus diterjemahkan dalam paradigma pembangunan yang menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

5.1 VISI

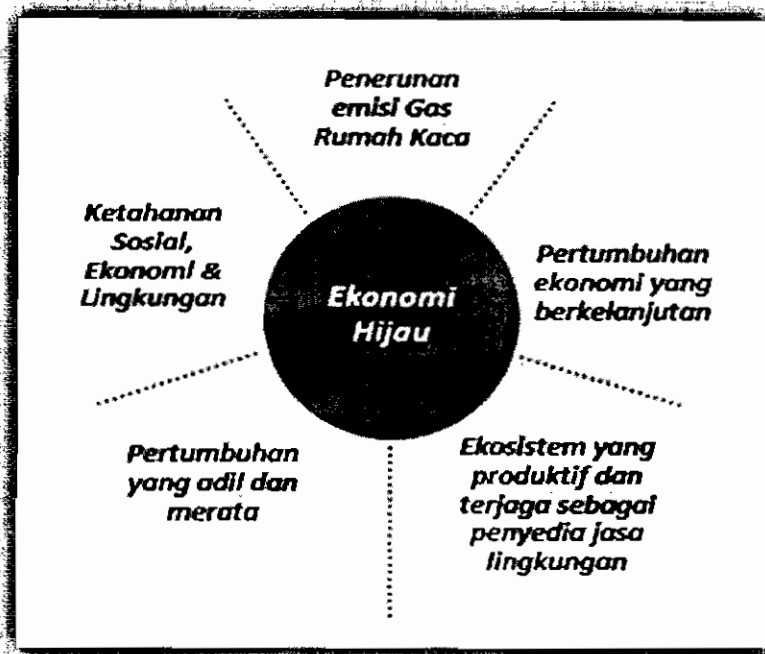
Visi RPJMD harus menemukan relevansi dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Keseimbangan lima dimensi ini akan menjadikan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai jawaban bagi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.



Gambar 5.1
Lima Dimensi Pembangunan Ekonomi Hijau



Sumber: Global Green Growth Institute, 2013

Sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas, dimensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menyoroti pentingnya keluaran ekonomi berkelanjutan (Produk Domestik Regional Bruto berkelanjutan). Ekonomi yang berkelanjutan sedemikian rupa akan menghasilkan pembangunan dan kemakmuran sosial yang dampaknya lebih luas. Dimensi Ekosistem penyedia jasa yang berfungsi dan produktif menyoroti pertumbuhan yang menopang modal alam, terutama cadangan alam yang memasok aliran jasa ekosistem yang penting secara berkelanjutan. Cadangan ini seperti penyediaan air bersih, tanah yang subur, dan fungsi hutan yang terjaga. Daya dukung tersebut memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia yang kerap diabaikan dalam kebijakan publik karena tidak dianggap sebagai pemakaian dalam produksi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hijau berusaha mengatasi kegagalan pasar ini.

Dimensi selanjutnya adalah pertumbuhan yang inklusif dan merata yang menekankan pada pertumbuhan untuk kepentingan rakyat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan serta yang kaya maupun terpinggirkan. Dimensi ini merupakan tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi hijau, dan sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan, sehingga daerah dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak mendapat manfaat dari intervensi pertumbuhan ekonomi hijau.



Dimensi Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan menyoroti pertumbuhan yang membangun ketahanan ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan dan berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menahan guncangan eksternal (misalnya beradaptasi dengan dampak fisik dari perubahan iklim, diversifikasi sektor ekonomi, ketahanan pangan, mata uang dan stabilitas perdagangan).

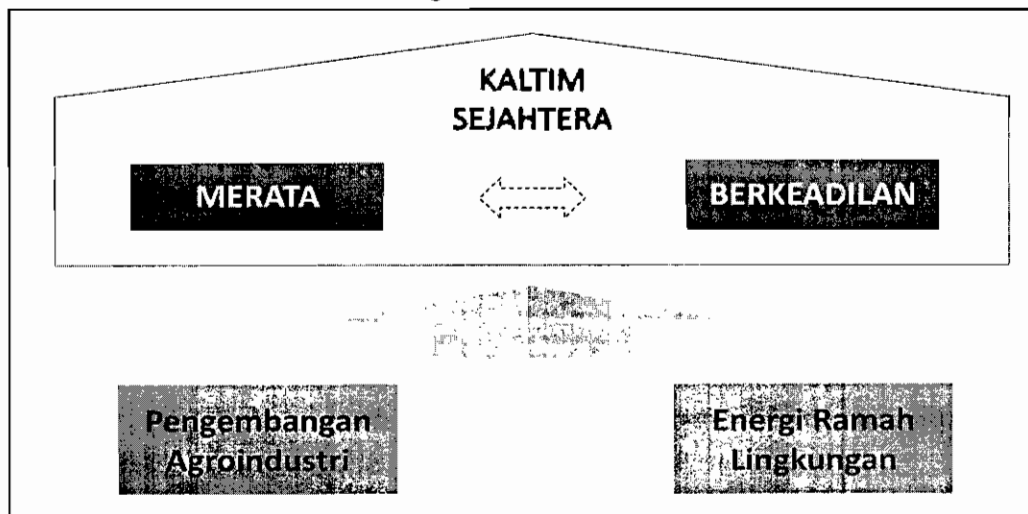
Dimensi penurunan emisi gas rumah kaca menekankan pada pentingnya pertumbuhan rendah karbon untuk berkontribusi terhadap upaya global dan nasional untuk mitigasi perubahan iklim dan meminimalkan dampak negatif di masa depan terhadap masyarakat lokal dan internasional. Negara-negara dengan intensitas emisi GRK yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk penurunan emisi berbiaya hemat dan memiliki keperluan yang lebih mendesak untuk mendapatkan bantuan.

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta selaras dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Timur maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur lima tahun ke depan ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN**

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yaitu mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan penopang utama pada pengembangan agroindustri dan berbasis energi ramah lingkungan sebagaimana digambarkan berikut ini:

Gambar 5.2
Hubungan Antar Elemen Visi





Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Pembangunan juga dapat dipandang sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya (Portes, 1976). Ini berarti bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Elemen Visi Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan memandang lebih jauh dibanding aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling memengaruhi. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan yang hanya berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat yang berakibat munculnya berbagai ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pembangunan daerah dengan pondasi ekonomi perlu diselaraskan dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup.

Pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara utuh dengan memenuhi kebutuhan fisik dan sosial. Pembangunan sosial juga lebih diarahkan kepada peningkatan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi, pembangunan sosial Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai proses pembangunan yang terencana dan selaras dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Elemen Visi Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan pada intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan berdasarkan data riil, kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan



dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2011 sebesar 72,02 meningkat menjadi 74,17 pada tahun 2015.

2. Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan

Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Fokus ini merupakan kebijakan yang diyakini dapat mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Timur ***Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan***. Jika komitmen ini disinkronisasi, maka pembangunan lima tahun Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 1990 hingga saat ini, ekonomi Provinsi Kalimantan Timur bergantung pada sumber daya tak terbarukan setelah selama kurang lebih 20 tahun (1970-1990) sektor kehutanan menjadi tulang punggung ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pergeseran basis sektor ekonomi terjadi pada tahun 90'an dimana sektor pertambangan mulai menjadi basis ekonomi wilayah menggantikan sektor kehutanan. Transformasi ini terjadi selain karena dimulainya eksploitasi tambang migas dan batubara secara masif, juga disebabkan karena semakin menipisnya potensi sumber daya hutan produksi akibat pemanfaatan yang tidak memerhatikan aspek keberlanjutan.

Pada periode 1990-2000, dimana sektor pertambangan migas, industri pengilangan minyak bumi dan gas alam cair, serta pertambangan batubara mulai mengambil alih dominasi ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan pada tahun 2001 kontribusi sektor pertambangan batubara terhadap PDRB meningkat tajam. Karena basis sektor ekonomi adalah sumber daya alam tak terbarukan maka seiring berjalannya waktu tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun sektor tersebut relatif menurun. Meskipun begitu, pada periode 2000-2013 sektor tambang migas dan batubara masih menjadi andalan dalam pembentukan PDRB meskipun kontribusi pertambangan minyak dan gas bumi mulai menurun. Pergeseran tersebut secara otomatis juga diikuti dengan penurunan sektor industri pengolahan berbasis migas.

Selanjutnya, pada tahun 2013-2015 terjadi penurunan yang cukup signifikan baik pada nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian maupun struktur ekonomi sektor tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi sektoral pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan bahkan mencapai titik -4,83 persen pada tahun 2015.

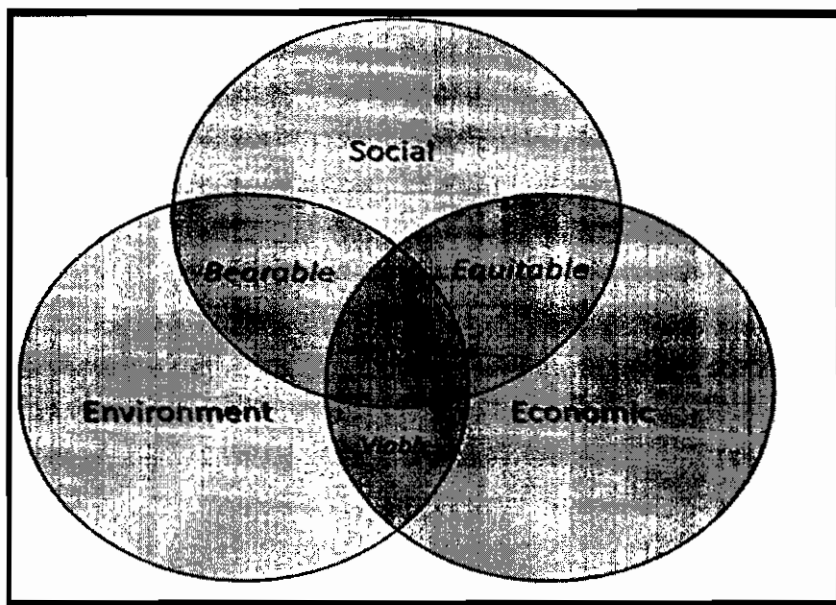
Kesalahan pengelolaan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan bukan saja menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan fluktuatif tetapi juga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar penduduk.



Elemen Visi Provinsi Kalimantan Timur yang kedua yaitu **Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan** memiliki makna komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya alam tak terbarukan menjadi ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Elemen visi ini merupakan tujuan sekaligus cara yang diyakini dapat mewujudkan elemen utama visi Provinsi Kalimantan Timur pertama yaitu **Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan** sebagai bagian dari implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. Suatu credo dimana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masa kini tanpa mengorbankan kehidupan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kerangka tindak ini menekankan pada prinsip keadilan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan antara generasi sekarang dan yang akan datang sebagai falsafah dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai usaha untuk mencapai keseimbangan antara tiga jenis keberlanjutan yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 5.3
Model Pembangunan Berkesinambungan



Sumber: Brundtland Commission, 1987

5.2 MISI

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:



- 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;**
- 2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;**
- 3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;**
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan**
- 5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim**

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi

Keberhasilan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kalimantan Timur harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah. Diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.



2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi

Misi kedua ini ditetapkan berdasarkan analisis terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak 40 tahun yang lalu dimana Provinsi Kalimantan Timur telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang sehat dan berkualitas.

Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh sektor primer dan sekunder. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Dalam uraian sektor yang lebih rinci dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan antarwilayah adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan.

Dari sisi ekonomi, kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tampaknya relatif tinggi. Hal ini terlihat pada angka PDRB per kapita di Penajam Paser Utara pada tahun 2015 adalah yang terendah, yaitu Rp 48,13 juta per tahun sedangkan PDRB per kapita tertinggi di Bontang mencapai Rp 352,88 juta per tahun.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2011-2015 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat semakin merata sehingga terlihat keberhasilan pelaksanaan program-program pro-rakyat dan perhatian besar Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan.

Dalam konteks **mewujudkan daya saing ekonomi**, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah



satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan untuk menjamin pembangunan keberlanjutan.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri.

Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat, serta peran koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

Dalam konteks *energi terbarukan*, misi ini tidak terlepas dari cadangan migas, batubara, dan biomassa yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur serta penetapan tema pembangunan Koridor III Kalimantan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional dalam MP3EI. Hal ini selaras dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam upayanya melakukan transformasi Ekonomi. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada transformasi dari sektor primer ke struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Berkaitan dengan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong untuk pembangunan industri pengolahan hasil tambang di Provinsi Kalimantan Timur. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur akan mengupayakan agar bahan galian mineral yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa



energi dalam bentuk gas, liquid atau sebagai bahan baku industri petrokimia yang bernilai tambah tinggi.

3. Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Berdasarkan *Global Competitiveness Index* Tahun 2012, dari tiga hal utama yang menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah kualitas infrastruktur yang belum memadai. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, faktor dominan yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah pada dasarnya disebabkan oleh:

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Sebagaimana diketahui bahwa kandungan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing masing kabupaten/kota sangat berbeda. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah yang mempunyai Kandungan cukup tinggi dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif lebih murah dibanding dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonominya.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis yang dimaksud disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan, dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat. Hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi pada daerah bersangkutan, demikian juga sebaliknya.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori oleh pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Apabila mobilitas



tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi pada suatu daerah tidak dapat dijual kepada daerah yang membutuhkan. Demikian halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja pada suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan.

d. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah yang dapat alokasi investasi lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 salah satunya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Untuk meningkatkan kemandirian jalan juga dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing Provinsi Kalimantan Timur akan dibangun jalan tol dan Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dikembangkan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi di ibukota kecamatan.

Sebagai upaya pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian dilaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, dan Penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

- 1) Tidak ada korupsi;



- 2) Tidak ada pelanggaran hukum;
- 3) APBD baik;
- 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik;
- 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap;
- 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik;
- 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif;
- 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan
- 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

Transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

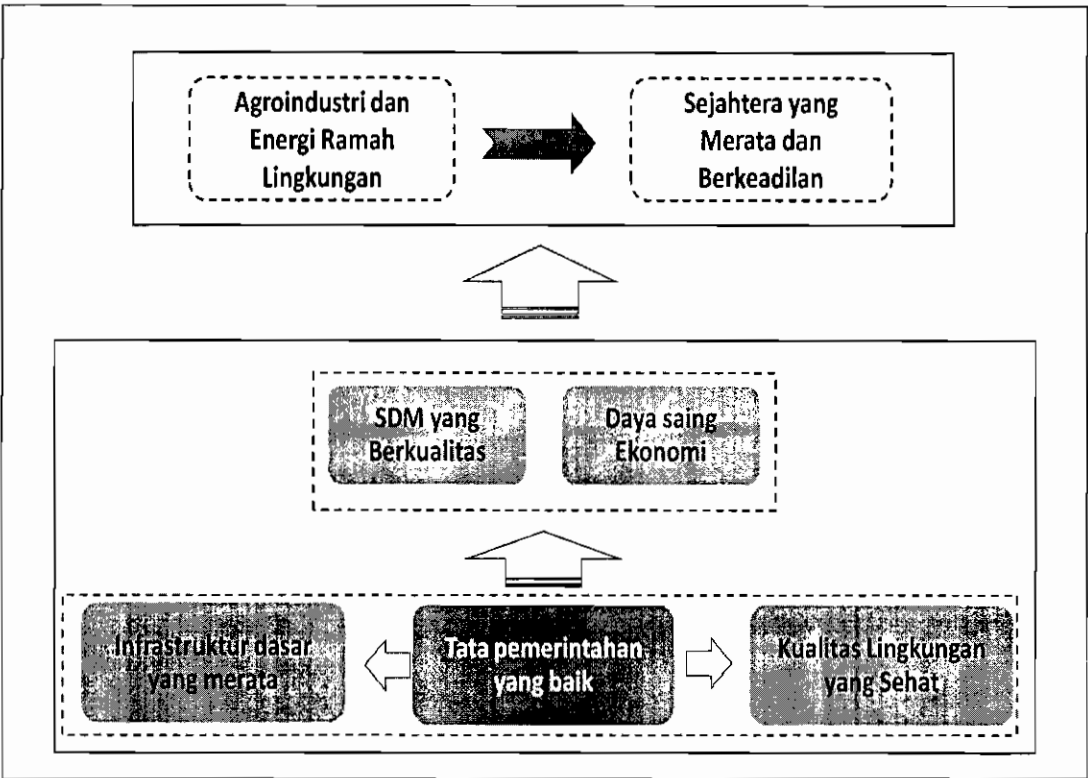
Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi biru melalui ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi



pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Keterhubungan antar misi dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 5.4
Hubungan Antar Elemen Visi dan Misi



Dari gambar tampak jelas bahwa begitu banyak permasalahan dan tantangan pembangunan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, peran misi pembangunan yang dirumuskan dengan baik dapat memberi keyakinan bahwa visi RPJMD dapat dicapai dengan peningkatan SDM yang berkualitas dan daya saing ekonomi sebagai prasyarat penting tercapainya visi RPJMD. Untuk itu, sangat penting peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang merata ke segenap wilayah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN



Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Timur dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja *'impact'* yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan *lagging indikator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka arahan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama periode pelaksanaan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di atas dan keberlanjutan kinerja pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:



Tabel 5.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2013-2015 dan Target 2018
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Realisasi			Target 2018
		2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IPM	73,21	73,82	74,17	75,70
2.	Indeks Gini	0,3341	0,3355	0,3200	0,3200
3.	Tingkat Inflasi (%)	9,65	7,66	4,89	4 ± 1
4.	Tingkat Pengangguran (%)	7,94	7,54	7,50	7,00
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,06	6,42	6,23	6,00
6.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,25	1,57	-1,28	0,5 ± 1
7.	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	78,29	81,97	82,00

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

• Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim

Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, Provinsi Kalimantan Timur telah mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun demikian, kita harus tetap meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Keberhasilan upaya meningkatkan derajat dan mutu pendidikan dapat diukur antara lain dengan melihat angka melek huruf. Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan yang berarti terjadi penurunan jumlah penduduk buta aksara. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sejak tahun 2010 pemerintah telah mencanangkan program Wajib belajar 12 tahun. Program ini harus terus dilanjutkan dan dituntaskan agar anak-anak usia sekolah memperoleh haknya dalam pendidikan dan lebih berdaya saing. Untuk itu, infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang berkualitas perlu dilengkapi di semua daerah terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.



Di samping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah telah mengembangkan 100 Puskesmas 24 jam selama kurun waktu 2009-2013 di berbagai daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan program pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang agar usia harapan hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkat dari 71,61 tahun pada 2012 menjadi 73 tahun pada 2018.

Guna mewujudkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. **Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, dengan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,70;**
2. **Meningkatnya harapan lama sekolah, dengan capaian indikator angka harapan lama sekolah sebesar 14,00 tahun;**
3. **Meningkatnya rata-rata lama sekolah, dengan capaian indikator rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun; dan**
4. **Meningkatnya angka harapan hidup, dengan capaian angka harapan hidup sebesar 74,00 tahun.**

• **Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Mutu kesehatan masyarakat yang baik/tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga akan mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Timur juga harus meningkatkan akses kesehatan agar masyarakat di daerah pedalaman dapat menjangkau pelayanan kesehatan sehingga dapat mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain aspek kesehatan, kurikulum pendidikan berbasis penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya.



Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran:

1. Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 6,00 persen;
2. Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 7,00 persen;
3. Meningkatnya standar hidup layak, dengan capaian paritas daya beli sebesar 11.800 ribu per kapita/tahun;
4. Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat tingkat inflasi sebesar 4 ± 1 persen dengan Indeks Tendensi Konsumen sebesar 106,8 ; dan
5. Menurunnya Indeks Gini, dengan capaian indeks gini sebesar 0,32.

• **Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya melalui pengurangan emisi GRK, membangun ketahanan terhadap iklim ekstrem dan perubahan jangka panjang, penggunaan sumber daya secara lebih efisien, memberikan peningkatan PDB dan standar hidup yang berkelanjutan dan didistribusikan secara merata serta menghargai modal alam yang sering tidak terlihat secara ekonomi meskipun telah mendukung keberhasilan ekonomi. Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan timur dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi yang berkelanjutan dimaknai dengan perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan dan hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar $0,5 \pm 1$ persen (LPE migas), 1 ± 1 persen (LPE non migas), dan 4 ± 1 persen (LPE non migas dan non batubara);
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, dengan capaian indikator kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 10,00 persen dan didukung pula



dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 5 ± 1 persen;

3. Tercapainya swasembada pangan, dengan capaian indikator rasio pemenuhan beras sebesar 85,00 persen; dan
4. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan, dengan capaian indikator bauran energi baru terbarukan sebesar 3,00 persen.

- **Tujuan 4: Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas**

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Keberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran, “Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 7,00”.

- **Tujuan 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,00 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 85 (sangat baik); dan
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 80,00 (A) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”.

- **Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**



Kualitas lingkungan hidup sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukung lingkungannya. Tersedianya berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan usaha kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah, namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dicapai dengan sasaran **meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan**, dengan capaian indikator kinerja:

1. **Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 82,00; dan**
2. **Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca , dengan indikator Intensitas Emisi sebesar 1.650 ton CO₂/US \$ juta PDRB.**

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018

VISI: MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN								
Sasaran		Indikator Sasaran (Satuan)	Realisasi			Target		
			Target Awal (2013)	2014	2015	2016	2017	Target Akhir (2018)
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi								
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim								
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	73,21	73,82	74,17	74,46	75,08	75,70
2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	13,17	13,18	13,50	13,70	14,00
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata sekolah (tahun)	8,87	9,04	9,15	11,00	11,50	12,00
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	73,52	73,62	73,65	73,75	73,85	74,00
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan								
Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat								
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6,06	6,42	6,23	6,11	6,10	6,00
6	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	7,94	7,54	7,50	8,86	7,18	7,00
7	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)	10.981	11.019	11.029	11.450	11.600	11.800



8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)	9,65	7,66	4,89	5±1	4±1	4±1
9	Menurunnya Indeks Gini	Indeks Tendensi Konsumen	112,29	111,73	105,9	106,2	106,5	106,8
		Indeks Gini	0,37	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan								
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	2,25	1,57	-1,28	0,2±1	0,5±1	0,5±1
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,45	3,74	-1,48	1±1	1±1	1±1
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	5,99	5,73	3,45	4±1	4±1	4±1
		Share sektor pertanian dalam arti luas (%)	5,65	7,11	7,62	8,00	9,00	10,00
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor pertanian dalam arti luas	6,44±1	6,72±1	4,59±1	4,73±1	4,87±1	5,00±1
12	Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72,00	71,22	70,15	72,50	75,00	85,00
13	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	0,50	1,01	1,62	2,12	3,00
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata								



Tujuan 4: Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas							
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	5,90	6,21	6,50	7,00
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik							
Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik							
15	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	5,20	4,90	5,58	5,70	6,00
		Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
16	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 ,00 (baik)	72,16 (baik)	76,65 (baik)	80,00 (sgt baik)	85,00 (sgt baik)
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	70,97 (B+)	75,14 (BB)	76,00 (BB)	80,00 (A)
		Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi (2-3)	Tinggi (2-3)	Tinggi (2-3)	Sangat Tinggi (3-4)	Sangat Tinggi (3-4)
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim							
Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup							
18	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	78,29	81,97	81,98	82,00
19	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US \$ juta)	1.500	1.611	1.738	1.800	1.650



Lima (5) misi, enam (6) tujuan, dan sembilan belas (19) sasaran/indikator kinerja pembangunan merupakan hasil dari revisi kebijakan pembangunan sebagai bagian kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir periode pembangunan jangka menengah. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai dengan bertahap, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur bersama kabupaten/kota di bawahnya.

5.4 SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pembangunan dari pemerintah provinsi (termasuk SKPD) dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Pada perumusan revisi perencanaan pembangunan jangka menengah ini, tentu saja akan berimbas pada rumusan target indikator strategis pembangunan kabupaten/kota. Dengan mengacu pada revisi tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2013-2018, serta memperhitungkan distribusi PDRB, penduduk miskin, dan jumlah pengangguran, maka target pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2016-2018 untuk beberapa indikator utama bidang ekonomi adalah sebagai berikut.

Target Peningkatan IPM Kabupaten/Kota

Target peningkatan IPM Kabupaten/Kota pada sisa periode pelaksanaan pembangunan disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Trend kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3
Capaian dan Target Peningkatan IPM Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Kondisi Awal (2013)	Capaian		Target		
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Kota Samarinda	77,84	78,39	78,69	79,16	79,58	80,01
2. Kota Balikpapan	77,53	77,93	77,93	78,18	78,33	78,73
3. Kota Bontang	78,34	78,58	78,78	78,82	78,,87	78,91
4. Kabupaten Berau	72,02	72,26	72,72	72,12	75,83	76,34
5. Kabupaten Paser	69,61	69,87	70,30	70,62	70,96	71,31
6. Kabupaten PPU	68,07	68,60	69,26	69,96	70,46	71,12
7. Kabupaten Kutai Barat	68,13	68,91	69,34	70,00	70,61	71,21



Kabupaten/Kota	Kondisi Awal (2013)	Capaian		Target		
		2014	2015	2016	2017	2018
8. Kabupaten Kutai Timur	69,79	70,39	70,82	71,24	71,67	72,05
9. Kabupaten Kutai Kartanegara	70,71	71,20	71,78	72,93	73,78	74,64
10. Mahakam Ulu	63,81	64,32	64,89	65,42	65,96	66,50

Sumber : Bappeda Kabupaten Kota Se-Kalimantan Timur, 2016

Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota selama sisa periode pelaksanaan pembangunan mendatang disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Isu gejolak perekonomian global-internasional;
- (2) Kebijakan perekonomian pada era pemerintahan presiden Ir. Joko Widodo; dan
- (3) Kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2011-2015, utamanya pada sektor pertambangan dan penggalan.

Tabel 5.4

Target Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (kondisi awal)-2018 (%)

Kabupaten/Kota	Kondisi Awal (2013)	Capaian		Target		
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Kota Samarinda	5,03	5,33	0,004	2,57	3,22	3,90
2. Kota Balikpapan	6,57	4,92	2,64	1,31	1,93	2,14
3. Kota Bontang	8,64	3,71	5,90	6,00	6,25	6,50
4. Kabupaten Berau	10,38	7,92	5,07	5,07	6,25	7,00
5. Kabupaten Paser	6,81	4,49	-0,97	-0,50	1,00	2,00
6. Kabupaten PPU	4,89	1,81	1,90	2,90	3,80	4,70
7. Kabupaten Kutai Barat	2,84	1,48	-1,42	0,54	1,76	2,01
8. Kabupaten Kutai Timur	4,10	3,55	3,71	3,73	3,74	3,76
9. Kabupaten Kutai Kartanegara	4,79	3,21	-10,72	4,33	5,13	5,08
10. Mahakam Ulu	0,60	4,77	3,18	3,75	4,25	5,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kota Se-Kalimantan Timur, 2016



Target Pengurangan Pengangguran Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018

Target pengurangan pengangguran Kabupaten/Kota 2013-2018 disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2018;
- (2) Distribusi tenaga kerja menurut Kabupaten/Kota tidak berubah; dan
- (3) Pertumbuhan angkatan kerja baru menurut kabupaten/kota tahun 2010-2015.

Tabel 5.5
Target Pengangguran Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (kondisi awal)-2018 (%)

Kabupaten/Kota	Kondisi Awal (2013)	Capaian		Target		
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Kota Samarinda	8,57	7,56	5,61	5,02	4,86	4,06
2. Kota Balikpapan	7,95	7,56	5,95	5,95	5,55	5,30
3. Kota Bontang	14,32	9,38	12,73	12,90	11,98	11,06
4. Kabupaten Berau	5,85	10,05	3,78	10,05	5,83	4,93
5. Kabupaten Paser	9,25	6,69	9,06	8,87	8,25	7,98
6. Kabupaten PPU	7,97	7,52	7,28	6,90	6,67	6,01
7. Kabupaten Kutai Barat	8,03	6,84	11,70	10,14	8,76	6,54
8. Kabupaten Kutai Timur	6,09	5,65	5,14	1,04	1,03	1,01
9. Kabupaten Kutai Kartanegara	7,37	7,65	10,22	9,23	9,02	8,93
10. Mahakam Ulu	Data masih tergabung dengan Kubar		4,75	7,24	7,04	6,75

Sumber : Bappeda Kabupaten Kota Se-Kalimantan Timur, 2016

Target Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018

Target pengurangan kemiskinan Kabupaten/Kota selama sisa periode pelaksanaan pembangunan disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pengurangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2018;
- (2) Distribusi penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota sesuai dengan dinamika; dan



(3) Kinerja pengurangan kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2010-2014.

Tabel 5.6
Target Kemiskinan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (kondisi awal)-2018 (%)

Kabupaten/Kota	Kondisi Awal (2013)	Capaian		Target		
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Kota Samarinda	4,63	4,56	4,33	4,30	4,22	4,00
2. Kota Balikpapan	2,48	2,46	2,35	2,35	2,34	2,33
3. Kota Bontang	5,16	5,1	5,06	5,04	4,83	4,62
4. Kabupaten Berau	4,84	4,75	5,33	4,83	4,76	4,51
5. Kabupaten Paser	7,94	7,86	8,76	8,50	8,25	7,86
6. Kabupaten PPU	7,70	7,67	7,92	7,65	7,60	7,60
7. Kabupaten Kutai Barat	7,70	7,53	8,33	7,25	6,14	5,00
8. Kabupaten Kutai Timur	9,06	8,86	8,67	8,52	7,32	6,12
9. Kabupaten Kutai Kartanegara	7,52	7,42	7,58	7,19	7,01	6,22
10. Mahakam Ulu	Data masih tergabung dengan Kubar		10,5	9,48	8,36	7,25

Sumber : Bappeda Kabupaten Kota Se-Kalimantan Timur, 2016



BAB VI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

6.1. STRATEGI

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan



6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus mengimplementasikan kebijakan nasional, sehingga secara eksplisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melaksanakan berbagai penyempurnaan dan revisi kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional di bawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional (**Nawacita**) harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan pusat dan daerah seperti yang tersaji pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya		
3	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya		
4	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	2	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
5	Melakukan revolusi karakter bangsa		
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		4	Percepatan Pengentasan Kemiskinan
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	5	Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	6	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
		7	Pengembangan Agribisnis (Peningkatan Skala Produksi Pertanian)



Kewacutan (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	
		8	Percepatan Transformasi Ekonomi
		9	Peningkatan Produksi Pangan
		10	Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
		11	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
9	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	12	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Dengan berdasarkan kertas kerja yang telah dirumuskan, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
Strategi Pembangunan Jangka Menengah

Sasaran		Strategi/Prioritas Pembangunan	
1	Meningkatnya IPM	S1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan
2	Meningkatnya harapan lama sekolah		
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah		
4	Meningkatnya angka harapan hidup	S2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	S3	Percepatan Pengentasan Kemiskinan
6	Menurunnya tingkat pengangguran	S4	Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja
7	Meningkatnya standar hidup layak	S5	Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
8	Meningkatnya daya beli masyarakat		
9	Menurunnya Indeks Gini		
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	S6	Percepatan transformasi ekonomi
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	S7	Pengembangan agribisnis (Peningkatan Skala Produksi Pertanian)
12	Tercapainya swasembada beras	S8	Peningkatan Produksi Pangan
13	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	S9	Pengembangan energi baru terbarukan
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	S10	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
15	Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	S11	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
16	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik		
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja		



Sasaran		Strategi/Prioritas Pembangunan	
18	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	S12	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
19	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		

Berdasarkan tabel 6.1 diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik untuk mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan demikian, kedua belas prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, meliputi:

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
5. Pengendalian Inflasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
6. Percepatan Transformasi Ekonomi;
7. Pengembangan Agribisnis (Peningkatan Skala Produksi Pertanian);
8. Peningkatan Produksi Pangan;
9. Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar;
11. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; dan
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Penjelasan masing-masing prioritas pembangunan sebagai berikut:

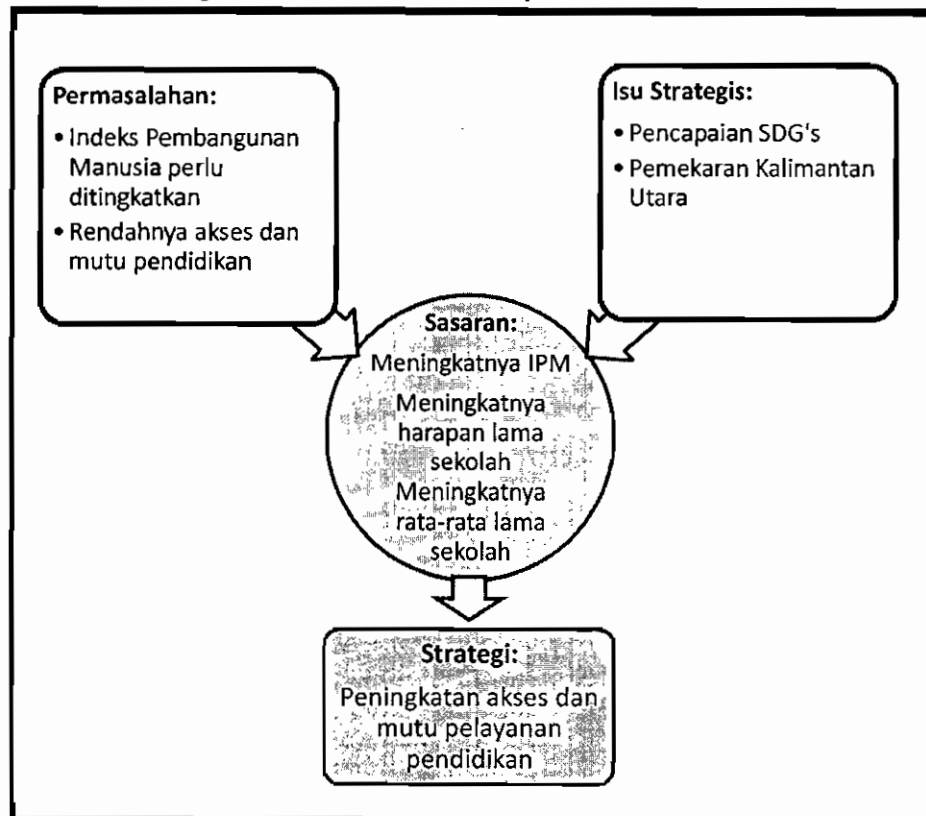
1. Strategi 1: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang harapan lama sekolah dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan



berimbas pada peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat sehingga kualitas SDM secara otomatis akan membaik. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah akan mendorong peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 6.1
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan



Penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas membutuhkan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya akses dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Dalam pembuktian kualitasnya, output pendidikan belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian dari lembaga yang independen sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan konsisten. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu mengupayakan peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih mendalam dan merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan itu sendiri.

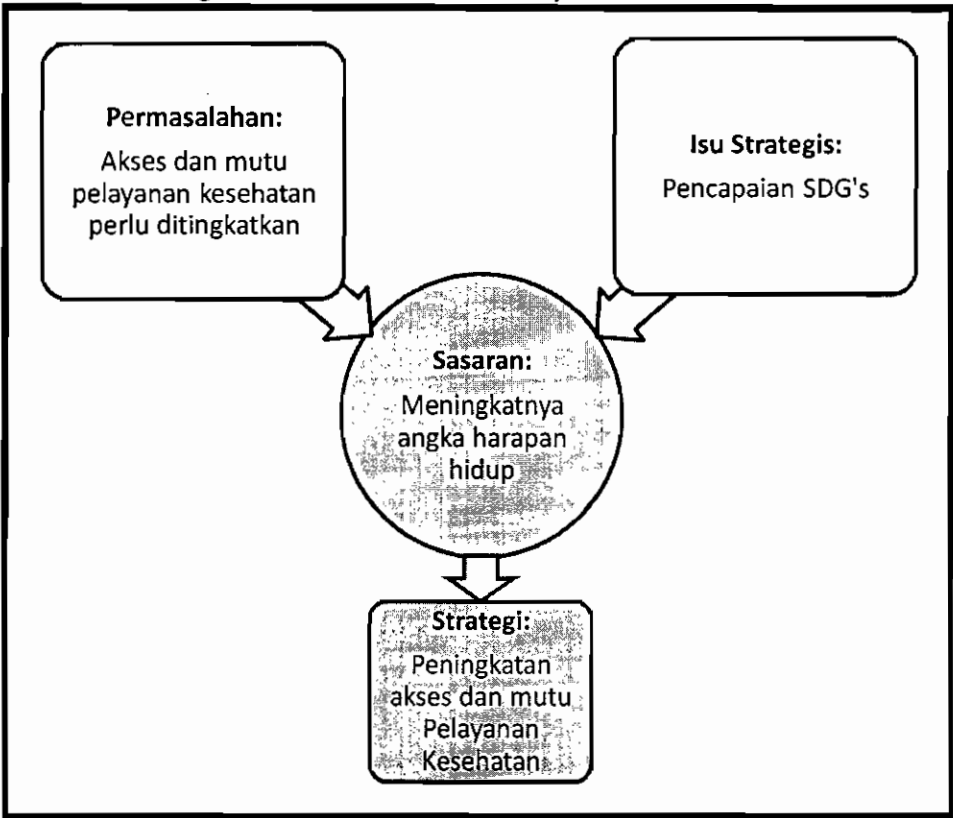
2. Strategi 2: Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang



sebagai suatu investasi dalam kaitaannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Gambar 6.2
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan



Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pembangunan di bidang ini secara mendasar.

3. Strategi 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan

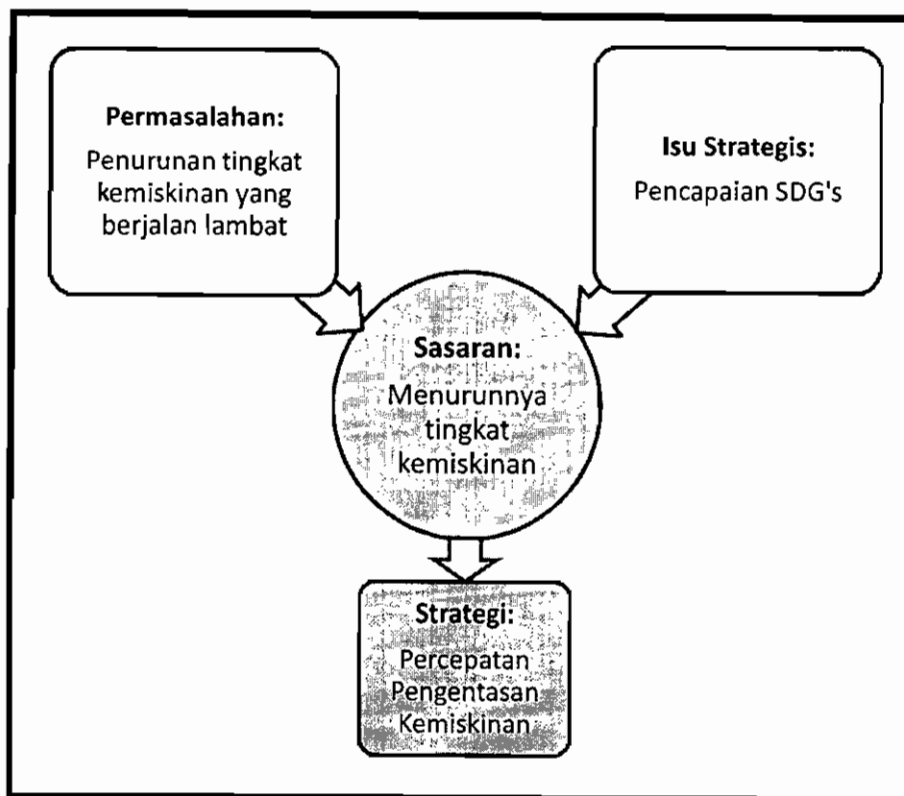
Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan beberapa upaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan cara mengefektifkan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dengan adanya pengefektifan berbagai strategi pengentasan kemiskinan, diharapkan terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, ketepatan sasaran penerima



bantuan dan perlindungan sosial perlu diperhatikan agar pengentasan kemiskinan berdampak efektif dan efisien dalam mengurangi beban masyarakat.

Gambar 6.3

Percepatan Pengentasan Kemiskinan



Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin memiliki kesempatan keluar dari garis kemiskinan dan terus menjaga perekonomiannya agar tidak kembali ke dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini menjadi perlu, mengingat upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dan memiliki dampak panjang dalam kestabilan perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan melakukan strategi pemberdayaan, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan segala potensi SDM maupun SDA di masing-masing wilayahnya.

Faktor mendasar yang memengaruhi kemiskinan antar lain SDM, SDA, dan penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga dimensi tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain karena kemiskinan merupakan ketidakseimbangan potensi ekonomi masyarakat sebagai pelaku ekonomi sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki andil secara efektif dalam proses pembangunan atau bahkan tidak menikmati hasil-hasil pembangunan (pembangunan belum merata).

Percepatan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap karena kompleksitas permasalahan yang melingkupinya. Perencanaan dan strategi yang

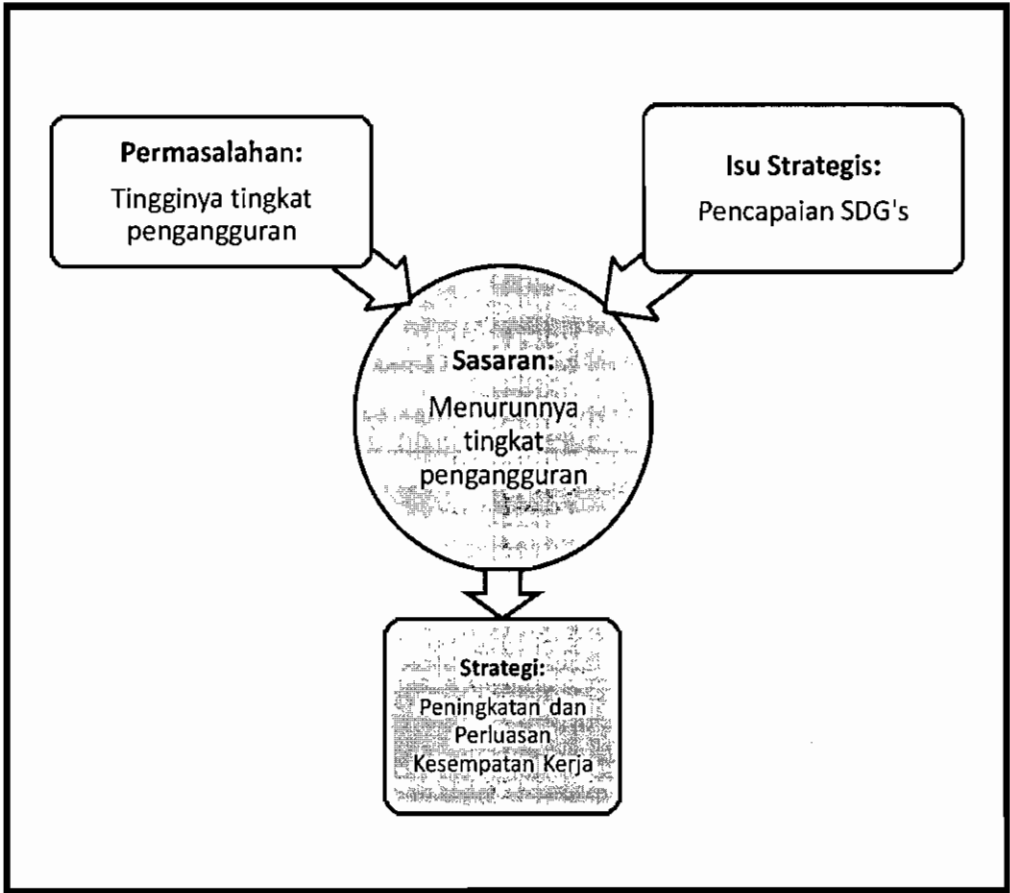


matang dalam pengentasan kemiskinan menjadi tolok ukur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menerapkan program-program yang tepat sasaran. Jika hal tersebut diimbangi dengan monitoring dan evaluasi yang proporsional, maka bukan tidak mungkin percepatan pengentasan kemiskinan terlaksana semaksimal dan seoptimal mungkin.

4. Strategi 4: Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Strategi dalam meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja dapat memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan.

Gambar 6.4
Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja



Dengan hal ini, diperlukan campur tangan dan upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien. Perlu diketahui bahwa kondisi daerah yang kondusif merupakan prasyarat utama dalam membuka dan memperluas lapangan usaha. Selain kondisi daerah yang

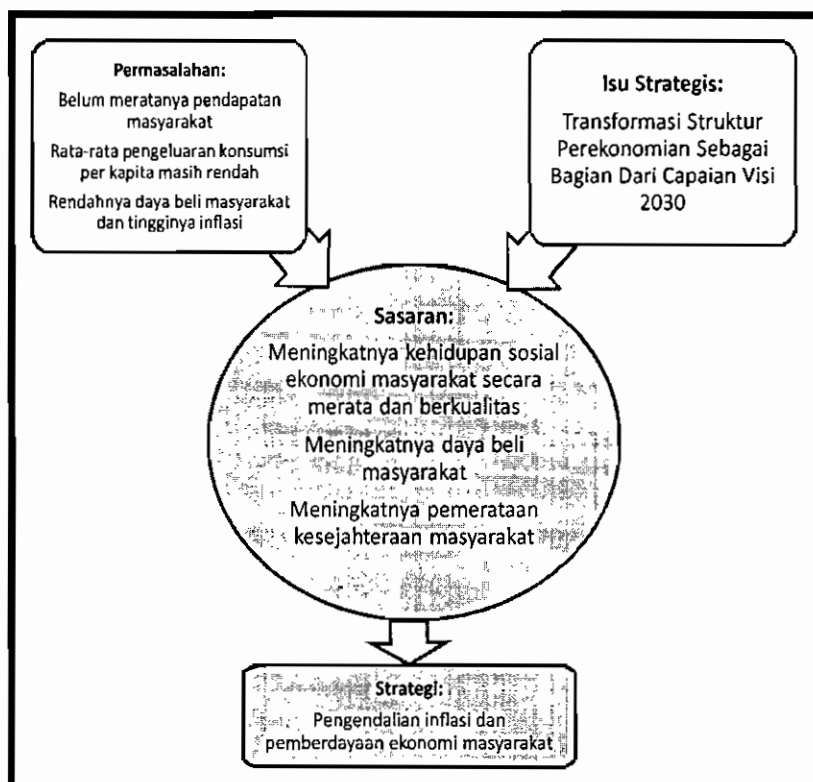


memadai, SDM daerah juga memengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan peningkatan infrastruktur daerah merupakan modal dasar dalam upaya penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM yang berkualitas, sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan dan perluasan kesempatan kerja merupakan *impact* dari peningkatan SDM dan infrastruktur.

5. Strategi 5: Pengendalian Inflasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menggali berbagai potensi ekonomi masyarakat sektor-sektor strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan SDA harus dalam kendali pemerintah berdasarkan asas kerakyatan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal harus memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuh-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis masyarakat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Gambar 6.5
Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat



Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah. Salah satu



upaya dalam menyiasati strategi ini yakni dengan mengupayakan pengembangan ekonomi lokal daerah. Dengan pengembangan ekonomi lokal daerah maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertangguh perekonomian daerah.

Perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat terkendali dan konsisten dengan mengupayakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang berdampak langsung pada kestabilan harga bahan baku sehingga menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya kestabilan harga, diharapkan akan menambah investasi pada sektor UMKM serta memperbaiki sektor tata niaga dan pemasaran produk UMKM sehingga berdampak pada terkendalinya tingkat inflasi pada perekonomian daerah.

Pada hakekatnya pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menumbuhkan/meningkatkan kegiatan perekonomian pada masyarakat, terutama pada masyarakat miskin. Melalui peran pemerintah daerah, diharapkan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sehingga perekonomian rakyat kecil dapat terangkat dan otomatis meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan pada sektor ekonomi ini diharapkan tidak hanya terjadi pada wilayah tertentu saja, tetapi juga pada wilayah pelosok (terpencil/pedalaman) sehingga pemerataan pembangunan antar daerah dapat terwujud. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dapat dengan mantap mampu menyejahterakan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur secara adil dan merata.

6. Strategi 6: Percepatan Transformasi Ekonomi

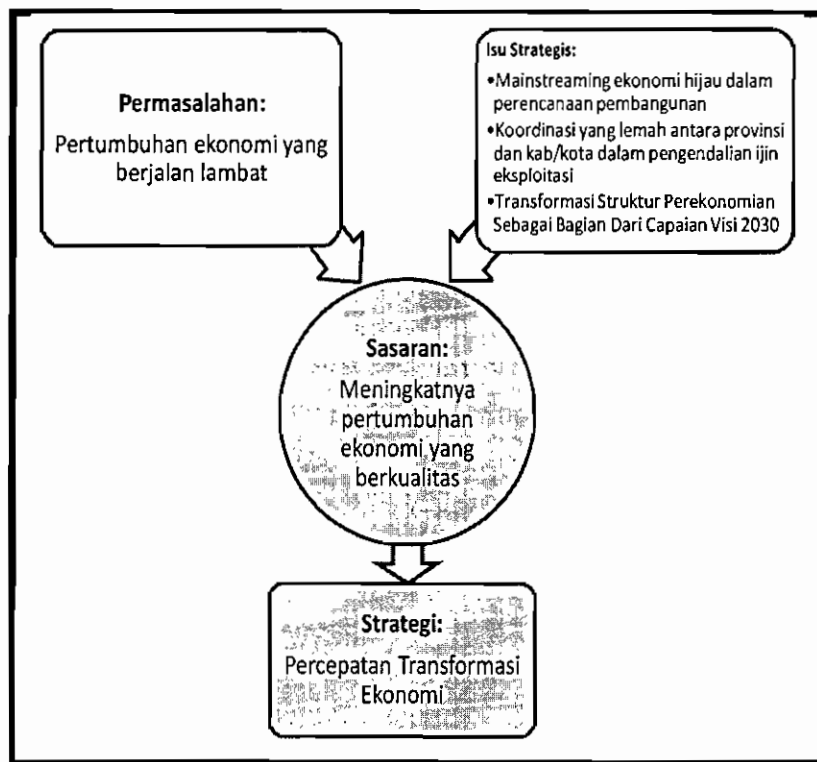
Transformasi ekonomi dilakukan dengan memperbaiki struktur ekonomi yang awalnya berbasis SDA tak terbarukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbarukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang. Selanjutnya, pembangunan ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Timur ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masa mendatang.

Transformasi ekonomi ini bertujuan untuk menuju keseimbangan yang merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini akan menyebabkan perekonomian masyarakat (pendapatan per kapita) meningkat dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan kalangan buruh. Dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dan berkelanjutan, diperlukan beberapa upaya prioritas seperti pemanfaatan SDA tak terbaharukan secara optimum dengan memperhatikan keberlanjutannya. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan transformasi ekonomi yang merupakan tantangan strategi dalam meningkatkan



perekonomian mampu menumbuhkembangkan perekonomian daerah yang berkualitas sehingga pendapatan per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkat secara merata.

Gambar 6.6
Percepatan Transformasi Ekonomi



Perencanaan yang matang pada percepatan transformasi ekonomi perlu disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan perbaikan dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung proses transformasi ekonomi seperti kualitas dan kuantitas SDM, SDA, serta sistem manajemen yang handal. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, peluang transformasi ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Timur menuju struktur ekonomi yang berkelanjutan dapat terealisasi dengan syarat konsistensi dari perencanaan hingga evaluasi tetap dijaga.

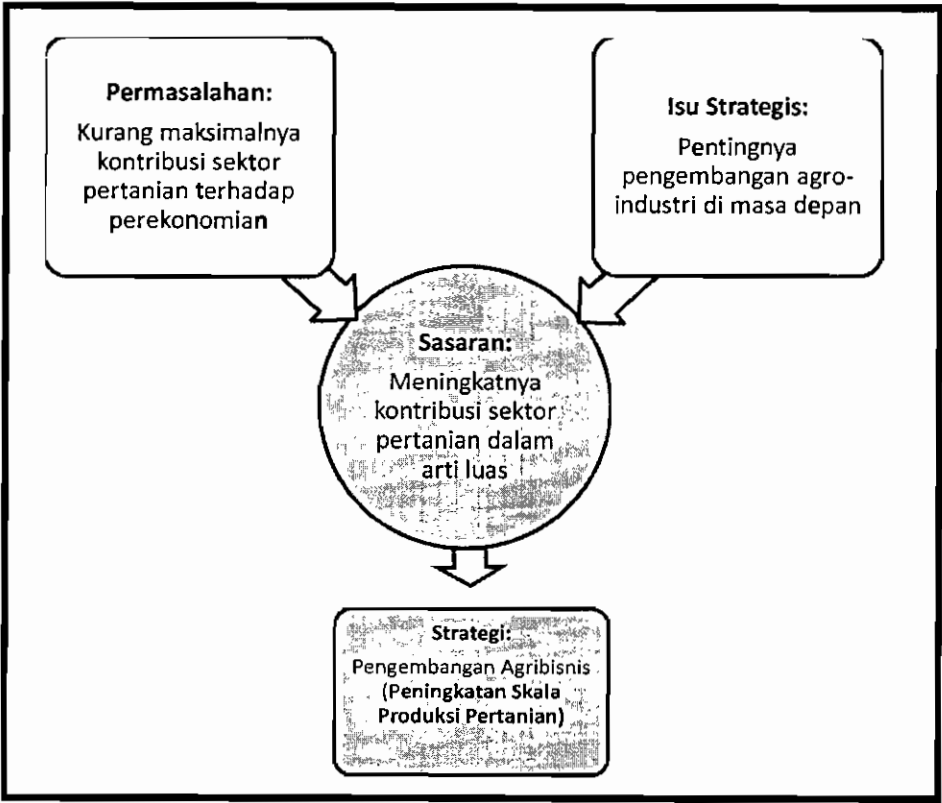
7. Strategi 7: Pengembangan Agribisnis (2014-2017)

Pengembangan agribisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai industri berbasis sumber daya. Agribisnis berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa serta penyediaan lapangan kerja (khususnya pada Provinsi Kalimantan Timur) yang mempunyai potensi dalam mengkolaborasikan sentra pertanian dengan sentra bisnis. Selanjutnya, pengembangan agribisnis akan sangat strategis jika dilakukan



secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (backward and forward linkages), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek.

Gambar 6.7
Pengembangan Agribisnis



Agribisnis sangat erat kaitannya dengan revitalisasi sektor pertanian sehingga strategi pengembangan agribisnis diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui penyediaan lahan dan infrastruktur pertanian unggulan. Kemudian hal itu dilanjutkan dengan upaya menghubungkan infrastruktur dasar menuju sentra agribisnis melalui pemenuhan infrastruktur industri dalam mengolah hasil-hasil pertanian. Agribisnis dapat terlaksana dengan tepat dan cepat melalui upaya percepatan penyiapan industri-industri pengolah hasil pertanian. Selanjutnya, proses ini dievaluasi dan diperbaiki dari tata kelola industri dan mata rantainya dari hulu ke hilir. Penyempurnaan pada pengembangan agribisnis ini adalah dengan peningkatan produktivitas agar produk lebih dapat berkembang dan pemasaran hasil-hasil industri demi menunjang proses keuangan yang berpengaruh pada proses operasional produksi. Terkait dengan hal ini, dalam menunjang pergerakan agribisnis diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan kinerja akan



menempatkan UKM dan UMKM yang tergabung dalam sentra-sentra industri menjadi variabel penting.

Kondisi lahan Provinsi Kalimantan Timur yang cukup luas menjadi salah satu pendukung utama dalam pengembangan agribisnis. Fokus agribisnis Provinsi Kalimantan Timur adalah memproduksi kebutuhan konsumsi masyarakat yang memiliki “*multiplier effects*” tinggi dengan keterlibatan berbagai komponen masyarakat. Dengan fokus seperti di atas, maka pengembangan agroindustri akan menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah sekaligus memperluas lapangan pekerjaan yang berkualitas.

Strategi 7: Peningkatan Skala Produksi Pertanian (2018)

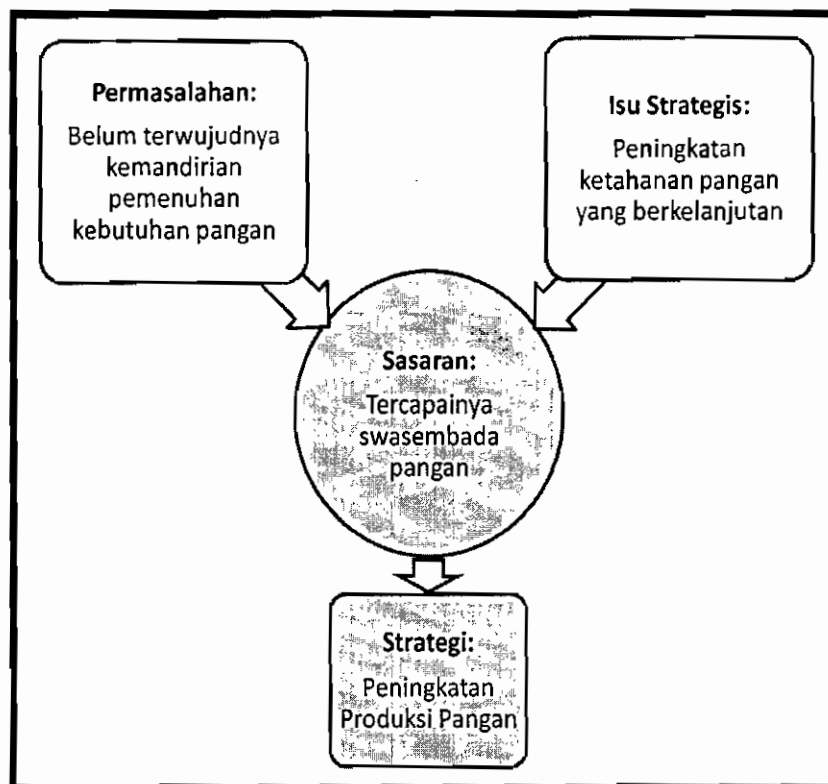
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sedangkan produksi merupakan sebuah proses pengolahan dari bahan baku/mentah menjadi barang yang mempunyai nilai lebih. Dengan ini produksi pertanian merupakan salah satu langkah strategik dalam mendongkrak produktivitas dalam bidang pertanian. Keberhasilan usaha peningkatan produksi pertanian memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun dari banyak faktor tersebut, ada beberapa faktor yang sangat tergantung pada upaya yang dilakukan oleh sumber daya manusia, diantaranya penyiapan lahan, penerapan tata cara budidaya yang benar, cara panen yang tepat dan pengolahan pasca panen yang bagus. Hal-hal tersebut tentu memiliki konten teknologi yang berpengaruh secara langsung dan harus mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Dengan peningkatan skala produksi pertanian diharapkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian ataupun PDRB dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan bagi para petani dan pekebun.

8. Strategi 8: Peningkatan Produksi Pangan

Ancaman ketahanan pangan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena perkembangan sektor pertanian Provinsi Kalimantan Timur cukup memprihatinkan yang terpapar sebagai isu terbaru dalam *Simposium International The 5th Head of research Councils in Asia (ASIAHORCs)* di Bali. Oleh karena itu, sebelum terjadi krisis pangan pada Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah daerah harus melakukan tindak pencegahan terlebih dahulu.



Gambar 6.8
Peningkatan Produksi Pangan



Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan yakni melalui peningkatan produksi pangan yang dapat dilakukan dengan pengembangan kegiatan agribisnis melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian berdaya saing dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang mendukung dalam menciptakan produk-produk pangan. Selain itu, perbaikan tata niaga dalam mendukung pergerakan ekonomi pada produk pangan dan peningkatan kualitas, kuantitas, dan keamanan pangan dapat menjadi pendukung dalam memperkuat cadangan pangan. Dengan berbagai pengupayaan tersebut, peningkatan produksi pangan untuk Provinsi Kalimantan Timur dapat terpenuhi dan optimis masyarakat Provinsi Kalimantan Timur akan menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.

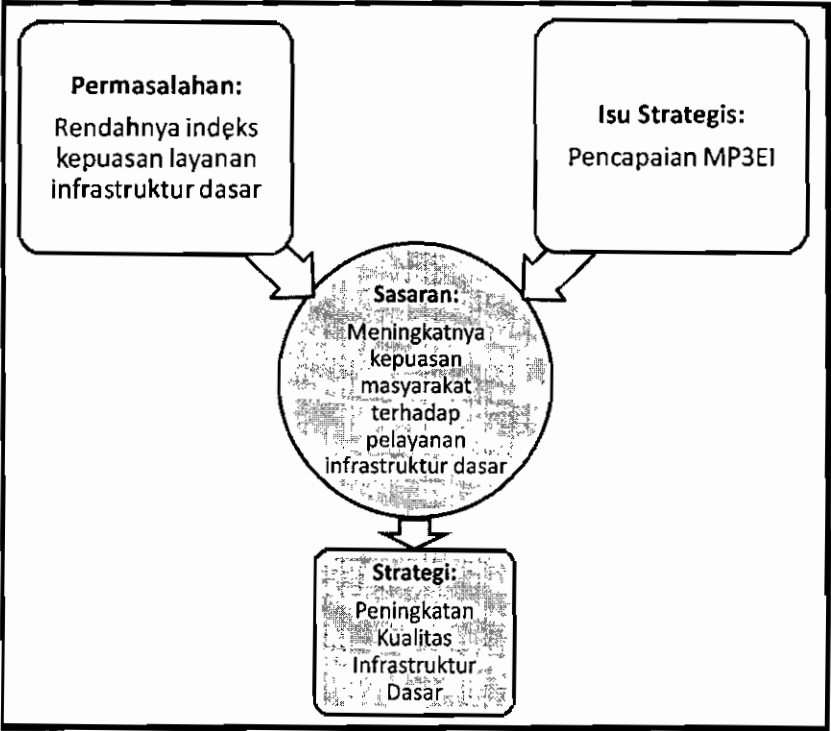
9. Strategi 9: Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Energi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan. Pemenuhan kebutuhan manusia mulai dari penerangan, transportasi, proses produksi, dan berbagai hal lainnya memerlukan ketersediaan energi. Ketergantungan masyarakat modern pada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, batubara, dan lain sebagainya menjadi permasalahan dan perbincangan utama di seluruh negara.



merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Gambar 6.10
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar



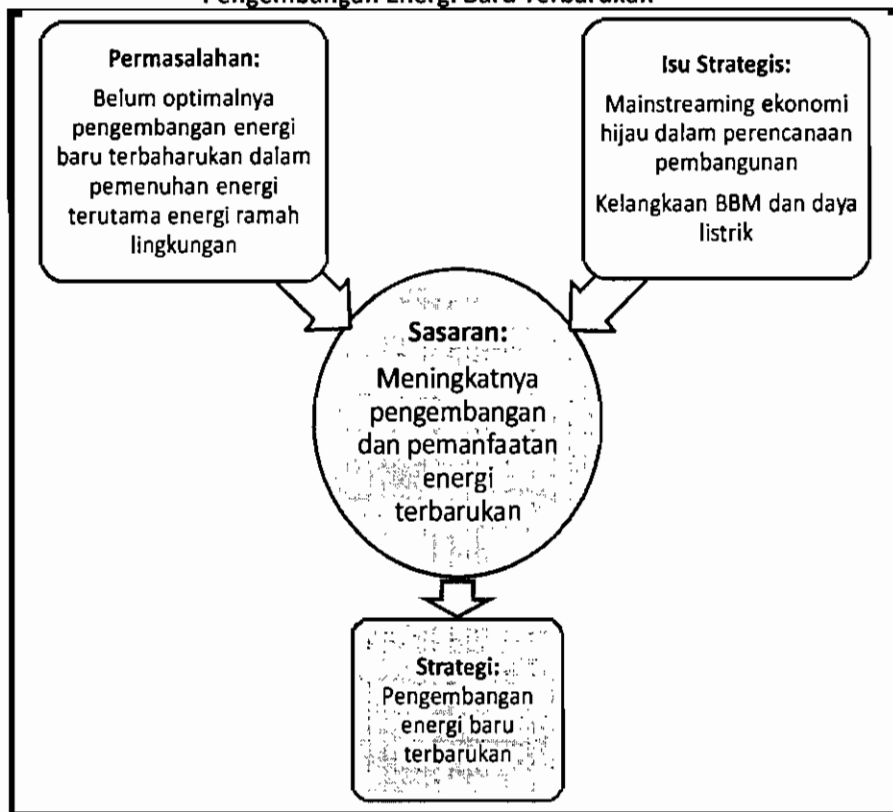
Upaya pembangunan infrastruktur dasar diharapkan menjadi penghubung pusat-pusat ekonomi serta pendukung pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan. Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah terpencil. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar mempunyai tujuan berupa pemerataan dan pengembangan wilayah dengan *prototype* kawasan berkembang sekitarnya. Seperti kita ketahui, infrastruktur dasar digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga sudah seyogianya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab membangun infrastruktur dasar yang memadai dan bersama masyarakat menjaga keberlanjutan infrastruktur tersebut.

11. Strategi 11: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam



Gambar 6.9
Pengembangan Energi Baru Terbarukan



Di sisi lain, cadangan minyak bumi dan gas alam Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan habis dalam waktu 25 tahun mendatang. Ketersediaan cadangan minyak bumi yang semakin menipis disertai peningkatan kebutuhan energi mendorong manusia melakukan pengembangan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif salah satunya dari alam yang dapat berupa tenaga air, uap air, angin, matahari, panas bumi, pasang surut air laut, gelombang laut, nuklir, sampai pemanfaatan sampah organik menjadi biomassa.

Kawasan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sumber daya alam melimpah dan beraneka ragam. Dengan pemanfaatan SDA sebagai energi yang ramah lingkungan sudah sebijaknya menjadi prioritas utama dalam pengembangan sumber energi alternatif. Ketersediaan sinar matahari dan angin sebagai alternatif penghasil energi merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dengan berbagai pengembangan dan pemenuhan kebutuhan energi terbarukan inilah yang akan menopang aktivitas manusia di masa depan dengan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

10. Strategi 10: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

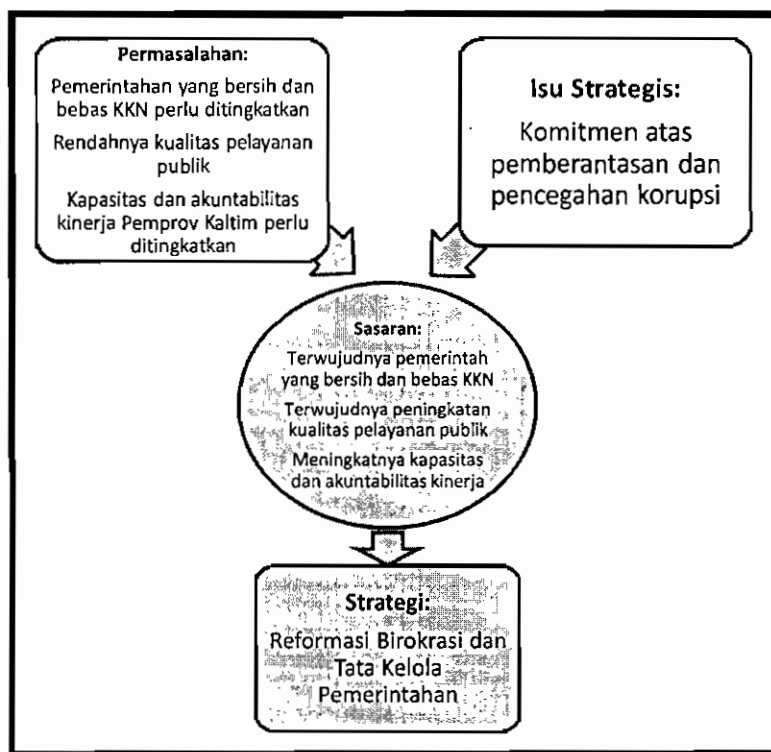
Infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan



mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat.

Penambahan kapasitas aparatur yang berkualitas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan yang sesuai agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kinerja aparatur yang baik memerlukan koordinasi dan manajemen yang kooperatif sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal.

Gambar 6.11
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan



Reformasi birokrasi, pada prinsipnya meliputi lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja dan perbaikan kualitas pelayanan. Hingga saat ini, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil memperbaiki tata kelola pemerintah sehingga perlu upaya nyata penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih agar terbentuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Selanjutnya diperlukan upaya percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik agar reformasi birokrasi dapat segera terwujud. Tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi penyampaian layanan dan menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola layanan dasar secara efektif. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

12. Strategi 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

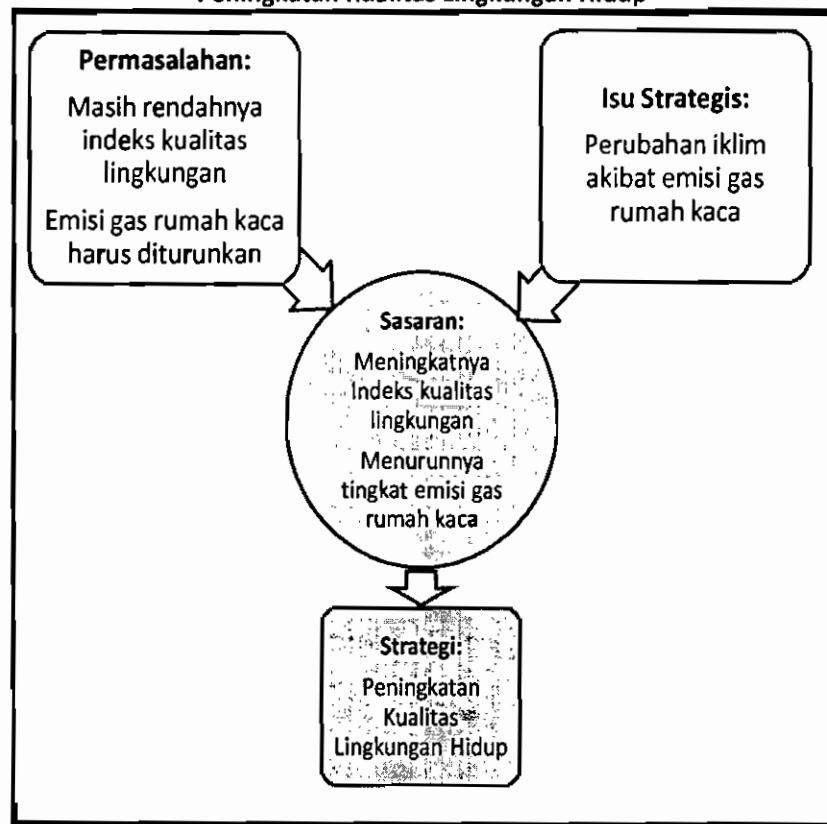
Isu-isu mengenai lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat semua negara di dunia. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya penuh dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan mengedepankan kelestarian alam. Sedangkan maksud dari pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya berencana secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar dapat mendayagunakan segala potensi dengan tepat untuk pencapaian pembangunan daerah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta peningkatan kualitas udara dan perairan perlu dilakukan demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil perlu dilaksanakan agar keseimbangan integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian dilakukan dengan mensinergikan peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. Secara nyata, hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas dan terjaganya komponen ekosistem alam dan kehidupan manusia.



Gambar 6.12
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



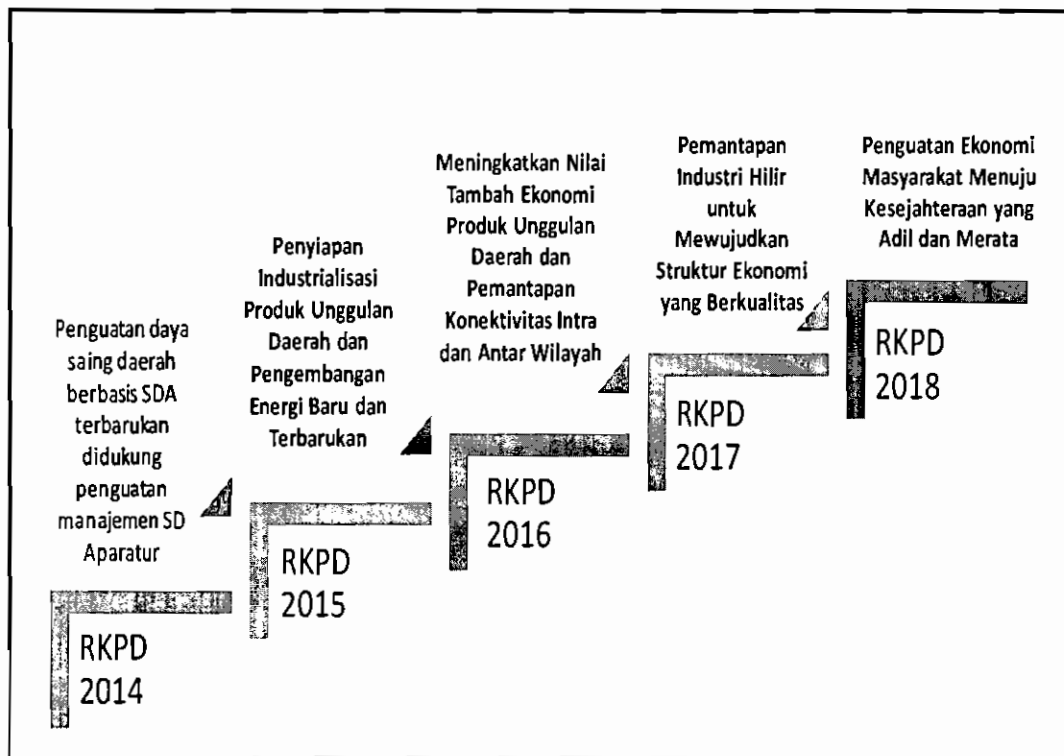
6.2. Arah Kebijakan Lima Tahunan

Arah kebijakan adalah penjabaran strategi dalam mencapai sasaran RPJMD serta jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Dengan demikian, arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. Untuk itu, arah kebijakan harus dapat merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Berangkat dari pemahaman tersebut maka kebijakan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur dipetakan dalam lima kerangka besar untuk masing-masing tahapan RKP, sebagai berikut:



Gambar 6.13
Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Pada Perencanaan Pembangunan Tahunan, Tahun 2014-2018



Untuk selanjutnya, masing-masing tema pembangunan di atas diterjemahkan dalam arah kebijakan sesuai prioritas pembangunan tiap tahun sebagaimana berikut.



Tabel 6.3
Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2018

VISI: MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN				
Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi				
1	Meningkatnya IPM	Strategi 1 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan		
2	Meningkatnya angka harapan lama sekolah		1	Peningkatan kompetensi guru
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah		2	Perluasan Subsidi Pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar
			3	Peningkatan kesempatan belajar masyarakat
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Strategi 2 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	4	Peningkatan mutu di bidang kesehatan
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan				
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	5	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
			6	Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
6	Menurunnya tingkat pengangguran	Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja	7	Peningkatan Kualitas tenaga kerja
			8	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
7	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Strategi 5 : Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	9	Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang



VISI: MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN				
Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
			10	Penguatan kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis
8	Meningkatnya daya beli masyarakat		11	Penguatan Peran Pemda dalam fungsi stabilisasi harga
9	Menurunnya Indeks Gini		12	Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa antar pusat kegiatan nasional (PKN)
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Strategi 6 : Percepatan transformasi ekonomi	13	Peningkatan investasi daerah
			14	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
			15	Peningkatan ekspor produk olahan
			16	Pembangunan prasarana jalan dan prasarana transportasi untuk mendukung kawasan strategis provinsi (KSP) Maloy dan KSP lain
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Strategi 7: Pengembangan agribisnis (Peningkatan Skala Produksi Pertanian)	17	Meningkatnya ekspor produk unggulan daerah
			18	Penguatan mata rantai kawasan2 agribisnis
12	Tercapainya swasembada beras	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan	19	Peningkatan produksi padi, palawija dan hortikultura
			20	Penerapan mekanisasi dan teknologi



VISI: MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN				
Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
13	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan		pertanian
			21	Peningkatan infrastruktur pertanian
			22	Peningkatan produktivitas pertanian
			23	Penyiapan regulasi untuk mendorong pengembangan EBT
			24	Peningkatan rasio elektrifikasi
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata				
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Strategi 10 : Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	25	Peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana jalan dan jembatan
			26	Peningkatan konektivitas kawasan pedalaman dan perbatasan
			27	Peningkatan kapasitas air baku dan air minum
			28	Pengendalian banjir dan daya rusak air
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik				
15	Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Strategi 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	29	Restrukturisasi organisasi dan peningkatan kinerja aparatur
16	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik		30	Perbaikan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja			
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim				
18	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Strategi 12 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup	31	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengendalian lahan



VISI: MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN				
Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
			32	Pengendalian pembangunan wilayah sesuai perencanaan tata ruang wilayah
			33	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pengendalian lahan
			34	Peningkatan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan
			35	Pencegahan degradasi kualitas lingkungan hidup
19	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		36	Penurunan emisi gas rumah kaca



6.2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memerhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah *misleading* dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

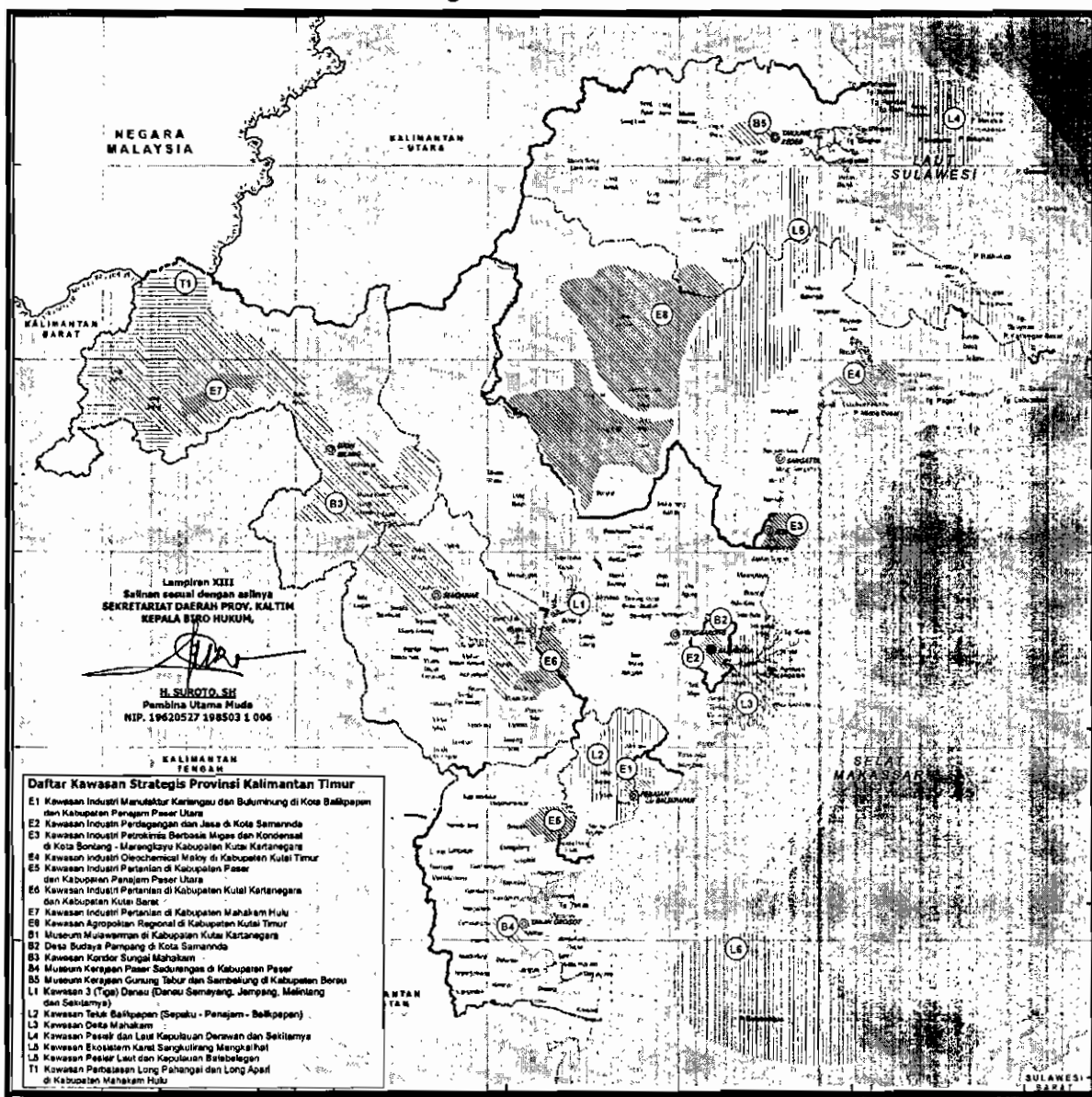
Dengan memerhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Provinsi Kalimantan Timur akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

Dalam perubahan perencanaan pembangunan daerah, panduan dalam penetapan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Timur sudah dapat berpijak pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dimana kawasan-kawasan prioritas (*priority region*) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena peng-kluster-an wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi;
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi;
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi; dan
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.



Gambar 6.14
Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2036

A. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

1. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau – Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan dikembangkan dan diintegrasikan dengan Kawasan Industri Buluminung di Penajam, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terletak di Kawasan Teluk Balikpapan dengan luas areal 2.721 Ha.



Kawasan industri Kariangau diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri, seperti pengolahan batubara, minyak, gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, meubel, dan lain-lain. Kegiatan industri di KIK dimaksudkan untuk memberi nilai tambah pada setiap komoditi yang dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur sehingga pemasaran produk primer akan beralih menjadi produk sekunder atau tersier.

Kawasan Industri Kariangau memiliki posisi yang sangat strategis karena telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan *Freeway* (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, Kawasan Industri Kariangau memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kariangau diprediksikan akan menjadi kawasan pusat aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur.

2. Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur merupakan pusat simpul jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Paser, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan) dengan bagian tengah (Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Bontang) serta bagian utara (Kutai Timur dan Berau). Berdasarkan RTRW Nasional, Kota Samarinda termasuk ke dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang mencakup wilayah Samarinda-(Sanga-Sanga)-Muara Jawa-Balikpapan (KAPET SASAMBA) sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur.

3. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang-Marangkayu Kutai Kartanegara

Kota Bontang merupakan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi *Industrial Estate*. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan migas dan kondensat. Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak LNG dan Co.

Kota Bontang memiliki peranan penting dalam misi menyukseskan proyek MP3EI koridor kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan energi nasional. Terkait dengan hal tersebut, saat ini tengah dilakukan proyek Pembangunan Pabrik Pupuk Kalimantan Timur V dengan nilai investasi sebesar 6,08 triliun rupiah yang nantinya akan menjadi pabrik urea dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara yaitu 3.500 ton urea per hari dan 2.500 ton amoniak per hari.

4. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur



Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 5.305 Ha. Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 dan dokumen Masterplan Perluasan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), KIPI Maloy diarahkan untuk menjadi pusat pengolahan kelapa sawit, *oleo chemical*, dan industri turunannya. Berdasarkan Masterplan 2012, tahap awal pembangunan KIPI Maloy seluas areal 1.000 Ha dengan nilai investasi sebesar 3,7 triliun rupiah.

KIPI Maloy akan terintegrasi dengan Tanki Timbun dan Pelabuhan Internasional CPO (*Crude Palm Oil*) yang dioperasikan dengan sistem pemipaan. Selain itu, sebagai strategi untuk menambah nilai investasi, KIPI Maloy telah diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada tahun 2030, KIPI Maloy diproyeksikan menjadi pusat/sentra pengolahan *oleo chemical* berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

5. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kawasan Industri Tanaman Pangan terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara-Paser) sebagai *hinterland* Kota Balikpapan, memiliki letak geo-strategis perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) PPU-Paser memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha.

Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2036, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

6. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat

Sebelum terjadi pemekaran, Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Negara dimana kedua wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi dan menjanjikan untuk diolah. Oleh karena itu, industrialisasi hasil produksi pertanian menjadi salah satu opsi penting dalam perumusan kebijakan peningkatan perekonomian wilayah selain sektor pertambangan dan penggalan yang merupakan sumber daya tak terbarui.

Potensi pertanian di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat juga didukung oleh tingginya tenaga kerja sektor pertanian di kedua wilayah tersebut serta "kue" struktur ekonomi daerah yang besar. Meskipun begitu, perlu adanya perencanaan yang terintegrasi bahkan koordinasi dengan kabupaten lain untuk mengoptimalkan berbagai potensi baik infrastruktur, tenaga ahli, hingga master plan. Diharapkan industrialisasi pertanian akan



memberikan dampak positif bagi peningkatan pembangunan Kalimantan Timur khususnya kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten tersebut.

7. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu

Klaster industri kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan harus diiringi dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2030, kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

8. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur

Pengembangan klaster industri di Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur (utamanya) sangat layak didukung karena merupakan program-program visibel yang akan menimbulkan multiplier efek luas bagi masyarakat. Pemerintah pusat sebagai pemrakarsa dan pelaksana tentu memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Selain itu, dukungan investor untuk menanamkan investasinya dalam proyek besar pengembangan klaster industri pertanian menjadi harapan bagi pemerintah.

Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan komitmen yang jelas dalam bentuk pembangunan yang mempertimbangkan sisi lingkungan, sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam komitmen Kalimantan Timur Green. Hal ini juga harus dilakukan pada pembangunan sektor perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Provinsi Kalimantan Timur harus siap untuk melaksanakan model pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan sisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat sehingga dalam pengalihan lahan tidak ada rekomendasi untuk lahan gambut dan tidak ada negosiasi untuk hutan primer.

B. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya di Dalam Wilayah Provinsi

1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara

Museum Mulawarman terletak di Kota Tenggarong, Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Museum Mulawarman adalah istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara dibangun pada tahun 1963 sebagai pengganti Istana sebelumnya yang terbakar dan diresmikan pada tanggal 25 November 1971 kemudian diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 Februari 1976.

Museum yang sebelumnya adalah bangunan Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ini didirikan pada tahun 1932 oleh Pemerintah Belanda yang menyerahkan Keraton kepada



Sultan Adji Muhammad Parikesit pada tahun 1935. Bahan bangunannya didominasi oleh beton mulai dari ruang bawah tanah, lantai, dinding, penyekat, hingga atap. Di halaman depan Museum terdapat duplikat Patung Lembuswana yang merupakan lambang Kerajaan Kutai Kartanegara. Arsitektur dari museum ini mengadopsi dari arsitektur tradisional Suku Dayak yang ada di Kutai.

2. Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser

Kabupaten Paser memiliki keunikan budaya dan keindahan alam termasuk wisata sejarah dimana salah satu daya tarik wisata adalah Museum Sadurengas. Museum Sadurengas merupakan bekas Istana Kesultanan Paser yang terletak di Pusat Kecamatan Paser Belengkong. Museum tersebut menjadi ikon daerah Kalimantan Timur wilayah selatan mengingat Kesultanan Sadurengas memiliki sejarah panjang di wilayah Kalimantan Timur.

Museum Sadurengas memiliki berbagai koleksi benda-benda kuno yang bisa dilihat hingga kini seperti Al-Qur'an Tua yang ditulis tangan, tempayan guci kuno peninggalan Dinasti Yuan, alat-alat rumah tangga Kesultanan Paser, alat-alat kesenian, pakaian Kesultanan Paser, serta meriam peninggalan Portugis.

3. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau

Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung pada dasarnya merupakan satu kerajaan (Kerajaan Berau) yang terpisah pada keturunan ke-13 (tahun 1810) pada silsilah kerajaan tersebut. Kedua kerajaan ini memiliki lokasi yang tidak berjauhan dimana hanya dipisahkan oleh pertemuan dua sungai yakni Sungai Segah dan Sungai Kelay. Kedua kerajaan tersebut mewariskan peninggalan sejarah berupa museum yang keduanya merupakan bekas istana kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung.

Pada kedua museum tersebut, dapat ditemukan berbagai peninggalan bersejarah kedua kerajaan tersebut yakni berupa benda sejarah, keramik, benda arkeologis, etnografis, dan naskah-naskah sejarah. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Berau masih konsisten menjaga warisan kebudayaan ini sehingga kondisi museum (kesultanan) tetap terawat. Selain itu, meskipun beberapa kali dilakukan pemugaran di beberapa titik, namun pemerintah daerah tetap menjaga keaslian bangunan historis tersebut

4. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda

Desa Budaya Pampang adalah sebuah desa budaya yang berlokasi di Sungai Siring, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekitar tahun 1960-an, Suku Dayak Apokayan dan Kenyah yang saat itu berdomisili di wilayah Kutai Barat dan Malinau hijrah karena tidak mau bergabung atau tidak ingin ikut ke wilayah Malaysia meskipun taraf pendapatan atau ekonomi yang menjanjikan di negeri tetangga tersebut. Rasa nasionalisme mereka inilah yang membuat mereka memilih tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pindah ke desa yang saat ini dinamai Desa Pampang.

Pada bulan Juni 1991, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H.M. Ardans mencanangkan dan meresmikan Desa Pampang sebagai Desa Budaya. Melalui desa ini,



pemerintah berharap Provinsi Kalimantan Timur tetap memelihara dan melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat Dayak. Pemerintah juga merasa antusias bahwa desa budaya ini memiliki kegiatan positif yang bisa menjadi aset wisata unggulan baik di tingkat lokal maupun mancanegara. Desa Budaya Pampang diharapkan dapat dijadikan sebagai cagar budaya guna mengoptimalkan nilai sosial dan budaya tempat tersebut.

5. Koridor Sungai Mahakam

Kawasan Koridor **Sungai Mahakam hingga ke hulu: Tanjung Isuy, Desa Mancong, dan Kersik Luway, Lamin Eheng** di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kawasan strategis yang diprioritaskan penataan ruangnya dalam upaya meningkatkan apresiasi seni/budaya bernilai tinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pengelolaan terhadap kawasan strategis ini juga perlu dipertimbangkan dari aspek apresiasi nilai seni/budaya bernilai tinggi yang menghasilkan peluang ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan kawasan strategis harus melibatkan berbagai pihak dengan pembagian peran dan kepentingan sesuai dengan tupoksinya, yakni pihak yang berkepentingan terhadap nilai seni/budayanya (benda/objeknya), terhadap wilayahnya (ruang spasial), dan terhadap investasi ekonomi (bisnis pariwisata).

C. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Dalam Wilayah Provinsi

1. Kawasan 3 (tiga) Danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, dan Sekitarnya)

Permasalahan utama danau-danau di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingginya tingkat sedimentasi bahkan tiga danau besar di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Danau Malintang (11.000 ha), Danau Semayang (13.000 ha), dan Danau Jempang (15.000 ha), memiliki tingkat sedimentasi tinggi yang mencapai sekitar 70 persen total kawasan. Tingginya tingkat sedimentasi menyebabkan kedalaman air yang tersisa hanya sekitar setengah hingga dua meter yang menyebabkan berkurangnya fungsi danau sebagai kawasan resapan air. Dengan demikian, resiko banjir akan meningkat pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau padang delta yang mencuat ke permukaan kian meluas. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas industri perhutanan di daerah aliran sungai di sebelah hulu kawasan danau memicu sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan.

Danau-danau di Provinsi Kalimantan Timur, selain menjadi kawasan tangkapan air hujan di pedalaman Mahakam juga berfungsi sebagai habitat berbagai satwa termasuk Belibis Kembang serta Kerbau Kalang. Burung Belibis Kembang (*Dendrocygna arcuata*) berfungsi sebagai motor produktifitas danau Mahakam dengan menyebarkan biji-biji rumput serta berkontribusi memberikan nutrisi (kotoran) terhadap ikan sedangkan Kerbau Kalang memiliki ciri khas, yakni bisa bertahan hidup dalam rawa-rawa pada danau tanpa penanganan yang rumit. Kerbau Kalang sebenarnya merupakan jenis "kerbau rawa" (*swamp buffalo*) yang dipelihara dengan sistem kalang, yaitu pada waktu musim banjir ternak



ditampung dalam kandang yang disebut "kalang", sedangkan pada musim kemarau kerbau dilepas sepanjang hari ke dalam hutan atau rawa-rawa. Disekitar danau juga terdapat puluhan ribu petani/nelayan yang mengantungkan hidupnya sebagai petani yang mengelola potensi pertanian pada lahan rawa-rawa serta perikanan darat.

2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan)

Kawasan Teluk Balikpapan merupakan kawasan di sekitar Sepaku-Penajam-Balikpapan yang berada di barat Selat Makassar atau tepi barat daya dari Samudera Pasifik. Kawasan ini memiliki berbagai pelabuhan umum maupun pelabuhan swasta sebagai penunjang aktivitas perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa pelabuhan umum yang berada di Kawasan Teluk Balikpapan seperti:

- a. Pelabuhan Semayan, penumpang dan kargo terbesar bagi Kota Balikpapan;
- b. Pelabuhan Kampung Baru, sebuah pelabuhan yang melayani penumpang kapal feri ke Sulawesi;
- c. Pelabuhan Kariangau, sebuah pelabuhan feri ke Kota Penajam; dan
- d. Pelabuhan Penajam, sebuah pelabuhan feri ke Kota Balikpapan.

Beberapa pelabuhan swasta yang berada di Kawasan Teluk Balikpapan seperti:

- a. Pelabuhan Pertamina, di bagian timur
- b. Pelabuhan Chevron, di bagian barat
- c. POSB, Petrosea Offshore Supply Base di kawasan Kariangau
- d. Beberapa perusahaan pertambangan batubara memiliki pelabuhan pribadi pada bagian barat dan utara.

3. Kawasan Delta Mahakam

Kawasan Delta Mahakam meliputi enam kecamatan yaitu: Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Angana, Muara Badak, dan Marang Kayu. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan meliputi perikanan (pertambakan), pertambangan energi, sentra industri, dengan bidang penunjang utama pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Pusat pengembangan kawasan Delta Mahakam ini adalah Muara Badak.

Delta Mahakam terbentuk dari hasil sedimentasi selama ribuan tahun oleh Sungai Mahakam dimana secara administrative berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Anggana, Muara Jawa, dan Sanga-sanga). Kawasan Delta Mahakam memiliki luas sekitar 1.500 km² (termasuk wilayah perairan) dengan luas wilayah daratan mencapai kurang lebih 1.000 km². Kawasan Delta Mahakam merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam (migas). Cadangan sumber daya alam terbesar terdapat di lapangan Peciko dan Tunu yang kini dieksploitasi perusahaan migas internasional asal Prancis, Total E&P Indonesia.

Wilayah daratan Delta Mahakam terbagi menjadi 4 zona vegetasi yaitu hutan tanaman keras tropis dataran rendah, hutan campuran tanaman keras dan palma dataran



rendah, hutan rawa nipah, serta hutan bakau. Sebagian besar Delta ditutupi oleh hutan rawa nipah dan hutan bakau yang penyebarannya tergantung pada keberadaan air laut (sering disebut hutan mangrove).

4. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan Sekitarnya

Kawasan Pariwisata Pesisir dan laut kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau memiliki luas areal 13.500 Ha dengan potensi wisata alam bawah laut yang menakjubkan. Gugus Kepulauan Derawan terdiri dari 4 (empat) pulau sebagai tujuan utama wisata, yaitu Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan semakin meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 mencapai 1.278.500 wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Pada tahun 2030, basis sektor industri pariwisata di Kepulauan Derawan diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disamping sektor jasa keuangan, industri pengolahan, dan pertanian. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati No. 31/2005 tentang Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau seluas 1,2 juta hektar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan untuk menjamin perikanan serta pariwisata yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Berau telah mengeluarkan Keputusan Bupati No. 351 Tahun 2006 tentang kerangka penyusunan rencana pengelolaan KKL Berau. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, penyusunan rencana pengelolaan mesti mempertimbangkan aspek sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek pengelolaan dan kebijaksanaan, pembiayaan, dan kelembagaan.

5. Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat

Karst Sangkulirang-Mangkalihat merupakan bentang alam kompak dan tak terpisahkan yang meliputi 2 kabupaten (Kutai Timur dan Berau), 13 kecamatan dan 111 desa. Kawasan tersebut merupakan hulu dari lima sungai utama di Berau dan Kutai Timur yaitu Sungai Talabar, Sungai Lesan, Sungai Pesab, Sungai Bengalon dan Sungai Karang, dan merupakan salah satu sumber air utama bagi masyarakat khususnya bagi pesisir Mangkalihat.

Kawasan tersebut merupakan ekosistem yang memiliki 120 jenis burung, 200 jenis serangga dan antropoda dengan 1 jenis kecoa raksasa, 400 jenis flora dan 50 jenis ikan, termasuk ikan *Nemacheilus Marang* dan *Kalacemeti Sarax Sangkulirangensis* sp. Nov, serta *Sarax mardua* sp. Nov yang merupakan spesies baru. Saat ini, pengelolaan ekosistem yang bersifat ekstraktif dan konversi bentang alam untuk perkebunan sawit, pertambangan batubara dan semen, pemukiman dan infrastrukturnya menurunkan kualitas karst. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan untuk menurunkan resiko degradasi ekosistem melalui pengelolaan dan perlindungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



6. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan

Kepulauan Balabalagan merupakan suatu kawasan wisata yang memiliki daya tarik wisata bahari yang terletak pada perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Potensi wisata bahari yang ditawarkan hampir menyerupai kepulauan Derawan, Kabupaten Berau dimana terdapat beberapa pulau yang layak untuk dikunjungi, keindahan pantai, batu karang, pasir putih, hingga spesies ikan dan penyu yang masih terjaga ekosistemnya.

D. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal di Dalam Wilayah Provinsi

1. Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.

Kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 1.531.500 Ha merupakan kabupaten hasil pemekaran Kutai Barat (berdasarkan UU. Nomor 2 Tahun 2013) memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu: Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, dan Laham. Perdesaan dalam kawasan tertinggal pada kelima kecamatan tersebut yang merupakan fokus utama untuk dipacu pertumbuhannya melalui paradigma perencanaan yang lebih kompeten diantaranya Datah Naha, Dilang Kerohong, Lirung Ubing, Liu Mulang, Long Isun, Long Lunuk, Long Pahangai II, Long Pahangai I, Long Pakak, Long Penaneh II, Long Penaneh I, Long Penaneh III, Long Tuyuq, Naha Aru, Naha Tifab, Tiong Buu, Tiong Ohang, Repama, Pa' Upan, Long Ruangan, Buduk Kubul, Long Puak, Wa' Laya, KP. Baru, Pa' Kebuan, Wa' Jagung, Samalat, Malutok, Sipatal, Sibal, Panas, Tatalunjuk, Sedalan, Buatan, Simantobol, Liang, Debulan, Simalumung, Likas, Sesibu, Liang.

Adanya pengembangan kawasan tersebut harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah hasil produksi dari pusat pertumbuhan kawasan tersebut akan dipakai oleh kegiatan ekonomi yang berada daerah sekitar (*hinterland*), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah *hinterland* tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan.

6.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam lima tahun (2013-2018) mendatang diarahkan untuk mendukung:

- (1) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dan peningkatan aksesibilitas;
- (2) Pengembangan prasarana wilayah untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
- (3) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (4) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadap kerusakan lingkungan hidup;



- (5) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- (6) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta
- (7) Pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu, sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan pola ruang wilayah diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW), pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagai berikut.

Tabel 6.4
Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Fungsi
Penataan Sistem Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.4a Rincian Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

No	Nama PKN	Lokasi	Fungsi
1	Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang	Balikpapan	Pusat Pemerintahan Kota
			Pusat Perdagangan Regional
			Pusat Industri
			Pusat Transportasi Udara Internasional
			Pusat Transportasi Laut Internasional
			Pusat Pengolahan Migas
			Pusat jasa Pariwisata
			Pusat Pendidikan Tinggi
		Tenggarong	Pusat Pengolahan Migas
			Pusat Pengolahan Batubara
			Pusat Pemerintahan Kabupaten
			Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional
			Pusat Pengembangan Perkebunan Sawit dan Pengolahan Hasil Sawit
			Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata
			Pengembangan Industri Kreatif
			Pusat Olahraga Skala Nasional
			Perikanan Budidaya
			Pusat Pendidikan Tinggi
			Pusat Pengendalian Laut
			Pengolahan Hasil Hutan
			Pusat Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Samarinda	Pusat Pemerintahan Provinsi
			Pusat Pemerintahan Kota



No	Nama PKN	Lokasi	Fungsi
			Pusat Perdagangan dan Jasa Regional
			Pusat Koleksi dan Distribusi Barang dan Jasa Regional
			Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata
			Pusat Transportasi Darat dan Laut Regional
			Pusat Pendidikan Tinggi
			Pusat Pelayanan Kesehatan
			Pusat Siaran dan Telekomunikasi
			Pusat Olahraga Skala Nasional dan Internasional
			Pusat Transportasi Laut Regional dan Internasional
			Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional
		Bontang	Pusat Industri Strategis Nasional
			Pusat Pengolahan Migas
			Pusat Pemerintahan Kota
			Pusat Perdagangan Regional
			Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional
			Pusat Pengolahan Perikanan

Tabel 6.4b Rincian Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

No	Nama PKW	Fungsi
1	Tana Paser (Kab. Paser)	Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan
		Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit
		Pusat pemerintahan kabupaten
2	Sendawar (Kab. Kutai Barat)	Pusat pemerintahan kabupaten
		Pusat pengolahan hasil tambang batubara
		Pengolahan hasil hutan
3	Kota Sangatta (Kab. Kutai Timur)	Pengembangan perikanan tangkap
		Pusat pelayanan pariwisata
		Pusat pengolahan hasil tambang batubara
4	Tanjung Redeb (Kab. Berau)	Pusat industri
		Pengolahan hasil hutan
		Pusat pengolahan hasil tambang batubara
		Pengembangan perikanan tangkap
		Pusat pelayanan pariwisata



No	Nama PKW	Fungsi
		Pusat pemerintahan kabupaten

Tabel 6.4c Rincian Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)

No	Nama PKWp	Fungsi
1	Penajam (Kab. Penajam Paser Utara)	Pusat pemerintahan kabupaten
		Pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan
2	Ujoh Bilang (Kab. Mahakam Ulu)	Pengolahan hasil hutan
		Pusat pengembangan perkebunan
		Pusat pemerintahan kabupaten
		Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan
		Pusat pariwisata

Tabel 6.4d Rincian Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

No	Nama PKL	Fungsi
1	Long Ikis (Kab. Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
2	Kuaro (Kab. Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
3	Muara Komam (Kab. Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
		Gerbang masuk provinsi dari Provinsi Kalimantan Selatan
4	Batu Kajang (Kab. Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
5	Long Kali (Kab. Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
6	Long Hubung (Kab. Mahakam Ulu)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
7	Tiong Ohang (Kabupaten Mahakam Ulu)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
		Pusat yang mendukung kegiatan di PKSN Long Pahangai dan PKSN Long Apari
8	Long Iram Kota (Kab. Kutai Barat)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
9	Muara Lawa (Kab. Kutai Barat)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
10	Mook Manaar Bulatn (Kab. Kutai Barat)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
		Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Kota Sendawar
11	Muara Badak (Kabupaten Kutai)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN



No	Nama PKL	Fungsi
	Kartanegara)	Samarinda
		Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
12	Muara Jawa (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Samarinda dan PKN Balikpapan
		Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
13	Kota Bangun (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
		Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
14	Kembang Janggut (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
15	Loa Janan (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
16	Tenggarong Seberang (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
17	Sebulu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
18	Loa Kulu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
19	Samboja (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
20	Sanga-Sanga (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
21	Anggana (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
22	Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
23	Muara Bengkal (Kabupaten Kutai Timur)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
24	Muara Wahau (Kabupaten Kutai Timur)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
25	Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Kota Sangatta
		Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
26	Merancang (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
		Pusat industri kabupaten
27	Tepian Buah (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
28	Tanjung Batu (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
29	Talisayan (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
30	Mangkajang (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan



No	Nama PKL	Fungsi
		desa-desa sekitarnya
		Pusat industri kabupaten
31	Labanan (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
32	Sido Bangen (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
33	Petung (Kab. PenajamPaser Utara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Penajam
		Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
34	Sepaku (Kab. Penajam Paser Utara)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya

Tabel 6.4e Rincian Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

No	Nama PKSN	Fungsi
1	Long Pahangai (Kab. Mahakam Ulu)	Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan (tercantum di dalam RTRWN)
		Didukung oleh pengembangan Bandar Udara Datah Dawai
2	Long Apari (Kab. Mahakam Ulu)	Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan
		Wilayah terdekat dengan perbatasan
		Pengembangan Pos Lintas Batas dan Pos Perbatasan
		Didukung oleh pengembangan Bandar udara Long Apari



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun janji kampanye Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu:

1. Penciptaan 150.000 lapangan kerja baru;
2. Pendampingan dan bantuan permodalan bagi 10.000 wirausahawan baru;
3. Penyediaan kartu sehat bagi seluruh masyarakat miskin;
4. Penyediaan beasiswa bagi 250.000 orang;
5. Program kredit tanpa agunan bagi usaha kecil;
6. Penyediaan permukiman layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah;
7. Penyediaan air bersih dan listrik di seluruh desa Kalimantan Timur;
8. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan;
9. Jalan Provinsi dan Nasional Kualitas Kelas I;
10. Penerapan Program Kaltim Hijau;
11. Pemanfaatan 100.000 Ha lahan terdegradasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat non sawit;
12. Swasembada pangan; dan
13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Janji Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait. Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mendapatkan



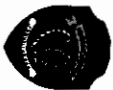
rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan.

Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dengan berbagai faktor internal, eksternal dan dinamika politik yang sedang terjadi pelaksanaan pembangunan daerah mengalami gejolak. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi hasil capaian pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dengan kondisi dan tantangan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian perlu adanya penajaman terhadap arah kebijakan dan program prioritas dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan Arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2014-2018.

Merujuk pernyataan diatas, arah kebijakan dan program prioritas merupakan ujung-ujungnya dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah. Mengingat RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 telah dilaksanakan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 melalui RKPD maka perlu adanya urgensi kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan terhadap kondisi daerah sekarang ini. Tindak lanjut hal tersebut maka dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini mempunyai 128 program pembangunan daerah yang bersifat prioritas untuk mencapai visi misi gubernur yang didalamnya telah mengakomodir 13 komitmen gubernur. Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2014-2018 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing Arah kebijakan.

Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi gubernur namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 7.1
Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2016
Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Gubernur

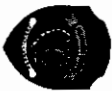
Sasaran									
Strategi									
Arah Kebijakan									
Subjektivitas									
Indikator									
Tahun 2014									
Tahun 2015									
Tahun 2016									
Tahun 2017									
Tahun 2018									
Tahun 2019									
Tahun 2020									
Tahun 2021									
Tahun 2022									
Tahun 2023									
Tahun 2024									
Tahun 2025									
Tahun 2026									
Tahun 2027									
Tahun 2028									
Tahun 2029									
Tahun 2030									
Tahun 2031									
Tahun 2032									
Tahun 2033									
Tahun 2034									
Tahun 2035									
Tahun 2036									
Tahun 2037									
Tahun 2038									
Tahun 2039									
Tahun 2040									
Tahun 2041									
Tahun 2042									
Tahun 2043									
Tahun 2044									
Tahun 2045									
Tahun 2046									
Tahun 2047									
Tahun 2048									
Tahun 2049									
Tahun 2050									
Tahun 2051									
Tahun 2052									
Tahun 2053									
Tahun 2054									
Tahun 2055									
Tahun 2056									
Tahun 2057									
Tahun 2058									
Tahun 2059									
Tahun 2060									
Tahun 2061									
Tahun 2062									
Tahun 2063									
Tahun 2064									
Tahun 2065									
Tahun 2066									
Tahun 2067									
Tahun 2068									
Tahun 2069									
Tahun 2070									
Tahun 2071									
Tahun 2072									
Tahun 2073									
Tahun 2074									
Tahun 2075									
Tahun 2076									
Tahun 2077									
Tahun 2078									
Tahun 2079									
Tahun 2080									
Tahun 2081									
Tahun 2082									
Tahun 2083									
Tahun 2084									
Tahun 2085									
Tahun 2086									
Tahun 2087									
Tahun 2088									
Tahun 2089									
Tahun 2090									
Tahun 2091									
Tahun 2092									
Tahun 2093									
Tahun 2094									
Tahun 2095									
Tahun 2096									
Tahun 2097									
Tahun 2098									
Tahun 2099									
Tahun 2100									
Tahun 2101									
Tahun 2102									
Tahun 2103									
Tahun 2104									
Tahun 2105									
Tahun 2106									
Tahun 2107									
Tahun 2108									
Tahun 2109									
Tahun 2110									
Tahun 2111									
Tahun 2112									
Tahun 2113									
Tahun 2114									
Tahun 2115									
Tahun 2116									
Tahun 2117									
Tahun 2118									
Tahun 2119									
Tahun 2120									
Tahun 2121									
Tahun 2122									
Tahun 2123									
Tahun 2124									
Tahun 2125									
Tahun 2126									
Tahun 2127									
Tahun 2128									
Tahun 2129									
Tahun 2130									
Tahun 2131									
Tahun 2132									



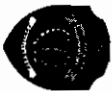
Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sektor		Subsektor		Arahan Kebijakan		Indikator Kinerja Utama		Program/Pelaksanaan		Garis Rangka		Mekanisme		
										B	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	76.49	81.00	DINAS PENDIDIK/
											Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	87.90	90.00	DINAS PENDIDIK/
											Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	15.96	18.60	DINAS PENDIDIK/
											Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	51.99	70.00	DINAS PENDIDIK/
											rasio angka minat baca di perpustakaan	01-Mar	01-Jul	BADAN PERPUSTAKAAN

VII-



Revisi RPJMDProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018



Indikator Kinerja Utama			Indikator Kinerja Utama			Indikator Kinerja Utama			Indikator Kinerja Utama		
11	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan	14	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase keberhasilan pengobatan TB	82.6	93	DINAS KESEHATAI				
				Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS	22.5	55	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan				
				Angka Kematian Bayi per 1000 KH	21	17	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan				
				Angka Kematian Balita per 1000 KH	31	26	DINAS KESEHATAI				
12	Melanjutkan program jaminan kesehatan masyarakat melalui kartu orang sehat (KOS) khusus	15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	177	102	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan				
				Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	65	90	DINAS KESEHATAI				



				untuk masyarakat kurang mampu						
			13	Peningkatan UMP (Upah Minimum Provinsi)	16	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran UMP	UMP = KHL	UMP = KHL	DISNAKERTTRANS
			14	Perlindungan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan perburuhan	17	Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	80	80	DISNAKERTTRANS
5	Meningkatnya pendapatan per kapita	Strategi 5 : Pengembangan ekonomi kerakyatan		Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IPG	61,07	63	BPPK8
				Peningkatan kualitas Bantuan dan Perlindungan gender						
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Strategi 3 : Percepatan Pengentasan	16	Peningkatan mekanisme pemberian	19	Program Penanggulangan Kemiskinan	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	0,75	0,5	DINAS PENDIDIKA



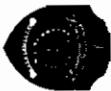
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Kemiskinan	sosial bagi masyarakat miskin;	bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPL B	1,4	1,2	DINAS KESEHATA	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	27,5	21,5		
				proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)	40	90		
			20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan)	1.25	< 1	DINAS SOSIAL
			21	Program Penanggulangan Kemiskinan bid. Kesejahteraan Sosial utk mengukur Indeks kedalaman kemiskinan	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum	6,03	100	Biro Ekonomi
22	Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)							



Revisi RPI/MD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Program	Sub-Program	Indikator Kinerja Utama	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial masyarakat miskin dan PMKS lainnya	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya dan melakukan usaha ekonomi melalui agribisnis TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPM pedesaan (jiwa)	3.888	15.552	BPM-PD				
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	42.65	59.57	DINAS SOSIAL				
	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	7	19	BPP-KB				



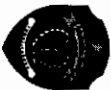
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

			Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin	18	Peningkatan pemberdayaa n usaha ekonomi masyarakat miskin	26	Program Penanggulangan kemiskinan bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk miskin yang terserap di dunia kerja	0	650	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu	7	35	DINAS KEHUTAN/
						28	Program Penanggulangan kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Persentase petani miskin yang difasilitasi untuk usaha pertanian	0	50	Dinas Pertanian
						29	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang PETERNAKAN	Jumlah KK yang dilatih budi daya peterakan	0	300	Dinas Peternakan
						30	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	Persentase daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam	0	100	BADAN PENANGGULANG. BENCANA



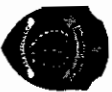
Revisi RPJMDProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

			Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin		Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat miskin	31	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat	20	50	DINAS PU (CIPTA KARYA)
					Peningkatan mekanisme pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	32	Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, plumbing, dst)	Jumlah tenaga terampil bidang jasa kontruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang)	0	2200	DISNAKERTTRANS
		Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja	Perluasan lapangan kerja;	18		33	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	100	100	DISNAKERTTRANS
7	Menurunnya tingkat pengangguran		Peningkatan kualitas tenaga kerja	19	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha)	34	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	50	400	DISPERINDAGKOF



RPI/MDProovinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sektor		Sub Sektor		Kategori		Indikator		Target		Instansi		
Kode		Kode		Kode		Kode		Kode				
				Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	20	Peningkatan kerjasama kegiatan bursa kerja,	39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	30%	35%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
							38	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru	10%	25%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
							37	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	0	0.17	DISPORA
							36	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi unggulan (koperasi)	0	160	DISPERINDAGKOP
							35	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah	jumlah wirausaha baru (WUB)	500	5000	DISPERINDAGKOP



Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

[illegible]

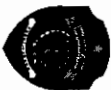
411-1.



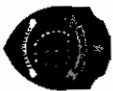
Revisi RPI/MDProvisi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

[illegible]

VII-1



			Penguatan mata rantai kawasan ² agribisnis	Peningkatan Populasi Ternak dengan kerjasama pemerintah dan swasta	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah Kawasan Peternakan	5	25	DISNAK
			Penerapan Inovasi Teknologi Agrobisnis	Meningkatkan nilai tambah produksi hasil perikanan kelautan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)	15	16,235	DINAS PERIKANAI
			Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah	Penguatan infrastruktur, SDM dan teknologi agroindustri	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB (Triliun)	24	38,4	DISPERINDAGKOF DISTAN, DISBUN
			Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan;	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Produksi Pertanian Padi	Program Peningkatan Produksi pertanian	jumlah produksi padi (GKG) (ton)	468.181	746.7	DISTAN
12	Tercapainya swasembada beras	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan	Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian	Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM pertanian	Program Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)	4,3	5	DISTAN



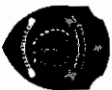
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



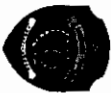
Kawasan Strategis 1: Kawasan Strategis Pantai, Perikanan, dan Industri											
			Peningkatan produktivitas pertanian	42	Mendorong produksi pertanian dalam arti luas	68	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Daerah	82,41%	100%	BKPP
						69	Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi daging (ton)	52.820,60	56.061,80	DISNAK
						70	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	221.007	271.339	Dinas Kelautan dan perikanan
						71	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	143.778	163.089	Dinas Kelautan dan perikanan
						72	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian	24	85	DISTAN
		Perbaikan tata niaga produk pangan	43	Peningkatan Kesejahteraan Petani	73	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,93	107	DISTAN	
					74	Program	% Bauran Energi	0,62	3	DISTANBEN & PLN	
13	Meningkatnya	Strategi 9 :	Peningkatan bauran	44	Pengembangan	74	Program	% Bauran Energi	0,62	3	DISTANBEN & PLN

VII-2



Revisi RPI/MD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sektor	Sub Sektor	Kategori	Indikator	Target	Responsible				
B.16	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan	47	Pembangunan jalan di kawasan umum dan industri	79	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (%)	63,28%	90%	DINAS PU
				80	Program peningkatan daya saling investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	59,94%	100%	DINAS PU
				81	Program pembangunan jalan tol	Ketersediaan jalan tol (%)	15	42,23	DINAS PU
				82	Program peningkatan daya saling investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas Komoditas dan Penumpang	324.681.818 ton dan 11.016.550 Org	334.321.428 ton dan 16.313.548 org	Dinas Perhubungan
				83	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi	13 Kecamatan	6 Kecamatan	DINAS PU
	Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan	48	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan						



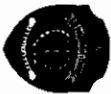
RPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

an seluruh wilayah kecamatan		84	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	13 Kecamatan	6 Kecamatan	Dinas Perhubungan
		85	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara	3	2	Dinas Perhubungan
		86	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi	60%	80%	Diskominfo
Meningkatkan Kualitas dan kapasitas pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan	49	87	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (l/detik)	260 lt/dt	1300 lt/dt	DINAS PU
		88	Program pengembangan kinerja pengelolaan air	Cakupan Layanan Air Minum (%)	38%	50%	DINAS PU



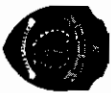
Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

					minum dan air limbah.				
				89	Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air	Persentase penyediaan air baku kawasan industri	5%	40%	DINAS PU
				90	Program pengendalian banjir	Luas genangan banjir (Ha)	440 Ha	400 Ha	DINAS PU
			50	91	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis	35 DAS	30 DAS	DINAS PU
				92	Program penguatan kelembagaan PTSP	Menurunnya tingkat korupsi	5,2	7	Biro Organisasi
15	Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Strategi 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas focus	51	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas perijinan	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	1	5	Inspektorat
				93	Program pengembangan zona integritas				



RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

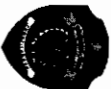


Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

[illegible]



18	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Strategi 12 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan	59	Perbaikan tata kelola perijinan pemanfaatan lahan dan hutan	104	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah KPH	3 unit	18 unit	DISHUT
			Meningkatkan kualitas perencanaanpemanfaatan & pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan.	60	Peningkatan luas lahan bervegetasi	105	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	45.000 Ha	200.000 Ha	DISHUT
						106	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor penyelenggaraa n tata ruang	67.83	80	DINAS PU
						107	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas penanaman mangrove	45 Ha	400 Ha	DISHUT
						108	Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Jumlah HCV dikawasan hutan	2 kawasan HCV	6 kawasan HCV	DISHUT
						109	Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang	% Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	35%	40%	DISTAMBEN
						110	Program Pembinaan Perkebunan	Jumlah Emisi yang dikurungan	218,75 CO2E	343,75 CO2E	DISBUN
			Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi	61	Pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup						

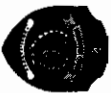


Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Kategori		Indikator		Target		Tahun		Keterangan	
Kategori	Indikator	Target	Tahun	Keterangan	Keterangan	Kategori	Indikator	Target	Tahun
Meningkatkan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	111	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	143	300	BLH	258	366
Meningkatkan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	112	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	74,04	82	BLH	258	366
Meningkatkan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat adiwiyata	4	10	BLH	258	366
Meningkatkan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	114	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata	258	366	BLH	258	366



				hidup															
				Peningkatan Jumlah dan Kualitas Pengawas dan Penyidik Lingkungan Hidup		115		Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH		PPLHD dan PPNS (orang)		PPNS = 22, PPLHD = 74		PPNS =32, PPLHD = 84		BLH			
		Pegakan hukum lingkungan		Penyediaan peraturan dan standar pengelolaan LH		116		Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup		Perda/Pergub		3 Perda		6 Pergub		BLH			
		Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan		Pengarus utamaan Green Ekonomi dan perubahan iklim pada dokumen perencanaan Kab/Kota dan SKPD		67		117		Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)		0		5		Bappeda	
19		Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca																	



Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

[illegible]

Dengan adanya perubahan dinamika pembangunan Provinsi Kalimantan Timur maka perlu adanya penyesuaian kebijakan pembangun daerah. Dengan mempertimbangkan segala aspek sumber daya daerah maka penyesuaian kebijakan memberikan dampak terhadap program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan hal itu, perubahan kebijakan dan program pembangunan daerah di lakukan pada tahun 2017 dan 2018 tersaji pada tabel berikut.



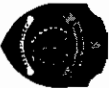
Tabel 7.2
Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Fokus Tahun 2017 dan 2018

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target						
						2017	2018					
1 Meningkatnya IPM	Strategi 1 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	Peningkatan kompetensi guru	Peningkatan kualitas pendidikan pengajar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi	70.00	70.01	Dina Pendidikan dan Kebudayaan				
2 Meningkatnya angka harapan lama sekolah						1 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murmi SD/MI/SDLB		98.00	98.01		
3 Meningkatnya rata-rata lama sekolah				2 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB		114.00		114.01			
					Angka Partisipasi Murmi SMP/MTs/SMP/PLB	92.00	92.01					
				3 Program pendidikan menengah	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMP/PLB	99.00	99.01					
					Angka Partisipasi Murmi SMA/MA/SMK/MAK	81.00	81.01					
				4 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	90.00	90.01					
					Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	18.60	18.61					
				Peningkatan kesempatan belajar masyarakat	Pemberian beasiswa bagi peserta didik	Peningkatan kesempatan belajar masyarakat	Peningkatan kesempatan belajar masyarakat		Peningkatan kesempatan belajar masyarakat	Peningkatan kesempatan belajar masyarakat	Peningkatan kesempatan belajar masyarakat	Peningkatan kesempatan belajar masyarakat



Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target			
							2017	2018		
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Strategi 2 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan mutu di bidang kesehatan	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan	5	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	17	17	Dinas Kesel RSUD RSUD Kanu
							Angka Kematian Balita per 1000 KH	26	26	Dinas Kesel
							Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	102	102	Dinas Kesel RSUD RSUD Kanu
			Melanjutkan program jaminan kesehatan masyarakat melalui kartu orang sehat (KOS) khusus untuk masyarakat kurang mampu	6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	90	90	Dinas Kesel	
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Strategi 3 : Percepatan Penguatan Kemiskinan	Peningkatan kewaspadaan bencana pada kelompok masyarakat kurang mampu	7	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	Persentase daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam	100	100	Badan Penanggulangan Daerah	
		Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Peningkatan kualitas infrastruktur	8	Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah RT miskin yang memiliki Rumah Layak Huni	50	60	Dinas Pekar Umu	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target		
							2017	2018	
				bidang Perumahan dan Pemukiman		Jumlah perumahan MBR yang dibantu PSU oleh Pemerintah	4 Kawasan	5 Kawasan	Penai Ruan; Perur Rakyat
6 Menurunnya tingkat pengangguran	Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja	Peningkatan Kualitas tenaga kerja	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha)	9 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif		Jumlah wirausaha baru (WUB)	1000	1000	Dispe p dar
				10 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	0.17	0.18	Dinas dan C
				11 Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif		Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru	25%	25%	Dinas Kerja Trans
				12 Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	35%	35%	
		Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	Peningkatan kerjasama kegiatan bursa kerja, pelatihan, sertifikasi dan penempatan TK dengan multi pihak	13 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah		Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri	30	30	Dinas



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		
							2017	2018	
7 Meningkatnya Standar Hidup Layak	Strategi 5 : Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang	Pengendalian belanja program-program strategis	14	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian target Nilai AKIP Dinas	95	100	Badai Perer Pemk Daer
		Penguatan kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis	Peningkatan kerjasama perdagangan dengan pemasok komoditas pangan	15	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rasio Ketersediaan stok komoditi pokok dan barang strategis	150%	150%	Dispe p dar
		Penguatan Peran Pemda dalam fungsi stabilisasi harga	Peningkatan koordinasi distribusi barang and jasa antar perangkat daerah/swasta	16	Program Peningkatan Sinergi Kebijakan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	± 4%	± 4%	Biro f
8 Meningkatnya daya beli masyarakat		Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa antar pusat kegiatan nasional (PKN)	Percepatan distribusi arus barang dan jasa komoditas pokok masyarakat	17	Program pembangunan jalan tol	Jumlah jalan tol yang terbangun (Ketersediaan jalan tol (%))	40%	42,23%	Dinas Pekei Umu Penai Ruan; Perur Rakyat
9 Menurunnya Indeks Gini									



RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Responsible		
							2017	2018			
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Strategi 6 : Percepatan transformasi ekonomi	Peningkatan investasi daerah	Peningkatan daya saing investasi daerah	18	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Realisasi Investasi (triliun)	41,69 Triliun Rp	42 Triliun Rp	Dinas Penanaman Modal dan KSP	
					19	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	3 MOU	3 MOU		
					20	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan	2500 ijin/non ijin	2600 ijin/non ijin		
				Pengembangan Klaster Industri Konstruksi dan Manufaktur	21	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan investasi industri	15%	15%	Dispenda	
					22	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	1,00%	1,50%		
					23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Persentase peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV (%)	1,20%	1,20%		
			Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)	Peningkatan nilai tambah produksi hasil peternakan							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target		
							2017	2018	
							Persentase Penurunan kasus cemaran mikroba (%)	2,25%	2,25%
		Peningkatan ekspor produk olahan	Pengembangan Jaringan Perdagangan	24	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	11 UKM	4 UKM	Dispe p dar
				25	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara	15 juta US\$	15 juta US\$	
				26	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	41,17% (62,99km)	42,84 % (65,54 km)	
				27	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Jumlah fasilitas transportasi darat, laut, udara dan ASDP yang terbangun (2017-2018)	1 (BSB)	1 pelabuhan maloy	
				28	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan (juta Ha)	144297 Juta Ha	150617 Juta Ha	
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Strategi 7: Pengembangan agribisnis (Peningkatan Skala	Meningkatnya ekspor produk unggulan daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi komoditas perkebunan		a. Karet	123740 Ha	128740 ha	Dinas Perke
						b. Kakao	9496 Ha	10096 ha	



RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sasaran	Strategi Produksi (Pertanian)	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target		Dinas Pekerjaan dan Ketenagakerjaan				
					Program Perluasan Kebun Sawit		c. Lada	2017		2018			
			Mendorong produksi pertanian dalam arti luas	29		Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,235 juta Ha	1,3 juta Ha					
			Peningkatan nilai produksi komoditas perkebunan	30	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan Kelapa sawit	18 Ton/Ha	18 Ton/Ha					
						Produktivitas komoditas perkebunan karet	1.3 Ton/Ha	1.3 Ton/Ha					
						Produktivitas komoditas perkebunan kelapa	0.68 Ton/Ha	0.68 Ton/Ha					
						Produktivitas komoditas perkebunan kakao	0.77 Ton/Ha	0.77 Ton/Ha					
						Produktivitas komoditas perkebunan lada	1.1 Ton/Ha	1.1 Ton/Ha					
			Penguatan mata rantai kawasan2 agribisnis	Peningkatan Populasi Ternak dengan kerjasama pemerintah dan swasta	31	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Peningkatan Produksi daging (%)	330%		360%			
							Peningkatan Produksi telur (%)	3%		3%			

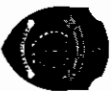


Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target					
						2017	2018				
12 Tercapainya swasembada beras	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan	Peningkatan produksi padi, palawija dan hortikultura	Peningkatan nilai tambah produksi hasil perikanan kelautan	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi hijauan pakan ternak (ton)	34125 ton	34125 ton	Dinas dan F			
					Jumlah Produksi Budidaya	114.469 ton	116.759 ton				
					Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	66.000 ton	72.000 ton		Dinas dan F		
		Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian	Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan komoditas unggulan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan	Produktivitas Unggulan Padi	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)	4.3 ton GKG	4.3 ton GKG	Dinas Pangi Holti		
										34	
Peningkatan infrastruktur pertanian	Peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah poin ketersediaan pangan pokok	95 Poin	98 Poin	Dinas Tanan Pang Holti					
							35				
							36				



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		
						2017	2018	
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah lingkungan	Penyiapan regulasi untuk mendorong pengembangan EBT	Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi daging	Program peningkatan produksi peternakan	1. Peningkatan populasi ternak (%) :	56061,8 ton	56061,8 ton	Dinas PETER dan KHEWE
					- Sapi (%)	6,00	6,00	
					- Kerbau (%)	5,00	5,00	
					- Kambing (%)	7,00	7,00	
					- Babi (%)	5,00	5,00	
					- Ayam Buras (%)	6,00	6,00	
					2. Service per Conception (S/C)	2,00	2,00	
					3. Produksi biogas yang dihasilkan (m3)	36	36	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi ikan	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	157.743 ton	163089 ton	Dinas dan F
			Perumusan regulasi pengembangan dan penggunaan EBT	Program Diversifikasi Energi	Persentase kapasitas produksi listrik yang dihasilkan dari sumber energi alternatif	0,01%	0,03%	
			Peningkatan ketersediaan produksi energi listrik dan jaringan pendukungnya	Program penguasaan Ketenagalistrikan	Rasio Ketersediaan daya listrik	78%	80%	Dinas Sumt Mine
				Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Rasio jumlah desa yang telah dialiri listrik	97%	97,5%	
13								



Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target			
						2017	2018		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar 14	Strategi 10 : Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan	42	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)	10,43% (109,53 km)	10,90% (114,53 km)	Dinas Peken Umur Penan Ruani Peruru Rakyat
				43	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (%)	62,94% (1.024,7km)	64,94% (1.057,26)	
				44	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana jalan	8 Kecamatan	10 Kecamatan	
				45	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyebrangan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan penyebrangan	8 Kecamatan	10 Kecamatan	Dinas Perhut
				46	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara	0 kecamatan	1 kecamatan	Dinas Perhut
				47	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi		80%	Dinas Komunikasi dan I



RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target		
							2017	2018	
		Peningkatan kapasitas air baku dan air minum	Peningkatan Kualitas dan kapasitas pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan	48	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (l/detik)	75 lt/dt	700 lt/dt	Dinas Peker Umur Penai Ruan, Perur Rakyat
			Pengembangan kualitas air baku dan air minum	49	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	Cakupan Layanan Air Minum (%)		60%	
				50	Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air	Persentase penyediaan air baku kawasan industri	2%	25%	
		Pengendalian banjir dan daya rusak air	Peningkatan antisipasi bencana banjir	51	Program pengendalian banjir	luas genangan banjir (Ha)	420 Ha	415 Ha	
			Optimalisasi kinerja aparatur sesuai efisiensi organisasi dan tata laksana	52	Program penguatan kelembagaan	Menurunnya tingkat korupsi	5,8	6	
15	Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Strategi 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Restrukturisasi organisasi dan peningkatan kinerja aparatur	53	Program pengembangan zona integritas	Jumlah PD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	1	1	Inspe



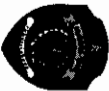
Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		
						2017	2018	
Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik 16				54 Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah kasus yang terindikasi KKN	4	4	Inspe
				55 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Opini laporan keuangan pemerintah provinsi	WTP	WTP	Badai Pengk Aset I
				56 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP	80%	100%	
				57 Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83	85	Biro (
				58 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur	97%	97%	Badai Kepeq Daer
				59 Program integrasi aplikasi	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dari SKPD	1	1	Dinas Komu dan Infor
				60 Pengembangan data statistik dan spasial	Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan	92	92	Badai Perer Pemt Daer



RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target				
						2017	2018			
17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja				61	Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	78 (BB)	A (80)	Biro	
				62	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0	0	Biro Perencanaan	
						% Kab/Kota yang memperoleh status sangat tinggi (5T) untuk kinerja	80	80	Inspeksi	
						penyelenggaraan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				63	Program Pendidikan politik masyarakat	Indeks demokrasi	75	77		
				64	Program pengembangan dan pengelolaan penggunaan aset daerah dalam pembangunan daerah	Prosentase Kab/Kota yang memperoleh opini WTP	80%	100%	Badan Pengawasan Keuangan dan Aset	
18	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Strategi 12 : Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengendalian lahan	Rehabilitasi lahan dan pelestarian kawasan hutan	65	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS prioritas yang dikelola secara terpadu	4 DAS	3 DAS	Dinas Kehutanan



Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Sasaran	Strategi lingkungan hidup	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		
						2017	2018	
		Pengendalian pembangunan wilayah sesuai perencanaan tata ruang wilayah	Pembangunan infrastruktur fisik sesuai RTRW daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor penyelenggaraan tata ruang	80	80	Dinas Pekei Umur Penai Ruan; Perur Rakyat
		Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pengendalian lahan	Pengawasan terhadap pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup	Program Rehabilitasi Reklamasi lahan Pasca Tambang	% wilayah pertambangan yang direhabilitasi	28%	29%	Dinas Sumt Mine
				Program mitigasi emisi gas rumah kaca	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (Bisnis As Usual)	25%	25%	Dinas Perke
				Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Jumlah kejadian pencemaran	Sedang / 5 Sedang / 5	Sedang / 5 Sedang / 5	Dinas Lingk Hidup
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola			Dinas
		Peningkatan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan domestik	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Jumlah Kawasan pemukiman yang sehat		2 Kawasan	Dinas Pekei Umur Penai Ruan; Perur Rakyat
						71		



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		
						2017	2018	
			Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah Penghargaan Pengelolaan LH yang diterima	4 penghargaan	4 penghargaan	Dinas Lingk Hiduf
		Pencegahan degradasi kualitas lingkungan hidup	Pelestarian dan perlindungan kawasan rentan bencana	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi	50%	50%	Dinas Perke
			Perwujudan <i>Kalitim Greendalam</i> pembangunan daerah	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)	5	5	Badai Perer Pemt Daer
19	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan emisi gas rumah kaca	Pencegahan dan minimisasi pelepasan emisi gas rumah kaca sektor lahan, energi dan limbah	Program perlindungan atmosfer dan perubahan iklim	Jumlah Presentase penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca	90%	90%	Dinas Lingk Hiduf



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu organisasi terlebih lagi pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah sehingga harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:



1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013, 2014 , 2015 merupakan capaian pembangunan dan tahun 2016, 2017, 2018 berisikan data capaian indikator merupakan target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen revisi RPJMD diuraikan dalam tabel 9.1 sebagai berikut.



Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
Buku Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur									
1.1	Pertumbuhan ekonomi dengan migas	%	1,59	2,25	1,57	-1,28			
1.2	Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	%		5,45	3,74	-1,48			
1.3	Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	%		5,99	5,73	3,45			
1.4	Tingkat inflasi	%	9,65	9,65	7,66	4,89			
1.5	Indeks gini	%	0,36	0,37	0,33	0,32			
1.6	Tingkat kemiskinan	%	6,06	6,06	6,42	6,23			
1.7	Tingkat pengangguran	%	8,9	7,94	7,54	7,5			
1.8	Pendapatan perkapita	Juta	64,12	64,12	61,17	50,63			
1.9	Paritas daya beli	Rp (000)	649.850	10.981	11.019	11.229			
1.10	Share pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB	%		14,14	15,22	17,21			
Aspek Pendidikan									
2.1	Pendidikan								
2.1.2	Angka melek huruf/	%	98,3	97,75	98,75	98,69			
2.1.3	Rasio angka minat baca	Buku/Tahun	1/2						
2.1.4	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,6	8,87	9,04	9,15			



2.1.5	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	%	0,75	0,17	0,15	0		
2.1.6	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMP LB	%	1,4	2,89	1,77	1,74		
2.1.7	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	27,5	26,71	19,4	19,27		
2.1.8	Proporsi anak yang kembali bersekolah	%	25			19,27		
2.1.9	Proporsi lulusan pelatihan yang terserap di pasar kerja	%	100					
2.1.10	Proporsi anak putus sekolah yang berusaha sendiri	%	10					
2.1.4	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun		12,85	13,17	13,18		
2.2	Kesehatan							
2.2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,4	73,52	73,62	73,65		
2.2.2	Persentase meningkatnya daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam	%	71,4					
2.2.3	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin	%	0					
Aspek Pelayanan Umum								
1.1.	Pendidikan							
1.1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1.a	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	49,77					



Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lainnya						
1.1.1.b	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	113,77	107,57	111,04	112,61
1.1.1.c	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	97,68	95,91	96,7	97
1.1.2	Pendidikan menengah					
1.1.2.a	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	82	91,06	91,49	97,9
1.1.2.b	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	%	90	82,21	85,54	90,31
1.1.2.c	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	56	76,1	78,73	79,06
1.1.2.d	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	%	76,49	62,22	67,03	67,78
1.2.	Kesehatan					
1.2.1	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	1000 KH (%)	85			
1.2.2	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	1000 KH	21			
1.2.3	Angka Kematian Balita per 1000 KH	1/1000 KH	31			
1.2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	1/100.000 KH	177			
1.2.5	Angka Kesakitan (Morbiditas) (Promosi kesehatan)	Jiwa	11.74			
1.2.6	Angka Kesakitan (Morbiditas) (Puskesmas)	Jiwa	11.74			
1.2.7	Angka Kesakitan (Morbiditas) (RS/RSJ/RSP/RSM)	Jiwa	11.74			



1.2.8	Angka prevalensi HIV/AIDS	1000 KH	0.183			
1.2.9	Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	%	98			
1.2.10	Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	1/1000	1.5			
1.2.11	Angka kematian akibat malaria	Jiwa	5.7			
1.2.12	Angka prevalensi Tuberklosis (TB) per 100.000 penduduk	Jiwa	229.4			
1.2.1.13	Persentase keberhasilan pengobatan TB	%	82.6			
1.2.13	Persentase kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	22.5			
1.3	Pekerjaan Umum					
1.3.1	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar		5	5	5,9	6,21
1.3.2	Luas lahan pertanian yang terlayani	Ha	3.850	3.850	4.100	4.350
1.3.3	Kapasitas air baku	Lt/Detik	75	75	75	75
1.3.4	Cakupan layanan air minum	%	35	35	38%	41%
1.3.5	Persentase penyediaan air baku kawasan industri	%	2	2	2	2
1.3.6	Luas genangan banjir	Ha	450	450	440	430
1.3.7	Jumlah DAS Kritis	DAS	35			



1.4.	Perumahan					
1.4.1	Jumlah perumahan MBR yang dibantu PSU oleh Pemerintah	%	0			
1.5	Perhubungan					
1.5.1	Tingkat kemandapan jalan	%	48,64	48,64	58,04	58,94
1.5.2	Kapasitas Daya Mampu Jalan diatas 10 ton	Km	18	18	43,15	70,19
1.5.3	Ketersediaan infrastruktur jalan	%	25,75	25,75	50,01	62,17
1.5.4	Ketersediaan jalan tol	%	5	5	15	25
1.5.5	Jumlah fasilitas transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP yang terbangun	unit	0	0	0	0
1.5.6	Jumlah kecamatan terisolasi yang dapat diakses sarana dan prasarana transportasi Jalan & Jembatan	Kec	0	0	2	5
1.5.7	Jumlah kecamatan terisolasi yang dapat diakses sarana dan prasarana transportasi SDP	Kec	2	2	2	2
1.5.8	Jumlah kecamatan terisolasi yang dapat terakses sarana dan prasarana transportasi udara	Kec	1	1	1	1
1.5.9	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi	%	60			



1.6.12	Ketersediaan dan pelaporan data level emisi yang terukur serta dapat di verifikasi	Kali PEP /Tahun	0				
1.6.13	Jumlah proyek/intensitas emisi	Ton/1 jt US\$	0				
1.6.14	Jumlah emisi yang diturunkan	CO2E	187,5				
1.7	Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
1.8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	61.07	84,69	84,75		
1.9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1.9.1	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	%	7				
1.10	Sosial						
1.10.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan)	Angka	1.27				
1.11	Ketenagakerjaan						
1.11.1	Jumlah tenaga terampil bidang jasa konstruksi yang terserap oleh pasar kerja	Orang	0				
1.11.2	Jumlah wirausaha baru	Wirausaha Baru (WUB)	500				
1.11.4	Tingkat lulusan pelatihan yang terserap di pasar kerja	%					
1.11.5	Persentase keluarga miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	%	42.65				



Indikator ke-10: Pembangunan Manusia									
1.11.6	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	%	0						
1.11.7	Tingkat UMP		UMP = KHL						
1.11.9	Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru	%	10%						
1.11.10	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	30%						
1.12	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah								
1.12.1	Jumlah KUBE bidang UMKM yang dibina	KUBE	0	0					
1.12.2	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	20	5.916	5.319	5.407			
1.13	Penanaman Modal								
1.13.1	Rata-rata hari proses perijinan investasi	Hari	7						
1.14	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1.15.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.15.1	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	5,2	3,2	4,9	5,58			
1.15.2	Indeks demokrasi	Angka	66,37	68,13	77,77				
1.15.3	Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP	%	15						
1.15.4	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	68	68	72,16	76,65			
1.15.5	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	Nilai	70,75 (B+)	70,75 (B+)	70,97 (B+)	75,14 (BB)			

IX-11



KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN KOPERASI, UKM DAN KEMASYARAKATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN KOTA KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN INFRASTRUKTUR						
2.3	Kehutanan		Unit	3		
2.3.1	Jumlah KPH		Ha	45.000	158.239,30	66.062,11
2.3.2	Luas rehabilitasi hutan dan lahan		Ha	45		
2.3.3	Luas penanaman mangrove		Ha	45		
2.4	Energi dan Sumberdaya Mineral					
2.4.1	Rasio elektrifikasi		%	65.05		
2.4.2	Bauran Energi Baru Terbarukan		%	0,02	0,5	1,01
2.4.3	Persentase desa berlistrik		%	86.65		
2.4.4	Jumlah instalasi biogas		Buah	125		
2.5	Pariwisata					
2.5.1	Jumlah kunjungan wisatawan		Orang	65.000	1.453.962	2.186.748
2.6	Kelautan dan perikanan					
2.6.1	Nilai ekspor perikanan		Juta US\$	15		
2.6.2	Produksi perikanan budidaya		Ton	221.007		
2.6.3	Produksi perikanan tangkap		Ton	143.778		
2.7	Perdagangan					
2.7.1	Nilai ekspor produk olahan nonmigas dan non batubara		Juta USD	31	25,82	17,41
2.8	Perindustrian					
2.8.1	Jumlah industri inti pengolahan khas daerah		Industri	2		
2.8.2	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor		IKM	3		



2.9 Ketransmigrasian						
2.9.1	Jumlah kawasan transmigrasi		1			
Aspek Daya Saing Daerah						
2.2 Jumlah kecamatan yang belum terakses prasarana transportasi						
2.2	Jumlah kecamatan yang belum terakses prasarana transportasi	Kecamatan	13			
3.1 Volume Usaha Kawasan Industri						
3.1	Volume Usaha Kawasan Industri	Trilyun	135			
3.2 Rata-rata hari proses perijinan investasi						
3.2	Rata-rata hari proses perijinan investasi	Hari				
3.3 Nilai Persetujuan Investasi (PMDN dan PMA)						
3.3	Nilai Persetujuan Investasi (PMDN dan PMA)	Triliun	34,11			
4.1 IPM						
4.1	IPM	%	76,22 (2011)	73,21	73,82	74,17
4.2 Kualifikasi Guru (minimal S1)						
4.2	Kualifikasi Guru (minimal S1)		51.99			



BAB X

**PEDOMAN TRANSISI
DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini baik dalam tahapan normal maupun masa transisi. Tak lain agar RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja baik oleh Perangkat Daerah, Kabupaten/kota, dan kolaborasinya dengan pemerintah pusat dalam koordinasi Bappeda.

10.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya gubernur baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi gubernur terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya yaitu pada tahun 2018, menyusun dokumen:

a. Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode 2018-2023

Penyusunan draft Rancangan Awal RPJMD dilakukan secara teknokratis mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya. Penekanan dokumen teknokratik dimaksud adalah pada analisis capaian kinerja RPJMD lalu (minimal empat tahun pertama realisasi kinerja pembangunan), analisis kapasitas riil keuangan daerah lima tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, arahan visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD. Draft Rancangan Awal RPJMD ini menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMD setelah gubernur terpilih dilantik.

**b. RKPD Tahun 2019**

Penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan atau draft rancangan awal RPJMD untuk periode 2018-2023 jika telah tersedia. Diharapkan, pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD Tahun 2019 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD 2019.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik pada tanggal 17 desember 2013 sebagai rujukan utama penyelenggaraan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Suatu keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD diindikasikan oleh sejauh mana berbagai *outcome* dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran (*impact*) RPJMD. Untuk itu, Bappeda sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggungjawab untuk mengoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen ini dengan mekanisme dan kerangka fikir sebagai berikut:

1. Sasaran pembangunan dalam jangka lima tahun dicapai melalui kinerja birokrasi, masyarakat, dan swasta secara simultan;
2. Dalam koordinasi antartingkatan pemerintahan, sasaran pembangunan pemerintah provinsi dicapai melalui:
 - 1) Dukungan dari pemerintah pusat dan kerjasama pemerintah daerah provinsi lain/sekitarnya;
 - 2) Pendekatan untuk merealisasikan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan;
 - 3) Pencapaian *impact* dan *outcome* Renstra Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - 4) Pencapaian *impact* dan *outcome* RPJMD Kabupaten/Kota.
3. Koordinasi pencapaian pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dicapai melalui:
 - 1) Integrasi arsitektur kinerja sasaran RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
 - 2) Integrasi arsitektur kinerja sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten/Kota;
 - 3) Integrasi dan sinkronisasi prioritas pembangunan daerah; dan
 - 4) Koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

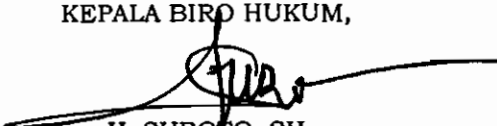


Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Dengan kerangka fikir di atas, RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 diselenggarakan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah). Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD dengan periode yang sama yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2018. Renstra Perangkat Daerah tersebut selanjutnya harus dilaksanakan atau menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun;
2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD Tahun 2013 -2018 dengan ketentuan pokok:
 - a. RKPD merupakan instrumen yang strategis dalam mengoperasionalkan RPJMD dari tahun ke tahun;
 - b. Sasaran (tahunan), prioritas pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dijelaskan pada Bab V dan VI RPJMD ini harus dipedomani sebagai prioritas dan sasaran pembangunan RKPD 2013 - 2018 dalam Bab IV untuk tahun atau periode berkenaan; dan
 - c. Indikasi program prioritas seluruh bidang urusan sebagaimana dijabarkan pada Bab VIII Perubahan RPJMD ini harus dipedomani sebagai Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam bab V RKPD sesuai tahun atau periode berkenaan.
3. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 kepada masyarakat;
4. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang ditetapkan;
5. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan dasar untuk mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan;
6. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 16 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK